



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, dan Program; dan
- b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD; dan penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19690421 199003 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (7-329/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025–2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Telah selesainya periodisasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJPD periode selanjutnya yaitu Tahun 2025–2045. Penyusunan RPJPD periode Tahun 2025–2045 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan periodisasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Gubernur. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana

pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Sumatera Utara. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2025-2045.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.3 Dasar Hukum	I-3
1.4 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-5
1.5 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-19
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-50
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-63
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-67
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-76
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Permasalahan.....	III-1
3.2 Isu Strategis	III-7
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1 Perumusan Visi dan Kerangka Pikir Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	IV-1
4.2 Visi Sumatera Utara 2045.....	IV-3
4.3 Sasaran Visi	IV-4
4.4 Misi	IV-6
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1 Arah Kebijakan	V-1
5.2 Sasaran Pokok.....	V-9
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2 Pembiayaan Pembangunan	VI-9
6.3 Kesimpulan	VI-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-6
Gambar 2.1 Kawasan Geopark Kaldera Toba	II-8
Gambar 2.2 Destinasi Super Prioritas Danau Toba	II-9
Gambar 2.3 Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara	II-10
Gambar 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023	II-11
Gambar 2.5 Peta Shape Index untuk IJE Pendukung Keanekaragaman Hayati Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Utara.....	II-12
Gambar 2.6 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) Provinsi Sumatera Utara	II-17
Gambar 2.7 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (Jiwa)	II-18
Gambar 2.8 Rerataan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2005-2023.....	II-19
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023 (persen)	II-19
Gambar 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005-2023	II-20
Gambar 2.11 Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023 (Persen).....	II-21
Gambar 2.12 Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II-21
Gambar 2.13 Rerataan (Geomean) Indeks Ketimpangan Pendapatan/ Gini Rasio (Indeks) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023	II-22
Gambar 2.14 Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023.....	II-23
Gambar 2.15 Rerataan Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023	II-23
Gambar 2.16 Potensi Pengembangan Aset Wakaf	II-24
Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023.....	II-25
Gambar 2.18 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	II-26
Gambar 2.19 UHH Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023	II-26
Gambar 2.20 UHH Menurut Jenis Kelamin.....	II-27

Gambar 2.21 Tren Jumlah Kematian Ibu dan AKI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – Oktober 2023	II-28
Gambar 2.22 Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2023.....	II-29
Gambar 2.23 Tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – Oktober 2023	II-29
Gambar 2.24 Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023	II-30
Gambar 2.25 Kondisi Stunting Sumatera Utara dan Nasional	II-31
Gambar 2.26 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota tahun 2023.....	II-33
Gambar 2.27 Kasus Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara Januari-Oktober 2023	II-34
Gambar 2.28 Keberhasilan Pengobatan Oktober 2023	II-34
Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara.....	II-36
Gambar 2.30 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin	II-36
Gambar 2.31 Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara.....	II-37
Gambar 2.32 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin	II-37
Gambar 2.33 Indeks Kerukunan Umat Beragam.....	II-38
Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara dan Nasional 2020-2023.....	II-39
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara Kabupaten/Kota, 2023	II-39
Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara dan Nasional	II-40
Gambar 2.37 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	II-40
Gambar 2.38 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dan Nasional	II-41
Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-41
Gambar 2.40 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota, 2018-2023	II-42
Gambar 2.41 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2022-2023	II-43
Gambar 2.42 Kondisi Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Periode April 2024.....	II-44

Gambar 2.43 Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan sektor informal/formal (%), 2017-2020	II-46
Gambar 2.44 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2018-2022	II-47
Gambar 2.45 Capaian Per Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	II-48
Gambar 2.46 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021-2022	II-50
Gambar 2.47 Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara tahun 2021-2022.....	II-50
Gambar 2.48 Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 2010-2023	II-51
Gambar 2.49 Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum terhadap PDRB (%) 2010-2023	II-52
Gambar 2.50 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara 2010-2023	II-52
Gambar 2.51 Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara, 2010-2016	II-53
Gambar 2.52 Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023.....	II-53
Gambar 2.53 Jumlah Koperasi Aktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023.....	II-54
Gambar 2.54 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2021.....	II-54
Gambar 2.55 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023.....	II-55
Gambar 2.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023	II-55
Gambar 2.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023	II-56
Gambar 2.58 Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Utara per Lima Tahun dalam Periode 2025-2045	II-69
Gambar 2.59 Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara	II-81
Gambar 4.1 Latar Belakang Perumusan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	IV-1
Gambar 4.2 Kerangka Pikir Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.....	IV-2
Gambar 4.3 Sasaran Visi Sumatera Utara 2045.....	IV-5
Gambar 5.1 Pentahapan Upaya Transformatif Pendidikan Unggul	

	dan Merata	V-11
Gambar 5.2	Pentahapan Upaya Transformatif Masyarakat Sejahtera dan Terlindungi	V-12
Gambar 5.3	Pentahapan Upaya Transformatif Peningkatan IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	V-14
Gambar 5.4	Pentahapan Transformasi Sektor Industri	V-16
Gambar 5.5	Pentahapan Pengembangan Investasi	V-17
Gambar 5.6	Pentahapan Transformasi Industri Kreatif dan Wisata Unggul Kelas Dunia	V-18
Gambar 5.7	Pentahapan Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan Aman	V-21
Gambar 5.8	Pentahapan Mewujudkan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	V-22
Gambar 5.9	Pentahapan Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	V-23
Gambar 5.10	Pentahapan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	V-27
Gambar 5.11	Kawasan Pengembangan Ekonomi SIBARAHAN	V-51
Gambar 5.12	Kawasan Pengembangan Ekonomi PATAMALASI dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias	V-52
Gambar 5.13	Pengembangan Wilayah Fokus Pertanian	V-53
Gambar 5.14	Pengembangan Wilayah Fokus Pariwisata	V-54
Gambar 5.15	Pengembangan Wilayah Fokus Daerah Afirmasi/3T	V-55
Gambar 6.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	VI-2
Gambar 6.2	Kerangka Kerja MRPN	VI-3
Gambar 6.3	Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPD	VI-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah Sumatera Utara	II-2
Tabel 2.2 Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2016 dan 2022	II-5
Tabel 2.3 Kebutuhan Pangan dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2022-2045.....	II-14
Tabel 2.4 Status Ketersediaan Air Kabupaten/Kota Sumatera Utara.....	II-16
Tabel 2.5 TPT Status Pekerjaan Formal Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023.....	II-22
Tabel 2.6 Potensi Zakat Skala Provinsi di Indonesia	II-24
Tabel 2.7 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumatera Utara	II-28
Tabel 2.8 Tren Capaian Stunting Kabupaten/Kota 2022 dan 2023	II-32
Tabel 2.9 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Utara, 2018-2023	II-42
Tabel 2.10 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2022	II-45
Tabel 2.11 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi dan Ragam Disabilitas Tahun 2022	II-46
Tabel 2.12 Indeks Pelayanan Publik 2019-2022	II-48
Tabel 2.13 Indeks Integritas Nasional 2022-2023	II-49
Tabel 2.14 Proyeksi Demografi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.....	II-68
Tabel 2.15 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.....	II-71
Tabel 2.16 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.....	II-45
Tabel 2.17 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	II-72
Tabel 2.18 Proyeksi Kondisi Persampahan dan Kebutuhan TPA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	II-73
Tabel 2.19 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	II-74
Tabel 2.20 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	II-75
Tabel 2.21 Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi Sumatera Utara	II-77
Tabel 4.1 Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4. 2 Target Sasaran Visi Sumatera Utara Setiap 5 Tahun dalam	

Periode 2025-2045	IV-6
Tabel 4.3 Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 Dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	IV-9
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	V-8
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Pentahapan Kesehatan untuk Semua	V-10
Tabel 5. 3 Pentahapan Transformasi Industri Kreatif dan Wisata Unggul Kelas Dunia.....	V-19
Tabel 5. 4 Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Tahun 2025-2045 Berdasarkan Kewilayahan/Koridor Ekonomi (KE)	V-24
Tabel 5. 5 Prioritas Industri Sumatera Utara Tahun 2025-2045 Berdasarkan Kewilayahan/Koridor Ekonomi (KE).....	V-25
Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Transformasi	V-27
Tabel 5. 7 Indikator Utama Pembangunan.....	V-45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, dalam Rancangan Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 juga telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat imperatif, wajib menjadi pedoman, dan diikuti serta dicapai target indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam proses penyusunannya, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 telah memedomani RPJPN Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 memuat cita-cita atau mimpi besar untuk **mewujudkan Indonesia Emas**, hal ini dicapai dengan perwujudan visi RPJPN berupa **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Dalam rangka mendukung perwujudan Visi RPJPN dimaksud, maka Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 adalah **“Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”** dengan sasaran utama visi berupa: peningkatan pendapatan per kapita yang ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita berkisar antara 454,83 – 534,21 Juta Rupiah, peningkatan kontribusi industri terhadap PDRB sebesar 27,14 – 28,34 persen, dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 532,92; pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui penurunan angka kemiskinan pada kisaran 0,17 – 0,42 persen dan penurunan rasio gini menjadi sebesar 0,241 – 0,264 poin; peningkatan peran dan posisi di tingkat nasional dan global dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,75; peningkatan daya saing sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,72 poin; dan peningkatan kualitas lingkungan melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission (NZE)* dengan nilai penurunan intensitas emisi GRK sebesar 90,39 persen. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara ini kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan RPJPN meliputi 5 (Lima) sasaran visi, 8 (Delapan) misi pembangunan, 17 (Tujuh Belas) arah pembangunan, dan 45 (Empat Puluh Lima) indikator utama pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan pengintegrasian muatan-muatan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau arah pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pendekatan perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam menyusun RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 juga telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa 1) pendekatan teknokratis, 2) pendekatan partisipatif, 3) pendekatan politik, serta 4) pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain pendekatan tersebut, juga mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Prinsip pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir yang mana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Prinsip tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Prinsip holistik adalah penjabaran program tematik ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Prinsip integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan program perencanaan yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Selanjutnya prinsip spasial adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Proses penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 juga telah melaksanakan prinsip-prinsip di atas dengan melibatkan pemangku kepentingan, khususnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat sejak awal proses penyusunan mulai dari evaluasi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Diseminasi Evaluasi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tahun 2005-2025, Forum Orientasi Penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, penjaringan aspirasi masyarakat terkait RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 melalui media *online* maupun forum-forum diskusi dan konsultasi, serta menaati pedoman penyusunan RPJPD dengan mengakomodir RTRW yang dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD serta melaksanakan berbagai kegiatan seperti Forum Konsultasi Publik RPJPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, dan pembahasan teknis melalui pertemuan diskusi grup terfokus (FGD).

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

1.2 Dasar Hukum

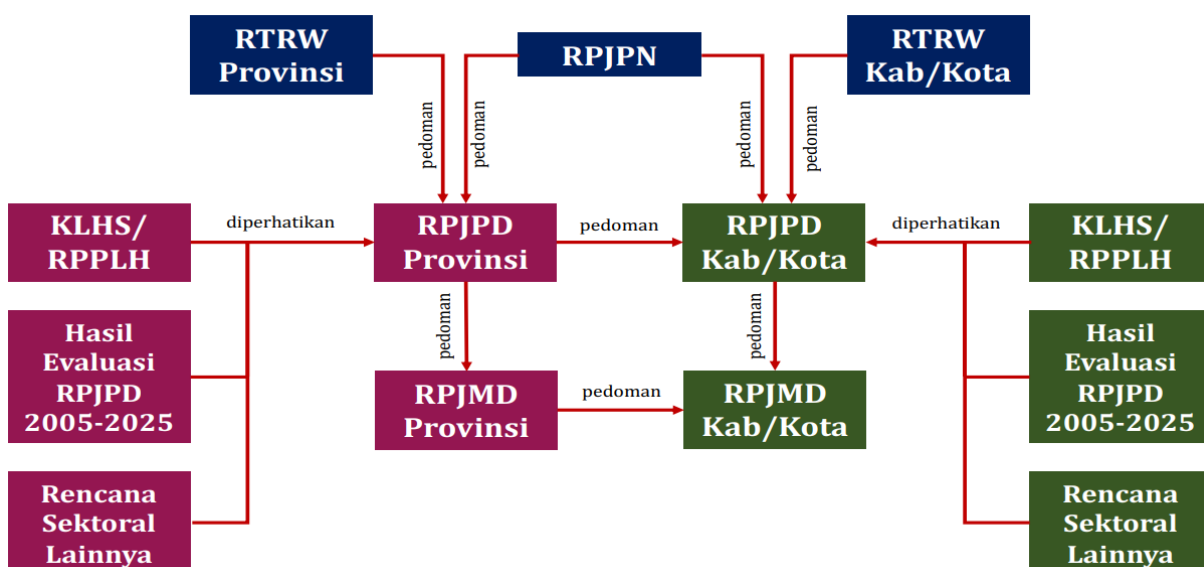
- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

- 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 18) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33)
- 20) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 70).

1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 melalui sinkronisasi dan penyelarasan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok antara RPJPD dengan RPJPN. Selain itu, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Selain itu, RPJPD Provinsi Sumatera Utara memperhatikan RTRW pada level provinsi maupun level nasional sehingga akan saling melengkapi antar dokumen perencanaan sehingga terjadi sinkronisasi dan keselarasan. Gambar berikut menunjukkan keterkaitan antar RPJPN, RPJPD, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 (diolah)

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 adalah untuk merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan yang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJPN 2025-2045).

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 adalah:

- 1) Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2025-2045;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD;
- 3) Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu; serta
- 4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dan Lampiran II Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Sistematika penulisan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai keseluruhan isi meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dasar dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; aspek pelayanan umum; evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025; tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan tentang (1) permasalahan utama yang merupakan faktor pembatas yang menjadi penghambat yang harus ditangani dengan baik untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah, serta (2) isu strategis daerah yang menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang semakin besar.

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi daerah, 5 (lima) sasaran visi, dan 8 (delapan) misi pembangunan daerah dengan merujuk pada muatan RPJPN melalui sinkronisasi serta penyelarasan antara RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Menjabarkan tentang (1) arah pembangunan daerah setiap lima tahun selama dua puluh tahun yang merupakan kerangka kerja pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dan mendukung

perwujudan visi pembangunan nasional serta (2) sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan yang terukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Utara memuat 17 (tujuh belas) arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik Provinsi Sumatera Utara.

Bab VI : Penutup

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Provinsi Sumatera Utara dengan ibukotanya Kota Medan terletak di bagian Utara Pulau Sumatera, membentang dari Barat ke Timur antara $96^{\circ} 51'$ - $100^{\circ} 29'$ Bujur Timur dan dari Utara ke Selatan antara $0^{\circ} 50'$ - $4^{\circ} 18'$ Lintang Utara. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, di sebelah Utara dengan Provinsi Aceh dan di sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Berbatasan dengan wilayah laut, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di bagian Barat menjadikan Sumatera Utara memiliki dua pantai sekaligus di kedua sisi kiri dan kanan wilayahnya, yang sering disebut Pantai Barat dan Pantai Timur. Provinsi Sumatera Utara termasuk 10 provinsi terluas di Indonesia, dengan daratan sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil di perairan bagian Barat maupun di bagian Timur Pulau Sumatera.

Secara administrasi, Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan, dan 5.417 desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2022, total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih luas sebesar 11.131.141,27 Ha yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 7.246.258,89 Ha dan luas perairan sebesar kurang lebih 3.884.882,38 Ha.

Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka dan berada di persimpangan antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Kedekatan dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang mana sekitar 40% perdagangan dunia melewati selat ini setiap tahunnya, memungkinkan Sumatera Utara memiliki pengawasan dan akses langsung ke jalur ini. Selain itu, Sumatera Utara juga menjadi gerbang maritim yang menjadikannya sebagai pintu masuk bagi kapal-kapal internasional ke Indonesia dari arah barat dan berperan penting dalam rantai logistik global. Provinsi Sumatera Utara yang bertetangga dan cukup dekat dengan negara-negara di Selat Malaka seperti Singapura, Malaysia dan Thailand menjadi titik penting dalam hubungan diplomatik dan ekonomi regional. Pantai barat Sumatera Utara yang menghadap langsung ke Samudera Hindia membuat Sumatera Utara memiliki akses langsung ke Samudera Hindia, hal ini memberi peluang untuk pengembangan pelabuhan dan industri maritim di masa depan.

Posisi geografis ini menjadikan Sumatera Utara sebagai wilayah yang sangat strategis dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia. Lokasinya memungkinkan provinsi ini untuk berperan penting dalam perdagangan internasional, keamanan maritim, dan hubungan diplomatik regional.

Topografi wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan, memiliki ketinggian yang bervariasi antara 0 hingga lebih dari 1750 m di atas permukaan laut (mdpl). Provinsi Sumatera Utara didominasi (33,69%) wilayah dengan ketinggian 0-75 mdpl umumnya terbentang pada pesisir Pantai Timur dan pesisir Pantai Barat Sumatera Utara, disusul oleh wilayah dengan ketinggian 75-150 mdpl

(12,34%) dan selanjutnya wilayah dengan ketinggian lebih dari 150 mdpl dengan rentang peningkatan ketinggian 75-250 mdpl hingga mencapai wilayah dengan ketinggian 1750 mdpl cakupannya bervariasi mulai dari 2,10%-11,33%, sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Ketinggian Wilayah Sumatera Utara

No.	Rentang Ketinggian (mdpl)	Luas	
		(Ha)	%
1	0-75	2,441,235.87	33.69
2	75-150	893,922.25	12.34
3	150-300	820,824.79	11.33
4	300-500	544,735.12	7.52
5	500-750	538,200.98	7.43
6	750-1000	759,848.72	10.49
7	1000-1250	537,148.60	7.41
8	1250-1500	490,574.99	6.77
9	1500-1750	152,301.38	2.10
10	>1750	67,466.18	0.93
	Luas total	7,246,258.89	100

Sumber: Interpolasi Kontur RBI KSP 1:250.000 Tahun 2017

Wilayah dengan ketinggian di atas 1750 m hanya mencakup 0,93% wilayah Sumatera Utara yang terdapat di sekitar Danau Toba dan Gunung Leuser. Dataran tinggi Sumatera Utara dominan memiliki ketinggian antara 1250-1500 mdpl. Dataran rendah di pesisir Pantai Timur sangat sesuai untuk pertanian, perikanan laut, tanaman pangan, perkebunan dan industri. Pegunungan Bukit Barisan di bagian tengah bergelombang dan berbukit menyimpan potensi wisata dan sumber daya alam. Sedangkan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Bagian Barat ini meliputi pesisir Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Nias. Wilayah bagian Barat juga menyimpan potensi wisata dan sumber daya alam dan cocok untuk pengembangan sektor perikanan laut, perkebunan dan tanaman hortikultura.

Klimatologi Sumatera Utara sangat dipengaruhi posisinya yang terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Curah hujan tahunan di Provinsi Sumatera Utara relatif cukup tinggi yaitu 1.918,1–3.853,9 mm per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 186–244 hari per tahun. Suhu udara rata-rata bulanan umumnya berkisar antara 26,86 °C. Suhu udara rata-rata bulanan tertinggi tercatat terjadi pada bulan Juli dengan nilai 30,2 °C, sedangkan suhu udara rata-rata bulanan terendah terjadi pada bulan Desember dengan nilai 19,5 °C. Kelembaban/humidity minimum sebesar 32%–66% dan kelembaban maksimum berkisar antara 92%–100% atau rata-rata sebesar 81,5%. Kecepatan angin maksimum berkisar 0-27 knot, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 855,9-999,6 mb yang membuat curah hujan cukup tinggi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun berdasarkan proyeksi curah hujan bulanan, musiman, dan tahunan menggunakan model CSIRO dan MIROC menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2050 cenderung mengalami penurunan curah hujan sehingga akan menimbulkan dampak negatif pada ketersediaan air karena beberapa sumber air akan mengalami kekeringan terutama pada musim kemarau.

Secara **geologis**, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera

Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (subduction) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat pusat gempa di dasar laut. Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi topografi, iklim, dan geologi sedemikian di atas, menjadikan **jenis tanah** di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh tanah litosol, podsolik, dan regosol. Jenis tanah tersebut seluas 1.601.601 ha yang tersebar di Kabupaten Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Labuhanbatu, Langkat, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Tanah ini sesuai untuk dikembangkan bagi menjadi budidaya komoditi perkebunan. Jenis tanah lainnya yang banyak dijumpai adalah podsolik merah kuning (16,35%), hidromorfik kelabu, glei humus, dan regosol (11,54%). Jenis tanah podsolik merah kuning terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, Langkat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Tanah hidromorfik kelabu terdapat di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Tebing Tinggi, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir.

Kondisi **hidrologi** di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah. Secara keseluruhan wilayah Sumatera Utara terbagi atas 13 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 137 Daerah Aliran Sungai (DAS). WS yang memiliki DAS terbanyak adalah WS Nias, yakni 40 DAS, selanjutnya adalah WS Batang Natal -Batang Batahan dengan 39 DAS. Beberapa WS hanya memiliki 1 DAS seperti WS Kubu, WS Masang – Pasaman, WS Rokan dan WS Toba Asahan. WS Belawan-Ular-Padang dan WS Toba-Asahan merupakan WS Strategis Nasional, sedangkan WS Alas Singkil merupakan WS lintas provinsi dengan Aceh, WS Batang Natal-Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan Sistem Wilayah Sungai (SWS) Rokan lintas provinsi dengan Riau. WS lintas kabupaten/kota meliputi WS Wampu-Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon-Kualuh, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong-Batang Toru dan WS Batang Angkola-Batang Gadis.

Terdapat 12 DAS di Sumatera Utara yang merupakan lokasi kota-kota utama Sumatera Utara yang membutuhkan ketersediaan air yang sangat besar. DAS tersebut meliputi DAS Aek Barumon dengan 6 kota utama (Rantauprapat, Labuhan Bilik, Sibuhuan, Gunung Tua, Kota Pinang dan Aek Nabara), DAS Toba Asahan menopang 9 kota utama (Kota Kisaran, Balige, Siborong-borong, Parapat, Tanjungbalai, Pangururan, Simpang Empat dan Porsea serta sebagian Merek), DAS Batang Gadis dengan 4 kota utama (Padangsidempuan, Panyabungan, Kotanopan dan Siabu), DAS Wampu mendukung 6 kota utama (Saribu Dolok, Stabat, Kabanjahe, Berastagi, Binjai dan Merek). Hingga saat ini pada DAS Batangtoru terdapat 3 kota utama (Sipirok, Tarutung dan Batangtoru), DAS Bolon menjadi sumber air pada 4 kota utama (Pematangsiantar, Limapuluh, Indrapura dan Perdagangan), DAS Ular dan DAS Padang masing-masing menyediakan air bagi dua kota utama, yakni Parbaungan dan Saribudolok untuk DAS Ular, serta Tebing Tinggi dan Pematang Raya untuk DAS Padang. DAS Belawan, Serdang, Percut dan Deli masing-masing menjadi sumber air untuk satu

kota utama yaitu Binjai, Lubuk Pakam serta Medan untuk DAS Percut dan Deli.

Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2022, dari 137 DAS di Sumatera Utara, 90 DAS (66.6%) diantaranya memiliki luasan hutan lebih kecil dari 30%, dan pada DAS ini terdapat kota-kota utama di Sumatera Utara, seperti DAS Deli, Belawan, Percut, Ular, Padang, dan DAS Serdang. Keberlanjutan kecukupan air untuk mendukung keberlangsungan kota-kota ini mengalami ancaman ke depannya.

Sungai-sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi, bahan baku air bersih untuk keperluan rumah tangga dan industri, juga sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA). Namun di sisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir di musim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 ha (32,18 %) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 ha (3,45 %).

Badan air berupa danau terdapat di Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan, Danau Balimbing di Kabupaten Padang Lawas Utara, Danau Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 112.986,15 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Natonang.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki potensi cekungan air tanah (CAT) seluas 5.569.900 Ha yang terbagi menjadi 19 CAT. Enam di antara CAT tersebut merupakan cekungan air bawah tanah lintas provinsi. CAT yang paling luas adalah CAT Teluk Durian/Pekanbaru dengan luas 2.179.900 Ha yang merupakan salah satu CAT lintas provinsi. CAT ini berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau. Kemudian setelahnya yang paling luas adalah CAT Medan dengan luas 1.978.600 Ha yang berada di Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Asahan, Batu Bara, Simalungun, Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Secara keseluruhan ketersediaan air di Sumatera Utara mencapai 78.497.133.430,94 m³/tahun sedangkan kebutuhan mencapai 35.604.240.751,55 m³/tahun dengan demikian masih terdapat selisih surplus sebesar 42.892.892.679,39 m³/tahun, namun jika dilihat dari selisih ketersediaan dan kebutuhan air masing-masing kabupaten/kota hanya Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami defisit, artinya ketersediaan air Kabupaten Serdang Bedagai tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhannya. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya ketersediaan air masih cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya,

sehingga daerah-daerah yang terlampaui terjadi karena distribusi yang tidak merata.

Meskipun memiliki potensi air yang berlimpah, **ketahanan air maupun penyediaan air minum aman dan sanitasi layak** masih banyak menemukan kendala. Akses air minum layak sebesar 89,68%, akses air minum aman 10,93%, akses air minum perpipaan 23,02% dan sambungan rumah sebanyak 829.579 SR. Semua capaian tersebut masih di bawah pencapaian nasional. Potensi sumber **air baku untuk minum** berupa 1 bendungan dengan volume tampung 20,07 juta m³ dengan kapasitas *intake* belum dimanfaatkan sebesar 0,015 m³/detik atau sekitar 83,33%. Di Provinsi Sumatera Utara juga terdapat 2 (dua) SPAM Regional yang sudah terbangun yaitu SPAM Regional Mebidangro dengan kapasitas rencana 2.200 liter/detik dan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan kota Tebing Tinggi) dengan total 300 liter/detik. Selain itu, akan direncanakan pembangunan SPAM Regional di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1) SPAM Regional Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 2) SPAM Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan;
- 3) SPAM Regional Kawasan Danau Toba;
- 4) SPAM Regional Kota Pematang Siantar – Kabupaten Simalungun;
- 5) SPAM Regional Kota Padang Sidempuan – Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 6) SPAM Regional di Kepulauan Nias.

Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Hutan dan Non Hutan Menurut Provinsi Tahun 2014–2022 (BPS, 2024), perbandingan luas tutupan lahan Hutan dan Non-Hutan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 27% berbanding 73%. Kondisi tersebut diperoleh dengan peningkatan luas tutupan lahan Hutan sebesar 1,3% yang pada tahun 2014 seluas 25,7%. Berdasarkan data spasial tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016–2022 dengan *updating* dan penyesuaian kenampakan Citra Satelit Spot 6 tahun 2022 (LAPAN) diperoleh **penggunaan lahan** yang paling dominan pada tahun 2016 didominasi oleh penggunaan ladang (lahan kering) sebesar 30,73%, kemudian penggunaan lahan hutan berupa hutan rimba sebesar 21,55% dan penggunaan lahan perkebunan sebesar 19,48%. Sedangkan pada tahun 2022 penggunaan lahan kering (ladang) berkurang sebesar 12,07% sehingga menjadi 18,66%. Sedangkan untuk penggunaan lahan hutan rimba bertambah sebesar 1,13% sehingga menjadi 24,33% dan penggunaan lahan perkebunan bertambah sebesar 8,38% sehingga menjadi 27,86%. Berdasarkan gambaran tersebut, **perubahan penggunaan lahan** di Provinsi Sumatera Utara dari yang sebelumnya berupa ladang kini dimanfaatkan menjadi perkebunan, kehutanan, dan juga ladang. Penggunaan lahan untuk permukiman masih kurang dari 2% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Rincian penggunaan lahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Perubahan Penggunaan Lahan Utama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 dan 2022

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Penggunaan Tanah (Ha)			
		2016	%	2022	%
1	Badan Air	152.891,22	2,11	151.106,76	2,09
2	Bandara	1.016,02	0,01	2.522,68	0,03
3	Belukar	596.770,46	8,24	391.961,40	5,41
4	Belukar Rawa	50.696,34	0,70	31.766,03	0,44
5	Hutan Rawa	62.730,77	0,87	18.854,84	0,26
6	Hutan Rimba	1.561.252,24	21,55	1.643.460,09	22,68

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Penggunaan Tanah (Ha)			
		2016	%	2022	%
7	Hutan Tanaman	145.218,17	2,00	167.633,92	2,31
8	Kebun Campuran	328.163,23	4,53	938.600,09	12,95
9	Ladang	2.226.753,61	30,73	1.351.978,00	18,66
10	Lahan Terbuka	256.980,08	3,55	33.867,62	0,47
11	Mangrove	38.815,11	0,54	37.851,77	0,52
12	Perkebunan	1.411.775,95	19,48	2.018.867,41	27,86
13	Permukiman	81.181,33	1,12	118.542,83	1,64
14	Pertambangan	10,04	0,00	419,67	0,01
15	Rawa	8.102,99	0,11	4.512,96	0,06
16	Sawah	294.311,61	4,06	311.095,25	4,29
17	Tambak	29.538,10	0,41	23.165,94	0,32
Total		7.246.207,27	100	7.246.207,27	100

Sumber: Analisis GIS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Dianugerahi dengan kondisi alam seperti gambaran aspek geografis di atas, menjadikan **potensi sumber daya alam** Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, di antaranya komoditas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, pariwisata, serta industri.

Komoditas unggulan pertanian tanaman pangan antara lain padi, jagung, dan ubi kayu. Tanaman hortikultura komoditas unggulannya berupa cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk, pisang. Komoditas unggulan perkebunan antara lain sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Potensi untuk pengembangan sapi, kerbau, ternak kambing dan domba, unggas seperti ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik juga cukup besar. Potensi sumber daya ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak juga cukup besar. Pesisir Pantai Barat jenis ikan unggulannya berupa tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias. Budidaya kelautan antara lain berupa teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang. Pesisir Pantai Timur SDI-nya mencapai 276.030 ton/tahun dengan jenis ikan unggulan seperti di Pesisir Pantai Barat ditambah dengan ikan baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari.

Potensi sumber daya alam pertanian khususnya tanaman pangan ini membuat **indeks ketahanan pangan** (IKP) Provinsi Sumatera Utara 75,97 (pada tahun 2023). Angka tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 71,22. Peningkatan tersebut membuat Provinsi Sumatera Utara pindah dari ketahanan pangan dengan kategori agak tahan ke dalam kelompok provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik atau sangat tahan (lebih besar dari 74,40). Namun perlu diwaspadai kabupaten yang masuk kategori agak rentan ketahanan pangannya yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan IKP sebesar 56,18 (pada tahun 2023). Kategori sangat tahan dalam ketahanan pangan ini perlu dipertahankan, untuk itu perlu dijaga agar jangan sampai ketahanan pangan ini menurun seperti yang dialami oleh Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padanglawas Utara. Pada tahun 2022 IKP kedua kabupaten ini sudah mencapai 87,15 dan 71,74 namun menurun pada tahun 2023 menjadi 86,81 dan 70,40.

Meskipun IKP Provinsi Sumatera Utara sudah kategori sangat tahan, namun **prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of**

Undernourishment/PoU) di provinsi ini masih di atas angka nasional. PoU Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 8,60% sementara nasional 8,35%. Hal ini menggambarkan masih ada 8,60% penduduk Sumatera Utara yang mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Pencapaian terbaik Sumatera Utara terkait PoU ini adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,84%.

Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Potensi yang cukup besar juga terdapat di sektor **pertambangan**. Potensi ini berupa tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif tersebar di beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo; Kecamatan Pahae Jahe Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikasi kandungan minyak di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat di Gunungsitoli/Kabupaten Nias. Bahan tambang batubara tersebar di Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Nias, dan Kota Gunung Sitoli. Potensi radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra). Bahan tambang mineral logam seperti Antimoni, Arsen, Barit, Bauksit, Belerang, Besi, Bismuth, Kromium, Emas, Perak, Tembaga, Florit, Mangan, Merkuri, Molibdenum, Niobium, Platina, Tellurium, Seng, Timbal, dan Wolfram tersebar di beberapa kabupaten/kota, begitu juga bahan tambang batuan/bukan logam seperti bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), dan pasir laut tersebar di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Potensi geografi dan sumber daya alam di mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan potensi *hydro*. Selain itu juga terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka, selain itu terdapat juga potensi dari limbah ternak mengingat Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil ternak potong di Pulau Sumatera. Semua potensi yang ada tersebut menghasilkan energi listrik bagi memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Utara.

Pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini belum sepenuhnya merata terutama pada Kepulauan Nias yang angka rata-rata rasio elektrifikasi masih di bawah 80% yang mengindikasikan masih

terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik. Hal yang sama juga terjadi pada wilayah selatan Sumatera Utara yang Sebagian besar masuk wilayah hutan dan pegunungan sehingga harus memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yang membutuhkan waktu dan ini juga merupakan permasalahan energi di Sumatera Utara.

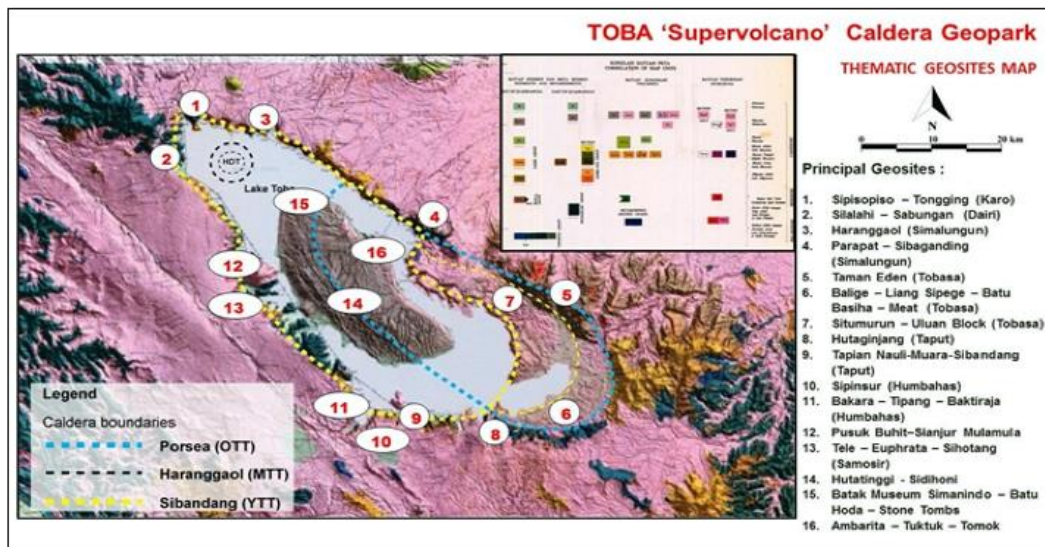
Komoditas unggulan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang digambarkan di atas selanjutnya menjadi potensi untuk diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya di sektor industri. Perwilayahan industri di Provinsi Sumatera Utara dikembangkan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (sentra IKM). Perwilayahan industri ini bersama dengan kawasan strategis provinsi (KSP) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Industri (KI) yang telah dicanangkan untuk terus mengembangkan berbagai industri menengah dan besar, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun antara lain:

- a. Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan;
- b. Kawasan Industri Medan Star di Kabupaten Deli Serdang;
- c. Kawasan Industri Medan di Kota Medan;
- d. Kawasan Industri Medan di Kabupaten Deli Serdang;
- e. Kawasan Industri Tanjung Morawa;
- f. Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang;
- g. Kawasan Industri Smelter Baja di Kota Medan;
- h. Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi;
- i. Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu;
- j. Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
- k. Kawasan Industri Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara;
- l. Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar;
- m. Kawasan Industri Sei Mangke dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun;
- n. Kawasan Industri Sei Bamban di Kabupaten Serdang Bedagai;
- o. Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- p. Kawasan Industri di Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- q. Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
- r. Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- s. Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias.

Potensi sumberdaya lainnya di Sumatera Utara adalah berbagai tempat **pariwisata** yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Jenis wisata di Sumatera Utara antara lain wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus. Objek wisata alam menjadi andalan dalam menarik wisatawan, di antaranya, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dan Geopark Kaldera Toba. Kawasan Geopark Kaldera Toba adalah contoh pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang menggabungkan unsur wisata dengan pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 Geosites (enam belas), situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano.

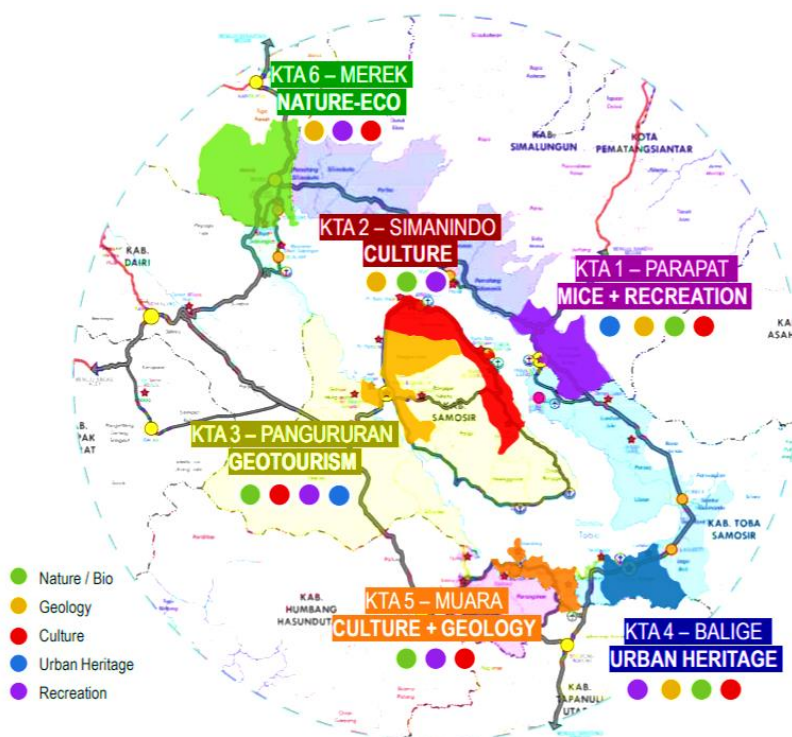
Gambar 2. 1 Kawasan Geopark Kaldera Toba



Sumber: <https://calderatobageopark.org/geosite/>

- Pemandian air panas Pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir;
- Berastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dan lainnya.

Gambar 2. 2 Destinasi Super Prioritas Danau Toba



Sumber: *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba, 2020*

Posisi beberapa destinasi KSPN Danau Toba yang digambarkan sebagai Destinasi Super Prioritas Danau Toba dengan *key tourism area* (KTA) tiap destinasi di atas dapat dilihat pada gambar di atas.

Sumatera Utara juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor ekowisata. Beberapa kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain:

- a. Kawasan Ekowisata Tangkahan dan Bukit Lawang. Tangkahan terletak di antara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat rehabilitasi satwa langka Orangutan Sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu terdapat Desa wisata Bukit Lawang, terletak di Kecamatan Bahorok, yang menawarkan berbagai fasilitas bagi pengunjung. Ini termasuk *jungle trekking* di Taman Nasional Gunung Leuser, arung jeram di Sungai Bahorok yang airnya sangat bersih. Selain itu, terdapat *tour* ke gua dan jalur untuk lari dan bersepeda di desa tersebut. Bukit Lawang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan kawasan konservasi orangutan.
- b. Kawasan Ekowisata Karo. Kabupaten Karo yang juga termasuk daerah penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba, menyimpan banyak potensi wisata. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

Beberapa objek wisata budaya juga menarik untuk dikunjungi di antaranya:

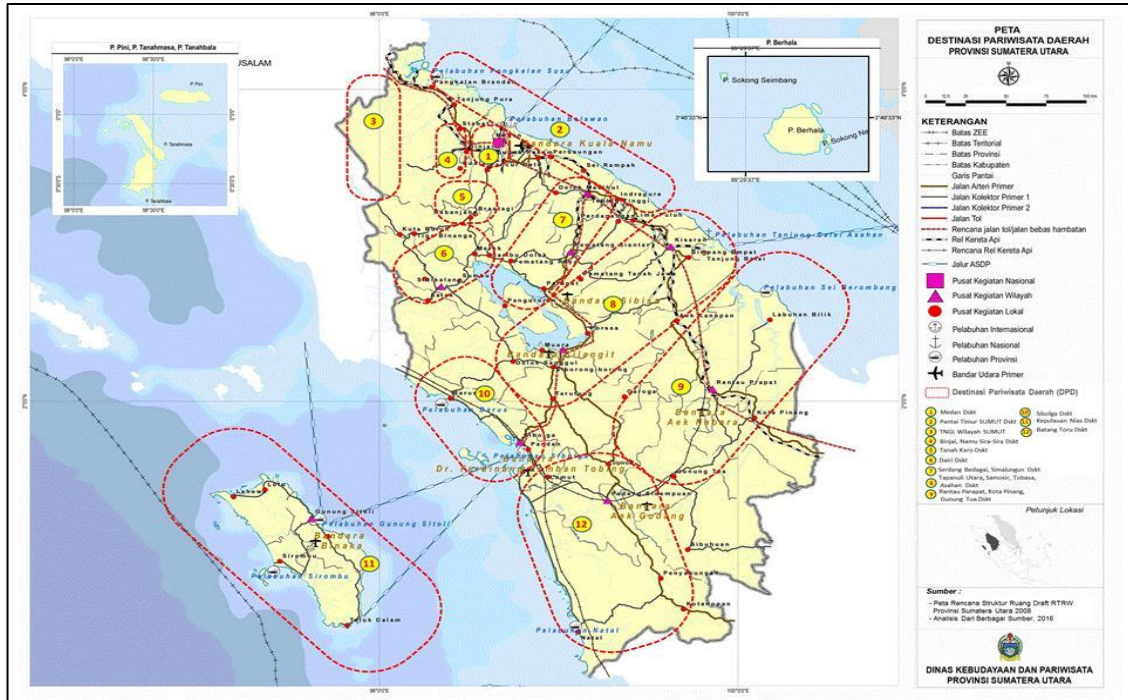
- a. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Masjid Raya, Masjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Tjong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah Kota Cina di Kota Medan;
- b. Cagar Budaya Stasiun Kereta Api Binjai;
- c. Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. Kawasan situs bersejarah Kota Rintang di Kabupaten Deli Serdang;
- e. Kawasan situs bersejarah Bawomataluo di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, dan lainnya.

Selain itu juga ada wisata minat khusus antara lain:

- a. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- b. Arung Jeram di Sei Asahan - Toba dan Sei Bingei, Sei Wampu di Langkat;
- c. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau-pulau Batu di Nias Selatan, dan lainnya.
- d. Petualangan (*Adventure*), Desa wisata Seribu Gua Banuarea terletak di lereng Gunung Pinapan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang asri dan alami, serta memiliki banyak gua dan air terjun yang menakjubkan. Dengan hampir ribuan gua yang memiliki keindahan tersendiri, Banuarea berpotensi menjadi destinasi wisata.

Secara umum destinasi pariwisata provinsi (DPP) di Provinsi Sumatera Utara terdapat di seluruh kabupaten/kota meliputi: a. DPP Medan dan sekitarnya; b. DPP Pantai Timur Sumatera Utara; c. DPP Kawasan TNGL Wilayah Sumatera Utara; d. DPP Binjai, Langkat, Namusira-sira dan sekitarnya; e. DPP Tanah Karo dan sekitarnya; f. DPP Dairi dan sekitarnya; g. DPP Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan sekitarnya; h. DPP Tapanuli Utara, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya; i. DPP Labuhan Batu Utara, Rantauprapat, Kota Pinang, Gunung Tua, dan sekitarnya; j. DPP Tapanuli Tengah dan sekitarnya; k. DPP Kepulauan Nias; l. DPP Tapanuli Bagian Selatan dan sekitarnya.

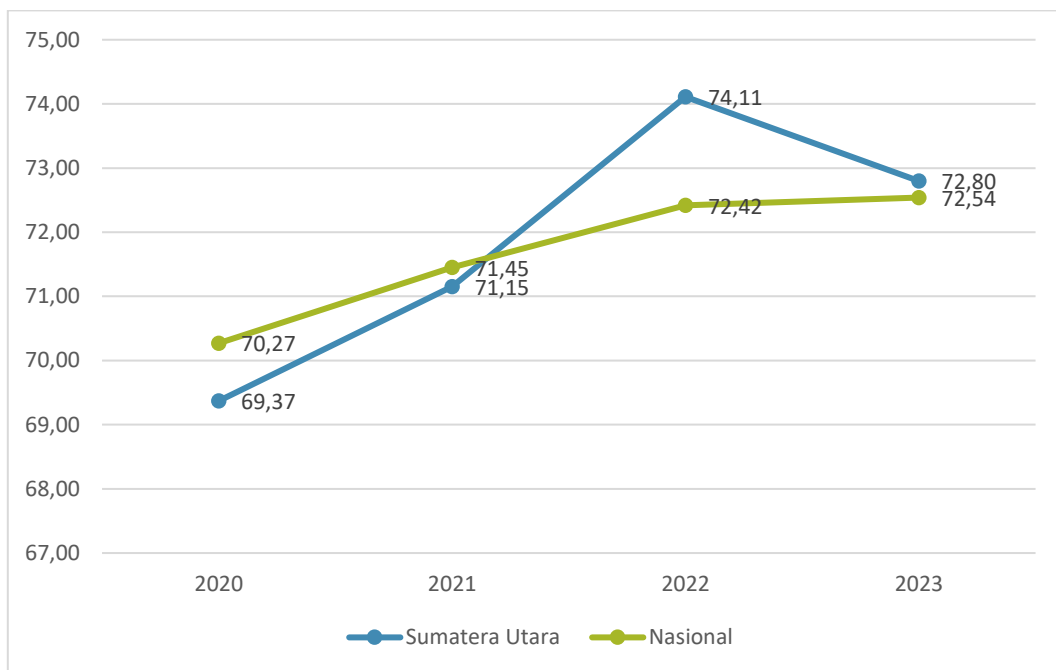
Gambar 2. 3 Peta Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Pemanfaatan berbagai sumberdaya alam untuk penyediaan kebutuhan pengembangan wilayah di atas akan menimbulkan tekanan dan berpengaruh terhadap keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat digambarkan dari kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan maupun kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2024 (Diolah)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Utara semakin baik dari tahun ke tahun khususnya pada periode 2020-2023. Meskipun sempat terjadi penurunan IKLH pada 2022 sebesar 74,11 menjadi 72,80 pada tahun 2023, namun pencapaian IKLH tersebut masih di atas IKLH nasional. Nilai IKLH 72,80 mengandung arti bahwa kualitas lingkungan

hidup Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “Baik” ($70 \leq \text{IKLH} \leq 90$).

Terkait dengan kualitas lingkungan dan daya tampung lingkungan, produksi sampah masih menjadi kendala di Sumatera Utara. Pada tahun 2020, timbunan sampah yang dihasilkan di Sumatera Utara meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, volume timbunan yang dihasilkan di Sumatera Utara mencapai $61.770 \text{ m}^3/\text{hari}$. Volume timbunan sampah terbesar di Sumatera Utara dihasilkan oleh Kota Medan ($10.381 \text{ m}^3/\text{hari}$) dan Kabupaten Deli Serdang ($7.618 \text{ m}^3/\text{hari}$), sedangkan volume timbunan sampah terkecil dihasilkan oleh Kota Sibolga ($384 \text{ m}^3/\text{hari}$) dan Kabupaten Pakpak Bharat ($224 \text{ m}^3/\text{hari}$).

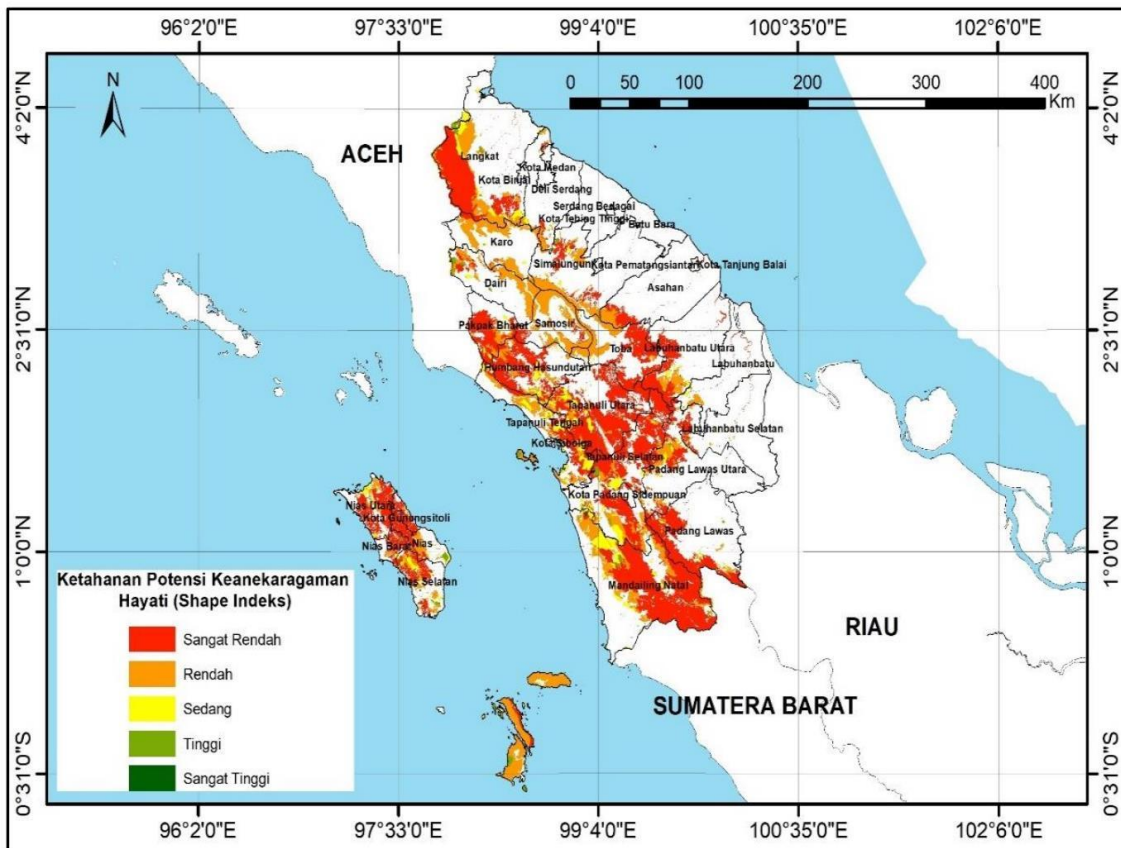
Sumatera Utara memiliki 37 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan jenis *open dumping* (33 unit), *controlled landfill* (2 unit), dan *sanitary landfill* (2 unit). Pada TPA jenis *open dumping*, sampah hanya dikumpulkan pada suatu lokasi dan dibiarkan terbuka. TPA jenis *open dumping* berpotensi menimbulkan pencemaran udara karena akan dihasilkan gas dari proses dekomposisi sampah secara anaerobik, seperti gas hidrogen sulfida (H_2S), metan (CH_4), dan amoniak (NH_3). Sebagai akibatnya, udara di sekitar TPA menjadi bau dan kualitas udara ambien menurun. Gas H_2S juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia. Gas H_2S dapat diserap oleh paru-paru dengan cepat. Pada konsentrasi rendah, gas H_2S dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Pada konsentrasi tinggi, gas H_2S dapat menyebabkan hilangnya kesadaran bahkan kematian.

Selain dengan membuang sampah ke TPA, 15% masyarakat di Sumatera Utara mengelola sampahnya dengan cara pembakaran secara terbuka di pekarangan rumah, bak sampah, atau di lahan kosong, yang biasa disebut dengan *open burning*. Kegiatan *open burning* menghasilkan beberapa pencemar udara, seperti CO , CH_4 , NOX , SOX , VOC , TSP , PM_{10} , dan $\text{PM}_{2,5}$. Pencemar ini merupakan salah satu faktor yang menyumbang beban emisi gas rumah kaca dan berbahaya bagi kesehatan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki wilayah dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagian besar terdapat pada bagian tengah hingga barat Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, wilayah tersebut memiliki tutupan lahan berupa hutan lahan kering, hutan rawa, hutan mangrove, perkebunan campur dan sungai.

Nilai *shape index* dapat menggambarkan **tingkat ketahanan potensi keanekaragaman hayati** di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana digambarkan di bawah. *Shape index* menunjukkan ukuran bentuk dari suatu petak (*patch*) ekosistem, yang menunjukkan seberapa efektif petak tersebut dalam mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh *shape index* sangat rendah dengan ukuran yang besar, sehingga memberikan ancaman bagi fauna yang ada di dalamnya. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan keterhubungan antar petak-petak *shape index* untuk meningkatkan kelangsungan atau terpeliharanya keanekaragaman hayati.

Gambar 2. 5 Peta Shape Index untuk IJE Pendukung Keanekaragaman Hayati Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2024 (Diolah)

Terkait dengan **daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup**, dihitung berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan, secara khusus untuk pangan dan air. daya dukung lingkungan hidup difokuskan pada daya dukung air dan pangan, dengan pendekatan *supply-demand* (ketersediaan-kebutuhan), yakni menghitung ketersediaan dan kebutuhan serta selisih keduanya. Jika ketersediaan lebih besar dari kebutuhan maka status daya dukungnya surplus dan jika lebih kecil status daya dukungnya defisit. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup akan membahas perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.

Dilihat dari produksi pangan yang dihasilkan, Provinsi Sumatera Utara memiliki **ketersediaan pangan yang relatif tinggi**. Tanaman Pangan, meliputi padi, jagung, kedelai, ubi, dan tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, merupakan sumber pangan utama di Sumatera Utara (48%), disusul oleh perkebunan (29%) dan pertanian (18%), sedangkan bahan pangan yang bersumber dari peternakan dan perikanan hanya sekitar 5% dari total bahan pangan seluruhnya.

Produksi pangan yang dihasilkan oleh masing-masing kota di Sumatera Utara umumnya sangat sedikit, tidak mencapai 1% dari total produksi pangan Sumatera Utara secara keseluruhan. Selain kota, terdapat beberapa kabupaten yang juga menghasilkan bahan pangan di bawah 1% dari total produksi bahan pangan keseluruhan, yaitu Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Samosir, Nias Selatan, dan Pakpak Bharat. Kota Sibolga menghasilkan bahan pangan paling sedikit untuk sektor perkebunan, pertanian, dan hortikultura, sedangkan bahan pangan dari sektor peternakan dan perikanan masing-masing paling sedikit dihasilkan oleh Kabupaten Samosir dan Kota Padangsidimpuan.

Tabel 2. 3 Kebutuhan Pangan dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2022-2045

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pangan dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2022-2045 (10 ³ Juta Kkal)					
		2022	2025	2030	2035	2040	2045
1	Nias	114	118	125	131	139	146
2	Mandailing Natal	372	389	419	452	487	525
3	Tapanuli Selatan	236	245	261	278	296	316
4	Tapanuli Tengah	287	301	325	351	380	410
5	Tapanuli Utara	244	252	266	281	297	314
6	Toba	163	171	186	203	221	240
7	Labuhanbatu	389	410	446	485	527	574
8	Asahan	604	629	674	722	773	827
9	Simalungun	783	828	908	996	1.093	1.199
10	Dairi	242	251	268	286	305	325
11	Karo	318	331	355	381	408	437
12	Deli Serdang	1.498	1.531	1.589	1.648	1.710	1.775
13	Langkat	797	812	837	863	889	917
14	Nias Selatan	286	305	339	377	419	466
15	Humbang Hasundutan	155	162	173	185	198	213
16	Pakpak Bharat	42	45	51	58	65	74
17	Samosir	107	111	118	126	134	143
18	Serdang Bedagai	512	527	554	581	610	641
19	Batu Bara	319	327	342	357	372	389
20	Padang Lawas Utara	205	214	231	249	268	289
21	Padang Lawas	205	214	230	247	265	285
22	Labuhanbatu Selatan	246	254	270	287	304	323
23	Labuhanbatu Utara	300	313	335	359	386	414
24	Nias Utara	116	121	129	139	149	160
25	Nias Barat	70	72	75	79	83	87
26	Sibolga	69	70	72	75	77	79
27	Tanjungbalai	138	143	152	162	173	184
28	Pematangsiantar	210	218	233	248	265	283
29	Tebing Tinggi	136	143	156	170	185	201
30	Medan	1.912	1.996	2.145	2.306	2.478	2.663
31	Binjai	230	242	262	285	309	336
32	Padangsidempuan	177	186	201	217	235	254
33	Gunungsitoli	105	108	112	116	120	125
SUMATERA UTARA		11.586	12.040	12.840	13.699	14.620	15.610

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022, hampir setengah dari bahan pangan dari hortikultura dan perikanan dihasilkan oleh Kabupaten Simalungun. Produksi hortikultura Kabupaten Simalungun didominasi oleh hasil tanaman sayuran dan biofarmaka, seperti jahe, kunyit, serai, bawang, dll, sedangkan produksi perikanan Kabupaten Simalungun didominasi oleh ikan mas dan nila. Bahan pangan yang bersumber dari pertanian dan peternakan paling banyak dihasilkan oleh Kabupaten Deli Serdang dengan komoditas pertanian utama berupa padi dan komoditas peternakan utama berupa sapi dan ayam. Bahan pangan yang bersumber dari perkebunan

paling banyak dihasilkan oleh Kabupaten Asahan, dengan komoditas utama berupa kelapa sawit dan kelapa.

Distribusi ketersediaan pangan (dalam satuan energi) diperoleh dari data produksi pangan per kabupaten/kota pada tahun 2022, yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Produksi pangan tersebut kemudian disebarkan secara kuantitatif menggunakan proporsi indeks jasa lingkungan penyedia pangan. Secara umum, hampir seluruh wilayah Sumatera Utara memiliki daya dukung yang belum terlampaui dalam hal penyediaan pangan sebesar 99,97 persen. Namun ada 0,03 persen wilayah Sumatera Utara yang sudah terlampaui daya dukungnya, Kota Sibolga memiliki persentase luas wilayah dengan daya dukung pangan terlampaui paling tinggi, disusul oleh Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan angka kecukupan kalori sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, maka kebutuhan energi masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2045 ditunjukkan pada tabel Kebutuhan Pangan dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2022-2045 di atas.

Berdasarkan proyeksi tersebut, secara umum hingga tahun 2045 daya dukung pangan Sumatera Utara belum terlampaui. Namun beberapa kabupaten/kota seperti Nias Barat sudah terlampaui daya dukung pangannya di tahun pada saat ini (2023), Nias Selatan di tahun 2030, Padangsidempuan di tahun 2035, sementara kota-kota otonom lainnya seperti Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Gunungsitoli sudah terlampaui daya dukung pangannya di tahun 2023.

Dilihat dari **daya dukung akan kebutuhan air**, secara keseluruhan ketersediaan air di Sumatera Utara mencapai 78.497.133.430,94 m³/tahun sedangkan kebutuhan mencapai 35.604.240.751,55 m³/tahun dengan demikian masih terdapat selisih surplus sebesar 42.892.892.679,39 m³/tahun. Namun jika dilihat dari selisih ketersediaan dan kebutuhan air masing-masing kabupaten/kota hanya Kabupaten Serdang Bedagai yang mengalami defisit, artinya ketersediaan air Kabupaten Serdang Bedagai tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhannya (sebesar 42.934.625,49 m³/tahun). Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya ketersediaan air masih cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, sehingga daerah-daerah yang terlampaui terjadi karena distribusi yang tidak merata. Wilayah dengan status terlampaui daya dukung airnya umumnya berada pada wilayah pantai timur, sebagian wilayah Kabupaten Toba dan daerah perbukitan bukit barisan. Luas wilayah pada masing-masing kabupaten/kota yang selisih ketersediaan air dan kebutuhannya belum terlampaui atau terlampaui ditunjukkan pada tabel Status Ketersediaan Air Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Secara keseluruhan terdapat 7,26% wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan status ketersediaan air defisit, dan persentase luas wilayah defisit pada masing-masing kabupaten/kota. Persentase luasan terlampaui terbesar adalah di Kota Tanjungbalai, menyusul Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Sibolga, sedangkan kabupaten/kota yang tidak memiliki daerah terlampaui yaitu Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 2. 4 Status Ketersediaan Air Kabupaten/Kota Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui		Luas Total (Ha)
		(Ha)	%	(Ha)	%	
1	Kota Tanjung Balai	2,219.37	38.24	3,585.11	61.76	5,804.48
2	Kota Medan	14,078.93	50.47	13,815.67	49.53	27,894.60
3	Asahan	208,029.76	55.70	165,436.65	44.30	373,466.42
4	Batu Bara	55,889.17	62.49	33,550.51	37.51	89,439.68
5	Kota Pematangsiantar	5,035.25	67.05	2,475.00	32.95	7,510.25
6	Serdang Bedagai	140,632.07	72.08	54,476.27	27.92	195,108.35
7	Kota P. Sidempuan	12,473.14	77.25	3,673.58	22.75	16,146.73
8	Kota Tebing Tinggi	3,071.35	78.26	853.15	21.74	3,924.50
9	Deli Serdang	206,455.91	80.23	50,874.01	19.77	257,329.92
10	Kota Sibolga	1,571.65	82.14	341.67	17.86	1,913.32
11	Toba	197,238.35	88.98	24,419.68	11.02	221,658.03
12	Kota Binjai	8,529.76	89.29	1,023.56	10.71	9,553.31
13	Simalungun	421,088.48	91.42	39,515.05	8.58	460,603.52
14	Langkat	579,937.74	94.41	34,359.42	5.59	614,297.16
15	Humbang Hasundutan	222,028.43	94.48	12,979.37	5.52	235,007.80
16	Tapanuli Utara	365,704.10	95.43	17,506.79	4.57	383,210.89
17	Labuhanbatu	269,145.40	97.10	8,027.38	2.90	277,172.78
18	Karo	214,642.46	97.48	5,547.76	2.52	220,190.22
19	Samosir	177,833.65	97.52	4,524.80	2.48	182,358.45
20	Tapanuli Tengah	227,934.75	97.55	5,717.78	2.45	233,652.53
21	Padang Lawas Utara	379,690.10	97.91	8,116.70	2.09	387,806.80
22	Tapanuli Selatan	415,981.35	97.95	8,714.27	2.05	424,695.62
23	Dairi	206,246.17	98.33	3,500.13	1.67	209,746.30
24	Labuhanbatu Utara	364,627.56	98.34	6,148.00	1.66	370,775.56
25	Padang Lawas	385,585.37	98.37	6,408.88	1.63	391,994.24
26	Mandailing Natal	648,982.46	99.04	6,308.26	0.96	655,290.72
27	Nias Barat	57,916.45	99.27	427.53	0.73	58,343.97
28	Nias Selatan	253,882.70	99.36	1,624.33	0.64	255,507.03
29	Nias Utara	129,321.56	99.47	683.94	0.53	130,005.50
30	Labuhanbatu Selatan	316,919.82	99.65	1,110.70	0.35	318,030.52
31	Nias	76,999.80	99.78	170.95	0.22	77,170.75
32	Kota Gunungsitoli	13,345.98	100.00		0.00	13,345.98
33	Pakpak Bharat	137,302.97	100.00		0.00	137,302.97
	Sumatera Utara	6,720,341.99	92.74	525,916.90	7.26	7,246,258.89

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2024

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan Renun, patahan Toru, patahan Angkola dan patahan Barumon. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2023, **bencana** yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dan banjir. Namun

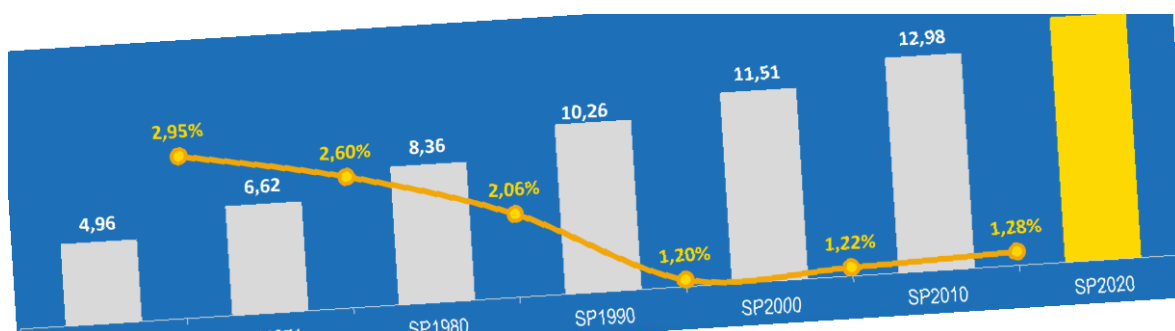
demikian di tahun ini pula, Sumatera Utara tercatat mengalami 84 kali laporan puting beliung dan 1 guncangan gempa bumi. Sebanyak 6.429 unit rumah rusak, 29 rumah peribadatan, 15 fasilitas pendidikan, 14 fasilitas umum dan 2 fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil pengukuran **indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)** tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara memiliki kelas risiko dengan nilai 140,65 (sedang). Angka ini terus menurun (semakin baik) dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2020 adalah sebesar 145,18 hingga tahun 2022 sebesar 142,51. Ada 13 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki angka IRBI dengan kelas risiko tinggi, yaitu: Mandailing Natal (214,80), Nias Utara (214,00), Nias (211,70), Nias Barat (210,80), Gunungsitoli (207,67), Nias Selatan (190,52), Tapanuli Tengah (187,85), Sibolga (167,20), Labuhanbatu Utara (155,20), Tapanuli Selatan (152,95), Padanglawas (152,76), Labuhanbatu (151,20), dan Asahan (146,85).

Perubahan iklim dan kenaikan temperatur secara global akibat Gas Rumah Kaca (GRK) juga merupakan suatu fenomena terkait pencemaran udara yang menjadi isu internasional dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. GRK dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. GRK antara lain terdiri dari CO₂, CH₄, N₂O, PFC, HFC, SF₆ dan uap air. Emisi GRK di Sumatera Utara pada periode tahun 2000-2018 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2000, emisi GRK agregat mencapai 7.352,55 Gg CO₂eq. Jumlah ini terus mengalami kenaikan hingga akhirnya pada tahun 2018 emisi agregat GRK Sumatera Utara mencapai 77.230,87 Gg CO₂eq. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 18 tahun, kenaikan emisi GRK di Sumatera Utara mencapai 69.877,99 Gg CO₂eq.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Sumatera Utara mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam kurun 50 tahun terakhir. Pada sensus penduduk (SP) 1971 jumlah penduduk Sumatera Utara sekitar 6,62 juta jiwa, pada SP 2020 sudah mencapai 14,80 juta jiwa. Selama periode 2010-2020, rata-rata **laju pertumbuhan penduduk** Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun pada tahun 2020-2023 menjadi 1,43 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk ini meningkat terus sejak 1990, meskipun angkanya tidak sebesar periode 1961-1980 sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah. Pertumbuhan yang meningkat ini perlu diwaspadai agar tetap sesuai dengan program/target perencanaan penduduk (keluarga berencana).

Gambar 2. 6 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP) Provinsi Sumatera Utara



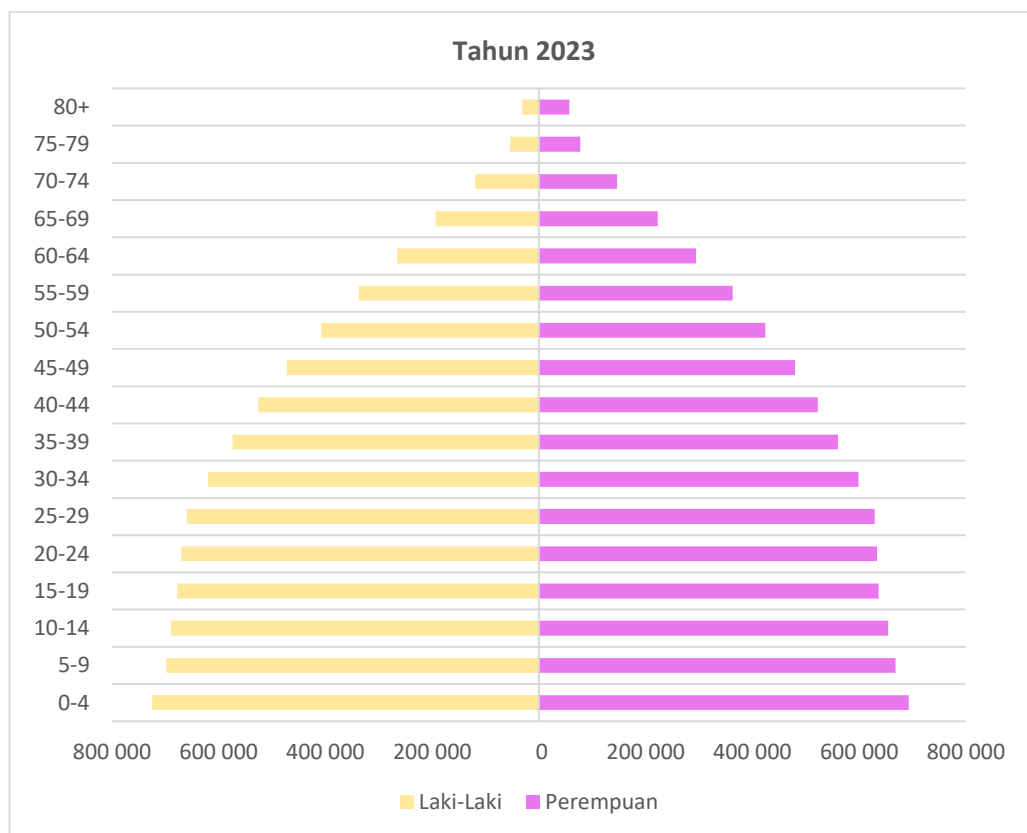
Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Sumatera Utara, BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada Tahun 2023 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.386.640 jiwa.

Kota Medan merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara, yakni 16,4% dari total penduduk. Kemudian, Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk dengan proporsi 13,1%, Kabupaten Langkat 7,1%, dan Kabupaten Simalungun 6,6%. Masing-masing kabupaten/kota tersebut adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total penduduk Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang jumlah penduduknya kurang dari 1 persen dari total penduduk Sumatera Utara (atau kurang dari 150 ribu jiwa) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat adalah kabupaten yang paling sedikit penduduknya sekitar kurang dari 60 ribu jiwa. **Kepadatan penduduk** pada tahun 2020 adalah 203 jiwa per km² kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 212 jiwa per km². Kota-kota otonom seperti Sibolga, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli adalah daerah dengan kepadatan penduduk di atas 500 jiwa per km². Kota Medan adalah daerah yang paling padat dan bahkan sudah mendekati 9000 jiwa per km², disusul dengan Kota Sibolga dengan kepadatan mendekati 8000 jiwa per km².

Komposisi penduduk Sumatera Utara tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin terdiri yang terdiri dari 7.721.314 jiwa penduduk laki-laki dan 7.665.326 jiwa perempuan, atau 50,18 persen laki-laki dan 49,82 persen perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,73. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan sebesar 48,56 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 orang penduduk usia non produktif.

Gambar 2. 7 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (Jiwa)



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS, 2023

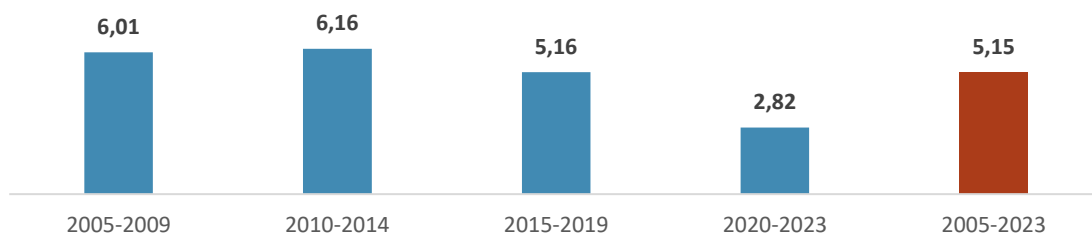
Meski didominasi usia produktif, saat ini Sumatera Utara belum mengalami bonus demografi, seperti yang ditampilkan dalam piramida penduduk di atas, piramida penduduk Sumatera Utara masih termasuk tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meruncing. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun adalah yang terbanyak, yakni mencapai 1.417.593 jiwa.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

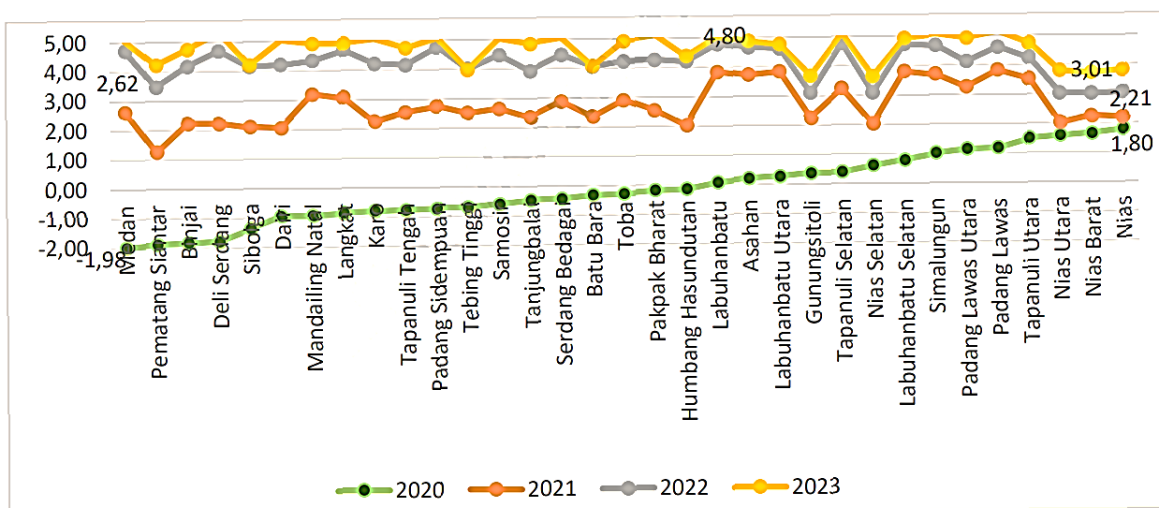
Secara rerataan **pertumbuhan ekonomi** Sumatera Utara sebagaimana terlihat pada gambar di bawah, tercatat bahwa pertumbuhan tertinggi berada pada periode 2010-2014 sebesar 6,16 persen dan rerataan selama periode 2005-2023 yang dihitung sampai dengan tahun 2023 tercatat sebesar 5,15 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,01 persen, hampir menyamai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen. Ekonomi sudah mengalami pemulihan yang berarti meskipun belum normal seperti sebelum pandemi covid19 karena pada tahun 2020, perekonomian terpuruk hingga berkontraksi sebesar 1,07 persen, nasional berkontraksi sebesar 2,03 persen.

Gambar 2. 8 Rerataan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Gambar 2. 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023 (persen)

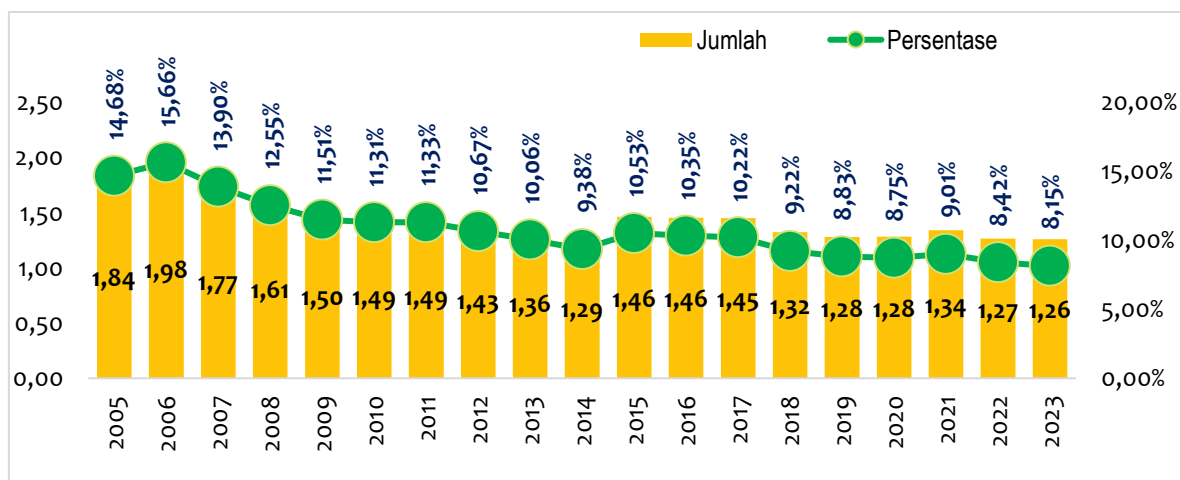


Sumber: Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2023, BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2023 ini mencapai 5,34 persen oleh Kabupaten Deli Serdang dan terendah oleh Kabupaten Nias Selatan yaitu 3,65 persen dan seluruh kabupaten/kota telah mengalami pertumbuhan positif setelah pandemi covid-19. Berbeda dengan tahun 2020, pertumbuhan di 19 kabupaten kota mengalami kontraksi, yaitu kota Medan sebagai wilayah yang mengalami kontraksi terdalam sebesar 1,98 persen. Kabupaten/kota terdekat pun sebagai penyanggah ibukota Sumatera Utara tersebut mengalami kontraksi, seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Karo. Namun pada tahun 2021 pertumbuhannya kembali menjadi positif.

Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara meskipun fluktuatif namun umumnya terus menurun, pada tahun 2005 tercatat sebesar 14,68 persen, namun pada tahun 2023 tercatat pada angka 8,15 persen atau dapat disebut dalam 2 (dua) dekade bahwa perkembangan angka kemiskinan Sumatera Utara berhasil ditekan sebesar 6,53 persen. Penurunan angka kemiskinan sebesar itu berarti jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari 1.840,20 ribu jiwa pada tahun 2005 menjadi sebanyak 1.262,09 ribu jiwa pada tahun 2023, atau berkurang sebanyak 578,11 ribu jiwa. Pada periode 2014-2018 dan Periode 2019-2023, terjadi fluktuasi penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Tercatat ada dua (2) fase naik turun yang terjadi, fase pertama dimulai dari 2014 (9,38%) yang meningkat di tahun 2015 (10,53%), lalu turun hingga ke level 8,75 persen pada tahun 2020. Fase kedua terjadi peningkatan pada tahun 2021 (9,01%) dan perlahan turun hingga mencapai angka 8,15 persen pada tahun 2023. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2015 hingga 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Sumatera Utara, Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005-2023

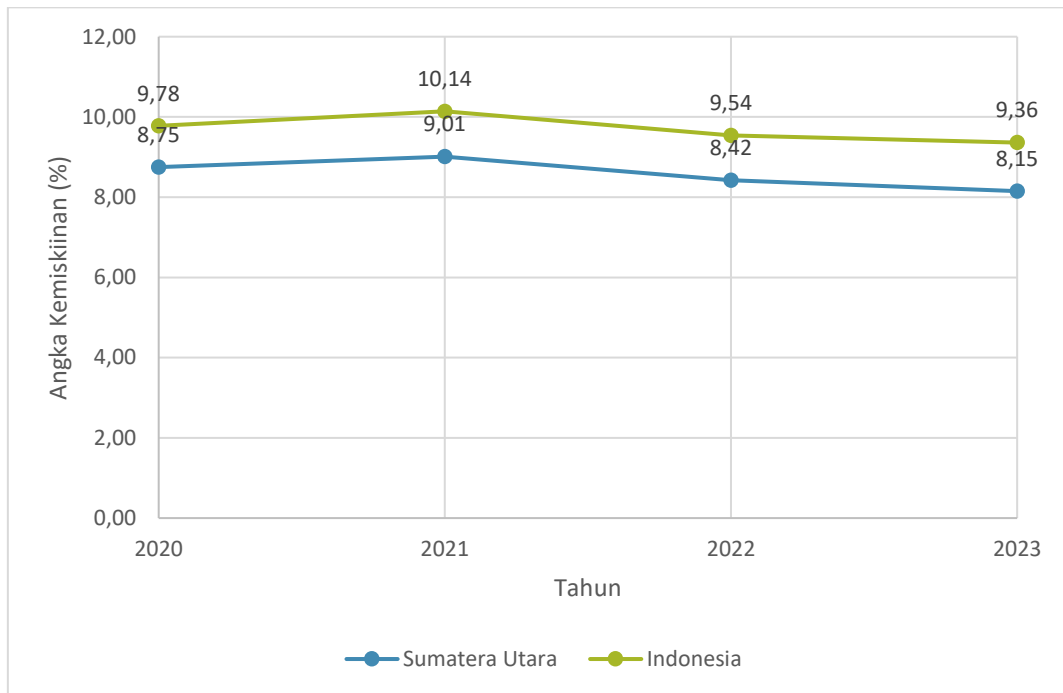


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2005 –2023

Meskipun angka kemiskinan Sumatera Utara cukup tinggi di atas 5 persen, apalagi dengan jumlah penduduk yang cukup besar secara nasional, namun angka kemiskinan tersebut masih berada di bawah angka kemiskinan nasional sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah. Capaian ini perlu ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

masyarakat Sumatera Utara hingga mencapai angka kemiskinan di bawah 5 persen atau bahkan menuju 0 persen.

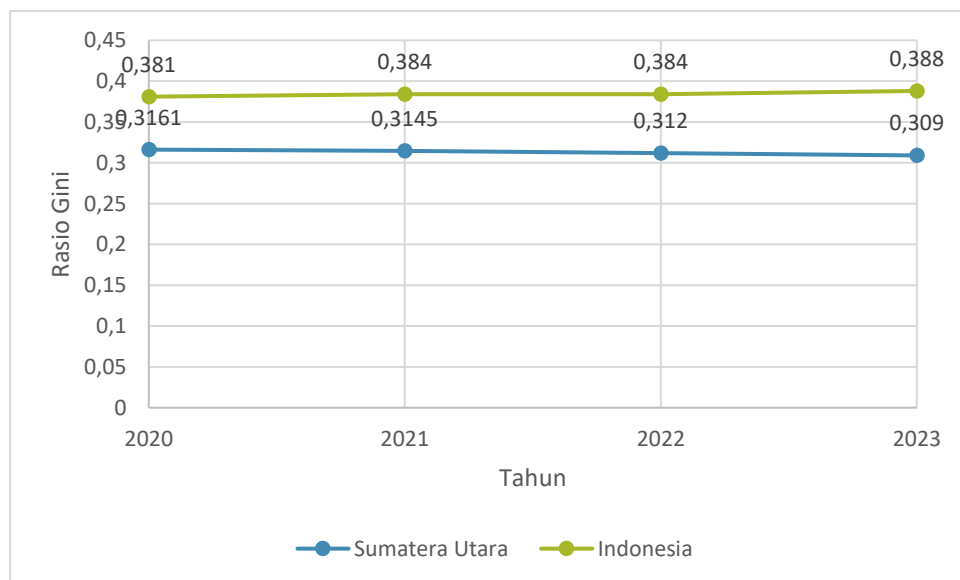
Gambar 2. 11 Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Rasio Gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Nilai rasio gini berkisar antara 0-1 poin. Semakin tinggi nilai rasio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Tahun 2005, rasio gini Sumatera Utara sebesar 0,337 poin hingga Tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,309 poin atau mengecil sebesar 0,028 dengan rata-rata ketimpangan sebesar 0,318 poin. Kondisi ini lebih baik dibanding capaian nasional dengan ketimpangan yang semakin tinggi mencapai 0,033 poin dari tahun 2005 terhadap tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

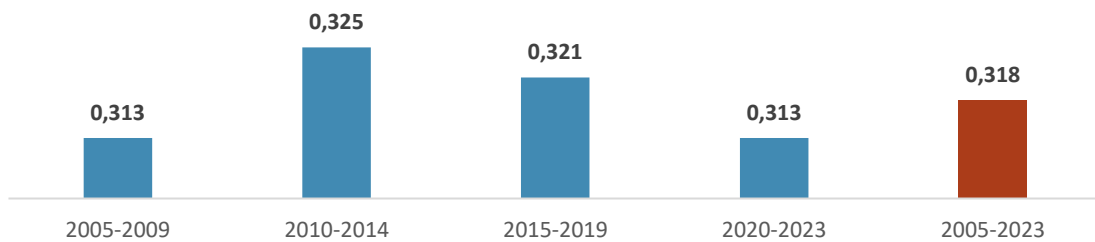
Gambar 2. 12 Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Rata-rata Tingkat ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2005-2023 berada pada angka 0,318 poin. Dengan angka rata-rata 0,318 poin selama hampir 2 dekade (yang ditampilkan dalam gambar di bawah) dapat diasumsikan bahwa Sumatera Utara masuk pada kondisi *Middle Income Trap* yang mana daerah yang tingkat pendapatannya tergolong menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi daerah yang lebih maju.

Gambar 2. 13 Rerataan (Geomean) Indeks Ketimpangan Pendapatan/ Rasio Gini (Indeks) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini salah satunya disebabkan karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada tahun 2020 TPT di Sumatera Utara meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak lapangan pekerjaan tutup. Apabila dibandingkan dengan angka nasional, TPT di Sumatera Utara cenderung selalu lebih tinggi. Jika dilihat dari status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja di sektor formal selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal. Selama kurun waktu 2005-2023 persentase pekerja formal di Sumatera Utara selalu berada di antara 30-45 persen. Pada umumnya penduduk yang bekerja di sektor formal memiliki upah yang lebih stabil dibanding penduduk yang bekerja di sektor informal. Sehingga selain dari TPT yang rendah, salah satu keberhasilan di sektor ketenagakerjaan adalah tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor formal.

Tabel 2. 5 TPT dan Status Pekerjaan Formal Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005–2023

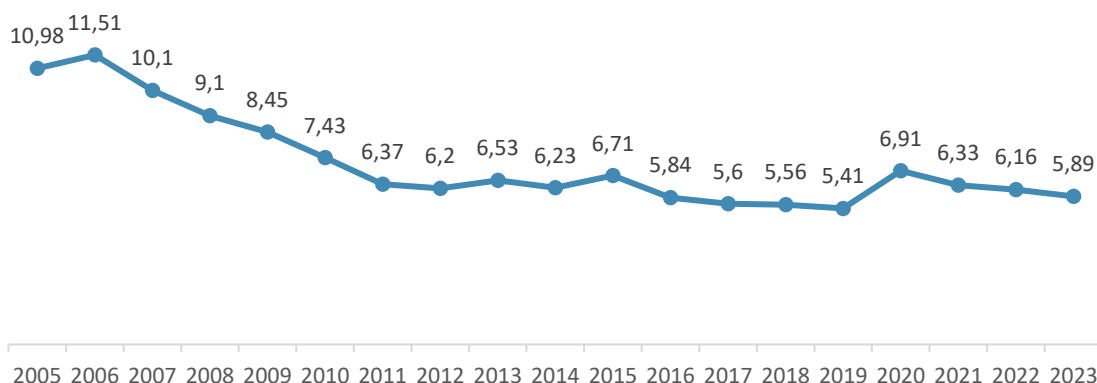
Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Status Pekerjaan Formal	
	Sumut	Nasional	Sumut	Nasional
2005	11,98	11,24	NA	30,73
2006	11,51	10,28	35,00	31,08
2007	10,10	9,11	34,71	30,95
2008	9,10	8,39	31,18	30,42
2009	8,45	7,87	30,92	30,65
2010	7,43	7,14	31,48	33,07
2011	8,18	7,48	38,50	37,76
2012	6,28	6,13	40,10	39,84
2013	6,45	6,17	39,58	39,90
2014	6,23	5,94	42,50	40,62
2015	6,71	6,18	39,86	42,25
2016	5,84	5,61	40,02	42,40
2017	5,60	5,50	42,00	42,97

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Status Pekerjaan Formal	
	Sumut	Nasional	Sumut	Nasional
2018	5,55	5,30	43,43	43,02
2019	5,39	5,23	45,00	44,12
2020	6,91	7,07	40,38	39,53
2021	6,33	6,49	40,67	40,55
2022	6,16	5,86	40,93	40,69
2023	5,89	5,32	NA	NA

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, persentase Angka Pengangguran di Sumatera Utara sejak tahun 2005 hingga 2023 terus mengalami penurunan, dari 10,98 persen yang tercatat di tahun 2005, terus menurun hingga pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,89 persen, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

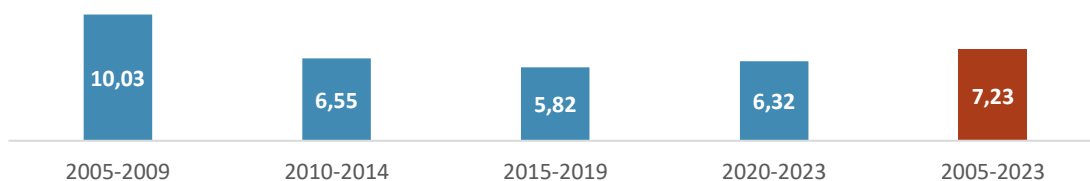
Gambar 2. 14 Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Kurun waktu 2005-2023 dalam masa periode RPJPD tahun 2005-2025 angka pengangguran Sumatera Utara berfluktuasi, tercatat menurun terus sejak 2005 hingga 2019, namun kembali naik sejak tahun 2020 (masa covid19) sehingga secara rerataan angka pengangguran tercatat sebesar 7,23 persen hingga 2023. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

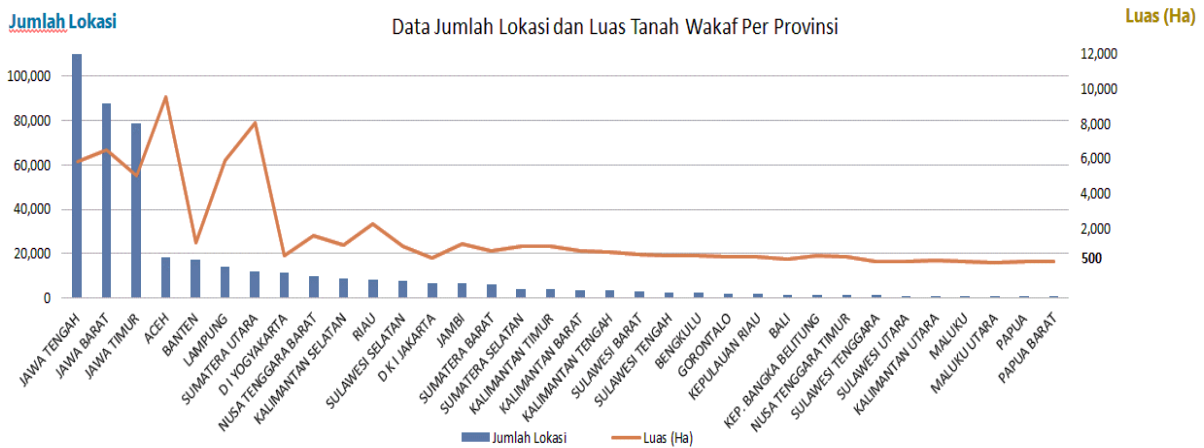
Gambar 2. 15 Rerataan Angka Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Dalam rangka menyeimbangkan PDRB beserta pertumbuhannya dan angka kemiskinan beserta penganggurannya, Sumatera Utara memiliki potensi aset tanah wakaf yang cukup besar, dengan luas tanah wakaf hampir 8.000 ha sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut. Lokasi dan luas tanah wakaf tersebut menjadikan Sumatera Utara dengan potensi pengembangan aset wakaf peringkat ke-7 di Indonesia.

Gambar 2. 16 Potensi Pengembangan Aset Wakaf



Sumber: Data SIWAK Kemenag RI 2023

Demikian juga dengan potensi zakat, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi zakat sebesar Rp. 201,9 miliar. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan potensi zakat terbesar di Pulau Sumatera. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Potensi Zakat Skala Provinsi di Indonesia

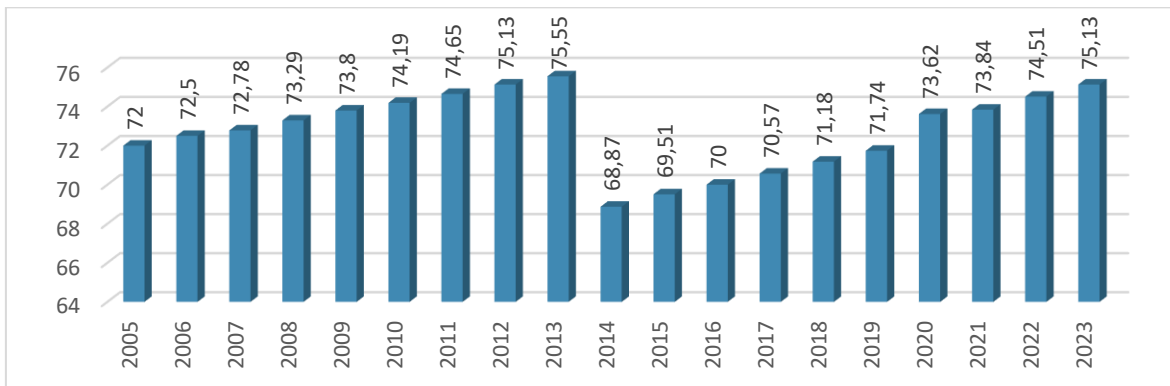
No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)	No.	Provinsi	Potensi zakat (miliar Rp)
1	Aceh	195,4	18	Nusa Tenggara Barat	105,4
2	Sumatera Utara	201,9	19	Nusa Tenggara Timur	19,2
3	Sumatera Barat	149,0	20	Kalimantan Barat	73,7
4	Riau	116,9	21	Kalimantan Selatan	102,0
5	Jambi	91,1	22	Kalimantan Tengah	61,8
6	Sumatera Selatan	160,1	23	Kalimantan Timur	85,3
7	Bengkulu	68,6	24	Kalimantan Utara	20,7
8	Lampung	134,6	25	Sulawesi Selatan	217,6
9	Bangka Belitung	31,3	26	Sulawesi Tenggara	92,9
10	Kepulauan Riau	33,6	27	Sulawesi Tengah	79,1
11	Banten	105,0	28	Sulawesi Barat	33,7
12	DKI Jakarta	302,9	29	Sulawesi Utara	29,6
13	Jawa Barat	535,4	30	Gorontalo	37,9
14	Jawa Tengah	505,4	31	Maluku	42,2
15	DI Yogyakarta	81,9	32	Maluku Utara	38,3
16	Jawa Timur	547,4	33	Papua Barat	18,5
17	Bali	27,5	34	Papua	27,0
Jumlah					4.372,9

Sumber : Baznas 2022

Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara telah mengacu pada konsep Pembangunan Manusia melalui pengukuran keberhasilan pembangunan dengan menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** sebagai salah satu indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada kurun waktu 2005-2013 perhitungan rata-rata IPM menggunakan metode lama, sedangkan pada periode 2014-

2023 menggunakan metode baru dikarenakan terjadi perubahan pada indikator perhitungan.

Gambar 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2023



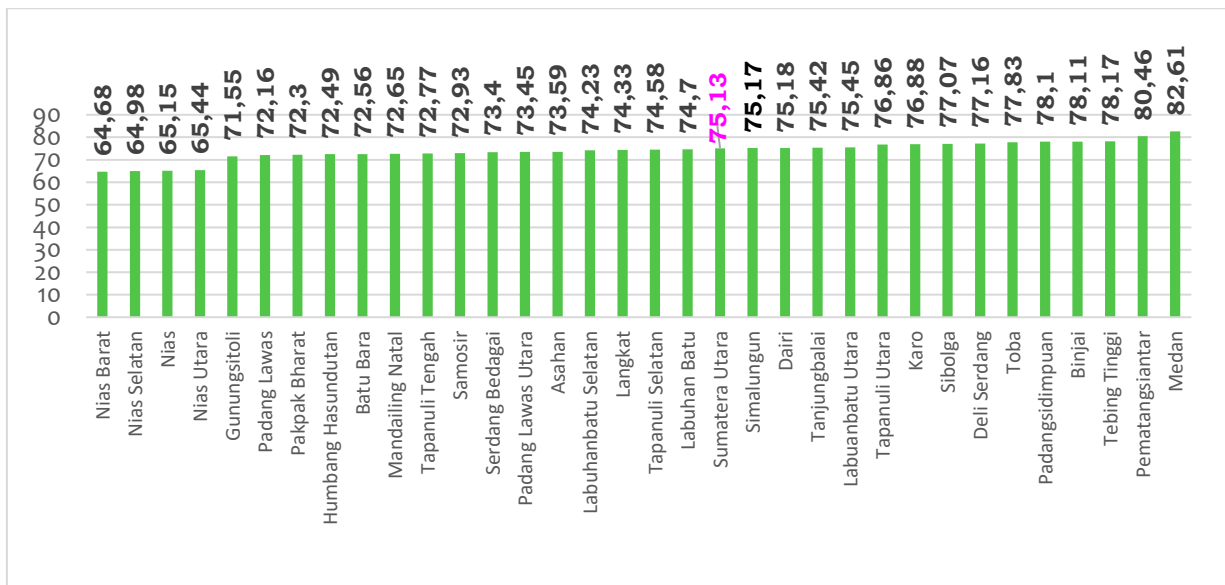
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, secara umum terlihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2005 IPM tercatat pada angka 72,00 poin dan pada tahun 2023 tercatat pada angka 75,13. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari IPM nasional pada tahun 2023 sebesar 74,39. Tahun 2014 terlihat penurunan drastis, namun hal tersebut terjadi karena adanya pengubahan metode penghitungan variabel komposit IPM yang merubah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita dan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selanjutnya terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 hal ini disebabkan oleh sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Peningkatan IPM Sumatera Utara 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,31 menjadi 13,48 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,71 tahun menjadi 9,82 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret dan Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 201 ribu rupiah (1,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Jika dilihat dari data pertumbuhan, IPM Sumut cenderung membaik, hal ini tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan IPM 33 kabupaten/kota yang semakin meningkat juga, yang mana setiap peningkatan dan penurunan tingkat IPM kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2. 18 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023



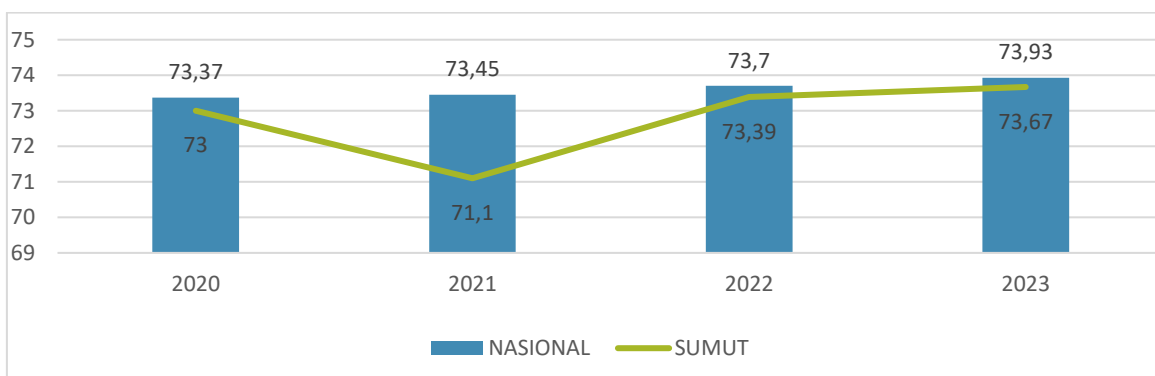
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Pada Tahun 2023 kondisi IPM semua kota otonom di Provinsi Sumatera Utara terkecuali Kota Gunungsitoli berada di angka lebih dari IPM Sumatera Utara (75,13). Kabupaten yang telah mencapai IPM di atas IPM Sumatera Utara adalah Simalungun, Dairi, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Karo, dan Deli Serdang.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Utara meningkat sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,67 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun). Meningkatnya Usia Harapan Hidup menyebabkan meningkatnya penduduk Lanjut Usia (Lansia) sehingga Rasio Ketergantungan semakin meningkat. Selain itu untuk merespons berbagai perubahan yang terjadi perlu penguatan peningkatan layanan Kesehatan Mental. Perbandingan UHH Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2. 19 UHH Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2023



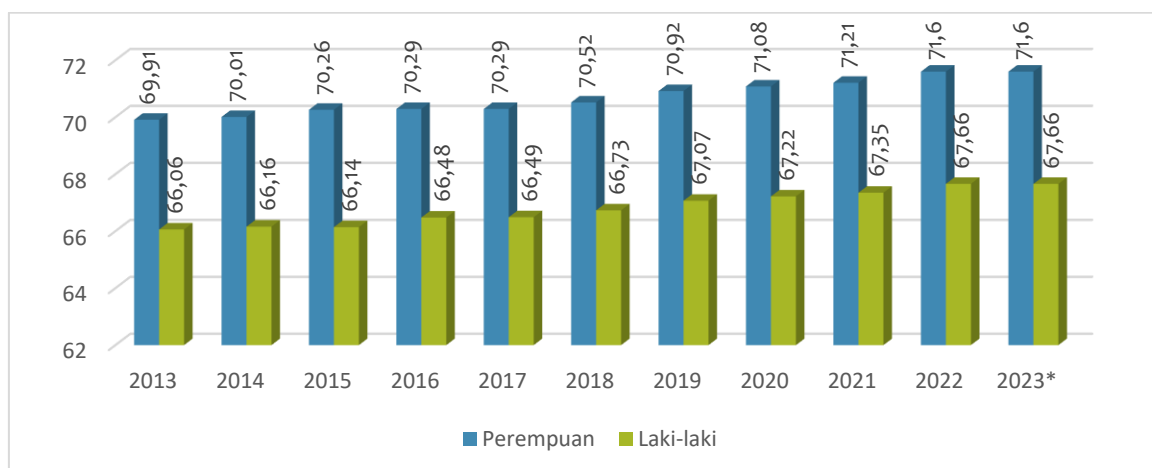
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF))

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,67 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Capaian Sumatera Utara lebih baik dari Nasional.

Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir, UHH penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan jenis kelamin, UHH perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki. Tahun 2022, UHH perempuan adalah 71,60 tahun, sedangkan laki-laki adalah 67,66 tahun. Hal ini berarti perempuan hidup 3,94 tahun lebih lama dibandingkan laki-laki.

Usia harapan hidup perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami peningkatan yang lebih baik. Baik pada perempuan maupun laki-laki sama-sama mengalami usia harapan hidup yang lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2013 UHH laki-laki adalah 66,06 tahun, kemudian pada 2022 UHH laki-laki meningkat menjadi 67,66 tahun atau lebih lama 1,60 tahun dibandingkan bayi laki-laki yang terlahir pada 2013. Demikian juga dengan UHH perempuan yang terlahir pada 2022 mempunyai harapan hidup sampai usia 71,60 atau lebih lama 1,69 tahun pada bayi perempuan yang lahir di tahun 2013. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Lebih lamanya harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah faktor sosial yang mengindikasikan perilaku hidup perempuan dinilai lebih sehat dibandingkan laki-laki. Selain itu, komponen lain yang turut mempengaruhi usia perempuan lebih lama dari laki-laki adalah faktor genetik atau *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan kromosom X yang dimiliki perempuan yang tahan terhadap mutasi genetik dan mendukung sistem imun pada tubuh. Informasi ini menegaskan bahwa usia harapan hidup lebih lama pada perempuan tidak dapat sepenuhnya merefleksikan perhatian dan kepedulian sosial budaya pada kesehatan perempuan, karena kemampuan bertahan hidup yang lebih baik dari laki-laki juga dijumpai pada perempuan yang tinggal dengan perbedaan perlakuan sosial budaya yang tidak menguntungkan perempuan.

Gambar 2. 20 UHH Menurut Jenis Kelamin



*) Data Sementara. Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Peningkatan Usia harapan Hidup dibarengi dengan peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang mana Sumber Daya Manusia Kesehatan menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar Kesehatan, terdapat 9 jenis tenaga Kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten/kota termasuk di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dari 617 Puskesmas, baru 222 Puskesmas yang memiliki lengkap 9 jenis tenaga Kesehatan.

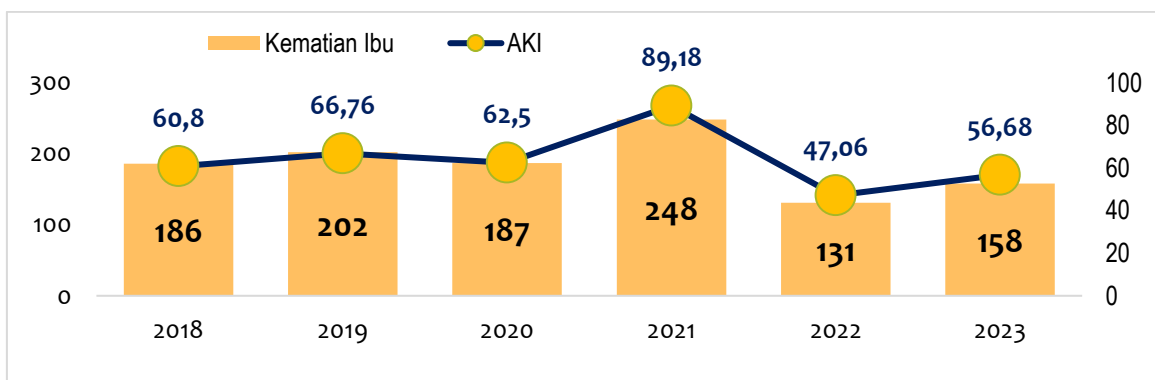
Tabel 2. 7 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumatera Utara

2.076	671	8.681	19.216	2.016	549	637	795	1.190
Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018–2023 cenderung berfluktuasi. Begitu juga halnya dengan jumlah kematian ibu. Penyebab utama kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara antara lain ibu hamil dan melahirkan banyak yang terpapar COVID-19, ibu hamil ragu memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap Angka Kematian Ibu menjadi 47.06 per 100.000 Kelahiran Hidup, Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, namun pada tahun 2023 terjadi lagi peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara penyebab tertinggi kematian Ibu di Sumatera Utara Tahun 2023 adalah hipertensi, pendarahan, komplikasi non-obstetric, infeksi, kehamilan dengan komplikasi abortus dan lain-lain, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

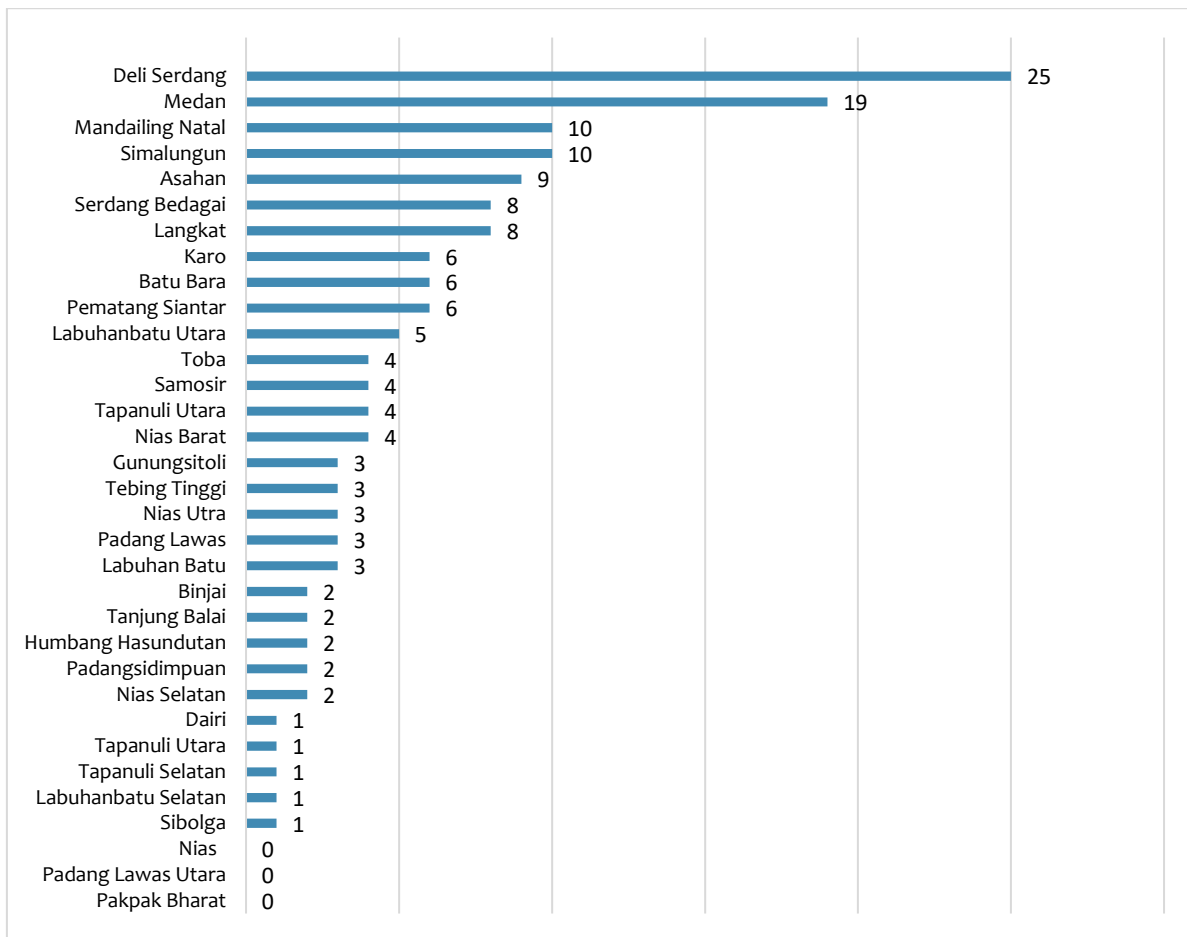
Gambar 2. 21 Tren Jumlah Kematian Ibu dan AKI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – Oktober 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

Selain itu, jika dilihat dari Kabupaten/Kota, jumlah kematian ibu tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 25 jiwa, kota Medan sebanyak 19 jiwa, Mandailing Natal dan Simalungun masing-masing 10 jiwa. Penyebab tingginya kematian ibu di daerah tersebut salah satunya minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya serta diakibatkan oleh faktor gaya hidup. Jumlah kematian Ibu kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut.

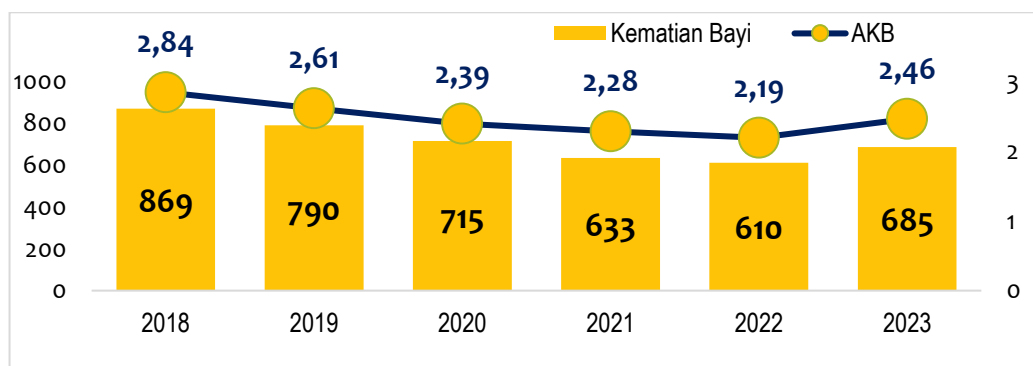
Gambar 2. 22 Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023

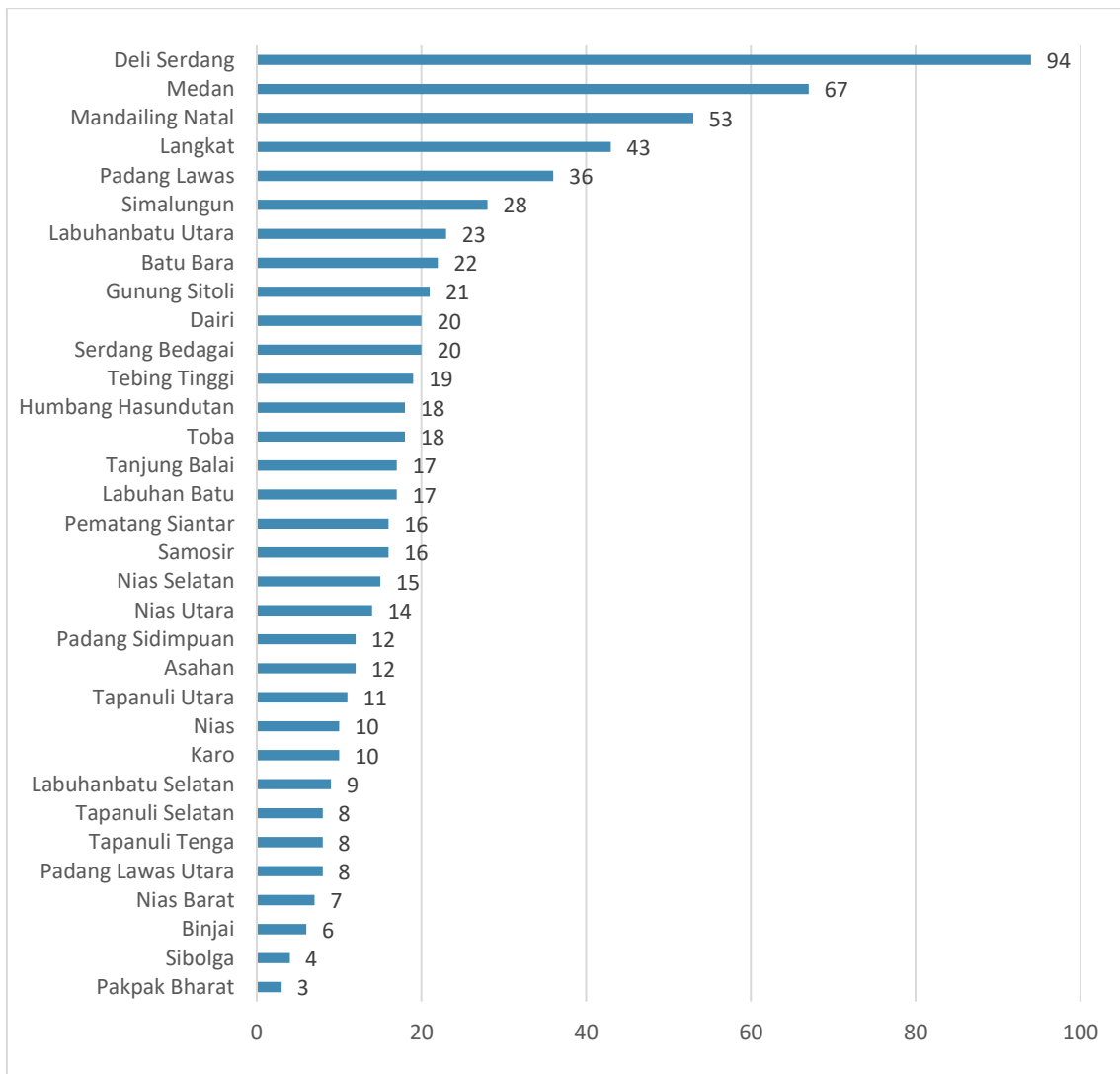
Selanjutnya jika dilihat dari **Angka Kematian Bayi**, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terjadi penurunan baik jumlah maupun angka kematian per 1000 Kelahiran Hidup. Dari 2.84 atau sebanyak 869 pada tahun 2018 menjadi 6.19 atau sebanyak 910 jiwa pada tahun 2022. Namun tahun 2023 terjadi peningkatan Angka Kematian menjadi 2.46 atau sebanyak 685 jiwa. Kematian bayi tertinggi disebabkan oleh Asfiksia (178 jiwa) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 159 jiwa, Infeksi (31 jiwa) dan lain sebagainya, tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2. 23 Tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – Oktober 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Gambar 2. 24 Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

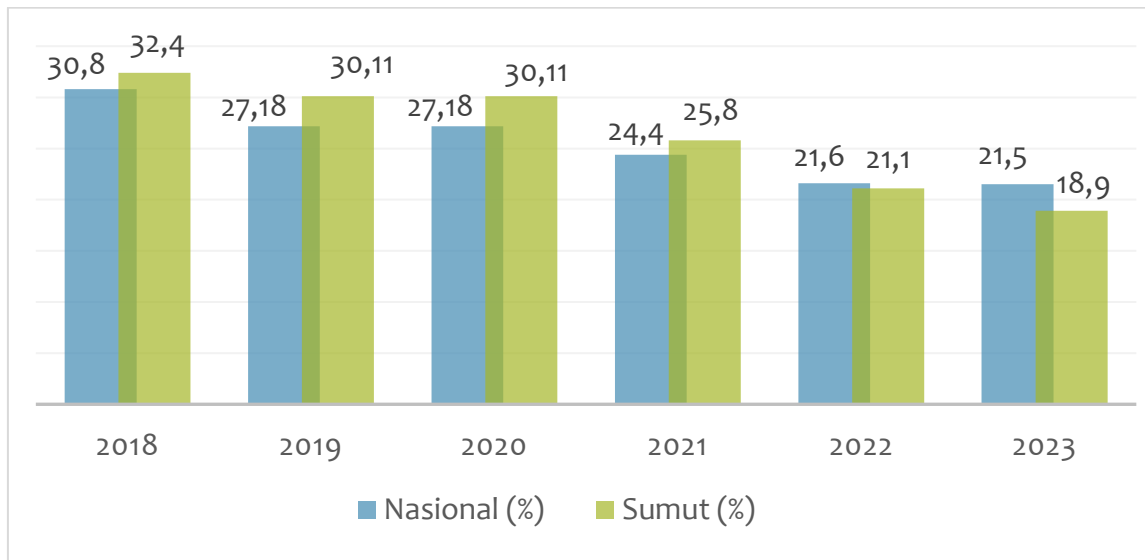
Pada tingkat kabupaten/kota, kematian bayi tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 94 jiwa, disusul Kota Medan sebanyak 67 jiwa, dan Mandailing Natal 53 jiwa. Kontributor penyebab tingginya AKI di kabupaten/kota antara lain adalah akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang optimal, kemampuan deteksi dini pada kehamilan dan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal masih belum optimal. Sehingga perhatian terhadap akses, layanan dan peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya masih tinggi perlu menjadi perhatian.

Kondisi lain yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah permasalahan **Gizi**, Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia begitu juga di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya **Stunting, Wasting, Underweight dan Overweight**. Provinsi Sumatera Utara memiliki kondisi *Wasting* sebesar 7,9 persen, *Underweight* sebesar 13.2 Persen *Overweight* sebesar 3.5 Persen dan *Stunting* 18.9 persen. Salah satu faktor determinan terjadinya masalah gizi pada balita adalah asupan makanan yang tidak adekuat (mencukupi kebutuhan zat gizi yang diperlukan bayi). WHO dan UNICEF merekomendasikan standar pemberian makan bayi dan anak mencakup inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi

usia 0 – 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan meneruskan menyusui sampai anak usia 2 tahun atau lebih.

Perhatian Pemerintah saat ini baik ditinggal Nasional maupun Provinsi Sumatera fokus dalam penanganan *stunting*. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka prevalensi *stunting* Sumut berhasil turun sebanyak 2,2%, atau tercatat sebesar 18,9%, dari sebelumnya 21,1% pada tahun 2022. Capaian ini juga lebih baik daripada Prevalensi *Stunting* Nasional yang tercatat sebesar 21,5 persen pada Tahun 2023.

Gambar 2. 25 Kondisi Stunting Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Upaya penurunan *stunting* tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, sehingga harus ditangani melalui aksi multi-sektor. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jika dilihat perkembangan Kabupaten/Kota Terjadi fluktuasi penurunan *stunting*, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Prevalensi *Stunting* pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 di antaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara dari 7.3 (2022) meningkat 9.6 (2023), Kabupaten Simalungun dari 17.4 (2022) meningkat 17.7 (2023), Kota Gunungsitoli dari 17.7 (2022) meningkat 18.9 (2023), Kota Binjai dari 18.7 (2022) meningkat 19.4 (2023), Kabupaten Nias Utara dari 11.9 (2022) meningkat 20.3 (2023), Kabupaten Toba dari 24.8 (2022) meningkat 28.0 (2023), Nias Selatan dari 27.2 (2022) meningkat 31.8 (2023), Kabupaten Dairi dari 28.6 (2022) meningkat 32.6 (2023) dan Kabupaten Deli Serdang dari 13.9 (2022) meningkat 33.8 (2023). Peningkatan yang paling signifikan terdapat di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

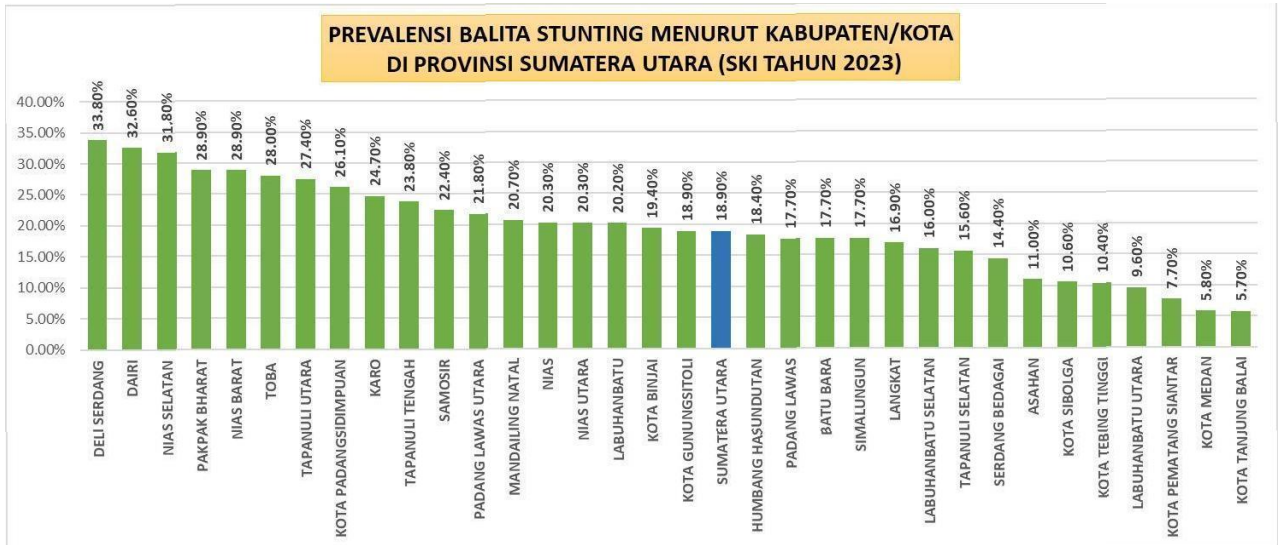
Tabel 2. 8 Tren Capaian Stunting Kabupaten/kota 2022 dan 2023

CAPAIAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 - 2023				
NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	Keterangan
1	Kota Tanjung Balai	26.9	5.7	↓
2	Kota Medan	15.4	5.8	↓
3	Kota Pematang Siantar	14.3	7.7	↓
4	Labuhan Batu Utara	7.3	9.6	↑
5	Kota Tebing Tinggi	19.6	10.4	↓
6	Kota Sibolga	14.5	10.6	↓
7	Asahan	15.3	11.0	↓
8	Serdang Bedagai	21.1	14.4	↓
9	Tapanuli Selatan	39.4	15.6	↓
10	Labuhan Batu Selatan	26.4	16.0	↓
11	Langkat	18.6	16.9	↓
12	Simalungun	17.4	17.7	↑
13	Batu Bara	21.7	17.7	↓
14	Padang Lawas	35.8	17.7	↓
15	Humbang Hasundutan	29.6	18.4	↓
16	Kota Gunung Sitoli	17.7	18.9	↑
17	Kota Binjai	18.7	19.4	↑
18	Labuhan Batu	23.9	20.2	↓
19	Nias	25.3	20.3	↓
20	Nias Utara	11.9	20.3	↑
21	Mandailing Natal	34.2	20.7	↓
22	Padang Lawas Utara	29.2	21.8	↓
23	Samosir	26.3	22.4	↓
24	Tapanuli Tengah	30.5	23.8	↓
25	Karo	24.9	24.7	↓
26	Kota Padangsidampuan	28.8	26.1	↓
27	Tapanuli Utara	27.4	27.4	▬
28	Toba	24.8	28.0	↑
29	Pakpak Bharat	30.8	28.9	↓
30	Nias Barat	29.4	28.9	↓
31	Nias Selatan	27.2	31.8	↑
32	Dairi	28.6	32.6	↑
33	DeliSerdang	13.9	33.8	↑
	SUMATERA UTARA	21.1	18.9	↓

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Pada tahun 2023 terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan Prevalensi Tertinggi yaitu Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Nias Barat Toba, Tapanuli Utara, Karo, Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2. 26 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provsu 2023

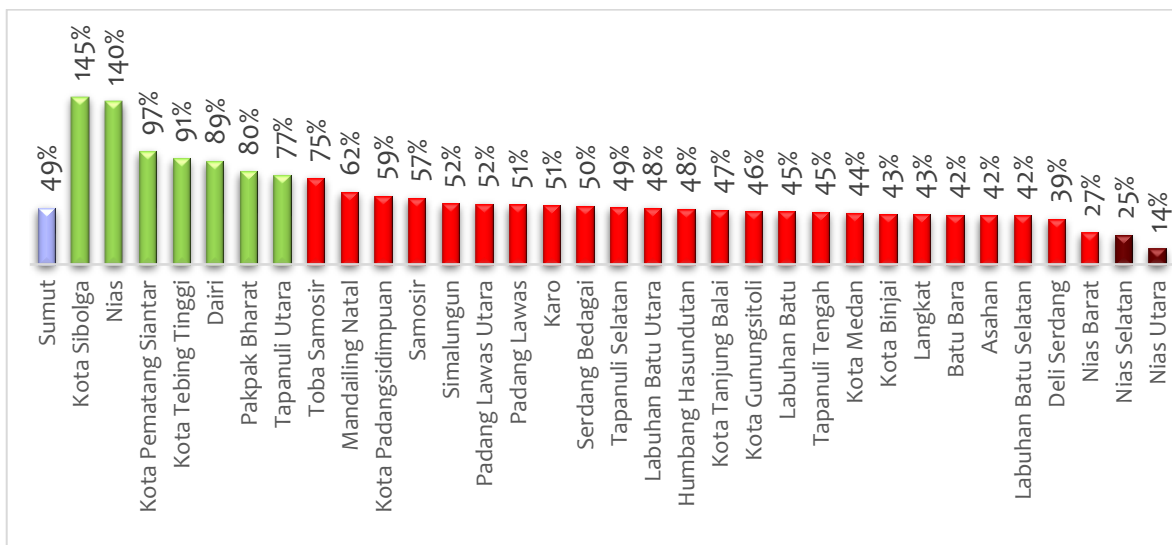
Meningkatnya perilaku Hidup Tidak Sehat menyebabkan meningkatnya beban **penyakit menular dan tidak menular**. Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM). Peningkatan prevalensi PTM antara lain kanker, *stroke*, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4% menjadi 1,8%, prevalensi *stroke* naik dari 7% menjadi 10,9% dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes melitus naik dari 6,9% menjadi 8,5% dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan PTM menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang setiap tahunnya. Kenaikan prevalensi PTM ini berhubungan dengan pola hidup, antara lain merokok, kurang aktivitas fisik serta kurang konsumsi buah dan sayur. Tren ini juga diikuti dengan peningkatan penduduk yang cenderung memiliki berat badan lebih (*overweight*) atau bahkan obesitas dari tahun ke tahun.

Selain itu penyakit menular di Provinsi Sumatera Utara juga masih menjadi tantangan di antaranya Terdapat peningkatan jumlah kasus baru ODHIV di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 dikarenakan semakin banyak layanan yang mampu mendiagnosa kasus HIV. Jumlah Kasus Baru ODHIV yang Dilaporkan di Provinsi Sumatera Utara hingga September 2023 sebanyak 2.678 Kasus, di mana Usia 25-49 tahun adalah usia dengan Jumlah Kasus Baru ODHIV terbanyak (1.882 kasus) dan usia 20-24 tahun sebanyak 429 Kasus, sementara Kabupaten/Kota dengan Kasus HIV terbanyak ada di Kota Medan (1.408 Kasus), Deli Serdang (243 kasus) dan Asahan (115 Kasus) dan laki laki lebih banyak menderita kasus HIV (2216) dibandingkan Perempuan (462). Penyakit menular lainnya yang masih menjadi perhatian di Provinsi Sumatera Utara adalah Malaria, di mana angka kesakitan karena malaria masih tinggi yang disebabkan oleh mobilisasi penduduk yang sangat tinggi ke wilayah endemik malaria. Kabupaten Kota tertinggi Annual Parasite Incidence (API) Malaria pada Tahun 2023 adalah Asahan (1.28), Serdang Bedagai 1.17 dan Labuhan batu sebanyak 1.03. di Provinsi Sumatera Utara terdapat 23 kabupaten/kota yang telah eliminasi Malaria, Masih terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat eliminasi Malaria dikarenakan masih adanya kasus *indigenous* di wilayahnya di antaranya Nias, Nias Barat, Nias Utara,

Nias Selatan, Gunungsitoli, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Langkat.

Selain kasus kasus di atas **Tuberkulosis** juga menjadi ancaman, dimana saat ini Indonesia Peringkat 2 setelah India. Estimasi Kasus 1.060.000 kasus 9.1% Kasus dunia Insiden *rate* TBC mencapai 354/100.000 penduduk. Sementara Provinsi Sumatera Utara Peringkat 3 setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah Estimasi Kasus 74.434 Kasus 7.1% Kasus Indonesia Target Insiden *rate* TBC mencapai 65/100.000 penduduk pada 2028. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (*Treatment Coverage*) Provinsi Sumatera Utara Januari-Oktober Tahun 2023 dilaporkan sebesar 49%. (38.616 Kasus) sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

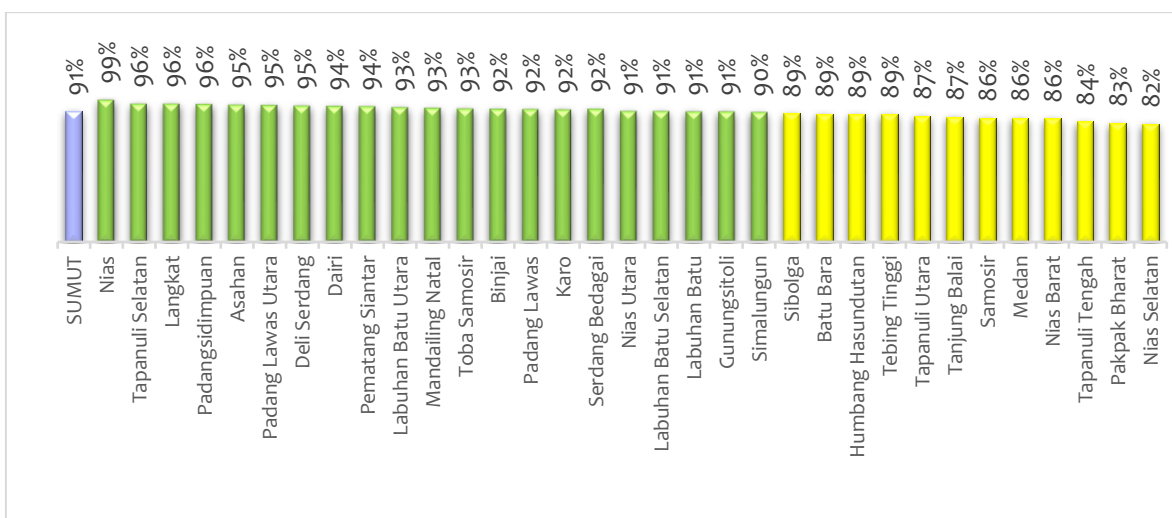
Gambar 2. 27 Kasus Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara Januari-Oktober 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Selain itu angka **Angka keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) TBC** Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara diketahui sebesar 91%. Meski angka keberhasilan pengobatan TBC di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi, namun perlu meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC.

Gambar 2. 28 Keberhasilan Pengobatan Oktober 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam penemuan Kasus Tuberkulosis adalah Cakupan penemuan kasus masih rendah dan belum merata, Masih ada stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB, Efek samping obat

membuat pasien menghentikan pengobatan secara sepihak, atau tidak melanjutkan pengobatan setelah merasa baikan. Kasus TB yang belum terjangkau, atau sudah diobati tetapi tidak dilaporkan, Jarak yang cukup jauh antara rumah penderita TB dengan faskes serta tingginya *turnover* petugas yang sudah dilatih kolaborasi TB-HIV, TB DM, yang belum optimal, dan sebagainya.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program **Jaminan Kesehatan Nasional** mengamanatkan kepada gubernur yang salah satunya adalah Memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Per 1 September 2023 Peserta JKN-KIS Nasional sebanyak 262.865.343 jiwa atau sebesar 96.64 persen. Sementara di Provinsi Sumatera Utara terdapat penyediaan Premi PBI Jaminan Kesehatan (APBN) dan PBI/PBU (Peserta Bukan Penerima Upah) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyediakan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non Register adalah merupakan pelayanan perawatan Rumah Sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit dan belum pernah memiliki jaminan kesehatan dari BPJS, dan masyarakat yang terdampak penonaktifan PBPB Provinsi Sumatera Utara termasuk pelayanan Kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.

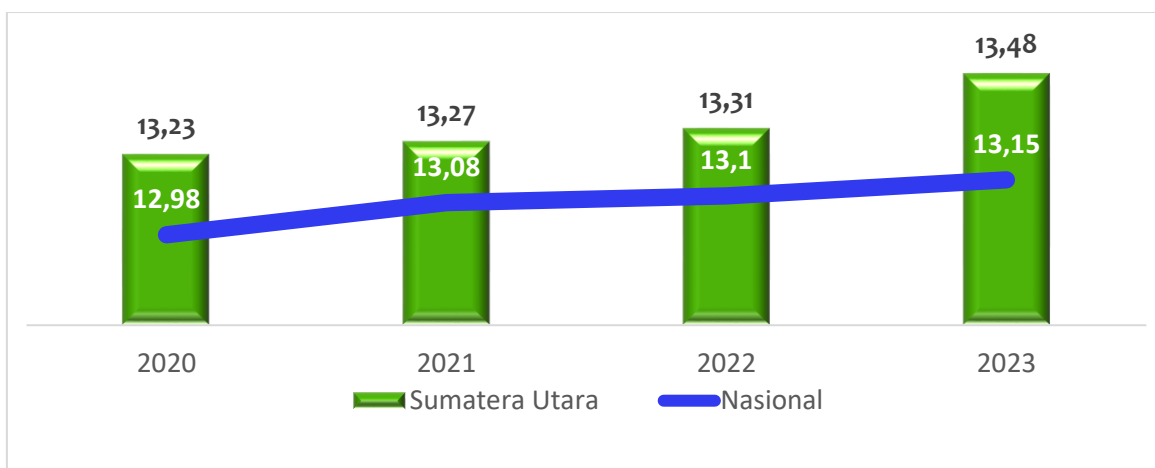
Pada tahun 2023 Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi sebanyak 194.927 jiwa, Penyediaan Kontribusi Bagi Peserta PBI JKN 4.686.985 jiwa serta Penyediaan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non Register sebanyak 5.440 paket. Pemerintah telah berupaya untuk membentuk suatu sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat. WHO telah menyepakati tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yaitu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Pada Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara Peserta JKN KIS sebanyak 13.739.412 jiwa di mana 15 Kabupaten/Kota sudah UHC yaitu Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pakpak Bharat, Samosir, Tebing Tinggi, Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Batu Bara dan Mandailing Natal.

Pembangunan manusia tidak bisa dilepas dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Salah satu pengukuran hasil pembangunan manusia untuk daya saing SDM adalah hasil pembelajaran yang diukur dari Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud Ristek. Hasil **capaian Asesmen Nasional** dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus, (2) Dasar, (3) Cakap, dan (4) Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai

kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Selanjutnya Dalam mengukur hasil pembangunan manusia, elemen pendidikan dilihat berdasarkan dua indikator, yaitu angka **Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**. Harapan Lama Sekolah (HLS)/Expected years of schooling (EYS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Mengetahui HLS penduduk menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang Pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak, maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya.

Gambar 2. 29 Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara

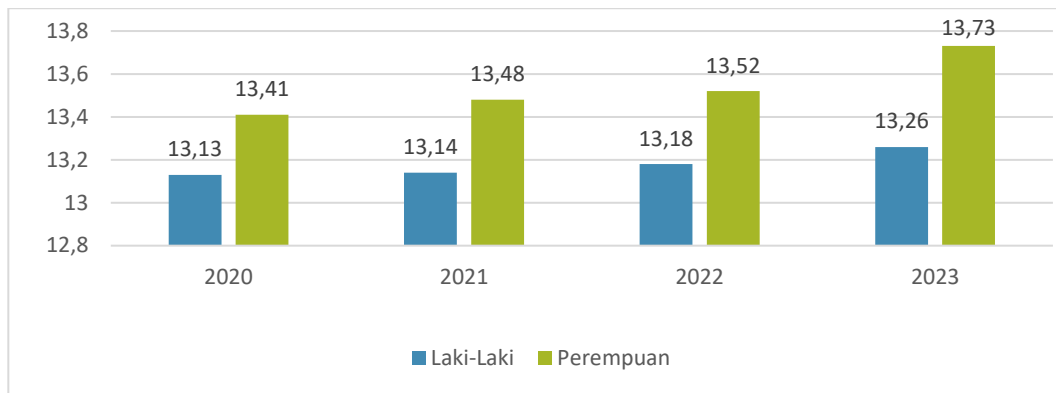


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat HLS terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Utara rata-rata meningkat 0,63 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,17 tahun (1,28 persen) dibandingkan tahun 2022, meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,30 persen).

Sejak 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Utara menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, baik laki-laki maupun perempuan. Selama periode waktu tersebut, HLS perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan justru berpeluang untuk lebih lama mengenyam Pendidikan dibandingkan laki-laki. Pada 2022, perempuan berpeluang untuk bersekolah selama 13,73 tahun, atau lebih lama 0,34 tahun dibanding laki-laki. Perbedaan harapan untuk bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Sebagai contoh, di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya yang memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini disinyalir dapat berkontribusi pada rendahnya harapan untuk sekolah laki-laki. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

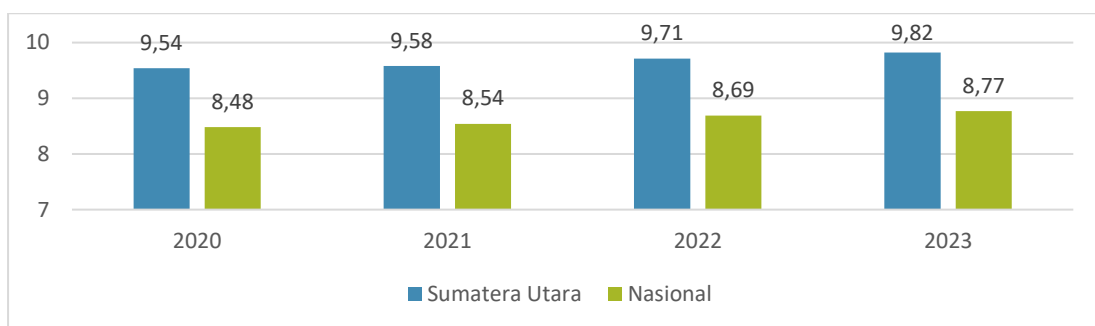
Gambar 2. 30 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years of Schooling (MYS). Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Angka RLS diketahui dengan menghitung jumlah tahun yang sudah ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam mengukur RLS dimulai pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia ini proses pendidikan formal sudah selesai dilalui. Pendidikan dasar (SD) diperhitungkan selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA selama 3 tahun, atau 12 tahun untuk seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak. Penghitungan juga dilakukan pada penduduk yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi sesuai tingkatan diploma, sarjana, magister dan doktoral.

Gambar 2. 31 Harapan Lama Sekolah Sumatera Utara

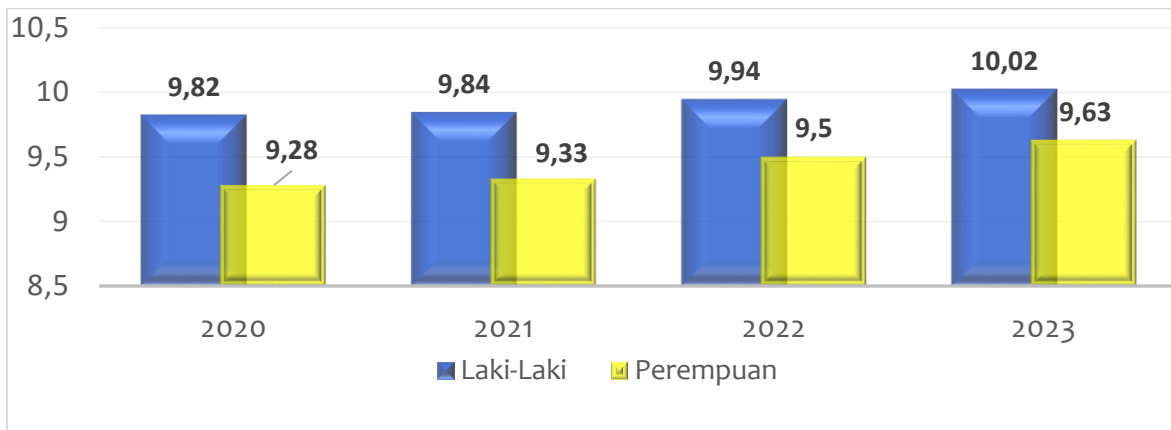


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Rata-Rata Lama Sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, RLS meningkat 0,97 persen per tahun. dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,30 persen).

Jika HLS atau peluang bersekolah menunjukkan perempuan berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki yang terlihat dari kurun waktu tahun 2020 hingga 2023, maka situasi sebaliknya terlihat pada data RLS. Selama periode waktu 2020-2023, capaian rata-rata lama sekolah perempuan ternyata lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, terdapat kesenjangan RLS dalam durasi hampir setengah tahun antara laki-laki dan perempuan atau perempuan lama bersekolahnya lebih cepat selama 0,44 tahun dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 10,02 tahun, sedangkan perempuan menikmati pendidikan lebih cepat yaitu selama 9,63 tahun. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 32 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin

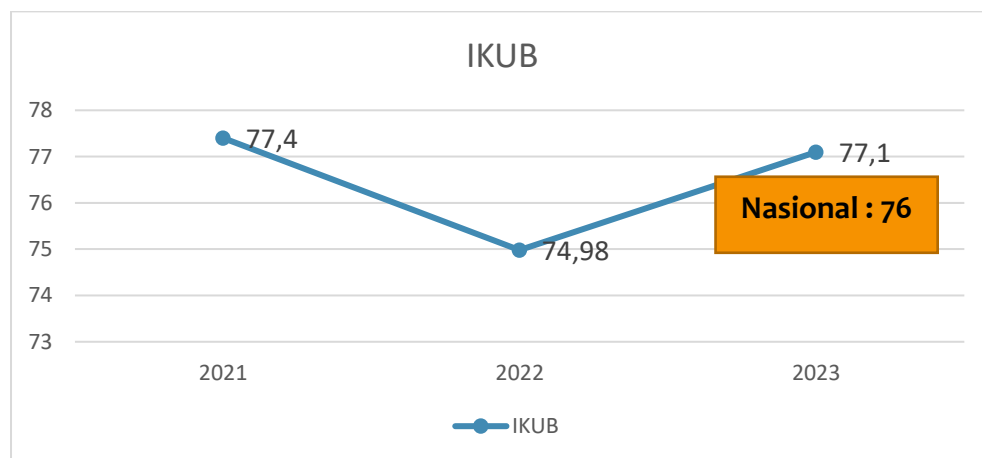


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2023

Meskipun terlihat adanya peningkatan, namun penting diingat bahwa situasi lebih rendahnya RLS perempuan dibandingkan laki-laki tidak sejalan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada perempuan. Terlebih lagi, kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan ini sudah terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Karena itu, penting melakukan upaya melalui kebijakan dan program prioritas guna mendorong perempuan bisa lebih lama berada di bangku sekolah. Berbagai kendala yang berkonsekuensi pada tidak dilanjutkannya pendidikan formal perempuan penting diintervensi. Berinvestasi pada pendidikan berdampak positif pada kapasitas individu dan masyarakat dalam menghadapi resesi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa.

Penguatan Nilai-nilai agama merupakan landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan, di mana Instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama yang diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2021 hingga 2023 fluktuatif. Terjadi penurunan pada tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun 2023, dan pada tahun 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara Lebih bagus dari Nasional).

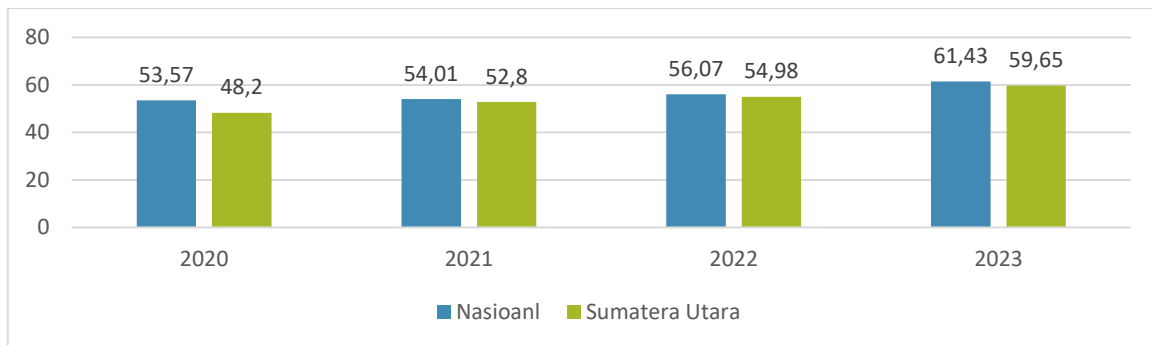
Gambar 2. 33 Indeks Kerukunan Umat Beragama



Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta

pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Nilai **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)** berkisar antar 0-100 dengan kategori nilai >70 (baik/Tangguh), 40-70 (cukup baik/berkembang) dan <40 (kurang baik/rentan), Jika dilihat dari grafik di bawah ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, namun capaiannya masih dalam kategori cukup baik/berkembang, begitu juga dengan nasional belum mencapai 70 persen dan capaian Sumatera Utara masih berada di bawah nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

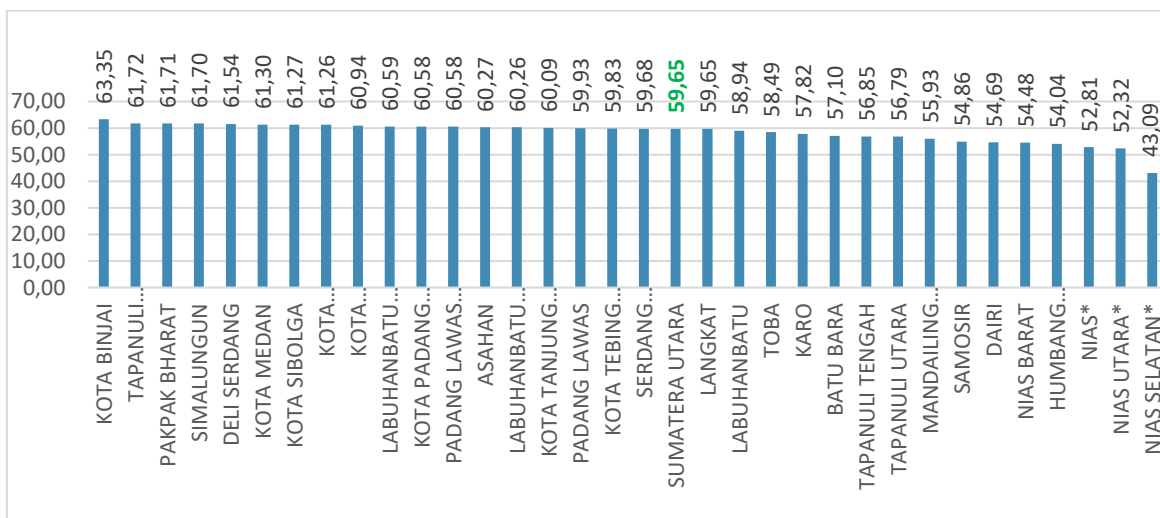
Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara dan Nasional 2020-2023



Capaian yang terus meningkat tidak terlepas dari upaya pemerintah diantaranya menyiapkan kehidupan keluarga melalui bimbingan perkawinan dan pendampingan calon pengantin serta penyediaan konseling keluarga, memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, memberikan pengasuhan tentang tumbuh kembang anak dan memperkuat data keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga.

Jika dilihat dari capaian Kabupaten/Kota, masih terdapat 15 Kabupaten/Kota yang capaiannya masih di bawah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

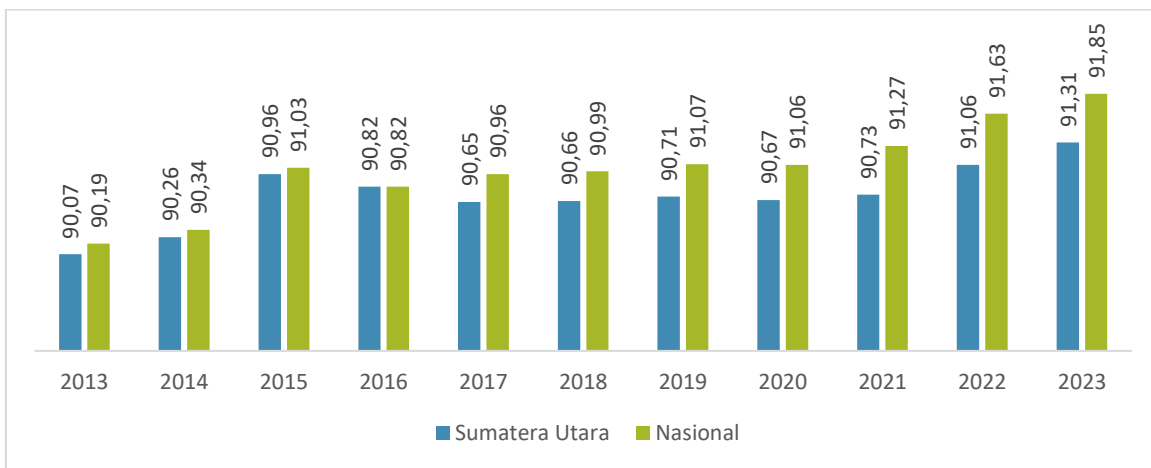
Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara Kabupaten/Kota, 2023



Sumber: BPS Sumut 2023

Selain peran keluarga, pembangunan gender juga menjadi penting untuk peningkatan sosial budaya dimana pada 2023, **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Sumatera Utara telah mencapai angka 91,31 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 0,25 poin dibandingkan 2022. Peningkatan IPG di 2023 ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode 2021-2023. Dibandingkan 2021, IPM perempuan pada 2023 meningkat 0,82 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada 2023 yang meningkat 0,62 poin, namun capaian IPG Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah Nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

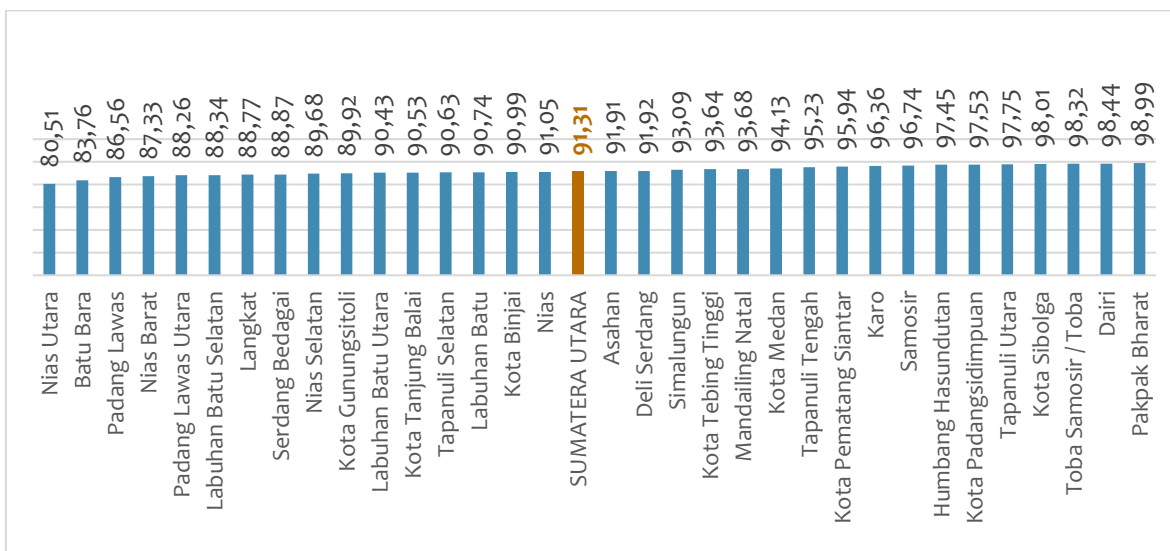
Gambar 2. 36 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: BPS Sumut 2023

jika dilihat dari capaian Kabupaten/Kota, maka masih terdapat 11 Kabupaten kota yang capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibawah provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 37 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2023

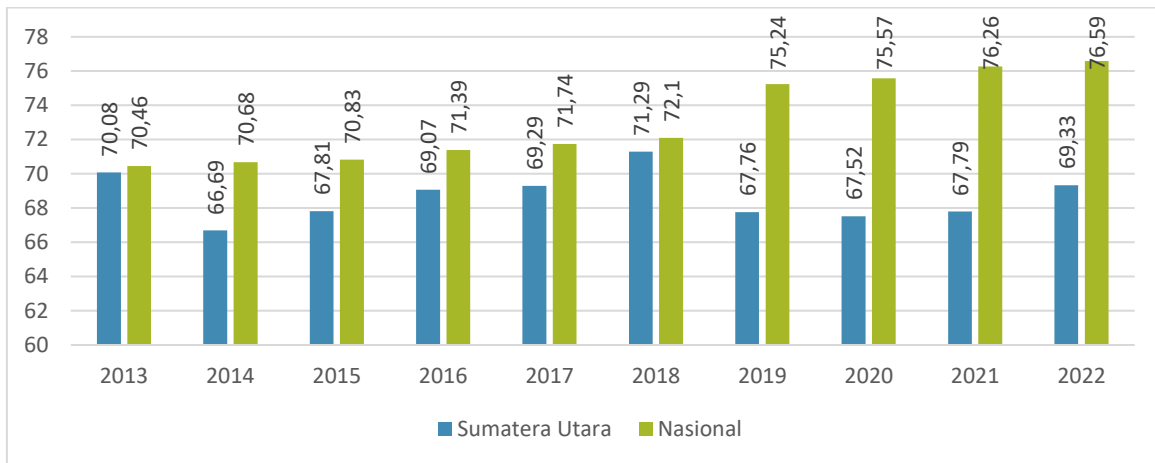


Sumber: BPS Sumut 2023

Keberhasilan Pembangunan Gender juga dilihat dari Pemberdayaan Gender. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** di Sumatera Utara terus meningkat, hingga tahun 2022 IDG mencapai 69,33%, meningkat dari tahun sebelumnya (2021) 67,79%. Peningkatan IDG di Sumatera Utara

mengindikasikan bahwa peran perempuan sudah semakin baik di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Walau terjadi peningkatan namun capaian IDG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

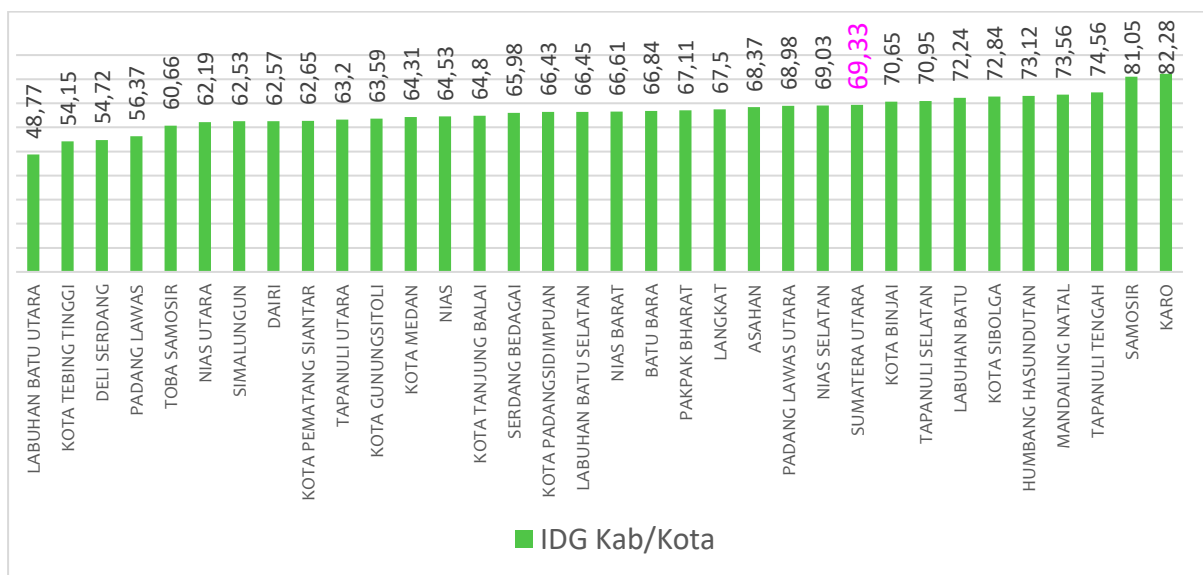
Gambar 2. 38 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumatera Utara dan Nasional



Sumber: BPS Sumut 2022

Jika dilihat dari Kabupaten/Kota, rata-rata capaian Kabupaten/Kota masih berada di bawah capaian Sumatera Utara, hanya 9 Kabupaten/kota yang capaiannya sudah berada di atas Provinsi Sumatera Utara, capaian tertinggi ada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir, capaian Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 39 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Sumut 2023

Selanjutnya pembangunan gender juga dilihat dari ketimpangan. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IKG Sumatera Utara 2023 sebesar 0,425 (turun 0,017 poin) dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,442. Ketimpangan gender di Sumatera Utara selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018 hingga 2023, IKG Sumatera Utara berkurang sebesar 0,04 poin, rata-rata turun 0,008 poin per tahun. Hal ini

mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2021, turun 0,023 poin yang utamanya dipengaruhi oleh membaiknya ketimpangan dimensi kesehatan reproduksi. Proporsi perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan menurun dari 18,30 persen.

Gambar 2. 40 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota, 2018-2023



Sumber: BPS Sumut 2023

Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Ketiga dimensi pembentuk IKG yang secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi secara keseluruhan semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara. Perkembangan indikator penyusun IKG selama 2018–2023 dapat dilihat di Tabel berikut.

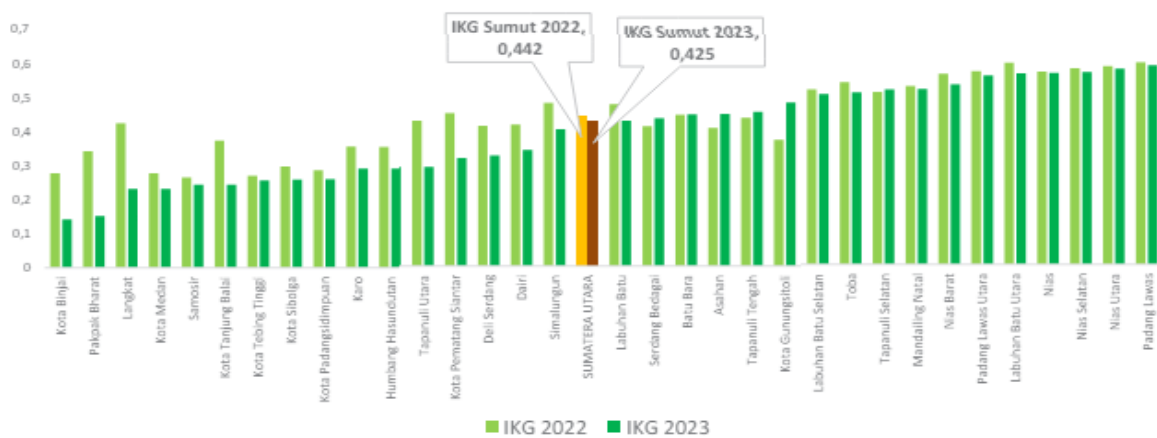
Tabel 2. 9 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Utara, 2018–2023

Dimensi/Indikator	Gender	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesehatan Reproduksi							
MTF	Perempuan	0,288	0,226	0,183	0,142	0,142	0,120
MHPK20	Perempuan	0,133	0,171	0,169	0,161	0,155	0,151
Pemberdayaan							
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	82,83	87,00	87,00	86,87	85,86	86,00
	Perempuan	17,17	13,00	13,00	13,13	14,14	14,00
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	47,52	49,74	51,77	51,38	54,36	55,75
	Perempuan	43,23	45,65	46,86	47,50	49,82	51,68
Pasar Tenaga Kerja							
TPAK (%)	Laki-laki	84,21	84,19	81,41	81,90	83,89	84,40
	Perempuan	59,97	56,80	56,15	56,50	55,37	57,81

Sumber: BPS Sumut 2023

Selama kurun waktu 2018-2023 terjadi perbaikan capaian IKG di tingkat kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender setiap tahunnya. Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Binjai (0,142), diikuti oleh Kabupaten Pakpak Bharat (0,152), Kabupaten Langkat(0,231), Kota Medan (0,232), dan Kabupaten Samosir (0,244). Dari 33 Kabupaten/Kota, ada sebanyak 27 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2022. Dari 27 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender, sebanyak 16 kabupaten/kota yang memiliki IKG di bawah IKG Sumatera Utara.

Gambar 2. 41 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2022-2023



Sumber: BPS Sumut 2023

Kabupaten Langkat mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,193 poin. Penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Langkat terjadi pada setiap dimensi, penurunan terbesar terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan reproduksi, penurunan terutama didorong oleh proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang turun sebesar 0,070 poin dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) yang turun sebesar 0,006 poin. Pada dimensi pasar tenaga kerja, TPAK laki- laki pada tahun 2022 sebesar 88,16 persen meningkat menjadi 90,15 persen pada tahun 2023 (meningkat 1,99 persen poin), sementara TPAK perempuan meningkat dari 54,66 persen pada tahun 2022 menjadi 61,46 persen pada tahun 2023 (meningkat 6,80 persen poin). Peningkatan capaian indikator ini menunjukkan adanya penurunan gap antara perempuan dan laki-laki pada dimensi pasar tenaga kerja.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dimunculkan dihadapi para pekerja, baik pekerja

formal maupun informal. Pemerintah daerah wajib berperan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dengan tujuan:

- memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia;
- mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja;
- mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
- mewujudkan universal coverage jamsostek (UCJ) di daerah.

Gambar 2. 42 Kondisi Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Periode April 2024



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Jika dilihat dari data capaian kondisi ketenagakerjaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan perlindungan kepesertaan jaminan sosial sektor formal dan informal Provinsi Sumatera Utara. Cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja formal tahun 2021 mencapai 46,28%, meningkat menjadi 51,68% tahun 2022, menjadi 55,40% di tahun 2023, dan 52,98% di April 2024. Sedangkan Cakupan UCJ untuk pekerja informal pada tahun 2021 mencapai 6,82%, meningkat menjadi 13,04% tahun 2022, menjadi 25,17% tahun 2023, dan 23,78% di April 2024.

Capaian coverage Jamsostek Tahun 2023 sebesar 41,31% (1.964.263 orang). Target coverage Jamsostek Tahun 2024 adalah 46,80% (2.447.853 orang); Tahun 2025: 51,08% (3.021.682 orang). Anggaran kepesertaan jamsostek bisa bersumber dari dana CSR dan DBH CHT. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Penambahan Perlindungan Sosial Tahun 2024 terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara untuk sektor pekerja informal berjumlah 59.865 Tenaga Kerja dan sektor formal berjumlah 20.248 Tenaga kerja.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya untuk selalu memberi penghormatan, serta terus memenuhi hak bagi para **penyandang disabilitas**, terutama memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas umum di bidang Kesehatan, Pendidikan, lapangan kerja,

dan layanan sosial. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah bagian dari hak asasi bagi setiap orang, termasuk Penyandang Disabilitas, sehingga UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya. Peningkatan perlindungan tenaga kerja bagi individu dengan disabilitas merupakan salah satu tujuan penting dalam mencapai kesetaraan dan inklusi di dunia kerja. Namun, meskipun adanya kebijakan perlindungan yang telah diberlakukan, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang dibentuk oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tidak mampu memaksimalkan penyerapan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (2022), menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja formal dengan kondisi disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau 5,37 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana jumlah tenaga kerja formal dengan disabilitas mencapai 7,67 juta orang atau 5,9 persen dari total penduduk yang bekerja. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi disabilitas salah satunya adalah dengan membuat peraturan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) yang di dalamnya disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah harus mempekerjakan minimal 2% dari jumlah pegawai atau pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Sementara itu, Pasal 53 ayat (2) mengharuskan perusahaan swasta untuk mempekerjakan minimal 1% dari jumlah pegawai atau pekerjanya yang merupakan penyandang disabilitas.

Tabel 2. 10 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Provinsi	Jenis Kelamin		Grand Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	1		1
2	Bali	2	2	4
3	Banten	6	6	12
4	Bengkulu		1	1
5	D.I.Yogyakarta	6		6
6	DKI Jakarta	8	6	14
7	Jawa Barat	22	8	30
8	Jawa Tengah	20	14	34
9	Jawa Timur	7	18	25
10	Kalimantan Barat	1		1
11	Kalimantan Selatan	1	1	2
12	Lampung		1	1
13	Nusa Tenggara Timur	1		1
14	Riau	16	5	21
15	Sulawesi Selatan	12	4	16
16	Sulawesi Utara	1	1	2
17	Sumatera Barat	4	2	6
18	Sumatera Selatan	4	1	5
19	Sumatera Utara	2	1	3
20	Tidak ada keterangan*	23	17	40
Grand Total		137	88	225

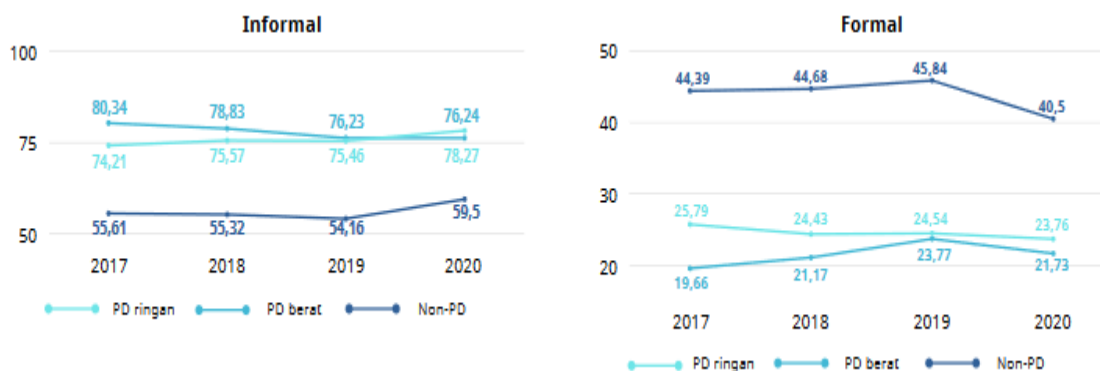
Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Tabel 2. 11 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Provinsi dan Ragam Disabilitas Tahun 2022

No	Provinsi	Ragam Disabilitas					Grand Total
		Penyandang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang Disabilitas Sensorik	Penyandang Disabilitas Ganda	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1					1
2	Bali	4					4
3	Banten	9		2	1		12
4	Bengkulu	1					1
5	D.I.Yogyakarta	2	1	3			6
6	DKI Jakarta	12		2			14
7	Jawa Barat	25		5			30
8	Jawa Tengah	23		7	1	3	34
9	Jawa Timur	18		7			25
10	Kalimantan Barat			1			1
11	Kalimantan Selatan	2					2
12	Lampung	1					1
13	Nusa Tenggara Timur	1					1
14	Riau	17		4			21
15	Sulawesi Selatan	5		10	1		16
16	Sulawesi Utara	2					2
17	Sumatera Barat	5		1			6
18	Sumatera Selatan	5					5
19	Sumatera Utara	3					3
20	Tidak ada keterangan*	34		6			40
	Grand Total	170	1	48	3	3	225

Sumber: Ditjen Binapenta dan PKK, diolah Pusdatik Kemnaker

Gambar 2. 43 Distribusi penyandang disabilitas berdasarkan sektor informal/formal (%), 2017-2020



Sumber: Sakernas, 2020

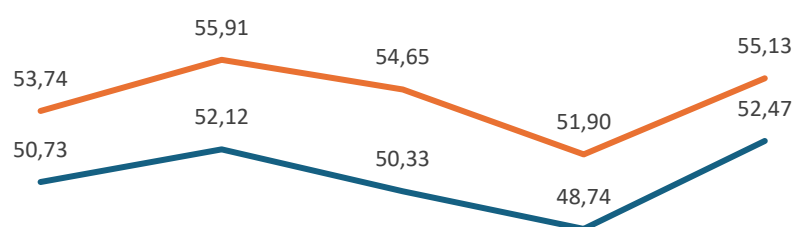
Mayoritas penyandang disabilitas bekerja di sektor informal persentasenya terus meningkat, Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal kurang lebih hanya setengah dari pekerja non disabilitas. Tingkat pengangguran disabilitas, khususnya untuk penyandang disabilitas berat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non disabilitas. Akan tetapi untuk penyandang disabilitas ringan, tingkat penganggurannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan, meskipun tidak mudah bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, mayoritas penyandang disabilitas yang masuk ke dalam angkatan kerja biasanya adalah pekerja yang telah memiliki pekerjaan dan juga memiliki kemampuan atau keahlian yang relatif lebih baik ketimbang penyandang disabilitas yang tidak masuk angkatan kerja.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan

peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Dalam rangka mendukung pemajuan kebudayaan ini, diperlukan sebuah instrumen untuk mengukur tingkat pembangunan kebudayaan di suatu daerah. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Pusat Statistik bekerja sama menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Provinsi pada tahun 2018. **Indeks Pembangunan Kebudayaan** diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Sejak tahun 2018-2022 capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sumatera Utara mengalami progres yang cukup baik, walaupun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sumatera Utara akan disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2018-2022

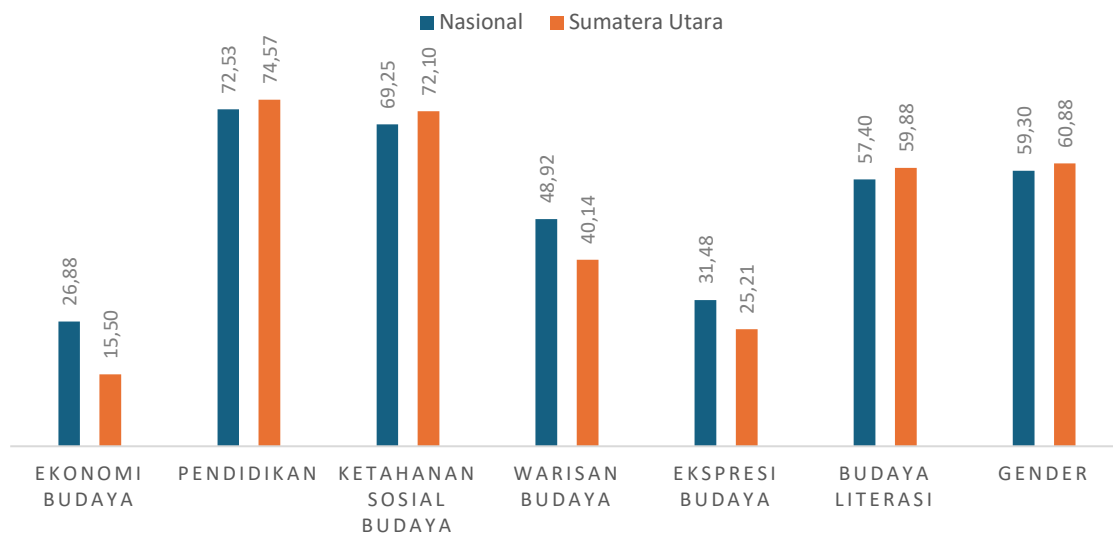


	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13
Sumatera Utara	50,73	52,12	50,33	48,74	52,47

Sumber: Kemendikbud, 2022

Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara sebesar 52,47 dengan Dimensi Pendidikan menjadi dimensi dengan capaian tertinggi yaitu 74,57 sedangkan Dimensi Ekonomi Budaya menjadi dimensi dengan capaian terendah yaitu sebesar 15,50. Hal ini disebabkan masih kurangnya jumlah pekerja seni dan kurangnya apresiasi terhadap para pekerja seni. Di bawah ini disajikan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 per dimensi.

Gambar 2. 45 Capaian Per Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber: Kemendikbud, 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai melalui 6 aspek, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Indeks pelayanan publik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 memiliki nilai 3,99 dan meningkat dari tahun 2019.

Tabel 2. 12 Indeks Pelayanan Publik 2019-2022

Indikator	2019 (data awal)	2020	2021	2022 (data terakhir)
Indeks Pelayanan Publik	3,00 (C)	3,68(B)	3,80(B)	3,99

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2022

2.3.2 Indeks Integritas Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mendapati bahwa Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 berada di angka 70,97, dan Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi 66,37 persen dan angka Provinsi Sumatera Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional.

Tabel 2. 13 Indeks Integritas Nasional 2022-2023

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi Sumatera Utara	66,20	66,37
Kabupaten Nias	74,50	79,02
Kabupaten Mandailing Natal	60,19	66,42
Kabupaten Tapanuli Selatan	80,02	80,50
Kabupaten Tapanuli Tengah	67,36	73,99
Kabupaten Tapanuli Utara	72,28	73,90
Kabupaten Toba	70,82	70,05
Kabupaten Labuhanbatu	70,98	74,33
Kabupaten Asahan	71,64	74,48
Kabupaten Simalungun	65,60	72,17
Kabupaten Dairi	72,33	69,92
Kabupaten Karo	71,85	72,61
Kabupaten Deli Serdang	66,78	68,52
Kabupaten Langkat	67,99	71,73
Kabupaten Nias Selatan	71,85	68,13
Kabupaten Humbang Hasundutan	72,61	70,66
Kabupaten Pakpak Bharat	72,37	77,19
Kabupaten Samosir	69,01	66,70
Kabupaten Serdang Bedagai	74,32	77,19
Kabupaten Batu Bara	71,62	66,75
Kabupaten Padang Lawas Utara	69,91	67,67
Kabupaten Padang Lawas	71,45	73,52
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	69,10	72,04
Kabupaten Labuhanbatu Utara	70,71	74,51
Kabupaten Nias Utara	64,9	73,53
Kabupaten Nias Barat	69,44	66,99
Kota Sibolga	66,29	71,14
Kota Tanjung Balai	68,33	72,46
Kota Pematang Siantar	68,10	68,43
Kota Tebing Tinggi	69,8	73,22
Kota Medan	61,69	66,93
Kota Binjai	73,29	76,22
Kota Padangsidimpuan	67,93	67,35
Kota Gunungsitoli	79,84	78,55

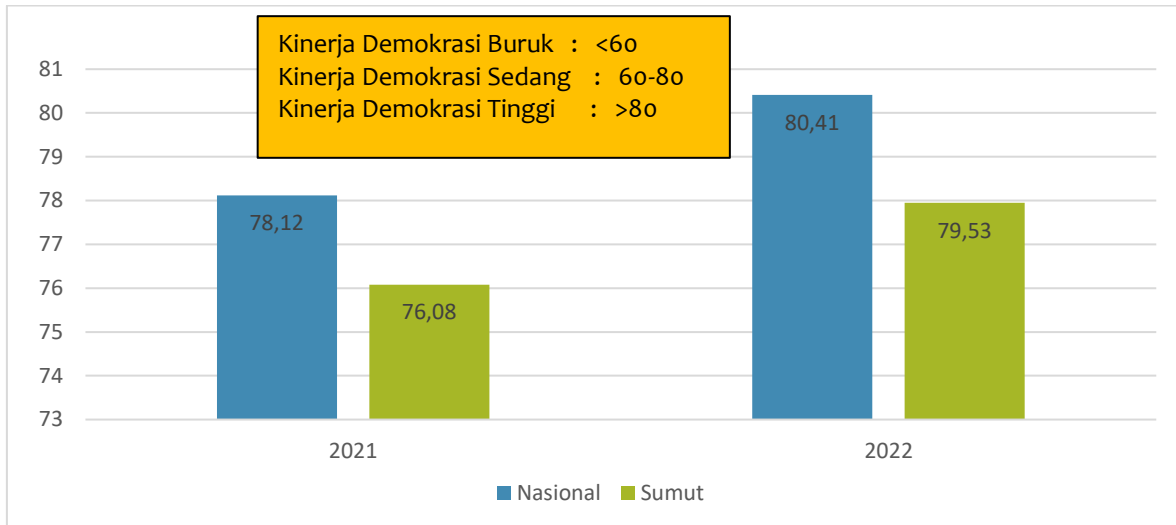
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023

2.3.3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Sejak tahun 2021 BPS menggunakan metode baru dalam penyusunan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Adapun metode baru dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun, Kebebasan (7 Indikator), Kesetaraan (7 Indikator) dan Kapasitas Lembaga Demografi (8 Indikator). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

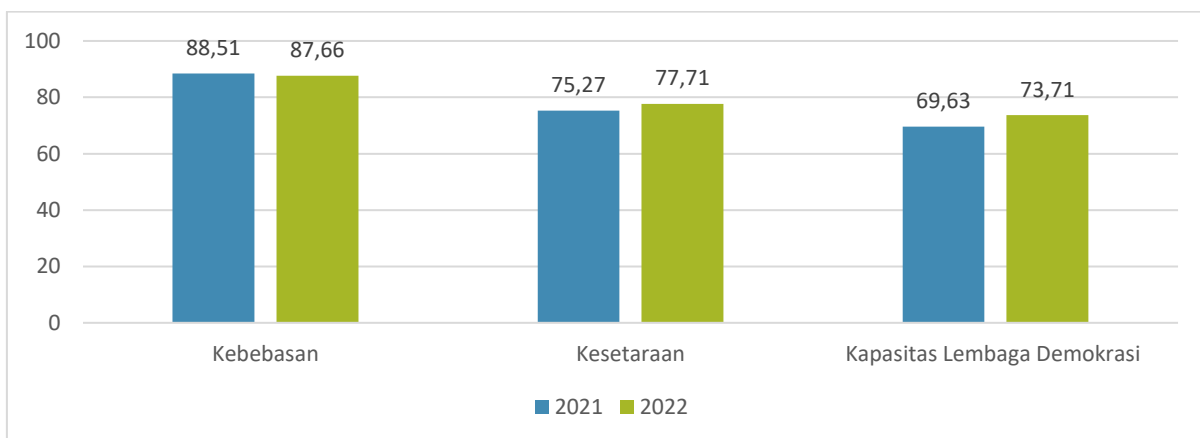
Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 79,53 dan mengalami peningkatan dari Tahun 2021. Capaian ini masih dibawah Nasional yaitu sebesar 80,41 pada Tahun 2022 dan 78,12 pada Tahun 2021. Dalam skala indeks 0 sampai 100 angka tersebut masih termasuk dalam kategori “Kinerja Demokrasi Sedang”.

Gambar 2. 46 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021-2022



Angka IDI Sumatera Utara 2022 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek Kebebasan dengan rata-rata 87,66; aspek Kesetaraan 77,71; dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 73,71.

Gambar 2. 47 Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara tahun 2021-2022



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita

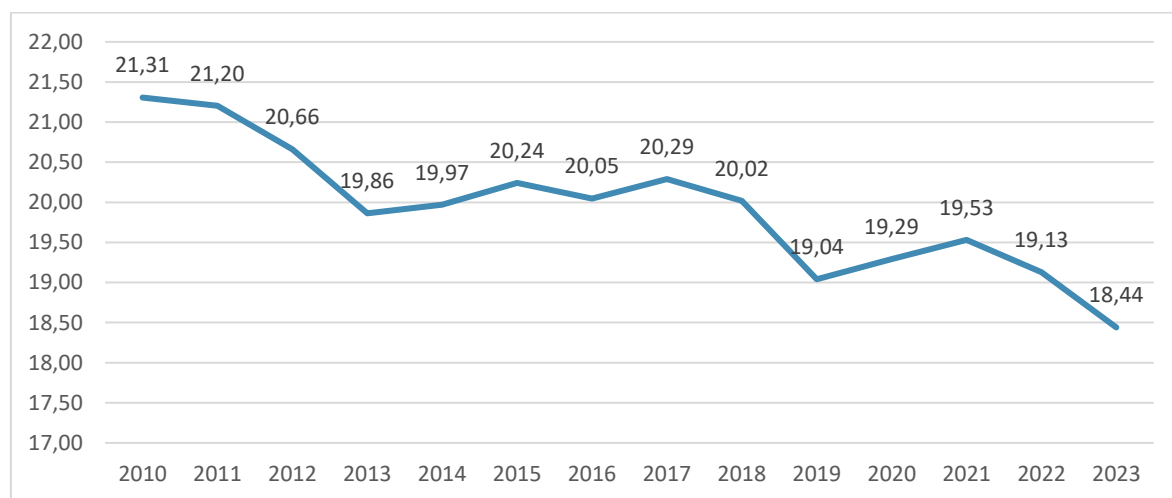
Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan ekonomi atau produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Pulau Sumatera. Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2023 didominasi oleh 3 provinsi besar, yaitu Provinsi Sumatera Utara berkontribusi sebesar 23,25 persen; Provinsi Riau sebesar 22,71 persen; dan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 13,92 persen. Sementara kontribusi terendah yaitu

Provinsi Bengkulu dengan kontribusi sebesar 2,14 persen. Pada tahun 2023, **PDRB per kapita** Sumatera Utara tercatat sebesar 68,31 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 62,92 juta rupiah. Jika kita mengamati besaran PDRB per kapita kabupaten/kota, ada sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara. Kabupaten/kota tersebut mencakup dua kota yang ada di Sumatera Utara yaitu Kota Medan (122,59 juta rupiah) sebagai kota dengan PDRB per kapita tertinggi, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (113,62 juta rupiah). Serta lima kabupaten yaitu, Kabupaten Batu Bara (101,68 juta rupiah), Kabupaten Labuhanbatu (89,06 juta rupiah), Kabupaten Labuhanbatu Utara (82,79 juta rupiah), Kota Sibolga (74,74 juta rupiah), dan Kabupaten Deli Serdang (68,92 juta rupiah). Kabupaten Nias Selatan menempati posisi dengan PDRB per kapita terendah yaitu hanya 22,42 juta rupiah.

2. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah indikator yang dapat mengindikasikan sejauh mana sektor lapangan usaha industri berkembang dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Sebagai salah satu sektor terbesar penyumbang PDRB di Provinsi Sumatera Utara, kontribusi Industri Pengolahan diharapkan 20 (dua puluh) tahun ke depan terus meningkat, walaupun kondisi saat ini kontribusi sektor Industri Pengolahan cenderung stagnan bahkan menurun. Pada tahun 2010, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tercatat sebesar 21,31% dan tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 18,44%.

Gambar 2. 48 Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

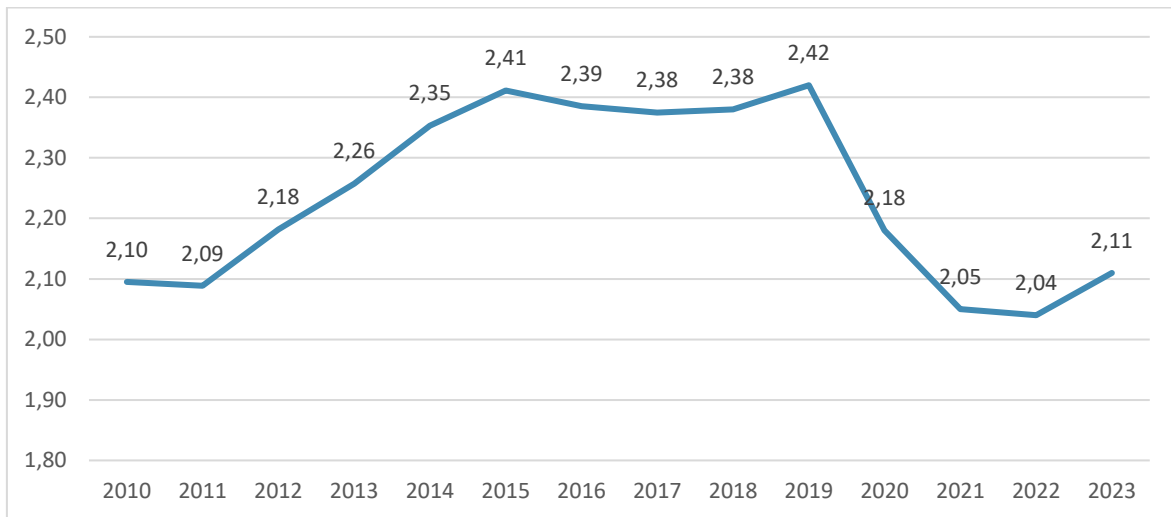
3. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat namun sekaligus sektor yang memiliki VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang cukup tinggi, sehingga sedikit saja perubahan global akan berdampak terhadap pariwisata. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, akibat melandanya Pandemi Covid-19, merubah paradigma wisatawan dalam berwisata.

Provinsi Sumatera Utara dengan kekayaan potensi wisatanya diharapkan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menjadi salah destinasi wisata

global. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri melihat kondisi daya saing pariwisata Sumatera Utara yang masih rendah, tercermin dari kontribusi sektor Akomodasi Makan-Minum di mana rerata kontribusinya masih cukup rendah yaitu di bawah 3%.

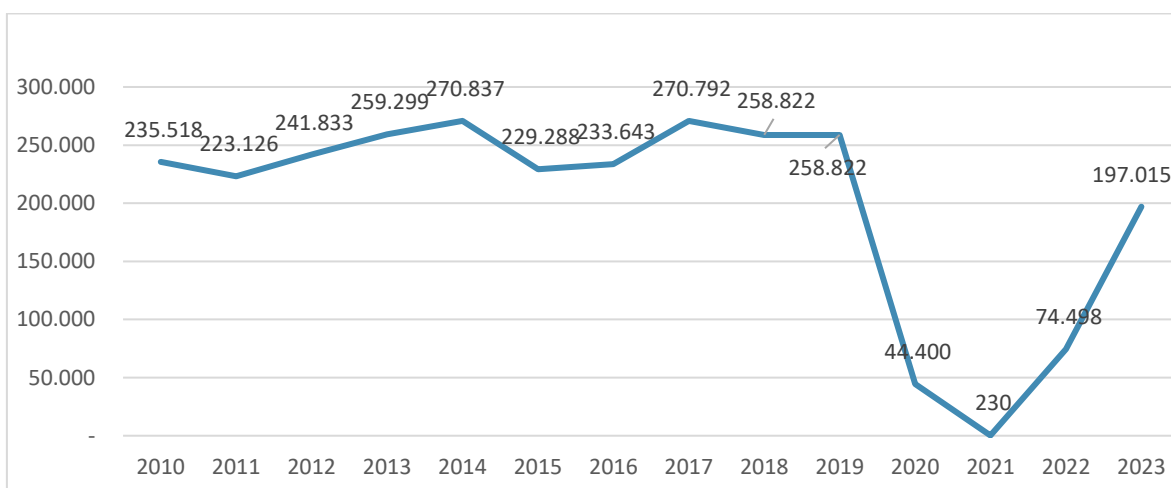
Gambar 2. 49 Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum terhadap PDRB (%) 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Sedangkan jika dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara, rerata kunjungan masih di bawah 300.000 wisman. Bahkan pada tahun 2021 saat Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara hanya sebanyak 230 orang.

Gambar 2. 50 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara 2010-2023

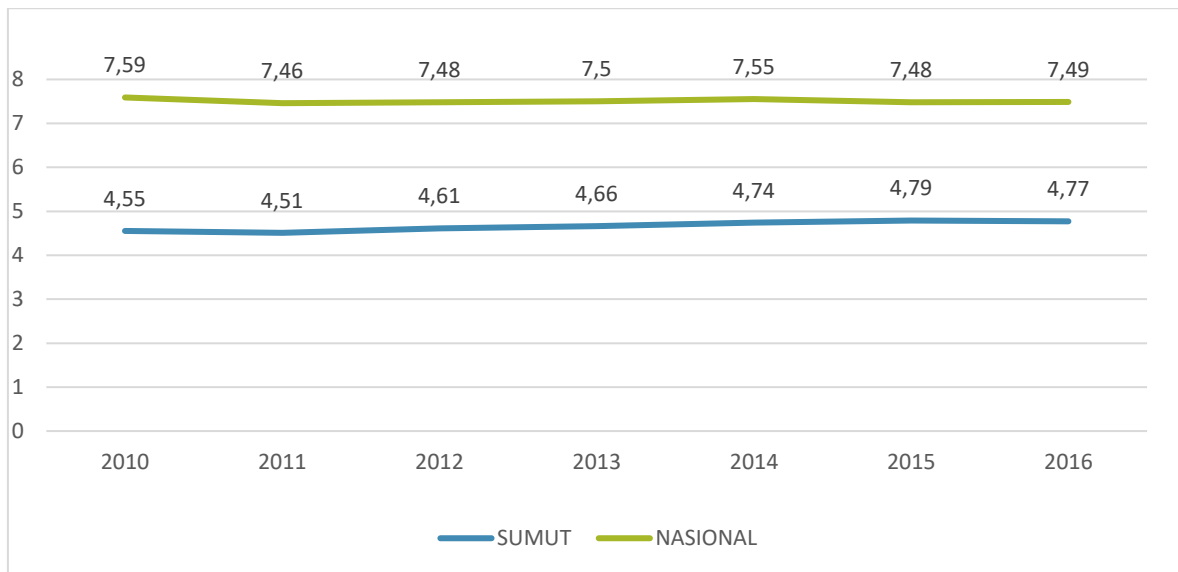


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

4. Ekonomi Kreatif (Ekraf)

Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu telah menyusun data statistik perkembangan ekonomi kreatif per provinsi.

Gambar 2. 51 Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara, 2010-2016



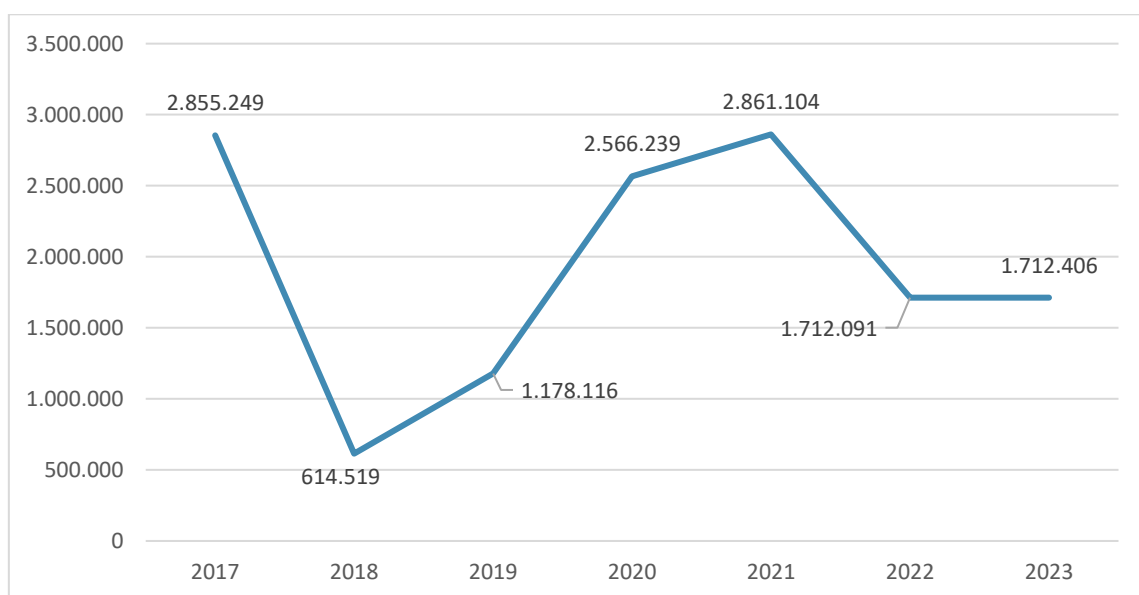
Sumber: BPS-Bekraf, data diolah

Kontribusi ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2016, masih berada di bawah capaian Nasional dengan rata-rata kontribusi masih di bawah 5% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya ekosistem industri ekonomi kreatif dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif.

5. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

Produktivitas menggambarkan tingkat efisiensi dalam menghasilkan output. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu organisasi atau sistem mampu menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit atau sama. Meningkatnya produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan jumlah UMKM dan Koperasi dapat memperlihatkan iklim usaha di suatu daerah cukup meningkat. Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 1.712.406 unit.

Gambar 2. 52 Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023

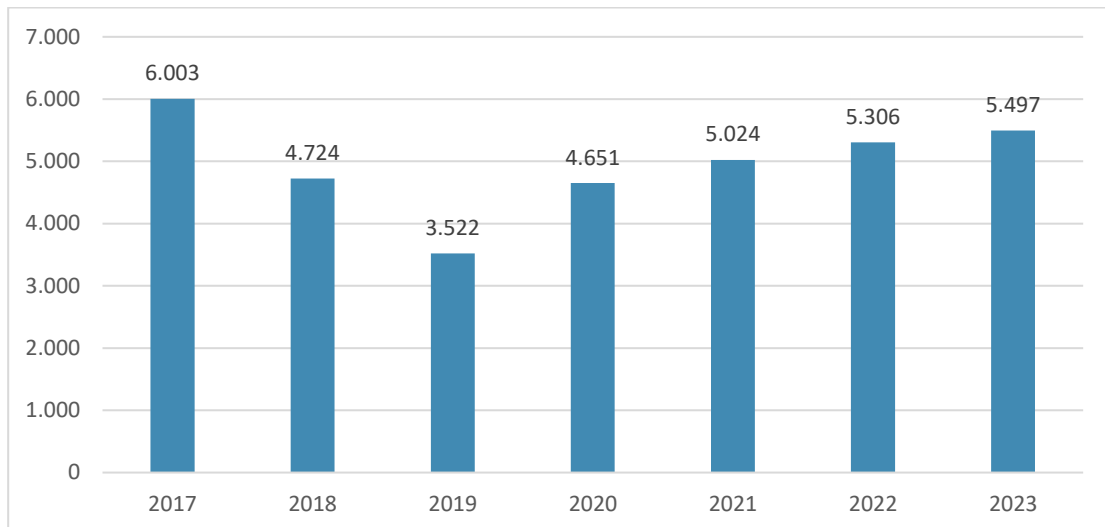


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan jumlah koperasi aktif di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebanyak 5.497 koperasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang hanya berjumlah 5.306 koperasi. Kondisi ini masih belum optimal untuk mendorong peningkatan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, hal ini terlihat dari porsi usaha mikro yang masih cukup besar (68,17%) jika dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah.

Gambar 2. 53 Jumlah Koperasi Aktif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023

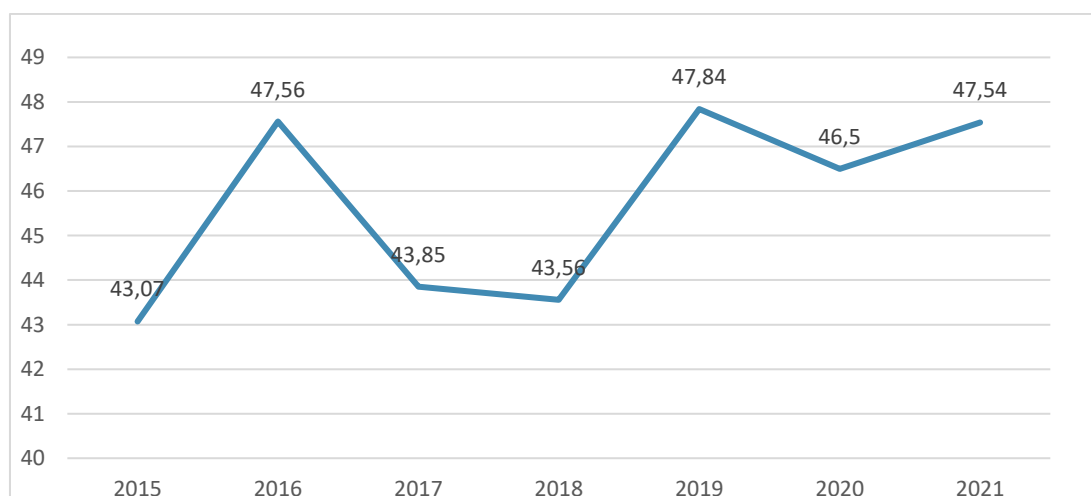


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

6. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah sebuah model pembangunan ekonomi yang berfokus kepada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Performa ekonomi hijau harus dilacak sesuai kemajuan terhadap target nasional dan pembangunan global sehingga aspek keberlanjutan ekonomi dapat diukur berdasarkan aksi. Untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat maka disusun Indeks Ekonomi Hijau sebagai instrumen pengukuran.

Gambar 2. 54 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

7. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

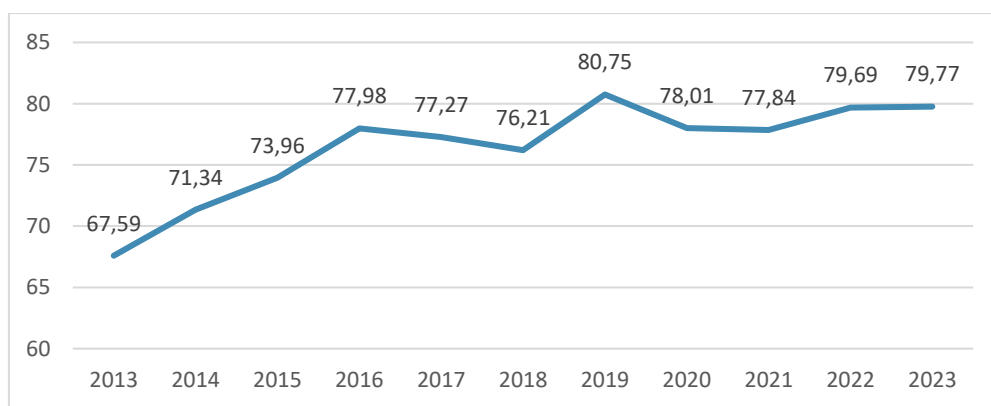
Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi adalah alat ukur penting untuk memahami tingkat fluktuasi harga dan stabilitas pasar suatu komoditas. Dengan memahami nilai KV, berbagai pihak dapat mengambil

langkah-langkah strategis untuk memastikan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

8. Tingkat Produktivitas Tenaga kerja

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara bahwa nilai Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara dari Tahun 2013 tercatat sebesar Rp 67,59 Juta/Tenaga Kerja dan Tahun 2023 tercatat sebesar Rp 79,77 Juta/Tenaga Kerja. Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Utara hingga tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai nasional dengan capaian nilai nasional sebesar Rp 87,96 Juta/Tenaga Kerja.

Gambar 2. 55 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023



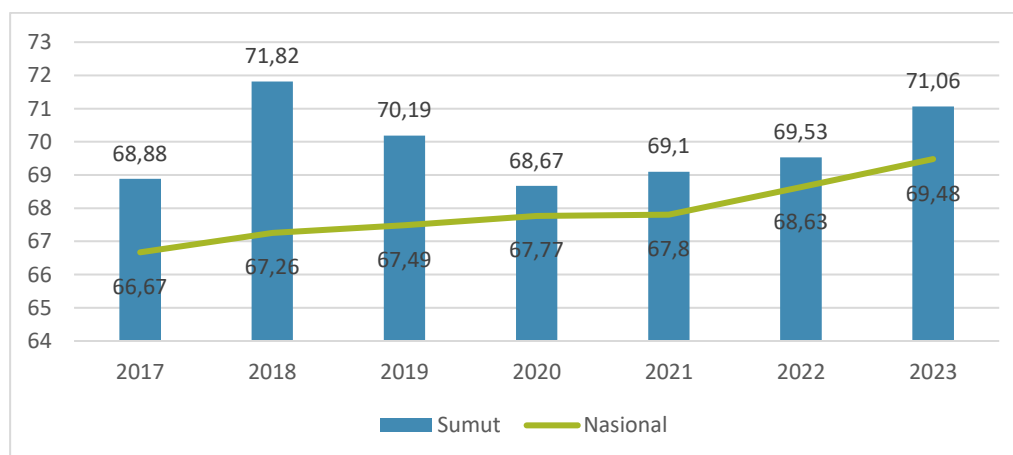
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Utara pada Februari 2024 diperkirakan sebanyak 8 juta orang, naik 126 ribu orang dibanding Februari 2023. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang berkebalikan dengan peningkatan Jumlah Angkatan Kerja dengan nilai penurunan sebesar 0,30 persen poin pada periode yang sama.

Gambar 2. 56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023



Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia

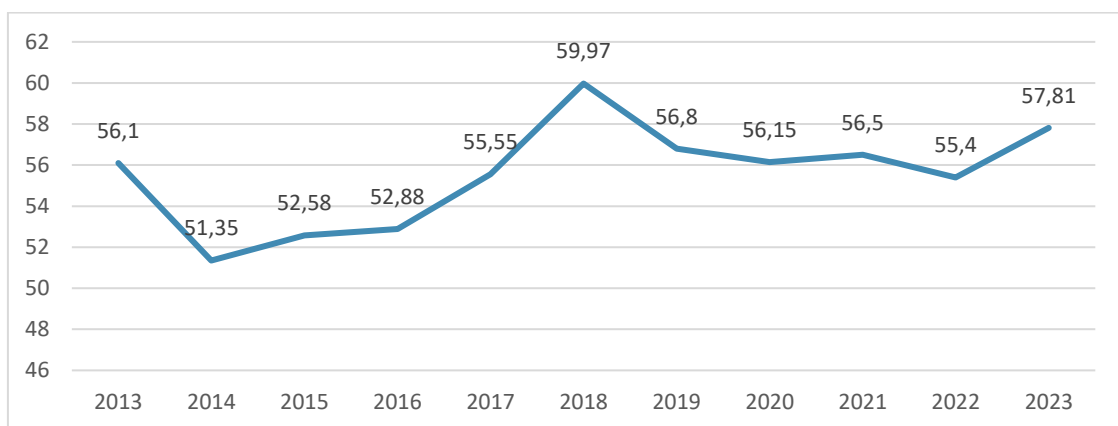
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 5,10 persen, turun 0,14 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023, Jika dilihat

dari capaian nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50 persen poin dibanding Februari 2023.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan atau TPAK Perempuan digambarkan sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja Perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Perkembangan TPAK Perempuan didasari oleh adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan Perempuan, perlunya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, adanya kemauan perempuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi, adanya kemauan untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan biaya sendiri, adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga serta makin meluasnya kesempatan dalam dunia kerja bagi perempuan seperti berkembangnya industri kerajinan tangan. Angka TPAK Perempuan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 tercatat sebesar 57,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dari 100 perempuan yang masuk dalam penduduk angkatan kerja, terdapat sekitar 57 orang aktif ke dalam dunia pasar kerja. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat pada periode yang sama yaitu sebesar 54,52 persen. TPAK Perempuan di Sumatera Utara pada periode 2013-2023 mengalami fluktuatif dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 59,97 persen.

Gambar 2. 57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1. Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang dimaksud, maka salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah pembinaan penataan ruang di samping juga pengaturan pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Salah satu permasalahan dasar dan konflik dalam pemanfaatan ruang saat adalah masih banyaknya tumpang tindih kebijakan, peraturan serta informasi geospasial yang salah

satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah. Untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, kepastian hukum, dan perizinan pemanfaatan ruang, perlu disusun peta indikatif tumpang tindih pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) merupakan Peraturan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. RDTR kabupaten/kota dalam hal ini menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan penerbitan izin lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Penyusunan RDTR sebagai rinci pada Tingkat Kabupaten/Kota saat ini belum terlaksana dengan maksimal. Bahkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sudah memberikan bantuan teknis (bantek) penyusunan RDTR untuk beberapa kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang telah terbit Perkada RDTR antara lain: Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Medan.

Dalam hal penggunaan tanah di Sumatera Utara mengalami peningkatan paling signifikan terjadi pada jenis penggunaan tanah Perkebunan dengan peningkatan mencapai 38.955,10 Ha per tahunnya, untuk penggunaan tanah ladang mengalami peningkatan 10.992,98 Ha per tahunnya, dan selanjutnya penggunaan tanah jenis sawah mengalami peningkatan sebesar 2.646,01 Ha per tahun. Dalam penataan ruang informasi status penguasaan tanah sangatlah diperlukan sehingga lahan yang terkena rencana tata ruang dapat menerima keadilan dan perlindungan hukum. Status penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Utara dominan tanah sudah terdaftar skala kecil dan tanah yang belum terdaftar yaitu sebesar 50,18 % dari luas lahan keseluruhan.

Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat ini masih menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk Menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan. Ketersediaan data dan informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala besar, masih belum merata di wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Data Geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Sumatera Utara masih belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata Kelola yang diharapkan. Dan juga sampai saat ini Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara masih terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang status Simpul Jaringan Informasi Geospasialnya dalam kategori “berkembang”. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi geospasial.

2. Urbanisasi dan Perkotaan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), sebaran penduduk Sumatera Utara (Sumut) masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya 0,36% wilayah Sumut, namun Medan dihuni 2,44 juta penduduk atau 16,46% dari total penduduk Sumut sebanyak 14,80 juta jiwa. Terkonsentrasinya penduduk Sumut di Medan disebabkan saat ini

masih terus berlangsung urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Karena kegiatan ekonomi, ketersediaan fasilitas atau infrastruktur, lebih banyak dan lebih baik di perkotaan. Selain itu, faktor kemiskinan atau ajakan saudara/teman/tetangga, maka seseorang atau kelompok masyarakat menjadi memilih untuk tinggal di kota.

Untuk masyarakat desa yang sudah pindah ke kota karena alasan pendidikan, ketika sudah menyelesaikan pendidikannya tidak tertarik pindah ke desa karena minimnya peluang pekerjaan di desa. Tak heran kota akan semakin padat dan diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Sedangkan di desa kekurangan orang-orang yang berkualitas. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan ketimpangan daerah perkotaan dan perdesaan semakin berlanjut.

Untuk Kota Medan, penduduknya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dari 2,44 juta penduduk Medan, laki-laki sebanyak 1,223 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,212 juta jiwa.

Merujuk pada hasil SP2020, sebaran penduduk Sumut terbanyak kedua di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1,93 juta atau 13,05% dari total penduduk Sumut. Terdapat 971.735 penduduk laki-laki dan 959.706 penduduk perempuan. Kemudian Kabupaten Langkat sebanyak 1,03 juta atau 6,96% dari total penduduk Sumut. Terbanyak berikutnya penduduk Simalungun sebanyak 990.246 jiwa (6,69%) dan Asahan sebanyak 769.960 jiwa (5,20%).

Sedangkan sebaran terendah di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 52.351 jiwa, kemudian Sibolga sebanyak 89.584 jiwa dan Nias Barat sebanyak 89.994 jiwa

3. Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Secara umum objek pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi hamper sama. Pembangunan tersebut menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus). Secara instrumen DAK tersebut digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan dasar (SPM). Pelayanan Dasar tersebut adalah a) pendidikan (dasar), b) kesehatan (pelayanan dasar dan kefarmasian), c) air minum (SPAM), d) sanitasi (IPAL komunal) dan e) perumahan dan permukiman (PSU). Khusus untuk daerah afirmasi ditambah bidang transportasi (dalam rangka peningkatan akses pelayanan dasar).

Daerah afirmasi umumnya memiliki karakteristik yang jauh dari pusat pemerintah dan secara posisi wilayah terluar dari Indonesia berbatasan dengan laut internasional dan Negara lain. Menurut indikator pembangunan, daerah afirmasi umumnya memiliki nilai rendah dibanding wilayah lain. Untuk itu kebijakan keberpihakan khusus dalam mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah sekitar yang lebih maju.

Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi disebabkan oleh (i) rendahnya daya saing produktivitas dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan, (ii) keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital, kompetensi kapabilitas dan aparat serta masyarakat desa yang minim dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan akuntabilitas sosial, (iv) kualitas pemenuhan layanan dasar rendah dan tidak merata, (v) tantangan krisis iklim, degradasi lingkungan dan ketahanan ekologi (vi) preservasi adat istiadat, budaya, dan nilai lokal yang belum optimal; (vii) tumpang tindih

regulasi dan program pembangunan di desa dan supra-desa (viii) dinamika urbanisasi perdesaan yang belum terkelola; (ix) kebijakan yang cenderung seragam belum mengenali keragaman kondisi, karakteristik dan kebutuhan desa serta (x) pengembangan perdesaan dan transmigrasi yang belum optimal.

Pendidikan adalah unsur penting dalam percepatan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan daerah perdesaan di wilayah afirmasi tertinggal dalam sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas pengajar dan jarak tempuh yang terlalu jauh untuk bersekolah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat erat kaitannya dengan kemajuan pendidikan hampir belum masuk ke sebagian besar wilayah afirmasi.

Kondisi kesehatan tidak berbeda jauh dengan pendidikan. Dalam sektor kesehatan, daerah afirmasi memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dokter dan ketersediaan dokter spesialis. Kemudian akses ke pusat layanan kesehatan seperti Rumah Sakit untuk ruang rawat inap yang sangat sulit untuk sebagian desa di daerah afirmasi. Akhirnya kita juga menemukan paradoks di mana daerah afirmasi umumnya masih rentan dengan binatang beracun dan berbisa, akan tetapi sering tidak ditemukan serum binatang berbisa di daerah afirmasi.

Sebagai wilayah yang memiliki curah hujan tinggi, agak ironis kalau ada daerah yang memiliki kekurangan dalam pasokan air bersih. Permasalahan penyediaan air bersih di daerah afirmasi secara umum adalah kekurangan infrastruktur air bersih seperti pompa air, bak penampung dan perpipaan. Dengan pertimbangan daerah afirmasi di Indonesia yang memiliki daya beli air yang relatif rendah dan biaya investasi yang tinggi untuk daerah afirmasi dengan pola pemukiman yang terpencar dan tidak mempertimbangkan pola ruang, maka kebijakan penyediaan air bersih di daerah afirmasi perlu diambil alih oleh pemerintah pusat.

Sampah menjadi isu penting di masa datang. Sampah menurunkan derajat kesehatan dan nilai ekonomi ruang. Sampah menjadi salah satu penyumbang polusi tanah, air dan udara. Untuk daerah afirmasi, penanganan sampah cenderung dibuang ke aliran air atau dibiarkan menumpuk. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dalam membangun sistem pengelolaan sampah. Itulah sebabnya pemerintah pusat dibutuhkan menggunakan instrumen dana alokasi khusus untuk membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di daerah afirmasi.

Rumah tangga di daerah perdesaan khususnya daerah afirmasi masih banyak mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Industri rumah tangga dan rumah makan juga menjadi penyumbang limbah lingkungan. Dalam bidang pengelolaan air limbah dan limbah padat dibutuhkan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di daerah afirmasi.

Permasalahan rumah layak huni ditemukan secara merata di daerah perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini semakin ekstrim dijumpai di daerah afirmasi. Hal ini disebabkan sebagian besar rumah tangga hidup dalam tingkat pra-sejahtera. Lahan yang masih luas memungkinkan pemerintah pusat untuk membangun rumah layak huni dengan anggaran yang lebih minim.

Daerah afirmasi Nias dikelilingi laut. Dengan struktur tanah yang relatif labil, maka pembangunan konektivitas laut sangat layak dilaksanakan. Pembangunan sistem konektivitas laut diharapkan dapat menurunkan biaya

logistik dan menurunkan biaya pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan listrik di daerah afirmasi Kepulauan Nias membutuhkan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Urusan kelistrikan sampai saat ini masih mengandalkan PLN (Perusahaan Listrik Negara), sebab PLN mengelola penyediaan listrik dari hulu hingga hilir. Daerah Afirmasi Nias sesuai untuk dikembangkan sebagai satu entitas kelistrikan yang dimulai dari penyediaan listrik melalui pembangkit listrik, penyaluran melalui jaringan transmisi dan distribusi, pengelolaan jaringan transmisi melalui gardu induk, pelayanan pelanggan hingga listrik dapat dinikmati di rumah masyarakat.

4. Konektivitas

Jalan kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 3005,65 km. Sementara jalan baik sebesar 56,34% dan sedang 21,79 persen. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 4,77 persen, dan rusak berat sebesar 17,10 persen.

Konektivitas jaringan jalan dihadapkan pada masih rendahnya kapasitas jalan Provinsi dan kecepatan yang masih di bawah kriteria desain yaitu rata – rata hanya 28 Km/Jam, Kualitas jalan terutama jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, masih rendah. Kondisi tersebut turut menyumbang pada tingginya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan di Sumatera Utara, dimana indeks fatalitas tahun 2022 sebesar 2.46. rendahnya konektivitas masih terjadi pada wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan sebagian wilayah dataran tinggi untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

Konektivitas jaringan transportasi Sumatera Utara dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi. Untuk simpul transportasi udara, sampai dengan tahun 2024, terdapat 8 bandara yang terdiri dari 1 bandara pengumpul (Bandara Kualanamu) serta 7 bandara pengumpan (Binaka, Sibisa, Dr. Ferdinand L. Tobing, Aek Godang, Raja Sisingamangaraja XII, Lasondre, Abdul Haris Nasution). Bandara Abdul Haris Nasution di Kabupaten Mandailing selesai dibangun di awal tahun 2024 dan saat ini belum beroperasi.

Angkutan udara khususnya bandara pengumpul dan pengumpan masih rendah pemanfaatannya sebagai akibat terbatasnya penerbangan, akar permasalahannya adalah fluktuasi penumpang dan kargo.

Selanjutnya, untuk simpul jaringan perkeretaapian, sampai dengan tahun 2023 terdapat 64 stasiun dan jalur rel sepanjang 577 km/sp terdiri dari 459 km/sp rel aktif (431 km/sp jalur tunggal dan 28 km/sp jalur ganda) dan 118km/sp rel non aktif. Untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan, terdapat 106 perlintasan sebidang yang dijaga, 341 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, dimana 5 diantaranya berada di ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi, dan 51 perlintasan tidak sebidang.

Untuk angkutan Kereta Api masih belum terwujud di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara hal ini dikarenakan minimnya kegiatan ekonomi di *hinterland* pantai barat serta potensi perikanan dan perkebunan yang belum berkembang menjadi hilirisasi industri yang bernilai tambah. Pengembangan kereta api eksisting terutama Medan – Labuhanbatu Selatan serta Medan – Langkat (Pangkalan Brandan) memerlukan strategis bisnis terutama pada angkutan barang dari kabupaten/kota ke kota Inti Medan. Sedangkan untuk

keselamatan lalu lintas, masih dibutuhkan penanganan untuk perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan yang belum dijaga.

Untuk pelabuhan sungai dan danau, terdapat 59 dermaga pengumpan di Sumatera Utara. Angkutan danau dan sungai untuk pergerakan orang dan barang terutama di Danau Toba masih sangat minim dengan memenuhi standar keselamatan.

Sementara untuk simpul transportasi laut, terdapat 24 pelabuhan sebagai simpul transportasi laut yang terdiri dari 2 pelabuhan utama (Kuala Tanjung, Belawan), 8 pelabuhan pengumpul (Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung, Gunung Sitoli, Teluk Leidong, Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Parlimbungan Ketek, Pulau Telo, Sibolga), 12 pelabuhan pengumpan regional (Bagan Asahan, Tanjung Tiram, Sei Berombang, Tanjung Sarang Elang, Tanjung Pura, Natal/Sikara-kara, Sirombu, Teluk Dalam, Lahewa, Tanjung Beringin, Pantai Cermin) dan 3 pelabuhan lokal (Pangkalan Dodek, Pulau Kampai, Barus). Untuk pelabuhan pengumpan regional yang masih beroperasi saat ini adalah Pelabuhan Tanjung Tiram, Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Teluk Dalam, dan Pelabuhan Lahewa. Pelabuhan yang tidak beroperasi saat ini terdapat 2 pelabuhan yang sulit untuk dikembangkan karena adanya sedimentasi yang tinggi yaitu Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Natal/Sikara-kara.

Konektivitas laut dihadapkan masih rendahnya pemanfaatan Simpul pelabuhan Pengumpan reguler maupun regional sebagai rute pergerakan logistik antara pelabuhan utama dengan pelabuhan pengumpan di sepanjang wilayah pesisir terutama antara pesisir pantai barat dengan pelabuhan utama Belawan. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya infrastruktur pelabuhan Pengumpan reguler maupun regional serta wilayah Pantai barat Sumatera Utara belum menjadi pusat logistik dan belum optimalnya kegiatan ekonomi pada *hinterland* pelabuhan di wilayah pantai barat Sumatera Utara.

Pantai timur Sumatera Utara berada Pada jalur ALKI I dan jalur perdagangan internasional tetapi kondisi pelabuhan pengumpan regional tidak dimanfaatkan sebagai jalur logistik yang menjangkau pasar yang lebih luas.

Untuk simpul utama transportasi darat, di Sumatera Utara terdapat 40 terminal yang terdiri dari 6 tipe A, 13 tipe B, dan 21 tipe C. Terminal tipe A, terdiri dari 5 terminal yang beroperasi (Amplas, Pinang Baris, Tanjung Pinggir, Madya Tarutung, Sibolga) dan 1 terminal tidak beroperasi yaitu Terminal Padang Bulan di Kabupaten Labuhan Batu.

Sedangkan untuk terminal tipe B, di Sumatera Utara terdapat 13 terminal Tipe B (Sijambi, Kabanjahe, Pasar X/Tanjung Beringin, Bahorok/Bukit Lawang, Lubuk Pakam, Ikan Paus, Sosorsaba Parapat, Perdagangan, Kota Pinang, Gunung Tua, Faekhu, Samosir, dan Labuhanbatu Utara.

5. Ketenagalistrikan

Provinsi Sumatera Utara secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 72.981,23 km² yang terdiri atas 33 kabupaten/kota. Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur pegunungan Bukit Barisan dan juga berada pada wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan potensi hydro. Selain itu juga terdapat potensi dari biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka, Selain di atas terdapat juga potensi dari limbah ternak mengingat Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil

ternak potong di Pulau Sumatera. Semua potensi yang ada tersebut menghasilkan energi listrik bagi memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Utara.

Pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Provinsi Sumatera Utara saat ini belum sepenuhnya merata terutama pada Kepulauan Nias yang masih angka rata-rata rasio elektrifikasi masih di bawah 80% yang mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik. Hal yang sama juga terjadi pada wilayah selatan Sumatera Utara yang Sebagian besar masuk wilayah hutan dan pegunungan sehingga harus memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yang membutuhkan waktu dan ini juga merupakan permasalahan energi di Sumatera Utara. Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Terciptanya bauran energi baru terbarukan sebesar 23,98% di tahun 2025 dan 49,91% pada tahun 2050.
2. Tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga.
3. Terpenuhinya penyediaan energi primer sebesar 8,866 ribu TOE pada tahun 2025 dan 18.510 TOE tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun dipasok dari luar Provinsi Sumatera Utara.
4. Tercapainya intensitas energi final sebesar 8,49 TOE/milyar rupiah tahun 2025 dan 4,21 TOE/milyar rupiah tahun 2050.
5. Tercapainya rasio elektrifikasi Sumatera Utara sebesar 100% pada tahun 2025.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Daya saing infrastruktur teknologi informasi sebagai upaya percepatan transformasi digital di Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud dengan didukung dengan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Di Sumatera Utara perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 5,75 pada tahun 2021 menjadi 5,90 pada tahun 2022. Ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi dan sosial.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 Provinsi Sumatera meraih predikat "Baik" dengan nilai indeks 3,21 dalam Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini menandakan kesuksesan Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Prestasi ini diharapkan dapat memberi contoh dan mendorong penerapan teknologi serupa di daerah lain.

Pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2023 Sumatera Utara mendapat Penilaian: 1) 57,56 untuk penilaian Infrastruktur digital yang merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital; 2) 59,84 untuk penilaian Keterampilan digital adalah rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi, 3) 25,91 untuk penilaian Kegiatan yang mencerminkan

kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. 4) 34,59 untuk penilaian Pilar pekerjaan berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru.

7. Sarana dan Prasarana Dasar

Penyediaan Air Minum aman dan Sanitasi layak masih terkendala pada beberapa isu dan tantangan dalam perencanaan pembangunan. Beberapa persoalan yang terkait dengan penyediaan air minum aman dan sanitasi layak adalah cakupan pelayanan air minum masih rendah, Isu teknis operasional, dan Isu non-teknis seperti kurangnya ketersediaan regulasi daerah terkait dengan penyelenggaraan SPAM, Peran regulator berkaitan dengan pelayanan air minum, penyelenggaraan SPAM, dan kinerja operator dalam pengelolaan SPAM di daerah belum optimal, rendahnya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran SPAM, terbatasnya pemanfaatan potensi sumber-sumber dana non-publik, Pengelolaan air minum belum sepenuhnya responsif gender, dan Eksploitasi pemanfaatan air tanah yang tidak memenuhi kaidah lingkungan hidup.

Di Sumatera Utara sendiri, akses air minum layak sebesar 89,68%, akses air minum aman 10,93%, akses air minum perpipaan 23,02% dan sambungan rumah sebanyak 829.579 SR. Potensi sumber air baku untuk minum berupa 1 bendungan dengan volume tampung 20,07 juta m³ dengan kapasitas *intake* belum memanfaatkan sebesar 0,015 m³/detik atau sekitar 83,33%. Di Provinsi Sumatera Utara juga terdapat 2 (dua) SPAM Regional yang sudah terbangun yaitu SPAM Regional Mebidangro dengan kapasitas rencana 2.200 liter/detik dan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan kota Tebingtinggi) dengan total 300 liter/detik. Selain itu, akan direncanakan pembangunan SPAM Regional di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1) SPAM Regional Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 2) SPAM Regional Kota Tanjung Balai – Kabupaten Asahan;
- 3) SPAM Regional Kawasan Danau Toba;
- 4) SPAM Regional Kota Pematang Siantar – Kabupaten Simalungun;
- 5) SPAM Regional Kota Padangsidimpuan – Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 6) SPAM Regional di Kepulauan Nias.

Untuk pemenuhan jumlah kebutuhan air minum, Proyeksi kebutuhan air minum dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang akan dilayani hingga akhir tahun perencanaan dan standar kebutuhan air minum untuk semua jenis pelanggan. Dasar perhitungan untuk kapasitas SPAM ditentukan oleh Penetapan daerah pelayanan, Proyeksi penduduk, Jumlah penduduk yang dilayani, Perhitungan SR, Penetapan konsumsi air, Kehilangan air, Faktor hari maksimum dan jam puncak, Kapasitas Terpasang, dan Defisit Air. Kapasitas akhir produk air minum ditentukan dari jumlah yang akan dilayani di mana perhitungan kebutuhan air dilaksanakan oleh masing-masing SPAM regional.

Sedangkan Strategi penyediaan air minum yang akan diadopsi adalah memprioritaskan penanganan berdasarkan ketersediaan air baku di mana permintaan (*demand*) mengacu pada dokumen RISPAM kabupaten/kota, sinkronisasi lokus dan kegiatan dengan pengembangan Kawasan permukiman, dan kolaborasi pembangunan dengan menjamin keberfungsian sistem secara utuh (hulu-hilir). Sedangkan strategi pencapaian akses sanitasi layak adalah dengan percepatan penyediaan dan pengoperasian

infrastruktur serta peningkatan cakupan layanan sanitasi, penguatan substansi dan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola pengembangan layanan sanitasi berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 dengan visi pembangunan yang tertuang dalam dokumen tersebut adalah “Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan”. Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. Memperkuat akhlak dan moral melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan;
2. Memantapkan sistem pemerintahan yang berkualitas;
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum;
4. Memantapkan prasarana dan sarana ekonomi/fisik daerah;
5. Memantapkan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, kepariwisataan dan sektor unggulan lainnya melalui pembangunan kawasan agropolitan untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri;
6. Memantapkan sistem pendidikan pada semua jenjang untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas cerdas, kreatif, inovatif, produktif dengan etos kerja yang tinggi dan semangat partisipatoris yang kuat dalam membangun lingkungannya secara keseluruhan;
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat; dan
8. Mewujudkan Sumatera Utara yang asri dan lestari untuk menjamin keberlanjutan pembangunan

Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 direncanakan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJPD dibagi menjadi empat RPJMD atau lima tahunan yaitu RPJMD ke-1 (2006-2009) dengan fokus pembangunan pada penciptaan lingkungan masyarakat yang aman, damai, adil dan demokratis; RPJMD ke-2 (2009-2013) dengan fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap tingkat baik aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat terutama sektor produksi dan distribusi/pemasaran; RPJMD ke-3 (2014-2018) dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang lestari; serta RPJMD ke-4 (2019-2023) sebagai perwujudan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemandirian tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang untuk melihat efektivitas pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama ini. Berbagai capaian positif maupun kendala yang ditemukan akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan jangka panjang ke depan. Oleh karena itu, kesimpulan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang baru adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang pada Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 tidak dilengkapi dengan penetapan indikator target, sehingga capaian kinerja pembangunan jangka panjang diukur dengan membandingkan data realisasi tahun awal periode perencanaan terhadap realisasi tahun akhir perencanaan;
- b. Secara umum capaian pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara telah selaras dengan RPJP Nasional sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1 Keselarasan Visi Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 pada BAB II di atas;
- c. Capaian kinerja indikator makro RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan membandingkan realisasi capaian indikator makro pembangunan pada tahun awal dokumen perencanaan terhadap realisasi indikator sampai dengan tahun 2022, untuk indikator IPM, TPT, Angka Kemiskinan, PDRB Per Kapita dan Rasio Gini berhasil melampaui tahun dasar perencanaan dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”, namun untuk indikator LPE masih belum tercapai meskipun dengan predikat kinerja “Tinggi”;
- d. Secara zonasi, capaian indikator kinerja makro pembangunan Sumatera Utara banyak dipengaruhi oleh capaian indikator kabupaten kota yang perekonomiannya lebih maju yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang berada di zona Wilayah Pantai Timur;
- e. Adanya bencana besar covid-19 di tahun 2020 berdampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada periode rencana pembangunan jangka menengah 2019-2023 yang menyerap sumber daya pembangunan sehingga mengalihkan fokus pencapaian target yang telah direncanakan;
- f. Dalam penghitungan indikator kinerja makro, sepanjang periode Tahun 2005-2022 terdapat perubahan metode penghitungan indikator, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian realisasi terhadap target.

Hal-hal yang menjadi catatan rekomendasi untuk menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Utara periode mendatang, antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan pembangunan sumber daya manusia harus terus berlanjut menuju masyarakat Sumatera Utara yang mandiri, madani dan sejahtera;
- b. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin handal, responsif dan adaptif disertai dengan keunggulan SDM aparatur, dekat dengan pemanfaatan teknologi dalam memenuhi pelayanan publik;
- c. Intervensi kebijakan terhadap pemerataan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya alam, budaya dan mempertahankan identitas daerah;
- d. Memperkuat arah kebijakan dan tata kelola mitigasi dan ketahanan bencana untukantisipasi keadaan luar biasa yang mungkin terjadi di masa mendatang, seiring dengan kondisi alam yang berpotensi semakin rapuh;
- e. Penentuan skala prioritas pembangunan jangka panjang didukung dengan penetapan indikator sasaran yang akan dicapai secara terukur dengan memperhitungkan aspek-aspek yang mempengaruhinya;
- f. Penetapan fokus pembangunan secara kewilayahan untuk mencapai pemerataan pembangunan yang terukur.

Pembangunan Sumatera Utara selama 2 (dua) dekade yang tertuang pada RPJPD Tahun 2005-2025 telah menghasilkan perkembangan kondisi pembangunan daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa catatan penting menggambarkan refleksi pembangunan

Sumatera Utara sepanjang Tahun 2005-2022 yang dikutip dari Laporan Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif cenderung stagnan, Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2005 adalah 5,48 persen dan tahun 2021 turun menjadi 2,61 persen. Ekonomi Sumatera Utara anjlok pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,07, hal ini terjadi karena kondisi Indonesia dan Khususnya Sumatera Utara mengalami pandemi Covid-19;
- 2) IPM Provinsi Sumatera Utara semakin tumbuh dari sebesar 72,00 menjadi 72,71. Pada tahun 2005 IPM Sumatera Utara sebesar 72,00 dan mengalami peningkatan menjadi 72,71 pada tahun 2022. Namun IPM ini masih di bawah rata rata nasional sebesar 72,91;
- 3) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tumbuh Melebihi Nasional. Tahun 2005 sebesar 8,53 tahun, pada 2022 menjadi 13,31 Tahun atau tumbuh sebesar 4,78 Tahun selama dua dekade. Sedangkan Nasional pada tahun 2005 sebesar 7,30 tahun dan 2022 menjadi sebesar 8,69 atau hanya tumbuh sebesar 1,39 tahun;
- 4) Harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat. Pada Tahun 2010 HLS Sumatera Utara sebesar 11,82 tahun menjadi 14,37 tahun pada tahun 2022 di atas rata-rata nasional sebesar 13,31 tahun. Tahun 2010 HLS nasional adalah sebesar 11,29 tahun menjadi 13,10 tahun pada tahun 2022;
- 5) Umur Harapan Hidup mengalami kecenderungan kenaikan meskipun terkesan lambat. Pada tahun 2010 angka UHH Sumatera Utara sebesar 67,46 tahun dan pada tahun 2022 menjadi 69,61 tahun, kenaikan yang cukup signifikan walaupun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 71,85;
- 6) Penduduk Miskin Sumatera Utara mengalami penurunan dari 14,68 persen menjadi 8,15 persen. Angka Kemiskinan Sumatera Utara selama dua dekade mengalami penurunan signifikan di mana pada tahun 2005 angka Kemiskinan sebesar 14,68 persen menjadi 8,15 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar -6,53 persen. Dan berada di bawah rata rata nasional yang hanya 9,57 persen (2022). Bila dibandingkan dengan nasional, penurunan angka kemiskinan Sumatera Utara sudah cukup baik dengan penurunan sebesar -6,53 persen, sedangkan nasional -6, persen, yang di mana pada Tahun 2005 angka Kemiskinan nasional sebesar 15,97 persen (2005) dan dan 2022 menjadi sebesar 9,57 persen;
- 7) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami Perkembangan positif pada tahun 2005, PDRB hanya mencapai Rp. 139.618,31 Milyar Rupiah atau turun 8,4 persen dari tahun 2004 118.100,51 Milyar Rupiah. Tahun 2022 meningkat menjadi 955.193,09 Milyar Rupiah;
- 8) Pendapatan per kapita Sumatera Utara terus meningkat, di mana tahun 2005 PDRB per Kapita (ADHK) tercatat sebesar Rp. 7,13 Juta (metode lama) dan naik menjadi 37,94 juta (metode baru) pada tahun 2022;
- 9) Tingkat Pengangguran Mengalami Penurunan. Angka Pengangguran Terbuka tahun 2005 sebesar 10,98 persen, pada tahun 2022 menjadi 6,16 persen atau mengalami penurunan sebesar 4,82 persen tahun 2022. Jika dibandingkan dengan nasional Provinsi Sumatera Utara lebih baik yang di mana nasional memiliki persentase TPT sebesar 5.86 persen;

- 10) Ketimpangan pendapatan Sumatera Utara berfluktuasi. Rasio Gini Sumatera Utara tahun 2005 sebesar 0,34 namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,31, artinya ketimpangan terjadi, namun Rasio Gini Sumatera Utara masih rendah jika dibandingkan dengan Rasio Gini Nasional sebesar 0,38;
- 11) Panjang Jalan dalam Keadaan Mantap semakin menurun. Pada tahun 2016 kondisi jalan provinsi Sumatera Utara dalam keadaan mantap adalah 1 397,83 km, kondisi ini semakin menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 1 255,53 km;
- 12) Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum semakin bertambah. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 36,54 persen sampai 89,68 persen pada rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai tahun 2021 dengan capaian 40,46 persen sampai 90,89 persen;
- 13) Pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 66,92 persen dan 82,30 persen. Kondisi ini terjadi seiring seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar 77,48 persen, dan Sumatera Barat 69,27 persen, pelayanan akses sanitasi layak Provinsi Sumatera Utara masih perlu peningkatan lebih lanjut lagi;
- 14) Produksi perikanan tangkap cenderung menurun. Tahun 2017 sebesar 800.751 ton sedangkan tahun 2021 adalah sebanyak 366.731 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 354.797 ton dan 11.934 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD);
- 15) Indeks Ketahanan Pangan, dan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Indikator pola pangan harapan tahun 2019 adalah 66,22, yang semakin meningkat dari pada periode 2013-2017 sebesar 70 meningkat menjadi 73,8 pada periode 2018-2022. Indeks Ketahanan Pangan pada periode 2018-2022 mencapai 73,8. Penanganan Daerah Rawan Pangan (Prioritas I, II, III) pada periode 2013-2017 yaitu 117 kecamatan dan periode 2018-2022 menjadi 77 kecamatan.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka beberapa poin penting untuk penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

1. Pada penyusunan RPJPD ke depan perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui *cascading* sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing strategi dan arah kebijakan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
2. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, dan peningkatan umur harapan hidup (UHH) perlu dijadikan sebagai isu strategis dan program prioritas baik dalam periode jangka panjang maupun periode jangka menengah dan pendek dengan target yang realistis.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Proyeksi penduduk merupakan suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di masa

yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah. Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan. Salah satu target dari perencanaan kebutuhan ini adalah terjadinya pemerataan pembangunan yang dapat menekan ketimpangan dalam mengakses layanan maupun infrastruktur dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan Indonesia Emas terkait upaya pengarusutamaan gender, di mana diharapkan Indeks Ketimpangan Gender dan Rasio Ketergantungan tidak meningkat hingga tahun 2045 di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2. 14 Proyeksi Demografi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

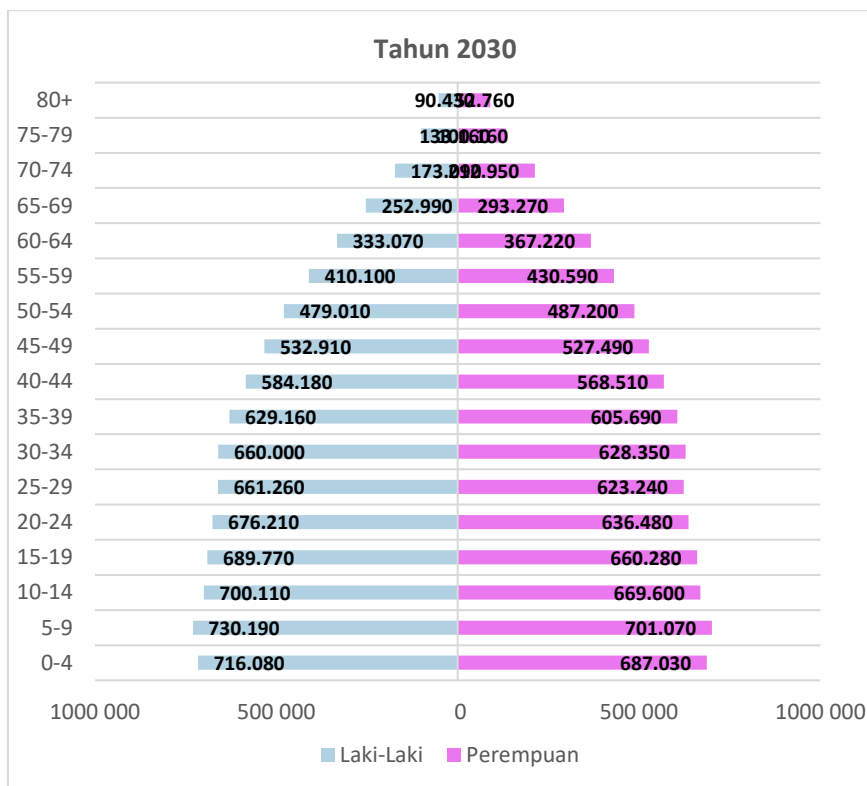
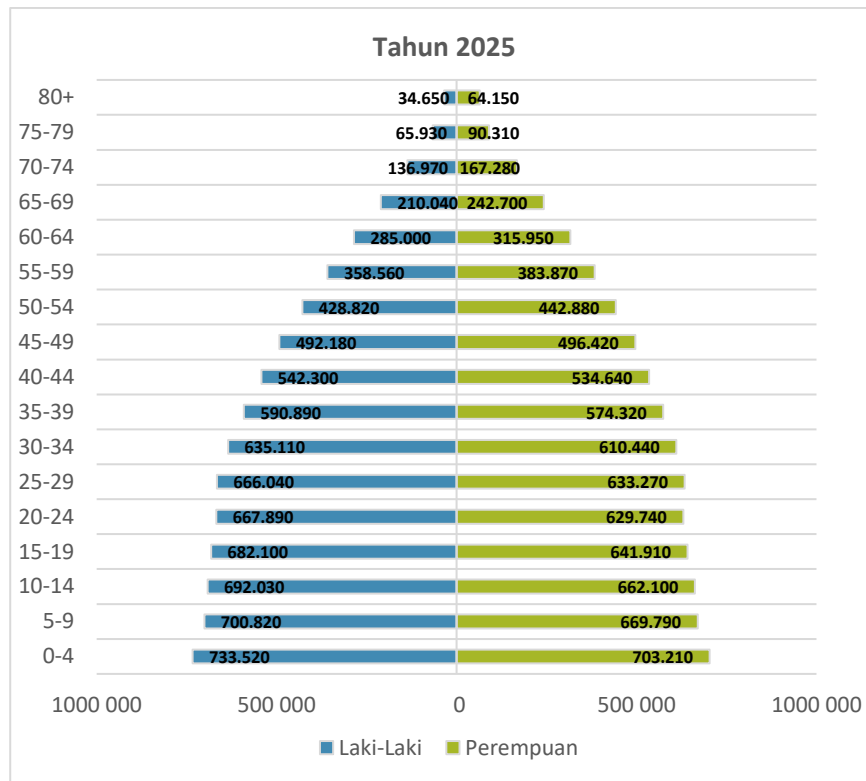
Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	7 400,73	7 922,85	8 381,03	8 776,40	9 118,32	9 416,43
Perempuan (000)	7 356,05	7 862,99	8 322,57	8 731,68	9 094,64	9 416,57
Total (000)	14 756,78	15 785,84	16 703,60	17 508,07	18 212,95	18 832,99
Komposisi Umur (%)						
0-14	27,51	26,36	25,17	24,03	22,75	21,90
15-64	67,42	67,23	67,00	66,70	66,57	66,08
65+	5,07	6,41	7,84	9,27	10,68	12,02
Dependency Ratio (%)	48,33	48,75	49,26	49,94	50,22	51,33

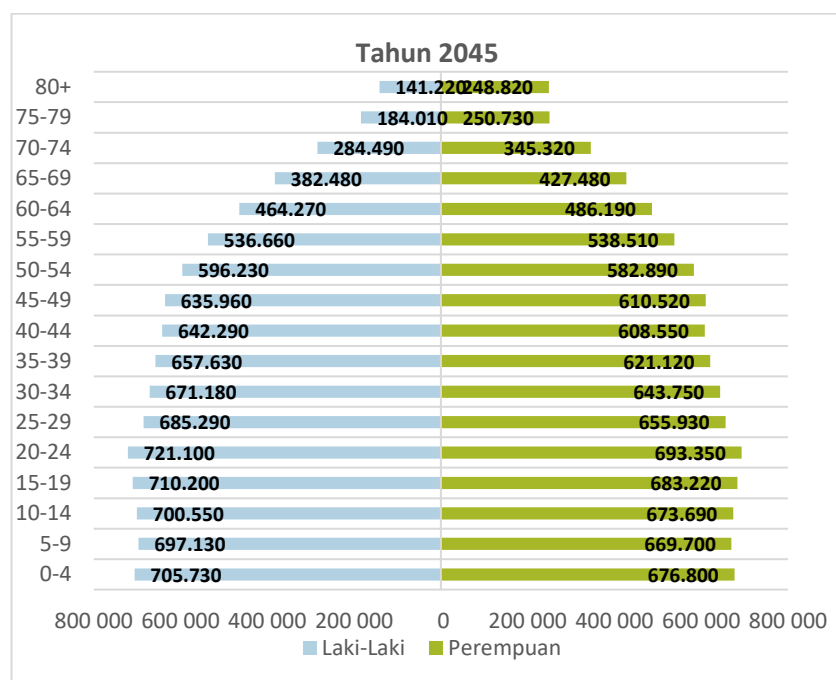
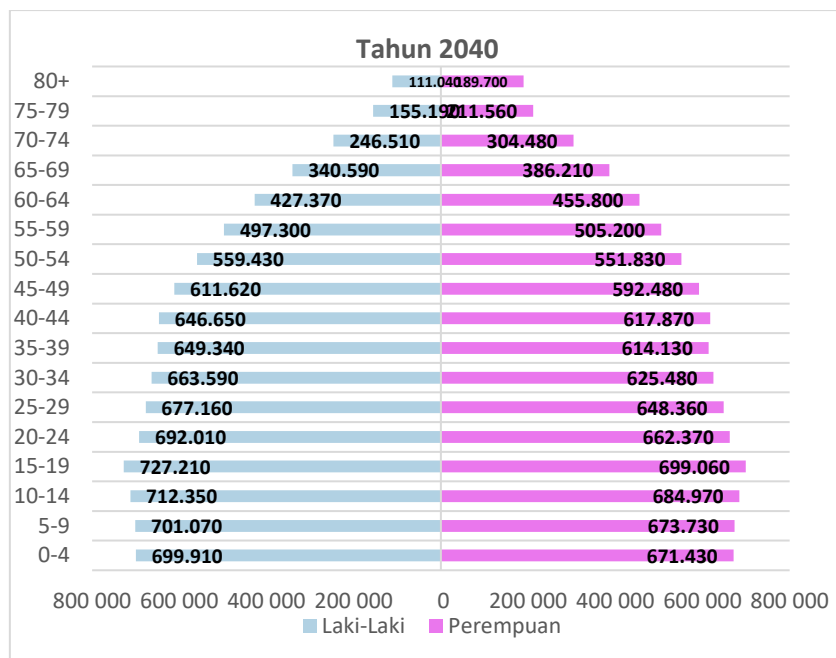
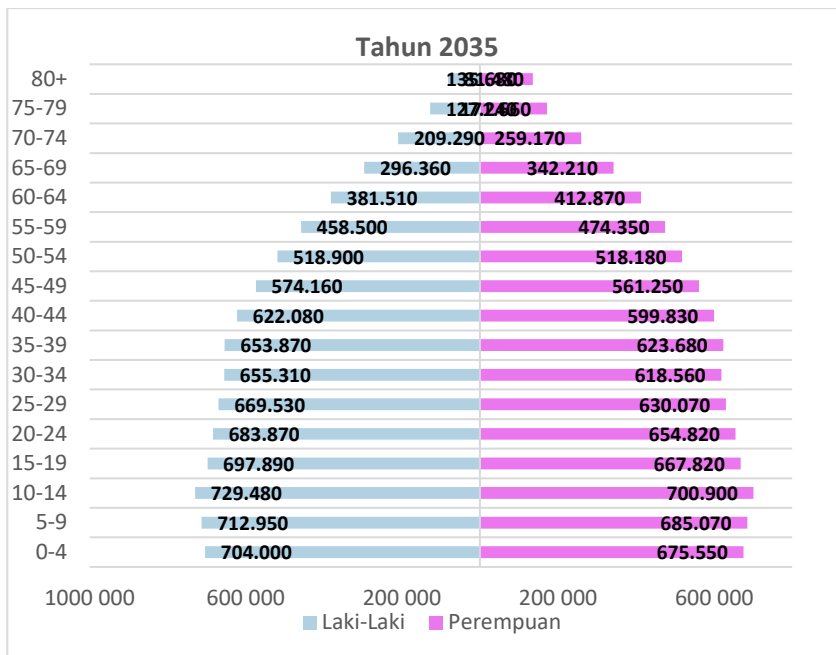
Sumber: *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS, 2023*

Penduduk Sumatera Utara diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi sebesar 18.832.990 jiwa. Komposisi usia penduduk berubah dengan meningkatnya kelompok usia non-produktif. Pada periode awal RPJPD, angka ketergantungan penduduk adalah sekitar 48 persen, namun angka ketergantungan penduduk di tahun 2045 diproyeksikan menjadi 51,33 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa usia non-produktif di Sumatera Utara telah melampaui setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia lanjut (lebih dari 65 tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan hampir dua kali lipat, di tahun 2045 diproyeksikan sekitar 12 persen dari jumlah penduduk. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan jumlah penduduk usia lanjut di awal periode RPJPD hanya sekitar 6 persen. Berbeda dengan jumlah penduduk usia lanjut, penduduk usia produktif justru semakin menurun jumlahnya meskipun tidak signifikan, yang sebelumnya di awal RPJPD jumlahnya sekitar 67 persen dari jumlah penduduk di tahun 2045 menjadi sekitar 66 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk usia muda yang sebelumnya berjumlah sekitar 27 persen di tahun 2045 menjadi kurang dari 23 persen. Demikian juga dengan komposisi jenis kelamin penduduk, diproyeksikan pada tahun 2045 terjadi perubahan jumlah penduduk, penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan rasio sebesar 99,99, yang artinya dalam 100 orang perempuan terdapat hampir 100 orang laki-laki. Kepadatan penduduk di Sumatera Utara pada tahun 2045 juga

diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 260 jiwa/km². Berikut ditampilkan piramida penduduk Sumatera Utara dalam setiap 5 tahun mulai tahun 2025 hingga 2045.

Gambar 2. 58 Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Utara per Lima Tahun dalam Periode 2025-2045





Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS, 2023 (diolah)

Piramida penduduk Sumatera Utara di atas menggambarkan bahwa dalam 20 tahun ke depan Provinsi Sumatera Utara tidak benar-benar mengalami bonus demografi. Piramida penduduk Sumatera Utara masih tetap termasuk piramida tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua bentuknya meruncing.

Berdasarkan proyeksi penduduk di atas maka dapat dihitung proyeksi kebutuhan sarana prasarana selama 20 tahun yang akan datang.

1. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap-tiap rumah. Sementara itu, data *backlog* dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah. Dalam studi kajian kebutuhan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Barat, *backlog* rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal 1 (satu) keluarga menghuni 1 (satu) rumah. Dalam menghitung kebutuhan rumah penting untuk mempertimbangkan asumsi yang digunakan dan data yang akurat agar hasil perhitungan dapat menjadi dasar yang baik dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 4 (empat) jiwa maka proyeksi kebutuhan rumah di Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah 3,946,458 unit dengan jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2025 adalah 15.785.830 jiwa. Sedangkan proyeksi kebutuhan rumah pada tahun 2045 adalah 4.708.248 unit untuk proyeksi penduduk Sumatera Utara pada tahun 2045 adalah 18.832.990 jiwa.

Tabel 2. 15 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	15.785.830	16.703.610	17.508.090	18.213.000	18.832.990
Proyeksi Kebutuhan Rumah	3.946.458	4.175.903	4.377.023	4.553.250	4.708.248

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan bersih ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan nondomestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non-domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Kebutuhan non-domestik diasumsikan 20 persen dari kebutuhan domestik. Proyeksi kebutuhan air total merupakan penjumlahan kebutuhan air domestik dan nondomestik ditambah sejumlah air untuk kehilangan yang tidak dapat ditanggulangi baik secara teknis maupun ekonomis.

Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 20 liter/orang/hari, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Sumatera Utara. Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan air bersih di Sumatera Utara adalah 4.385,95 liter/detik dengan jumlah penduduk sebesar 15.785.830 jiwa. Sedangkan pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan air bersih di Sumatera Utara 5.231,39 liter/detik dengan jumlah penduduk sebesar 18.832.990 jiwa.

Tabel 2. 16 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	15.785.830	16.703.610	17.508.090	18.213.000	18.832.990
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/detik)	4.385,95	4.639,89	4.863,36	5.059,17	5.231,39

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3. Proyeksi Kebutuhan Energi/Kelistrikan

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita. Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis kebutuhan energi/kelistrikan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Kebutuhan konsumsi listrik per 5 tahun sampai dengan tahun 2045 dapat dihitung menggunakan proyeksi kebutuhan energi listrik dengan menggunakan asumsi standar kebijakan penyediaan listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2013-2022. Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 170 watt/jiwa, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik di Sumatera Utara. Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan energi listrik di Sumatera Utara adalah 2.683.591,10 kWh dengan jumlah penduduk sebesar 15.785.830 jiwa. Sedangkan pada tahun 2045, proyeksi kebutuhan energi listrik di Sumatera Utara 3.201.608,30 kWh dengan jumlah penduduk sebesar 18.832.990 jiwa.

Tabel 2. 17 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	15.785.830	16.703.610	17.508.090	18.213.000	18.832.990
Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik (kWh)	2.683.591,10	2.839.613,70	2.976.375,30	3.096.210,00	3.201.608,30

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4. Proyeksi kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Kebijakan terkait pengelolaan sampah di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di mana setiap orang wajib

mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Namun sebelumnya pengelolaan persampahan lebih banyak bertumpu pada konsep lama/konvensional yang bersifat “kumpul – angkut – buang” yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir.

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di atas, di mana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang” yang memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengolahan Akhir Sampah (TPAS). Dalam paradigma ini, sampah yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Kebutuhan infrastruktur persampahan per 5 tahun sampai dengan tahun 2045 dapat dihitung menggunakan proyeksi kebutuhan timbulan sampah. Dengan asumsi timbulan sampah domestik sebesar 3 Liter/orang/hari, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi timbulan sampah di Sumatera Utara. Pada tahun 2025 proyeksi timbulan sampah di Sumatera Utara adalah 47.357,52 m³/hari dengan jumlah penduduk sebesar 15.785.830 jiwa. Sedangkan pada tahun 2045, proyeksi timbulan sampah di Sumatera Utara 56.498,98 m³/hari dengan jumlah penduduk sebesar 18.832.990 jiwa.

Tabel 2. 18 Proyeksi Kondisi Persampahan dan Kebutuhan TPA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	15.785.830	16.703.610	17.508.090	18.213.000	18.832.990
Proyeksi Timbulan Sampah (m ³ /hari)	47.357,52	50.110,83	52.524,27	54.639,00	56.498,98
Proyeksi kebutuhan TPA	33	35	37	38	40

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk yang pesat di Provinsi Sumatera Utara, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, standar kebutuhan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) per jumlah penduduk sesuai dengan SNI 03-1733-2004 adalah 1 (satu) unit TPA untuk lebih dari 480.000 penduduk. Pada tahun 2025, penduduk Sumatera Utara diproyeksikan mencapai 15.785.830 jiwa. Dengan standar tersebut, dibutuhkan 33 unit TPA untuk mengelola sampah di provinsi ini. Ketika melihat proyeksi ke depan, pada tahun 2045, jumlah penduduk Sumatera Utara diproyeksikan akan mencapai 18.832.990 jiwa. Dengan mempertimbangkan standar

kebutuhan 1 (satu) unit TPA per lebih dari 480.000 penduduk, proyeksi kebutuhan TPA pada tahun tersebut adalah sekitar 40 unit TPA.

5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada SNI 03-1722-2004. Perhitungan dilakukan dengan membagi proyeksi jumlah penduduk secara total per kabupaten/kota dengan standar jumlah penduduk pendukung di setiap jenis sarana. Perhitungan kebutuhan dilakukan hanya untuk sarana puskesmas dan puskesmas pembantu.

a. Puskesmas/Balai Pengobatan

Perhitungan jumlah puskesmas/balai pengobatan di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi bahwa setiap 1 unit puskesmas melayani sejumlah 120.000 jiwa penduduk dengan lokasi yang dapat bergabung dengan lokasi kantor kecamatan.

b. Puskesmas Pembantu/Balai Pengobatan Lingkungan

Perhitungan jumlah puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi bahwa setiap 1 unit puskesmas melayani sejumlah 30.000 jiwa penduduk dengan lokasi yang dapat bergabung dengan lokasi kantor kelurahan/desa.

Tabel 2. 19 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	15.785.830	16.703.610	17.508.090	18.213.000	18.832.990
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas (Unit)	132	139	146	152	157
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu (Unit)	526	557	584	607	628

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Proyeksi kebutuhan Puskesmas ini juga diikuti dengan pemenuhan kebutuhan optimalisasi kapasitas sumber daya tenaga kesehatan, pemutakhiran alat deteksi dan diagnosis risiko penyakit, sertifikasi dan standarisasi pelayanan tenaga kesehatan serta tata kelola, dan tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan dalam pembiayaan kesehatan, asuransi dan jaminan kesehatan.

6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan pendidikan dilakukan dengan berpedoman Permendikbud Ristek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Perhitungan dilakukan dengan membagi prediksi jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing satuan pendidikan yang dibagi dengan standar jumlah siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan.

a. Sekolah Dasar/MI

Perhitungan jumlah fasilitas SD/MI di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 10,91% (2025); 11,57% (2030); 12,22% (2035); 12,88% (2040); dan 13,53% (2045)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SD/MI ialah sebanyak 16 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan adalah sebanyak 18 rombongan belajar.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat dilihat bahwa ketersediaan jumlah SD/MI di Sumatera Utara telah melampaui kebutuhan jumlah sekolah bahkan hingga tahun 2030. Wilayah kepulauan memiliki jumlah SD/MI yang melebihi kebutuhan hingga tahun 2045 sedangkan Wilayah Pantai Timur memiliki *gap* jumlah SD/MI tertinggi di tahun 2040 dan 2045.

Tabel 2. 20 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Uraian	Tersedia (2022/2023)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk		15.785.830	16.703.610	17.508.090	18.213.000	18.832.990
Proyeksi Kebutuhan SD/MI (Unit)	10.865	7.830	8.799	9.760	10.711	11.653
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs (Unit)	3.867	2.946	3.304	3.660	4.012	4.360
Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA (Unit)	2.654	2.618	2.900	3.178	4.012	3.454

Sumber: Hasil Analisis, 2023

b. Sekolah Menengah Pertama/MTs

Perhitungan jumlah fasilitas SMP/MTs di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMP/MTs (13-15 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 5,37% (2025); 5,70% (2030); 6,02% (2035); 6,34% (2040); dan 6,67% (2045)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMP/MTs ialah sebanyak 24 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan adalah sebanyak 12 rombongan belajar.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat dilihat bahwa ketersediaan jumlah SMP/MTs di Sumatera Utara telah melampaui kebutuhan jumlah sekolah bahkan hingga tahun 2030. Wilayah kepulauan memiliki jumlah SMP/MTs yang melebihi kebutuhan hingga tahun 2045. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki *gap* jumlah SMP/MTs di tahun 2040 dan 2045.

c. Sekolah Menengah Atas/MA

Perhitungan jumlah fasilitas SMA/MA di Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMA/MA (13-15 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 5,32% (2025); 5,64% (2030); 5,96% (2035); 6,28% (2040); dan 6,60% (2045)

- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMA/MA ialah sebanyak 30 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan adalah sebanyak 12 rombongan belajar.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat dilihat bahwa ketersediaan jumlah SMA/MA di Sumatera Utara telah melampaui kebutuhan jumlah sekolah bahkan hingga tahun 2030. Wilayah kepulauan memiliki jumlah SMA/MA yang melebihi kebutuhan hingga tahun 2045. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki *gap* jumlah SMA/MA sejak tahun 2030 hingga 2045.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Berdasarkan Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2023-2043

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan kelautan) yang berhierarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat baik dalam ruang darat dan ruang laut. Tujuan pengembangan sistem perkotaan untuk mendorong proses pertumbuhan pada kota-kota yang berpotensi untuk berkembang dengan menghindari terjadinya ketidakefisienan kota-kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Sistem perkotaan wilayah Provinsi Sumatera Utara diarahkan memiliki 4 (empat) hierarki pusat pelayanan, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo).
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. PKW di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Tebingtinggi, Sidikalang, Pematangsiantar, Balige, Rantauprapat, Kisaran, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Sibolga.
- c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara. PKSN di wilayah Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan.
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Kota-kota sebagai pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan.

Penentuan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera utara hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2043).

Rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2043 terdiri dari 1 (satu) PKN, 9 (sembilan) PKW, 1 (satu) PKSN dan 42 (empat puluh dua) PKL. Untuk lebih jelasnya rencana sistem pusat permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 21 Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)					
1	PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo	Eksisting dan Sedang Berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Provinsi Pusat perdagangan dan jasa regional Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa regional Pusat pelayanan jasa pariwisata Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional Pendidikan tinggi Industri
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)					
1	PKSN Medan	Kota Medan	Eksisting dan Sedang Berkembang	Pengembangan baru	Pusat pemerintahan Provinsi Pusat perdagangan dan jasa regional Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa regional Pusat pelayanan jasa pariwisata Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional Pendidikan tinggi Industri
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)					
1	PKW Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Eksisting	Revitalisasi	Pemerintahan Kota Perdagangan dan jasa
2	PKW Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar	Eksisting	Revitalisasi	Pemerintahan Kota Perdagangan dan jasa Industri Pendidikan
3	PKW Kisaran	Asahan	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Industri pengolahan hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan Perdagangan dan Jasa
4	PKW Balige	Toba	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Perdagangan Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan Pelayanan jasa pariwisata Pendidikan Tinggi
5	PKW Sidikalang	Dairi	Sedang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten

No	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
			berkembang		Industri pengolahan hasil pertanian Perdagangan
6	PKW Sibolga	Kota Sibolga	Eksisting	Revitalisasi	Pemerintahan Kota Pusat perdagangan dan jasa regional Pusat pelayanan jasa pariwisata Pengolahan hasil perikanan Pusat transportasi laut Pusat pendidikan
7	PKW Padang-sidempuan	Kota Padang Sidempuan	Eksisting	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil hutan Perdagangan dan Jasa
8	PKW Rantauprapat	Labuhanbatu	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Perdagangan dan Jasa Pengolahan hasil perkebunan
9	PKW Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Pariwisata Bahari Pengolahan hasil perikanan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)					
1	PKL Pangkalan Brandan	Langkat		Revitalisasi	Pengolahan hasil pertambangan Pengolahan hasil pertanian Perikanan
2	PKL Stabat	Langkat		Revitalisasi	Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Industri Pengolahan hasil Pertanian
3	PKL Perbaungan	Serdang Bedagai		Pengembangan baru	Permukiman Perkotaan Industri Perdagangan
4	PKL Sei Rampah	Serdang Bedagai		Pengembangan baru	Permukiman Perkotaan Pusat Pemerintahan Perdagangan dan Jasa
5	PKL Indrapura	Batu Bara		Pengembangan baru	Perikanan Pelabuhan Pengolahan hasil pertanian Pendidikan kejuruan
6	PKL Lima Puluh	Batu Bara		Pengembangan baru	Permukiman perkotaan Perdagangan dan Jasa
7	PKL Simpang Empat	Asahan		Pengembangan baru	Permukiman Perkotaan

No	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
					Pengolahan Hasil perikanan
8	PKL Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai		Revitalisasi	Pengolahan Hasil perikanan Pelabuhan Permukiman perkotaan
9	PKL Aek Kanopan	Labuhanbatu Utara		Revitalisasi	Pengolahan hasil perkebunan Pengolahan hasil pertanian
10	PKL Labuhan Bilik	Labuhanbatu		Revitalisasi	Industri Pengolahan hasil Perikanan Jasa
11	PKL Aek Nabara	Labuhanbatu		Pengembangan baru	Perkebunan pertanian tanaman pangan
12	PKL Kota Pinang	Labuhanbatu Selatan		Revitalisasi	Perkebunan pertanian tanaman pangan
13	PKL Berastagi	Karo		Revitalisasi	Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan Pariwisata Agroindustri
14	PKL Kabanjahe	Karo		Revitalisasi	Agroindustri Pengolahan hasil perkebunan
15	PKL Merek	Karo		Revitalisasi	Pertanian tanaman pangan Perkebunan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
16	PKL Kuta Buluh	Karo		Pengembangan baru	Pertanian tanaman pangan Perkebunan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
17	PKL Tiga Binanga	Karo		Pengembangan baru	Pertanian tanaman pangan Perkebunan
18	PKL Pematang Raya	Simalungun		Revitalisasi	Permukiman perkotaan Pendidikan
19	PKL Perdagangan	Simalungun		Pengembangan baru	Pengolahan Hasil Perkebunan Perdagangan
20	PKL Parapat	Simalungun		Revitalisasi	Pariwisata Perkebunan
21	PKL Saribudolok	Simalungun		Pengembangan baru	Pertanian tanaman pangan Pendidikan kejuruan
22	PKL Pangururan	Samosir		Pengembangan baru	Pariwisata Jasa Pengolahan Hasil pertanian
23	PKL Salak	Pakpak Bharat		Revitalisasi	Pertanian tanaman pangan Pendidikan kejuruan

No	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
24	PKL Dolok Sanggul	Humbang Hasundutan		Revitalisasi	pertanian tanaman pangan Pengolahan hasil hutan Pengolahan Hasil perkebunan
25	PKL Porsea	Toba		Pengembangan baru	pertanian tanaman pangan Pengolahan hasil hutan
26	PKL Tarutung	Tapanuli Utara		Revitalisasi	pertanian tanaman pangan Pengolahan hasil hutan Pengolahan Hasil perkebunan
27	PKL Siborong-borong	Tapanuli Utara		Pengembangan baru	Pertanian Tanaman Pangan Pengolahan hasil perkebunan
28	PKL Pandan	Tapanuli Tengah		Pengembangan baru	Permukiman perkotaan Perdagangan dan Jasa
29	PKL Barus	Tapanuli Tengah		Pengembangan baru	Perikanan tangkap Perkebunan Jasa
30	PKL Sipirok	Tapanuli Selatan		Revitalisasi	Pengolahan hasil perkebunan dan hutan Pendidikan kejuruan
31	PKL Batang Toru	Tapanuli Selatan		Pengembangan baru	Pengolahan hasil perkebunan dan hutan Pendidikan kejuruan
32	PKL Gunung Tua	Padang Lawas Utara		Revitalisasi	Perkebunan pertanian tanaman pangan
33	PKL Sibuhuan	Padang Lawas		Pengembangan baru	Perkebunan pertanian tanaman pangan
34	PKL Natal	Mandailing Natal		Revitalisasi	Perikanan Pertanian tanaman pangan
35	PKL Siabu	Mandailing Natal		Pengembangan baru	Pengolahan hasil pertanian Pendidikan kejuruan
36	PKL Panyabungan	Mandailing Natal		Revitalisasi	Pengolahan Hasil Hutan dan perkebunan Pertanian tanaman pangan
37	PKL Kotanopan	Mandailing Natal		Revitalisasi	Pengolahan hasil pertanian Pendidikan kejuruan
38	PKL Gido	Nias		Pengembangan baru	Pusat pemerintahan Kabupaten Pengolahan hasil perikanan Perkebunan
39	PKL Lotu	Nias Utara		Pengembangan	Perikanan

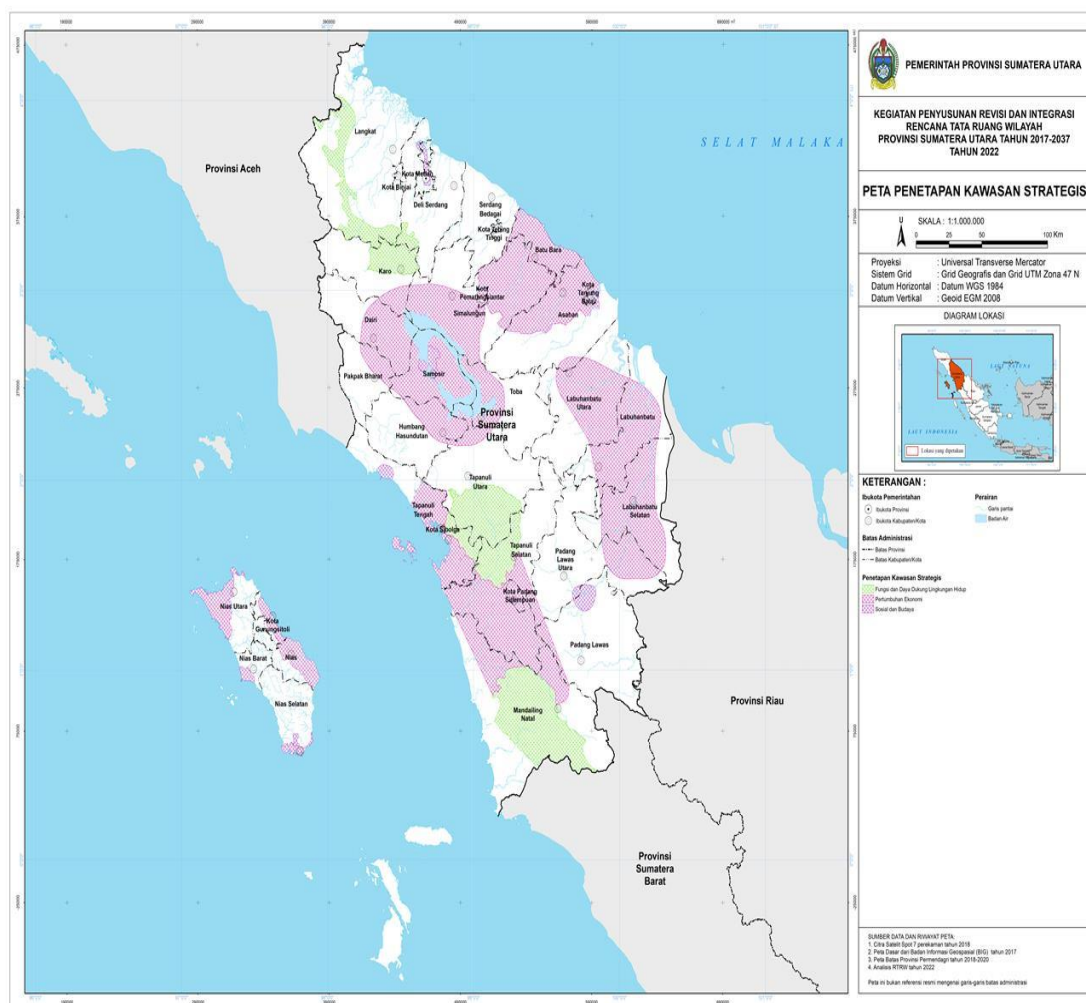
No	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
				baru	perkebunan Peternakan
40	PKL Lahomi	Nias Barat		Pengembangan baru	Perikanan tangkap Perkebunan
41	PKL Teluk Dalam	Nias Selatan		Revitalisasi	Perikanan tangkap Pariwisata Bahari
42	PKL Pulau Telo	Nias Selatan		Pengembangan baru	Pariwisata Bahari Perikanan tangkap

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara 2023-2043

2.7.2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2023-2043

Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan wilayah provinsi. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Gambar 2. 59 Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Provinsi Sumatera Utara 2023-2043

- A. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:
1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
7. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
8. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan

Pengembangan kawasan agropolitan ini adalah untuk pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan yang akan dikembangkan mencakup:

1. Merek, Kabupaten Karo;
2. Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Lumban Julu, Kabupaten Toba;
5. Harian, Kabupaten Samosir;
6. Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
7. Sitinjo, Kabupaten Dairi;
8. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
9. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

Komoditi agropolitan yang direncanakan meliputi kopi, jagung, nanas, wortel, bawang merah, kacang tanah, kentang, kubis, cabe, tomat, ubi jalar, alpukat, ubi kayu, sapi, kerbau dan ayam buras. Pada pelaksanaannya, potensi ini didukung oleh adanya jaringan transportasi pelabuhan dan bandara sehingga dapat dikembangkan dengan sinergitas antar daerah. Lebih lanjut, terdapat rencana pengembangan infrastruktur di kawasan ini meliputi: (1) pembangunan jalan RAWASARING sepanjang ± 90 km yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke wilayah kantong produksi pertanian di sebagian besar wilayah Kab. Deli Serdang dan Karo, meningkatkan akses ke objek agrowisata di Deli Serdang dan wisata danau, serta mendukung pengembangan objek wisata baru di Deli Serdang dan Simalungun; (2) pembangunan jalan lingkaran luar Danau Toba dengan panjang 248,53 km yang dimaksudkan untuk mendukung kawasan-kawasan agrowisata dan agropolitan. Jalan lintas kabupaten di kawasan Danau Toba merupakan jalan pariwisata yang terdiri dari 78 km ruas jalan nasional, 15 km ruas jalan provinsi dan 155,53 km ruas jalan kabupaten dengan lebar badan jalan minimal 6 m; (3) peningkatan jalan-jalan poros sentra produksi dan wisata; dan (4) pembangunan jaringan irigasi.

b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun–Batubara–Asahan

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) didasarkan oleh sektor-sektor ekonomi unggulan dengan gubernur menjadi pihak yang berperan dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur melalui penetapan kebijakan dan strategi pengembangan KAPET. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang akan dikembangkan antara lain:

1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai– Asahan;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun- Batubara;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Kawasan ekonomi terpadu ini merupakan bagian dari pembangunan kawasan agromarinepolitan dengan komoditi unggulan wilayah pantai timur antara lain: Ikan Pelagis (126.500 ton/tahun; Ikan Demersal 110.000 ton/tahun, Ikan Karang 6.800 ton/tahun; dan udang 20.000 ton/tahun. Rencana pembangunan infrastruktur pada kawasan ini adalah pembangunan ruas jalan susur pantai timur dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan penumpang dan barang, di antaranya Pelabuhan Internasional Belawan, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Pelabuhan Tanjung Sarang Elang.

Selain pembangunan kawasan agromarinepolitan, pada pengembangan kawasan ini meliputi pembangunan infrastruktur kawasan KEK Sei Mangkei. KEK Sei Mangkei ditetapkan dengan PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan diresmikan pada tahun 2015 dengan luas 1.933,80 Ha yang meliputi berbagai kavling untuk industri dan fasilitas pendukung. Di masa mendatang, direncanakan infrastruktur di KEK Sei Mangkei akan terpadu antara jalan kawasan, jaringan listrik, pipa gas, jaringan telekomunikasi, *dry port*, jalur kereta api, jalan nasional, dan *airport*.

Pembangunan yang sudah dilakukan di KEK Sei Mangkei antara lain PKS kap. 75 ton TBS/jam, PKO kap. 400 ton inti/hari, PLTBm kap. 2 x 3,5 MW, WTP kap. 250 m³/jam, gedung perkantoran, gedung pusat inovasi, saluran drainase induk, infrastruktur jalan beton ROW 28 dan 43, industri Oleokimia PT UOI, jaringan teknologi informasi, jaringan kabel listrik dalam tanah, jaringan kabel telepon dalam tanah, jaringan perkeretaapian, jalan kawasan, *dry port* domestik, dan lainnya.

c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;

Kawasan ekonomi terpadu Labuhanbatu termasuk ke dalam pembangunan kawasan agromarinepolitan. Selain itu, Labuhan batu mempunyai sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi serta batubara sehingga kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas melalui perencanaan dan koordinasi yang baik. Sebagai contoh terkait sinergitas dengan daerah lain, Teluk Nibung yang berlokasi di Tanjung Balai masih digunakan sebagai pusat distribusi barang oleh masyarakat Labuhanbatu dan Kepulauan Riau. Pemerintah provinsi berupaya mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Teluk Nibung sebagai pelabuhan penumpang dan bersinergi dengan pelabuhan lain yang berada di sekitarnya, misalnya Pelabuhan *Port Klang* di Malaysia, serta dapat mengakomodir daerah *hinterland* seperti Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhanbatu, Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.

Pada rencana pembangunan prioritas di Sumatera Utara, direncanakan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Kisaran dengan peran untuk

menambah kapasitas ruas jalan, mengurangi beban *traffic*, menghemat biaya operasi kendaraan, mengurangi beban biaya dana untuk investasi serta memacu pertumbuhan kawasan pada koridor sepanjang jalan tol. Jalan tol ini melewati 7 kabupaten dan 1 kota di mana Kabupaten Labuhanbatu termasuk ke dalamnya bersama dengan Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya

Kawasan Pantai Barat masih termasuk ke dalam pembangunan kawasan agromarinepolitan dengan dengan fokus pengembangan sinergitas pembangunan antar daerah dan sinergitas pelayanan umum melalui penanganan terencana dan koordinasi. Kawasan Pantai Barat meliputi:

1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Padangsidimpuan– Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Labuan Angin – Sibolga.

Komoditi unggulan pada Pantai Barat antara lain: Jenis Ikan Pelagis 115.000 ton/tahun; Ikan Demersal 78.700 ton/tahun; Ikan Karang 5.144 ton/tahun; dan Udang 21.000 ton/tahun dengan rencana pembangunan infrastruktur di kawasan ini adalah pengembangan pelabuhan-pelabuhan penumpang dan barang, di antaranya Pelabuhan Internasional Belawan, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Pelabuhan Tanjung Sarang Elang serta infrastruktur strategis berupa jaringan rel kereta api.

e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Kepulauan Nias termasuk ke dalam pengembangan Kawasan Andalan di mana merupakan bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Kepulauan Nias memiliki sektor unggulan berupa pariwisata, perkebunan, pertambangan, dan perikanan dengan potensi sumber daya alam meliputi minyak dan gas bumi serta batu bara. Beberapa infrastruktur strategis di Provinsi Sumatera Utara yang mendukung dalam pengembangan kawasan ekonomi terpadu Kepulauan Nias antara lain jaringan jalan lingkaran Pulau Nias dan TPA Regional.

B. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- c. Merupakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut:

a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro (Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) Selain berfungsi sebagai kawasan ekonomi, Kawasan Perkotaan Mebidangro juga berfungsi untuk peningkatan kualitas cagar budaya karena merupakan salah satu identitas kebudayaan etnis di Sumatera Utara. Sektor unggulan di Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi industri, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Pada pelaksanaannya, kawasan ini didukung payung hukum lainnya berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Mebidangro di mana tertuang pada PERPRES Nomor 62 Tahun 2011, namun RTR KSN ini sedang dilakukan revisi pada tahun 2024. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro meliputi:

1. Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang
2. Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
3. Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Sebagai dukungan dalam pengembangan kawasan, dibangun beberapa fasilitas antara lain TPA Regional dengan pengolahan sampah menggunakan *sanitary landfill*, pembangunan serta rehabilitasi jalan kereta api perkotaan rute Medan – Binjai – Belawan – Pancur Batu – Deli Tua – Tanjung Morawa, program *Mass Rapid Transportation* (MRT), Moda angkutan *transit oriented development* (TOD) dengan revitalisasi 21 (dua puluh satu) stasiun kereta api yang sudah ada dan tersebar di wilayah Mebidangro, optimalisasi terminal regional, dan pengembangan Pelabuhan Internasional Belawan.

- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara;
 - c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit
- C. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:
- a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. Merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
 - d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. Rawan bencana alam; atau
 - g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan ekosistem Leuser dan Bahorok bertujuan untuk menjaga fungsi lindung kawasan konservasi karena merupakan dulu DAS pada WS strategis ke beberapa kota utama, dengan kondisi saat ini terdapat bencana longsor dan banjir karena terjadinya alih fungsi lahan yang sulit diawasi. Dukungan kebijakan yang sudah dilakukan adalah dengan pembentukan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ini bertujuan untuk menjaga hutan lindung Batang Toru dan Taman Nasional Batang Gadis di mana merupakan hulu sungai-sungai besar ke kota utama sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi hutan Batang Toru menjadi hutan lindung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Dalam upaya pencapaian pembangunan di masa depan terdapat berbagai isu dan tantangan yang menjadi permasalahan pembangunan di provinsi Sumatera Utara. Permasalahan pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi geografi, demografi, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial budaya, daya saing daerah dan pelayanan umum. Sebagai berikut:

1. Permasalahan Kondisi Geografi

- a. Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;
- b. Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain), sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana;
- c. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.

2. Permasalahan Kondisi Demografi

- a. Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2045
- b. Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan;
- c. Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif. Sementara Angka Ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 45.6 persen (2022) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 jiwa penduduk usia tidak produktif;
- d. Angka usia produktif terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak seimbang. Kalau ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit.

3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

a. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja

Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98% dan menurun menjadi 5,89% pada Tahun 2023, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,32%. Tingginya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (TK). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas TK Sumatera Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/TK, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp 87,96 juta/TK.

Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya *human capital* (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etos kerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidak merata.

b. Belum optimalnya daya saing perekonomian Sumatera Utara

Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari:

- 1) Sektor industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari *stagnan*-nya kontribusi industri pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industri sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat
- 2) Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara belum mencapai tingkat kemajuan yang ideal, sektor ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif yang belum maksimal, sistem pembiayaan yang belum memadai, dan kekurangan infrastruktur fisik dan nonfisik yang cukup. Selain itu, peraturan ekonomi kreatif, penghargaan masyarakat terhadap kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kreatif, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya lokal, dan standarisasi produk juga perlu ditingkatkan. Salah satu faktornya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing

Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, Eco-friendly, Fair Trade, atau Vegan masih sangat terbatas.

- 3) Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Sektor pariwisata di Sumatera Utara menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB belum optimal. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari UNESCO Global Geopark. Rendahnya daya saing sektor Pariwisata ditunjukkan melalui kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 3%. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, *ancillary* dan *available packages* di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata serta kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahan preferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Serta, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, *marketing digital*, serta kurangnya *branding* dan investasi infrastruktur pariwisata sehingga terbatasnya akses ke pasar global.
 - 4) Rendahnya investasi pada sektor riil seperti industri pengolahan (agroindustri), industri kemaritiman, industri makanan, dan industri manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi di KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya
- c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan masih sangat tinggi.

Walaupun tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera utara menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah

Selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya

a. Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum inklusif

Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dihadapkan pada permasalahan meningkatnya usia harapan hidup yang menyebabkan bertambahnya penduduk Lansia, dan Lansia Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan Lansia Laki-Laki. Meningkatnya Perilaku dan Pola Hidup tidak sehat serta meningkatnya gangguan mental mengakibatkan Meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular serta buruknya status gizi masyarakat yang menyebabkan masih adanya kasus *stunting*, gizi kurang dan obesitas. Di samping itu kesenjangan antara indikator input, proses dan output masih terlihat. Jika diperhatikan cakupan *antenatal care* K1, K2, K3, K4 hampir mencapai target 100 %, tetapi jika dilihat angka-angka prevalensi atau kasus-kasus kematian bayi, kematian ibu, komplikasi kehamilan, perdarahan dan *stunting* ternyata juga masih tinggi. Diduga hal ini karena kapasitas dan kualitas pemeriksaan dan deteksi dini terhadap pemeriksaan belum mengikuti SOP dan prosedur standar. Permasalahan selanjutnya dihadapkan pada jumlah tenaga Kesehatan yang belum tersebar merata di setiap daerah, Layanan kesehatan masyarakat belum sepenuhnya inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta perlindungan dan jaminan kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota belum optimal.

Sementara itu di bidang Pendidikan, aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pendidikan belum sepenuhnya inklusif, aksesibilitas (fisik dan non-fisik), dan kualitas tenaga pendidik serta peserta didik belum maksimal. Saat ini ketersediaan Sekolah Menengah di tingkat Kecamatan sebesar 94,51% dari 455 total Kecamatan. Masih terdapat 5,49% (25 Kecamatan) yang belum memiliki Sekolah menengah. Selain itu masih banyak kondisi sekolah menengah yang belum cukup memadai. Serta masih terdapat 5 kabupaten belum memiliki SLB. Sementara itu Terdapat 101.486 anak tidak sekolah usia 16-18 tahun di Provinsi Sumatera Utara. Lulusan SMK yang terserap bekerja di DUDI baru terserap sebesar 31,5 %, . Sebagian besar guru di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV (84,3%). Namun hanya 31,32% yang sudah memiliki sertifikasi. Selanjutnya dari sisi kesejahteraan masyarakat Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin masih menjadi permasalahan serta sulitnya masyarakat miskin dan kaum rentan (Lansia dan Disabilitas) untuk dapat memiliki sumber pendapatan dan kemandirian ekonomi selain itu Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin belum inklusif dan belum maksimal.

b. Belum maksimalnya penguatan pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan

Ketimpangan Gender masih tinggi, dengan Indeks Ketimpangan Gender tahun 2023 sebesar 0.425 serta Masih rendahnya

perlindungan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan lain belum maksimalnya penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan serta belum maksimalnya peningkatan pemberdayaan perempuan serta kelompok rentan (termasuk Lansia dan Disabilitas) lainnya dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif belum menjadi prioritas.

- c. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Ancaman negatif budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan.

5. Permasalahan Infrastruktur dan lingkungan

- a. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Sumatera Utara. Selanjutnya infrastruktur lain seperti irigasi juga belum optimal di beberapa wilayah.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan, diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2035 fasilitas sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih mencukupi jumlah penduduk yang diproyeksikan. Dibutuhkan penambahan menjadi 11.653 unit SD/MI dan 4.360 unit SMP/MTs di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SMA/SMK/MA diperkirakan yang tersedia saat ini masih mencukupi hingga tahun 2025 dan dibutuhkan penambahan menjadi 3.454 unit di tahun 2045. Untuk fasilitas kesehatan, diproyeksikan dibutuhkan sekitar 152 puskesmas dan 607 puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2045.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum, ditandai dengan cakupan layanan akses air minum layak tahun 2022 sebesar 77,10 persen di mana masih berada di bawah capaian nasional sebesar 91,05. Sanitasi, ditandai dengan cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 sebesar 77,69 persen di mana masih berada di bawah capaian nasional sebesar 86,03 persen. rumah layak huni, persampahan juga masih cukup rendah di beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama di daerah afirmasi 3T. Masalah banjir juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang belum tangguh bencana, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir pada tahun 2022 sebesar 58,16 persen dan diharapkan menjadi 64,51 persen pada tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Layanan ketenagalistrikan Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting

yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Hal ini ditandai dengan konsumsi listrik Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 850-1.050 kWh di mana konsumsi tersebut berada di bawah rata-rata konsumsi listrik nasional pada tahun yang sama sebesar 1.173 kWh. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama di daerah Metropolitan Medan juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi.

Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antar daerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Bandara perairan belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau belum dikembangkan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata. Rasio konektivitas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mempunyai nilai 0,565 dan diharapkan akan meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2026 (sesuai dengan target dokumen RPA Tahun 2024-2026).

b. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam masih rendah, ditandai dengan masih tingginya indeks risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 mencapai 142,51 (tinggi) dibandingkan dengan indeks risiko bencana nasional sebesar 138,81. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 74,11% (Baik), sebagai perbandingan, indeks kualitas lingkungan hidup nasional memiliki nilai 72,72%. Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah kualitas lahan dan air mengingat indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada pada nilai 48,69% (Kurang), dan indeks kualitas air dengan nilai 61,20% (Sedang). Namun untuk kualitas lingkungan lain seperti indeks kualitas udara (89,69%), Indeks kualitas air laut (85,19%) memiliki nilai yang baik. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup adalah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, Iklim dan cuaca ekstrem saat ini harus menjadi perhatian di sektor Pertanian, selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatera.

6. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan optimalisasi capaian di mana pada tahun 2021 kategori predikat kinerja indeks reformasi birokrasi adalah B dengan nilai 62,07 poin dari target yang ditetapkan yakni predikat kinerja BB dengan nilai 64 poin.

Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masih belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masih menghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplementasi dengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif.

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan pada isu global, isu nasional, dan isu-isu pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu direspons dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara.

3.2.1 Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi Global

Perekonomian dunia saat ini menghadapi beberapa isu yang perlu ditinjau. Prospek pemulihan global menurut Laporan *World Economic Situation and Prospects* yang dirilis PBB di tahun 2023 ini masih cukup suram yang diiringi dengan inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya ketidakpastian untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dampak Pandemi COVID-19, perang, krisis iklim dan kondisi makroekonomi yang berubah sangat cepat menjadi tantangan untuk mencapai tujuan SDGs, bahkan terdapat beberapa isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi global dan PDB per kapita diperkirakan tumbuh lambat di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia dan diperkirakan memperkuat tren kinerja ekonomi yang lemah dalam jangka panjang; (2) perekonomian dunia menghadapi risiko pertumbuhan di bawah standar yang kemungkinan terjadi secara berkepanjangan karena dampak pandemi, perang, struktur makroekonomi, lemahnya investasi, dan meningkatnya kerentanan utang; (3) inflasi yang masih sangat tinggi di banyak negara berkembang; (4) pasar tenaga kerja di banyak negara maju yang terus menunjukkan ketahanan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan kekurangan pekerja yang berulang akibat penggunaan sistem kerja jarak jauh dan pengaturan jam kerja yang fleksibel; (f) pengetatan moneter global yang memperburuk kerentanan fiskal dan utang di negara-negara berkembang.

Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara terutama dalam hal pengembangan sektor perkebunan dan industri yang berorientasi ekspor. Krisis ekonomi global

juga dapat memperlambat investasi sektor ekonomi di Sumatera Utara termasuk investasi untuk pembangunan infrastruktur.

b. Pariwisata Global (Sustainable Tourism)

Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir 90% dari tingkat sebelum pandemi pada akhir tahun 2023. Sekitar 975 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional antara Januari dan September 2023, meningkat 38% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pada kuartal ketiga tahun 2023, kedatangan wisatawan internasional mencapai 91% dari tingkat sebelum pandemi, dan mencapai 92% pada bulan Juli, bulan terbaik sejak dimulainya pandemi. Secara keseluruhan, pariwisata telah pulih sebesar 87% dari tingkat sebelum pandemi pada periode Januari-September 2023, menempatkan sektor ini pada jalur pemulihan hampir 90% pada akhir tahun. Penerimaan pariwisata internasional diperkirakan mencapai USD 1,4 triliun pada tahun 2023, sekitar 93% dari USD 1,5 triliun yang diperoleh pada tahun 2019. Ini menunjukkan pariwisata internasional hampir sepenuhnya pulih, hal ini potensi besar dan penting bagi destinasi, bisnis, dan komunitas yang bergantung pada sektor pariwisata yang akan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Travel & Tourism Development Index 2024, Sumatera Utara ada di urutan 14 dengan hasil penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) 3.548 dengan indikator di bidang pariwisata terdapat 18 indikator dan bidang lainnya terdapat 43 indikator.

c. Demografi Global

Menurut data *World Population Prospects (2022)* Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9.7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2045 tumbuh menjadi 9.5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran, sementara itu perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya.

d. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Global

Menurut laporan *World Urbanization Prospects, The 2018 Revision* yang dirilis PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di tahun 2050.

Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspons dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang, serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun.

Kondisi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global tersebut juga diperkirakan terjadi di Sumatera Utara di mana berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di tahun 2045 diperkirakan akan meningkat. Begitu juga halnya dengan urbanisasi yang kemungkinan terjadi karena perkembangan Wilayah Metropolitan Medan. Urbanisasi juga kemungkinan terjadi dengan berkembangnya kawasan perkotaan baru yang tumbuh akibat adanya pusat kegiatan ekonomi baru.

e. Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan *startup*. Bangkitnya *e-commerce* yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru. Perkembangan teknologi *blockchain* juga mendisrupsi sistem keuangan yang mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan Provinsi Sumatera Utara di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.

f. Perubahan iklim global

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Sebagai langkah dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang berjalan semakin cepat, *Intergovernmental*

Negotiating Committee/INC yang kemudian pada tahun 1992 INC mengadopsi sebuah kerangka hukum yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC* dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi di dalamnya dengan tujuan akhir yaitu *Common but Differentiated Responsibilities Principle*. Dalam keikutsertaannya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian paris (*Paris Agreement*) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, pada tataran nasional dengan keikutsertaan *Paris Agreement* akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta adaptif terhadap dampak perubahan iklim, ribuan ilmuwan dan pengawas pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Namun, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan kenaikan suhu sebesar 3°C pada akhir abad ini.

Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua orang, namun beberapa negara menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan negara lain. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020. Beberapa kerangka dan perjanjian global telah dimiliki dengan tiga kategori tindakan yang harus dilakukan, yaitu: pengurangan emisi; adaptasi terhadap dampak iklim; dan pendanaan untuk penyesuaian yang diperlukan.

g. Sumber energi alternatif

Pemanfaatan sumber energi alternatif menjadi inti tantangan perubahan iklim yang dihadapi dunia. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, berdasarkan *Paris Agreement* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu diakhiri karena telah menyumbang hingga lebih dari 75% emisi GRK dan 90% emisi karbon dioksida. Investasi pada sumber energi alternatif yang bersih, mudah diakses, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan menjadi tantangan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan energi alternatif salah satunya melalui kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan kebijakan yang relevan lainnya.

h. Geopolitik dan Geoekonomi di Samudera Hindia

Samudera Hindia sangat penting bagi nasib geopolitik dan ekonomi negara-negara pesisir dan kekuatan di luarnya. Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkatan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga

di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang ekonomi dan pembangunan yang berharga. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan “*Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources*” tahun 2013 yang memuat tentang kerja sama keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana, kerjasama akademik dan sains teknologi, serta pertukaran pariwisata dan budaya.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, di mana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat terkuasai. Bonus demografi juga diperkirakan akan terjadi di Sumatera Utara dengan hasil proyeksi penduduk di tahun 2045 yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja.

b. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2045 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup Sumatera Utara. Pertumbuhan penduduk kedepannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal.

c. Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (*superhub*) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi melalui pengembangan kluster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi *superhub* dengan kluster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

d. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal kedepannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

e. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

f. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas talenta Sumatera Utara, kita membuka peluang untuk memberikan nilai tambah yang tinggi secara global.

g. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication (SLoC)* dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*, dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

h. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US\$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3.2.3 Isu Strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, isu Nasional dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi 20 tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2045) diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2045 pembangunan manusia dihadapkan pada transisi demografi dan proyeksi peningkatan jumlah penduduk yang dapat meningkatkan rasio ketergantungan dan peningkatan jumlah Lanjut Usia. Transisi demografi yang diiringi dengan perilaku dan pola hidup tidak sehat mengakibatkan meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular serta permasalahan gizi dan permasalahan Kesehatan mental. Selain itu, Layanan kesehatan masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan jumlah tenaga kesehatan belum tersebar secara merata di setiap daerah. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan kesehatan menjadikan tantangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan) di seluruh

Kabupaten/Kota. Sementara itu sektor Pendidikan dihadapkan pada belum optimalnya aksesibilitas (fisik dan non-fisik), kualitas tenaga pendidik, dan peserta didik. Selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non-formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Kondisi di atas merupakan tantangan yang besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas dan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial agar tersedia pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan (termasuk lansia dan disabilitas). Isu utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Isu ini menyangkut dua aspek, yakni pertumbuhan ekonomi dan kualitas tenaga kerja. PDB Sumatera Utara berdasarkan lapangan usaha terutama didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu keberlanjutan sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimal terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara

sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurang-tersediaan air akan menyebabkan ketidak-tercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

c. Pembangunan antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan, tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai,

Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. Wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang

diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan Kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

e. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

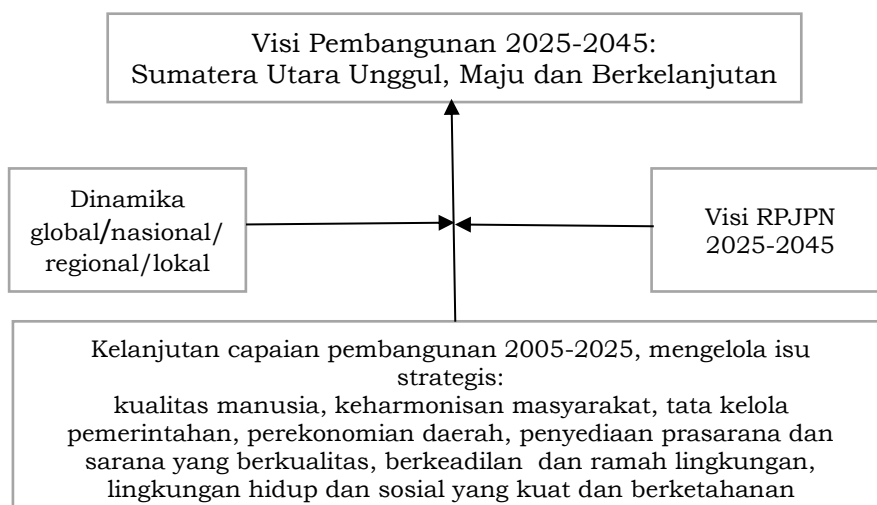
4.1 Perumusan Visi dan Kerangka Pikir Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, yang mana merujuk pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan di Dalam Kebhinekaan”**. Rencana pembangunan jangka panjang Sumatera Utara dua puluh tahun ke depan juga dalam upaya menjawab isu strategis daerah jangka panjang meliputi kualitas manusia yang berdaya saing, keharmonisan masyarakat yang beragam dan berbudaya tinggi, tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas, berkeadilan dan ramah lingkungan, lingkungan hidup dan sosial yang kuat dan berketahanan.

Di samping sebagai kelanjutan periode pembangunan sebelumnya, pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 juga dalam rangka mendukung perwujudan cita-cita besar atau visi Bangsa Indonesia dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”** yang sering disebut dengan visi Indonesia Emas 2045. Guna mendukung cita-cita atau visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Sumatera Utara mengambil fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, serta mandala keberagaman budaya yang harmonis dalam dua puluh tahun ke depan.

Pembangunan Sumatera Utara tentunya dilaksanakan dan dipengaruhi oleh dinamika global, nasional, regional, maupun lokal. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Kondisi dan pengaruh tersebut perlu disikapi dengan mitigasi dan adaptasi.

Gambar 4. 1 Latar Belakang Perumusan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045



Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan latar belakang semua hal di atas, sehingga dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara 20 tahun ke depan adalah “**Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan**”. Rumusan visi tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar skema di atas. Gambaran mekanisme pencapaian visi pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

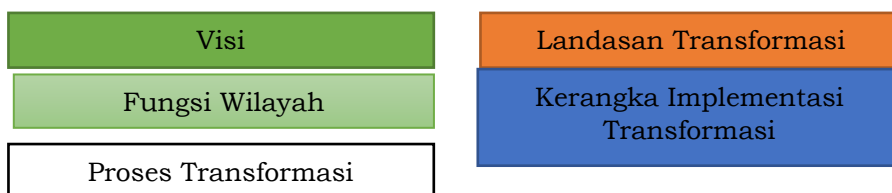
Kerangka pikir pembangunan Sumatera Utara di atas menggambarkan visi Provinsi Sumatera Utara 2045 sebagai Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Hal itu dicapai dengan menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, serta mandala keberagaman budaya yang harmonis **melalui proses transformasi** sosial, ekonomi, dan tata kelola. Perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan **dengan landasan transformasi** berupa keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Landasan transformasi tersebut perlu dicapai terlebih dahulu agar pembangunan dapat menjadi kompetitif yang didorong oleh produktivitas tinggi secara merata dan berkelanjutan.

Gambar 4. 2 Kerangka Pikir Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045



Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2024 (diolah)

Keterangan:



Perwujudan visi Provinsi Sumatera Utara 2045 **dilaksanakan dalam kerangka implementasi** yang mengikat semua proses proses transformasi dan landasan transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata, didukung sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Di samping itu kerangka implementasi dalam upaya perwujudan visi “Sumatera

Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan” juga didukung dengan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

4.2 Visi Sumatera Utara 2045

Visi pembangunan Sumatera Utara tahun 2025–2045 merupakan wujud Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk rentang waktu 20 tahun. Visi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat yang berkembang, seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan memperhatikan kondisi capaian masa lalu serta memperhatikan proyeksi dan modal dasar pembangunan maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

“Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan “Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan” merupakan kondisi yang diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna di balik pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sumatera Utara, merupakan wilayah yang memiliki posisi geostrategis berada di jalur lintas pelayaran tersibuk di dunia, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan penduduk produktif, masyarakat religius, harmonis berbudaya, dan berperadaban mulia dalam tatanan nasional dan pergaulan antar bangsa di dunia.

Unggul

Sumatera Utara berperan penting di tingkat nasional dengan daya saing global melalui transformasi sosial yang membentuk masyarakat cerdas, kompetitif, dan inklusif, didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh, terampil, dan menghargai keberagaman budaya. Transformasi tata kelola menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif, menghadirkan layanan publik berkualitas yang mendukung pengembangan bioindustri dan pariwisata kelas dunia. Selain itu, keamanan daerah yang tangguh menjadi fondasi yang menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menarik bagi warga, investor, dan wisatawan. Dengan sinergi antara transformasi sosial, tata kelola yang unggul, dan keamanan yang kokoh, Sumatera Utara menjadi pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Maju

Pada tahun 2045, Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Sumatera Utara menjadi provinsi berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan.

Berkelanjutan

Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

Visi pembangunan Sumatera Utara 2045 mendukung visi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju yang perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Utara yang memiliki daya saing, penduduk berkualitas, produktif, dan inovatif, menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara berdaya, modern, tangguh, dan inovatif. Pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di negara Indonesia juga diwujudkan dalam pembangunan di Sumatera Utara. Capaian pembangunan Sumatera Utara di tahun 2045 memperkuat peran dan posisi Sumatera Utara dengan provinsi lainnya secara nasional dan berkontribusi terhadap peran Indonesia di tingkat global.

4.3 Sasaran Visi

Upaya mewujudkan “Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” tercermin dalam sasaran visi, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Peningkatan pendapatan per kapita ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita berkisar antara 454,83 – 534,21 Juta Rupiah, peningkatan kontribusi industri terhadap PDRB sebesar 27,14 – 28,34 persen, dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 532,92.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan terus menurun hingga 0,17 – 0,42 persen di tahun 2045 hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi dan membaiknya kondisi tenaga kerja yang tercermin dari peningkatan proporsi pekerja formal.

Ketimpangan pendapatan antar penduduk Sumatera Utara juga menurun dengan Rasio Gini mencapai hingga 0,241 – 0,264 poin. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang.

3. Peran dan Posisi di Tingkat Nasional dan Global Meningkat

Kemajuan pembangunan Sumatera Utara meningkatkan nilai peran dan posisi Sumatera Utara di tingkat nasional dan global yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah dengan nilai 4,75 pada tahun 2045. Dalam bidang pariwisata meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan nasional (IPKN) Sumatera Utara dengan target posisi 5 di tahun 2045 yang saat ini berada di posisi 22. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia sebesar 0,72

pada tahun 2045. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju *Net Zero Emission* (NZE)

Sumatera Utara meningkatkan komitmen di tingkat nasional dan global dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menjadi 90,39% pada tahun 2045 antara melalui penerapan konsep hijau pada konsep pembangunan perkotaan. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran visi pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.

Kelima sasaran visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara di atas memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan sasaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Berikut ditampilkan persandingan sasaran visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dengan sasaran visi RPJPN Tahun 2025-2045.

Gambar 4. 3 Sasaran Visi Sumatera Utara 2045



Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Sasaran visi Sumatera Utara 2045 di atas juga telah ditetapkan target capaiannya agar selaras dan dapat mendukung pencapaian sasaran visi RPJPN Tahun 2025-2045. Dua tabel di bawah menunjukkan keselarasan target capaian (setiap 5 tahun hingga 2045) maupun indikator sasaran visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dengan sasaran visi RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 4. 1 Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

No.	RPJPN Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*)	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,01 - 74,02	454,83 - 534,21	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,18 - 74,49	454,83 - 534,21
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	58,77	532,92		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,79	138,50
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,18 - 19,27	27,14 - 28,34		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,00 - 19,50	27,18 - 31,85
2	Kemiskinan menuju 0% & ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17 - 0,42	Pengentasan kemiskinan dan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17 - 0,67

No.	RPJPN Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*)	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	berkurang	Rasio Gini (indeks)	0,303 - 0,305	0,241 - 0,264	ketimpangan	Rasio gini (Indeks)	0,303 - 0,305	0,241 - 0,264
		Kontribusi PDRB (ADHB) Provinsi (%)	5,03	5,91		Kontribusi PDRB (ADHB) Provinsi	5,10	5,91
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20 - 5,40	5,42 - 6,70
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peran dan posisi di tingkat nasional dan global meningkat	Indeks Inovasi Daerah		
						Indeks Daya Saing Daerah	3,4	4,75
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,53	0,72	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,53	0,68
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	90,39	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	90,39
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	83,49

*) Keterangan: tahun 2025 Berdasarkan hasil rakortekbangpus 26 Februari 2024 dan pembahasan Indikator Makro di Bali tgl 15 Mei 2024

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Tabel 4. 2 Target Sasaran Visi Sumatera Utara Setiap 5 Tahun dalam Periode 2025-2045

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE		TARGET			
		2022	2025*)	2029	2035	2039	2045
Peningkatan Per Kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	63,19	*72,75-74,01	105,75-110,00	200,00-205,57	245,00-250,00	454,83 - 534,21
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	-	*58,77	Menunggu Data Nasional			532,92
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	17,41	*19,00-19,50	20,41-21,00	21,84-23,00	24,00-26,00	27,14 - 28,34
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,15 (2023)	7,85-5,65	5,24	3,75	1,25	0,17 - 0,67
	Rasio Gini (Indeks)	0,309 (2023)	*0,305-0,303	0,290-0,287	0,280-0,277	0,270-0,260	0,241 - 0,264
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)		5,10				5,91
	Pertumbuhan Ekonomi		5,25 - 5,40				5,42 - 6,70
Peran dan Posisi di Tingkat Nasional dan Global Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,24	*3,4	3,75	4,00	4,25	4,75
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	-	0,52-0,60	0,56	0,34	0,66	0,68

SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE		TARGET			
		2022	2025*)	2029	2035	2039	2045
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	25,16	*1,00	18,88	41,23	63,57	90,39
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		77,20				83,49

*) Keterangan: tahun 2025 Berdasarkan hasil rakortekrenbangpus 26 Februari 2024

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

4.4 Misi

Untuk mewujudkan visi Sumatera Utara “Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan meliputi:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera.

Pembangunan Sumatera Utara hingga 2045 pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan masyarakat Sumatera Utara sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas dan sejahtera. Transformasi sosial dilakukan agar penduduk Sumatera Utara dapat menjadi manusia yang unggul karena memiliki sistem kesehatan yang tangguh dan responsif untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berdaya saing serta masyarakat sejahtera dan terlindungi.

2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi (termasuk pengembangan pariwisata, pertumbuhan ekonomi kreatif dan keuangan syariah), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Transformasi ekonomi di Sumatera Utara juga didukung dengan transformasi sosial yang menjadi kunci pendorong peningkatan produktivitas perekonomian Sumatera Utara. Dalam konteks ini, bioindustri dan pariwisata memiliki peran penting. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang kemudian menggeser perekonomian Sumatera Utara yang tadinya lebih bergerak pada sektor primer (pertanian, perkebunan) lalu berubah ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa). Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inovasi dalam bioindustri, transformasi digital dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan serta pusat kegiatan ekonomi lainnya juga semakin mendorong keberhasilan transformasi ekonomi Sumatera Utara melalui industrialisasi dan urbanisasi.

3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas.

Transformasi sosial dan transformasi ekonomi di Sumatera Utara tidak dapat terwujud tanpa adanya transformasi tata kelola dengan *menjalankan good and dynamic governance*. Transformasi tata kelola diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang adaptif, lincah dan kolaboratif yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan dukungan teknologi informasi.

Transformasi tata kelola diharapkan akan menciptakan kelembagaan dan regulasi yang adaptif dalam proses pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan pemerataan dan keadilan bagi seluruh penduduk. Pelayanan Publik berorientasi teknologi, lincah, standarisasi sarana prasarana dan responsif. Transformasi tata kelola juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menggeser peran masyarakat dari penerima manfaat menjadi pelaku aktif pembangunan.

4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah adalah untuk menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang menjadikan Sumatera Utara unggul dan berdaya gantar kawasan. Hal ini ditunjukkan juga dengan peran dan posisi Sumatera Utara di tingkat nasional dan global meningkat.

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan manusia, keluarga, masyarakat beserta lingkungan dan alam sekitarnya yang mampu hidup dalam keseimbangan dan keberkelanjutan.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dimaksudkan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup dengan kualitas tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan dengan penguatan nilai-nilai agama dan kerukunan beragama, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah.

Pembangunan berbasis karakteristik wilayah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah serta tata kelola dan kemampuan fiskalnya.

7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan, ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi faktor pendukung utama pengembangan wilayah Sumatera Utara dan menjadi pilar transformasi yang diharapkan terwujud di tahun 2045. Dukungan sarana dan prasarana yang perlu dibangun di Sumatera Utara ialah berkaitan dengan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar di kawasan perkotaan maupun perdesaan juga mendukung pengembangan pariwisata dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini juga mendukung misi ke-7 RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah dan lingkungan. Pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan memerlukan perencanaan yang matang, penerapan teknologi hijau, infrastruktur hijau dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Adapun prinsip utamanya antara lain efisiensi energi, pengelolaan sumber daya air dan konservasi air, material ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, kebiasaan hijau, konservasi ekosistem. Dengan komitmen dan kolaborasi, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai, membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan Masyarakat. Dalam mewujudkan misi ini, pembangunan sarana dan prasarana

Sumatera Utara juga mengikuti arahan pembangunan wilayah Sumatera yang telah diamanatkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan** melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Kesinambungan pembangunan di Sumatera Utara terwujud melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan pengembangan pembiayaan inovatif dalam memperkuat aspek pembangunan berkelanjutan. Misi ini sesuai dengan misi ke-8 RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. Perwujudan misi ke-8 jangka panjang Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan kaidah pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 dan pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif.

Delapan misi pembangunan Sumatera Utara di atas memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan visi Sumatera Utara 2045 yaitu Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Visi Sumatera Utara Unggul yang bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global memiliki keterhubungan dan kesesuaian yang kuat dengan dengan misi ke-4 dan ke-5. Misi ke-4 RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 mengagendakan perwujudan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah untuk menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang **menjadikan Sumatera Utara unggul** dan berdaya gentar kawasan. Demikian juga dengan misi ke-5 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan **memperkuat ketangguhan manusia**, keluarga, masyarakat beserta lingkungan dan alam sekitarnya yang mampu hidup dalam keseimbangan dan keberkelanjutan. Visi Sumatera Utara Maju yang bermakna pada tahun 2045, Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal memiliki keterhubungan dan kesesuaian yang kuat dengan dengan misi ke-2, ke-3, ke-6, dan ke-7. Visi Sumatera Utara Berkelanjutan yang bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang memiliki keterhubungan dan kesesuaian yang kuat dengan dengan misi ke-1, ke-3, dan ke-8. Kuatnya keterhubungan dan kesesuaian visi misi maupun keselarasan sasaran visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJPN Tahun 2025-2045 juga tidak terlepas dengan selarasnya keselarasan misi RPJPD Provinsi Sumatera Utara dengan misi RPJPN. Kedua rencana pembangunan jangka panjang tersebut sama-sama memiliki 8 misi dan masing-masing transformasinya bersesuaian satu sama lain. Berikut ditampilkan persandingan misi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dengan misi RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 4. 3 Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045				RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 2045
No	Agenda	No	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial
		2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
		3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
2	Landasan Transformasi	4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3	Kerangka Implementasi Transformasi	6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil Berbasis Karakteristik Wilayah
		7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
		8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 diturunkan ke dalam 4 tahap berdasarkan periode jangka menengah dengan tema setiap periode yaitu:

1. Tahap I Periode 2025-2029 yang merupakan Tahapan Penguatan Transformasi;
2. Tahap II Periode 2030-2034 yang merupakan Tahapan Percepatan Transformasi;
3. Tahap III Periode 2035-2039 yang merupakan Tahapan Peningkatan Daya Saing untuk Ekspansi Global; dan
4. Tahap IV Periode 2040-2045 yang merupakan Tahapan Perwujudan Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1 Arah kebijakan Tahap I Periode 2025 – 2029

Pada periode pertama dari pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara, fokus utama diarahkan pada "**Penguatan Transformasi**" sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Tahap pertama ini bertujuan untuk menguatkan fondasi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penguatan fondasi ini sangat penting untuk mempersiapkan Sumatera Utara dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global. Arah kebijakan pada tahap ini memastikan bahwa Sumatera Utara memiliki dasar yang kuat untuk memulai transformasi menuju pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata global. **Penekanan tahap ini memprioritaskan** pembangunan layanan dasar, penguatan industri regional, serta penciptaan struktur tata kelola yang responsif dan dinamis. Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan kapasitas riset, Sumatera Utara dipersiapkan untuk memasuki tahap transformasi lebih lanjut.

Mewujudkan transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang unggul, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata. Ini semua dilakukan untuk membentuk masyarakat yang produktif, berkualitas, dan sejahtera sebagai fondasi untuk Sumatera Utara yang unggul.

Mewujudkan transformasi ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan seperti agrikultur atau hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, penguatan industri regional (dan bioindustri) serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hilirisasi ini termasuk

mengamankan ketersediaan bahan baku sumber daya alam unggulan untuk bioindustri. Ketersediaan bahan baku bioindustri dari agrikultur atau hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan salah satunya didukung dengan pengamanan pupuk baik organik maupun anorganik yang memudahkan dan menguntungkan petani, khususnya petani kecil. Penguatan industri dengan investasi berskala besar, seperti KEK Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, didukung dengan pengembangan industri lokal untuk menjadi penyedia bahan baku industri manufaktur, penerapan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri dan penguatan ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Transformasi ekonomi juga diarahkan melalui optimalisasi ekonomi biru (*blue economy*) dengan meningkatkan kapasitas dan teknologi untuk perikanan tangkap dan budidaya. Pengembangan kawasan perikanan di Pantai Barat Sumatera Utara yang kaya akan sumber daya laut. Selain itu, implementasi pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) di Sumatera Utara melalui pengembangan kawasan strategis agrikultur dengan menerapkan teknologi dan energi ramah lingkungan, dan efisiensi rantai distribusi melalui pengembangan jaringan transportasi darat dan laut untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan tol, rel kereta api, dan pelabuhan untuk mendukung rantai distribusi yang efisien dan menurunkan biaya logistik. Pengembangan pariwisata dengan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata serta peningkatan pengembangan wisata kota (*urban tourism*). Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan melakukan penguatan kapasitas riset dan inovasi, pemenuhan akses digital salah satunya pembuatan *marketing digital* produk wisata pada destinasi, peningkatan standar kualitas produk bioindustri untuk pasar ekspor, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik. Transformasi tata kelola mencakup semua urusan pemerintahan, terlebih pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) Pariwisata Provinsi dan kelompok kerja (POKJA) Pariwisata Kabupaten/Kota, serta menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan bioindustri dan pariwisata.

Kelembagaan tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran yang menjamin perangkat daerah lebih dinamis dan responsif dalam menyelenggarakan pelayanan. Penguatan kelembagaan tepat fungsi akan membantu menghasilkan perangkat daerah yang kolaboratif

Peningkatan kualitas ASN dalam tahap ini memfokuskan pada penyiapan peta arah sistem merit, penataan kembali fungsi meritokrasi, manajemen ASN yang lebih terarah dan objektif, dan penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan sistem merit, peningkatan ASN berkualitas menjadi pendukung terwujudnya ASN unggul dan profesional.

Digitalisasi pelayanan publik lebih diarahkan pada penguatan ketersediaan sistem informasi publik di semua sektor, pengintegrasian sistem informasi, penyediaan *dashboard* pelayanan publik dan penyiapan regulasi pembangunan basis satu data pelayanan publik Sumatera Utara. Selain itu, tata kelola yang baik dalam pariwisata dapat membantu penguatan fondasi

transformasi tata kelola seperti pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) pada destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara. Sehingga membantu pemerintah daerah memasuki periode perencanaan lima tahunan kedua untuk memperbaiki indeks pelayanan publik.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital. Stabilitas ekonomi ditekankan dengan menguatkan fondasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menjaga stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas ekonomi makro difokuskan kepada optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, dan pengelolaan fiskal yang adaptif serta penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi kerukunan umat beragama dan budaya serta penguatan pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat serta mensosialisasikan prinsip pariwisata berkelanjutan pada destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara.

Ketahanan masyarakat juga dibangun untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Penciptaan iklim riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, termasuk untuk menguatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana pada tahap ini difokuskan untuk penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, infrastruktur dasar, listrik) yang diprioritaskan di daerah afirmasi serta pemerataannya di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pembangunan konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus), pusat komoditas sumber daya alam, perwilayahan industri serta kawasan pariwisata agar menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur transportasi fokus pada moda transportasi massal dengan transisi energi di kota metropolitan disertai dengan peningkatan layanan air bersih melalui konservasi air, sanitasi dan pengolahan persampahan terpadu. Memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan bioindustri dan pariwisata juga ditekankan dalam tahap pertama ini. **Pembiayaan pembangunan** dioptimalkan dengan membuka proyek-proyek perintis dengan pembiayaan alternatif (KPBU) dan menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk melakukan reformasi tata kelola fiskal daerah.

Pada **Tahapan Penguatan Fondasi Transformasi ini PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp. 105,75-110 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32-5,74 persen.** Hal ini dicapai dengan menguatkan fondasi sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, dengan arah kebijakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Fokus Arah Kebijakan Penguatan Transformasi

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat. - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul. - Mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata.
Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan hilirisasi sumber daya alam unggulan. - Ketersediaan pupuk organik dan organik yang cukup dan memudahkan serta menguntungkan petani - Memperkuat industri regional dan bioindustri melalui investasi berskala besar. - Menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri. - Mengembangkan pariwisata berkelanjutan. - Memperkuat ekonomi kreatif melalui UMKM. - Mengoptimalkan ekonomi biru. - Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur transportasi. - Mengembangkan kapasitas riset dan inovasi serta pemasaran digital.
Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan kelembagaan yang dinamis dan responsif. - Meningkatkan kualitas ASN melalui sistem merit. - Mendigitalisasi pelayanan publik. - Mengelola pariwisata secara berkelanjutan melalui POKDARWIS. - Meningkatkan kerjasama internasional untuk investasi, teknologi, dan pengetahuan.
Keamanan dan Stabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. - Menjaga stabilitas ekonomi makro dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat. - Mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis risiko.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kerukunan umat beragama dan budaya. - Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. - Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar di daerah afirmasi dan pemerataan di seluruh wilayah. - Menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata melalui konektivitas. - Memperkuat infrastruktur dasar untuk pengembangan bioindustri dan pariwisata. - Mengembangkan moda transportasi massal dan layanan air bersih.
Pembiayaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka proyek perintis dengan pembiayaan alternatif (KPBU). - Menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk reformasi tata kelola fiskal daerah.

5.1.2 Arah Kebijakan Tahap II Periode 2030–2034

Pada tahap ini, setelah terwujudnya penguatan transformasi, maka pembangunan diarahkan untuk melakukan **percepatan transformasi** mewujudkan sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan percepatan penguatan mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta percepatan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan percepatan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan penguatan pembiayaan pembangunan. Fokus tahap

ini mengarahkan kebijakan untuk mempercepat transformasi yang telah dimulai. Penekanan pada peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan kolaborasi antar lembaga, dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergeseran dari fase pembangunan dasar menuju fase penguatan dan percepatan. **Penekanan dalam tahap ini**, Sumatera Utara mulai memperluas skala operasionalnya dengan fokus pada peningkatan investasi, adopsi teknologi canggih, dan pengembangan produk yang lebih inovatif. Langkah-langkah ini memastikan Sumatera Utara semakin dekat dengan pencapaian menjadi pusat bioindustri dan pariwisata.

Mewujudkan transformasi sosial difokuskan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan yang berkualitas melalui pemenuhan kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pusat pelatihan dan pendidikan agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri bioindustri dan pariwisata, sehingga percepatan transformasi sosial yang berkelanjutan dapat terpenuhi.

Mewujudkan transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas ekonomi secara masif dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan baru di perkotaan dan perdesaan berbasis komoditas unggulan sesuai dengan agenda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengembangan iptek dan inovasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan melanjutkan pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan bioteknologi, peningkatan investasi dalam teknologi tinggi dan bioteknologi, serta optimalisasi sektor-sektor strategis yang berorientasi ekspor sebagai bagian dari rantai pasok global. Peningkatan produktivitas dicapai melalui percepatan peningkatan produktivitas secara masif, terutama di sektor-sektor unggulan seperti agrikultur, kemaritiman, bioindustri dan pariwisata. Dengan mendorong inovasi dalam bioindustri melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, serta mendukung *start-up* yang berfokus pada bioindustri serta percepatan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Transformasi digital seperti *marketing digital* semakin diperkuat untuk Mendukung *branding* pada pengembangan ekonomi, integrasi ekonomi domestik dan global serta pariwisata.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan yang dinamis dan kolaboratif, peningkatan profesionalisme ASN, penguatan dukungan pemberdayaan teknologi informasi dalam perumusan dan pengimplementasian perundang-undangan/regulasi, memfasilitasi terwujudnya partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang mandiri, terlebih pada peningkatan kelompok kerja (POKJA) Pariwisata Provinsi dan kelompok kerja (POKJA) Pariwisata Kabupaten/Kota, terjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam peningkatan sektor bioindustri dan pariwisata.

Kelembagaan yang dinamis dan kolaboratif memfokuskan pada area kolaborasi proses kerja, pemecahan masalah, penguatan lintas fungsi, memperbaiki proses bisnis lintas sektoral, pemanfaatan basis satu data dan perbaikan koordinasi antar lembaga. Peningkatan mutu kelembagaan kolaboratif membantu mewujudkan pemerintahan adaptif dan dinamis.

Peningkatan profesionalisme aparaturnya diarahkan memperbaiki cara kerja sistem merit dan menindaklanjuti fungsi pengawasan pelaksanaan sistem merit dengan dukungan teknologi informasi yang menjamin transparansi dan penajaman proses bisnis pendukung/manajerial dalam peningkatan profesionalisme.

Pemberdayaan teknologi informasi dalam perumusan dan implementasi regulasi memfokuskan pada penguatan digitalisasi fungsi Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) satu data antar pemerintah daerah dalam provinsi, penyediaan *dashboard* regulasi, penyediaan regulasi pendukung ekonomi digital dan pengawasan penerapan regulasi dengan dukungan teknologi informasi.

Fasilitasi partai politik berintegritas memfokuskan pada pengawasan pelaksanaan penerapan kode etik, tersedianya proses bisnis rekrutmen anggota dan mekanisme kaderisasi, penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri difokuskan pada peningkatan partisipasi publik, mengubah posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan, penciptaan iklim berkreasi dan inovasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya lokal serta memperluas dan mempermudah ketersediaan informasi dan melindungi/mendampingi/memfasilitasi iklim ekonomi lokal (UMKM).

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat melalui penciptaan ruang publik yang lebih sehat. Stabilitas ekonomi makro ditempuh melalui peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan di antaranya dengan peningkatan produk wisata dan geoproduk di destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada percepatan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya di masyarakat serta penguatan akselerasi pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan penyediaan akses partisipasi yang inklusif. Pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan bencana.

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana difokuskan pada percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan baru yang didukung dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. Peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur dasar serta konektivitas semakin dipercepat di kawasan perkotaan selain di wilayah metropolitan juga di kawasan perdesaan dan daerah afirmasi. Selain itu, meningkatnya pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D) serta infrastruktur pendukung untuk sektor bioindustri dan pariwisata serta meningkatnya destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata yang tersertifikasi berkelanjutan oleh ISTC (*Indonesia Sustainable Tourism Council*). **Pembiayaan pembangunan** difokuskan kerjasama dengan pihak swasta dan investor untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan bioindustri dan peningkatan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

Hasil pada **Tahapan Percepatan Transformasi ini diharapkan tercapai PDRB per kapita sebesar Rp. 200-205,57 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,02-8,11 persen.** Hal ini dicapai dengan percepatan upaya transformasi setelah memiliki fondasi yang kuat sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global. Pada tahap ini arah kebijakan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Fokus Arah Kebijakan Percepatan Transformasi

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
Mewujudkan Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. - Mempercepat pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata. - Mengembangkan pelatihan dan pendidikan yang lebih berkualitas untuk membangun SDM yang produktif.
Mewujudkan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produktivitas ekonomi secara masif di sektor unggulan. - Memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di perkotaan dan perdesaan. - Mendorong investasi dalam teknologi tinggi dan bioteknologi untuk mendukung inovasi.
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kelembagaan yang dinamis dan kolaboratif. - Meningkatkan profesionalisme ASN dengan dukungan teknologi informasi. - Digitalisasi layanan publik untuk efisiensi pemerintahan.
Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat. - Meningkatkan efektivitas belanja publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat internalisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat. - Mengembangkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi.
Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas fisik dan digital. - Memperkuat infrastruktur pendukung bioindustri dan pariwisata.
Pembiayaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta dan internasional. - Optimalisasi sumber pendanaan non-pemerintah untuk pembangunan strategis.

5.1.3 Arah Kebijakan Tahap III Periode 2035–2039

Pada tahap ketiga (2035-2039) ini Sumatera Utara memulai langkah-langkah peningkatan daya saing untuk melakukan ekspansi global. Peningkatan daya saing untuk melakukan ekspansi global ini diterapkan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan pemantapan pembiayaan pembangunan. Fokus tahap ini menandai pergeseran signifikan menuju ekspansi global, di mana Sumatera Utara tidak hanya fokus pada pertumbuhan internal tetapi juga bersiap untuk bersaing di pasar global. Peningkatan daya saing SDM, adopsi teknologi canggih, dan penguatan ekspor menjadi kunci di tahap ini. **Penekanannya**

adalah modernisasi dan digitalisasi ekonomi serta peningkatan kerjasama internasional menunjukkan bahwa Sumatera Utara mulai memainkan peran aktif di kancah global. Penekanan pada keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam juga memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global.

Mewujudkan transformasi sosial difokuskan pemantapan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan. Produktif dan inovatif ini salah satunya dicapai dengan meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan dengan adopsi teknologi canggih.; peningkatan kesejahteraan masyarakat dan semakin meningkatnya kerjasama internasional dalam peningkatan sektor bioindustri dan pariwisata sehingga transformasi sosial yang berkelanjutan semakin kuat.

Mewujudkan transformasi ekonomi difokuskan pada modernisasi dan digitalisasi sektor pertanian, perikanan, manufaktur yang memastikan industri semakin mengembangkan beragam produk bioindustri yang inovatif yang membuat Sumatera Utara mampu bersaing di pasar global dengan meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Memperkuat posisi dan kemampuan Sumatera Utara dalam rantai pasok global, pengembangan ekspor dan perdagangan internasional dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan efisiensi logistik. Peningkatan daya saing untuk ekspansi global juga ditempuh melalui peningkatan investasi dalam teknologi tinggi dan pengembangan kapasitas riset dan inovasi untuk mendukung transformasi hijau, penguatan pengembangan infrastruktur digital yang mendukung konektivitas perkotaan dan perdesaan, serta penguatan kelembagaan dan modal manusia yang kompetitif untuk mendukung stabilitas ekonomi makro. Sektor pariwisata juga semakin meningkat dengan bertambahnya wilayah STO (*Sustainable Tourism Observatory*) yang terdaftar UN Tourism.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan adaptif, aparatur sipil negara (ASN) kompetitif, partai politik modern, ketersediaan regulasi adaptif, terlebih pada semakin meningkat kinerja kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan kelompok kerja (POKJA) pariwisata dalam memajukan pariwisata berkelanjutan. Melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah diterapkan dalam sektor bioindustri dan pariwisata untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Kelembagaan adaptif merupakan persyaratan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis sebagai penyangga terwujudnya Sumatera Utara unggul dan maju.

Kelembagaan adaptif memfokuskan pada transformasi proses bisnis pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengedepankan kemampuan berpikir ke depan, evaluasi berulang, dan berpikir menyeluruh ke dalam strategi dan kebijakan sehingga terdapat pembelajaran, pelaksanaan, inovasi, dan perubahan yang berkelanjutan. ASN kompetitif memfokuskan area pada peningkatan *mental agility, change agility, people agility, learning agility dan result agility*. Regulasi adaptif memfokuskan pada upaya penyederhanaan regulasi, penguatan regulasi berkemampuan adaptasi terhadap lingkungan, penguatan kelembagaan perumus regulasi melalui penciptaan proses bisnis yang jelas dan memberdayakan teknologi informasi dalam penerapan regulasi. Fasilitasi partai politik modern memfokuskan pada upaya memfasilitasi terwujudnya partai politik adaptif, berorientasi pada penegakan demokrasi dan berintegritas serta mandiri.

Pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri pada periode lima tahun ketiga ini difokuskan pada penguatan peningkatan partisipasi publik, penguatan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dan keterjaminan fasilitas pemerintah dalam melindungi/mendampingi/ memfasilitasi iklim ekonomi lokal (seperti usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk bersaing di pasar global.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada pemantapan Sumatera Utara sebagai wilayah yang memiliki lingkungan yang aman untuk bertempat tinggal, menjalankan investasi, dan berdemokrasi. Stabilitas ekonomi makro diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan SDM yang kompetitif untuk mendukung stabilitas ekonomi makro. Selain itu, peningkatan investasi infrastruktur pada daerah wisata dapat meningkatkan ekonomi pada destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada perwujudan penerapan nilai-nilai agama, kerukunan umat beragama dan budaya serta pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif. Penerapan dan pengembangan teknologi semakin terwujud untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi pencemaran lingkungan, integrasi sistem pangan, dan pengelolaan infrastruktur energi dan limbah di perkotaan dalam rangka peningkatan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar dengan konsep berkelanjutan secara merata di seluruh wilayah termasuk dalam sektor bioindustri dan destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara. **Pembiayaan pembangunan** difokuskan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah dan perluasan cakupan sektor yang memanfaatkan sumber dana non pemerintah dan pemberian insentif bagi investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.

Diharapkan PDRB per kapita pada **Tahapan Peningkatan Daya Saing untuk Ekspansi Global ini semakin tinggi yaitu sebesar Rp. 245-250 juta dan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,34-7,56 persen per tahun.** Arah kebijakan pada tahap ini sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing untuk Ekspansi Global

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
Mewujudkan Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan daya saing SDM melalui peningkatan produktivitas dan inovasi. - Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan dengan adopsi teknologi canggih. - Memperkuat kerjasama internasional dalam pelatihan dan pendidikan untuk mendukung inovasi dan daya saing global.
Mewujudkan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan sektor bioindustri dan pariwisata untuk bersaing di pasar global. - Mempercepat modernisasi dan digitalisasi sektor utama. - Mengembangkan infrastruktur digital dan logistik untuk mendukung ekspor dan perdagangan internasional.
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan adaptasi kelembagaan dan kompetensi ASN untuk mendukung lingkungan

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
	bisnis yang dinamis. - Mengembangkan regulasi adaptif yang mendukung inovasi dan efisiensi. - Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan untuk menjaga relevansi dan efektivitas.
Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	- Memantapkan Sumatera Utara sebagai wilayah yang aman untuk investasi dan bisnis. - Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pariwisata untuk mendukung daya tarik global.
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. - Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya sambil memastikan adaptasi terhadap perubahan global.
Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana	- Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur modern yang mendukung ekspansi global. - Mengembangkan infrastruktur modern seperti bandara internasional dan pelabuhan wisata untuk meningkatkan konektivitas global.
Pembiayaan Pembangunan	- Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan memperluas sumber pendanaan non-pemerintah. - Memberikan insentif untuk investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.

5.1.4 Arah Kebijakan Tahap IV Periode 2040–2045

Fokus agenda pembangunan diarahkan pada perwujudan Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan pembiayaan pembangunan yang semakin kuat. Fokus tahap ini adalah puncak dari seluruh proses transformasi, yang mana Sumatera Utara mencapai visinya dengan menjadi wilayah yang benar-benar unggul, maju, dan berkelanjutan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memastikan Sumatera Utara tidak hanya siap bersaing tetapi juga menjadi pemimpin global dalam bidang bioindustri dan pariwisata. **Penekanan pada tahap ini**, Sumatera Utara difokuskan untuk menjadi model ekonomi hijau dan biru global, dengan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas. Pembangunan infrastruktur modern, penguatan regulasi yang adaptif, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan memastikan bahwa Sumatera Utara siap menghadapi tantangan global dan mencapai status yang diidamkan.

Mewujudkan transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan transformasi sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing dan sejahtera serta memiliki keterampilan yang relevan dengan sektor bioindustri dan pariwisata.

Mewujudkan transformasi ekonomi dititikberatkan pada peningkatan produktivitas perekonomian Sumatera utara yang didukung oleh peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi dalam mendukung pengembangan kontribusi industri pengolahan, ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terwujudnya transformasi ekonomi dengan keberhasilan produk

bioindustri masuk ke pasar global dan pariwisata bertaraf global. Transformasi ekonomi dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi untuk memastikan Sumatera Utara keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*), dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan terwujudnya prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Transformasi digital dan pembangunan diarahkan kepada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung konektivitas internasional dan integrasi ekonomi, dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung ekspansi global, pembangunan kota cerdas (*smart city*) dan desa cerdas (*smart village*) yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

Mewujudkan transformasi tata kelola terwujud dengan difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terwujudnya tata kelola yang baik pada semua urusan pemerintahan, terlebih pada terwujudnya pusat pengembangan bioindustri Sumatera Utara dan peningkatan indeks pembangunan kepariwisataan nasional (IPKN) Sumatera Utara menjadi posisi kelima untuk meningkatkan indeks pembangunan kepariwisataan nasional (IPKN) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke dua puluh dua. Semakin bertambah Asesor/Auditor pariwisata dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) serta semakin banyak destinasi wisata, desa wisata, dan usaha wisata yang mendapat sertifikasi berkelanjutan.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah terwujud dengan difokuskan pada masyarakat damai, demokratis, dan taat hukum serta menguatnya pengelolaan kapasitas fiskal daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro melalui pendapatan yang tinggi dalam sektor industri serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan keluarga dan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Sumatera Utara juga dapat menjadi daerah percontohan daerah yang menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru di tingkat regional, nasional, maupun global dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya peningkatan kawasan geowisata di geopark Kaldera Toba untuk mempertahankan status di UNESCO untuk *Geopark Global Network* juga menjadi fokus mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana difokuskan pada penjagaan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan andal untuk mendukung ekonomi wilayah (termasuk mewujudkan keberhasilan sektor bioindustri dan pariwisata) yang unggul, maju dan berkelanjutan serta pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan. **Pembiayaan pembangunan** difokuskan pada sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat termasuk semakin banyak dan meningkatnya investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.

Pada tahap Perwujudan Visi Sumatera Utara ini walaupun **pertumbuhan ekonomi mulai mengalami penurunan, namun tetap terjaga cukup tinggi berada di kisaran 5,42-6,70 per tahun, dan PDRB per kapita mencapai Rp. 454,83-534,21 juta.**

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Perwujudan Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan

Aspek Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan standar layanan kesehatan dan pendidikan ke level internasional. - Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri global. - Mengembangkan program-program sosial yang adaptif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan penggunaan teknologi tinggi dan inovasi dalam semua sektor ekonomi. - Memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai hub global untuk bioindustri dan pariwisata. - Mengintegrasikan ekonomi Sumatera Utara dengan jaringan global melalui peningkatan konektivitas dan digitalisasi.
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> - Mencapai tata kelola yang berintegritas dan adaptif, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas. - Meningkatkan indeks pembangunan kepariwisataan dan memperluas sertifikasi internasional di sektor pariwisata. - Menjadi model tata kelola yang baik di tingkat nasional dan internasional.
Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan stabilitas politik dan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi. - Meningkatkan pendapatan dari sektor strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi daerah percontohan dalam penerapan ekonomi hijau dan biru di tingkat regional dan global. - Mempertahankan status Kaldera Toba di UNESCO Global Geopark Network sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung ekonomi wilayah yang berkelanjutan. - Memperkuat infrastruktur digital dan transportasi untuk mendukung ekspansi global.
Pembiayaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sinergi pendanaan pemerintah dan swasta. - Mendorong model pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang adil dan merata.

Secara ringkas Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan transformasi sosial 2. Mewujudkan transformasi ekonomi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola 	Penguatan fondasi mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan	Percepatan transformasi mewujudkan sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan percepatan	Peningkatan daya saing untuk melakukan ekspansi global ini diterapkan dengan pemantapan	Perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan keamanan daerah

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	<p>4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah</p> <p>5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi</p> <p>6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan</p> <p>7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana</p> <p>8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan</p>	<p>penguatan mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta penguatan mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan penguatan fondasi transformasi ini didukung dengan implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan penguatan pembiayaan pembangunan.</p> <p>Penguatan fondasi transformasi fokus pada Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar; Pembangunan Infrastruktur Dasar; Reformasi Hukum dan Tata Kelola; Pembangunan Fasilitas Produksi; Peningkatan Kualitas Bahan Baku; Peningkatan Kualitas Layanan Pelatihan dan Pendidikan.</p> <p>Pada Tahapan Penguatan Fondasi Transformasi ini PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp. 105,75-110 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32-</p>	<p>penguatan mewujudkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta percepatan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan percepatan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan penguatan pembiayaan pembangunan.</p> <p>Percepatan transformasi fokus pada Peningkatan Kualitas dan Cakupan Layanan Publik; Pengembangan Infrastruktur Pendukung; Kerjasama Internasional dan Perdagangan; Ekspansi Fasilitas Produksi; Diversifikasi Produk.</p> <p>Diharapkan tercapai PDRB per kapita sebesar Rp. 200-205,57 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,02-8,11 persen.</p>	<p>transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan pemantapan pembiayaan pembangunan.</p> <p>Peningkatan Daya Saing untuk Ekspansi Global fokus pada Inovasi dan Teknologi; Ekspansi Pasar Internasional; Peningkatan Infrastruktur Modern; Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p> <p>Diharapkan PDRB per kapita semakin tinggi yaitu sebesar Rp. 245-250 juta dan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,34-7,56 persen per tahun.</p>	<p>tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan serta sarana prasarana, dan pembiayaan pembangunan yang semakin kuat.</p> <p>Perwujudan Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan fokus pada Kualitas Hidup dan Layanan Publik; Ekonomi Global dan Inovasi; Infrastruktur dan Keberlanjutan; Tata Kelola dan Kepemimpinan Global; Hub Bioindustri dan Destinasi Wisata Global; Ekspansi Pasar Baru; Penguatan Ekosistem Inovasi; Keberlanjutan dan Keunggulan Kompetitif.</p> <p>Pada tahap ini walaupun pertumbuhan ekonomi mulai mengalami penurunan, namun tetap terjaga cukup tinggi berada di kisaran 5,42-6,70 per tahun, dan PDRB per kapita</p>

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		5,74 persen.			mencapai Rp. 454,83-534,21 juta.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi “Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Sasaran pokok tersebut dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi (agenda transformasi dan landasan transformasi) yang telah diuraikan sebelumnya dan pencapaiannya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah atau disebut 17 Indonesia Emas (17 IE). Misi transformasi sosial dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu:

1. Masyarakat Sumatera Utara sehat dan terjamin yang dicapai dengan IE1;
2. Masyarakat Sumatera Utara berpendidikan berkualitas unggul yang dicapai dengan IE2;
3. Masyarakat Sumatera Utara sejahtera dan terlindungi yang dicapai dengan IE3.

Misi transformasi ekonomi dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah berupa masyarakat Sumatera Utara yang produktif dengan keunggulan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan dicapai dengan IE4, IE5, IE6, IE7, dan IE8. Misi transformasi tata kelola dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah berupa pemerintahan Sumatera Utara berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi dicapai dengan IE9. Dalam rangka mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah juga dicapai dengan sasaran pokok yaitu masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul dan berdaya gentar kawasan dicapai dengan IE10, IE11, dan IE12. Demikian juga dengan mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah berupa masyarakat Sumatera Utara berketahanan sosial budaya dan ekologi yang unggul, maju dan berkelanjutan dicapai dengan IE13, IE14, IE15, IE16, dan IE17. Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan daerah atau IE tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6 Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Agenda	Pelaksanaan Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)
Transformasi	1. Mewujudkan transformasi sosial	1. Masyarakat Sumatera Utara sehat dan terjamin	1) IE1. Kesehatan untuk Semua
		2. Masyarakat Sumatera Utara berpendidikan berkualitas unggul	2) IE2. Pendidikan Unggul dan Merata
		3. Masyarakat Sumatera Utara sejahtera dan terlindungi	3) IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi	4. Masyarakat Sumatera Utara yang produktif dengan keunggulan	4) IE4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 5) IE5. Penerapan Ekonomi

Agenda	Pelaksanaan Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)
		IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	Hijau melalui Industri Hijau (Bioindustri Unggul) 6) IE6. Investasi Unggul Bernilai Tinggi (<i>High Value</i>) yang Didukung oleh Transformasi Digital 7) IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui Industri (termasuk Bioindustri) Kreatif dan Wisata Unggul Kelas Dunia 8) IE8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola	5. Pemerintahan Sumatera Utara berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi	9) IE.9 Penguatan Kapabilitas Tata Kelola Berintegritas dan Regulasi Adaptif
Landasan Transformasi	4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	6. Masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul dan berdaya gantar kawasan	10) IE10. Masyarakat Demokratis dan Penciptaan Lingkungan Aman 11) IE11. Stabilitas Ekonomi 12) IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
	5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	7. Masyarakat Sumatera Utara berketahanan sosial budaya dan ekologi yang unggul, maju dan berkelanjutan	13) IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14) IE14. Pembangunan Keluarga Berkualitas, kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 15) IE15. Lingkungan Hidup yang Berkualitas 16) IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 17) IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Uraian gambaran kinerja dalam mencapai ketujuh sasaran pokok pembangunan di atas dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Masyarakat Sumatera Utara Sehat dan Terjamin

Masyarakat Sumatera Utara sehat dan terjamin dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, serta pengembangan ekosistem halal.
2. Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit tidak menular terutama tuberkulosis serta penuntasan penyakit tropis terabaikan seperti kusta.

3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
4. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif/dokter terbang khususnya di Kepulauan Nias dan Kabupaten/Kota yang kekurangan tenaga medis.
5. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
6. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh kabupaten/kota.
7. Penguatan layanan kesehatan ibu, anak, lanjut usia dan layanan kesehatan mental.
8. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
10. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
11. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
12. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
13. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
14. Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting* terutama bagi wilayah dengan beban tinggi.
15. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
16. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
17. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
18. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan Kesehatan yang berkelanjutan.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 7 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sumatera Utara Sehat dan Terjamin

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar; Peningkatan fasilitas kesehatan ibu dan anak; Penanganan gizi buruk dan <i>stunting</i> ; Penemuan dan pengobatan Tuberkulosis; Peningkatan	Modernisasi fasilitas kesehatan; Peningkatan efisiensi sistem kesehatan; Pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data dan teknologi; Pengembangan kebijakan penanganan Tuberkulosis berbasis data dan teknologi; Peningkatan efektivitas	Peningkatan kualitas layanan kesehatan spesialis; Penguatan kolaborasi internasional dalam bidang kesehatan; Pengembangan teknologi kesehatan canggih; Penguatan kolaborasi internasional dalam penanganan	Optimalisasi sistem kesehatan berbasis digital; Peningkatan standar kesehatan global; Penguatan layanan kesehatan berkelanjutan; Optimalisasi sistem penanganan Tuberkulosis berbasis digital;	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73,73	79,00
				2. Kesehatan Ibu dan anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	146	16
				3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): a) Cakupan	16,4	4

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; Penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan industri bioindustri dan destinasi wisata.	jaminan kesehatan nasional; Meningkatkan fasilitas kesehatan di kawasan industri dan wisata dengan teknologi digital.	Tuberkulosis; Memastikan layanan kesehatan berkualitas di semua area, termasuk kawasan industri dan wisata.	Layanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk kawasan industri dan wisata.	penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	71	95
				b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	93,49	98,00
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,9	99,5

Peningkatan UHH menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan, gizi, dan kondisi hidup yang lebih baik, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan yang baik adalah prasyarat untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan, karena masyarakat yang sehat lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih baik dalam pengembangan industri dan pariwisata. Menurunkan angka kematian ibu dan prevalensi stunting adalah indikator penting dari peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ini penting karena kesehatan ibu dan anak yang baik memastikan generasi berikutnya yang lebih sehat dan produktif, yang mendukung visi menjadi daerah unggul. Kesehatan ibu dan anak yang baik juga mempengaruhi persepsi wisatawan dan investor, membuat Sumatera Utara lebih menarik sebagai pusat pengembangan industri dan pariwisata. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat menghambat produktivitas masyarakat. Tingkat penemuan dan pengobatan yang tinggi menunjukkan sistem kesehatan yang efektif dalam menangani penyakit menular. Ini penting untuk memastikan tenaga kerja yang sehat dan produktif, yang mendukung pengembangan industri dan pariwisata di Sumatera Utara. Lingkungan yang sehat juga penting untuk menarik wisatawan dan investor. Cakupan jaminan kesehatan yang luas memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi beban biaya yang berat. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan akses kesehatan yang terjamin, Sumatera Utara dapat mengembangkan tenaga kerja yang sehat, yang merupakan kunci untuk mendukung industri dan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

5.2.2. Masyarakat Sumatera Utara Berpendidikan Berkualitas Unggul

Masyarakat Sumatera Utara berpendidikan berkualitas unggul dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
3. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.

4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
6. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
7. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
8. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
9. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
10. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
11. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
12. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
13. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
14. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
15. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
16. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama pada Daerah Afirmasi Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP) khususnya di Kepulauan Nias.
17. Penguatan sekolah terbuka, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
18. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 8 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sumatera Utara Berpendidikan Berkualitas Unggul

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan guru; Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan; Implementasi program literasi	Modernisasi fasilitas pendidikan; Peningkatan efisiensi sistem pendidikan; Pengembangan kebijakan pendidikan berbasis data dan teknologi; Penguatan	Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi; Penguatan kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan; Pengembangan teknologi	Optimalisasi sistem pendidikan berbasis digital; Peningkatan standar pendidikan global; Penguatan layanan pendidikan berkelanjutan;	5. Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i. Literasi membaca ii. Numerasi b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar	6,06-12,12 0,00-3,03	66,67-72,73 60,61-63,64

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
membaca dan numerasi; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi; Penyediaan beasiswa dan dukungan finansial; Pengembangan kurikulum pendidikan untuk bioindustri dan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata.	program literasi membaca dan enumerasi; Peningkatan efisiensi sistem pendidikan tinggi; Peningkatan program pendidikan dan pelatihan untuk mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.	pendidikan canggih; Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat; Pengembangan program pendidikan berbasis keterampilan kerja; Program pendidikan internasional dan pelatihan untuk mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.	Penguatan program literasi membaca dan enumerasi; Optimalisasi sistem pendidikan tinggi berbasis digital; Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.	kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	31,09-33,09	68,13-70,13
				i. Literasi Membaca		
				ii. Numerasi	27,21	63,26
				c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,41-10,42	13,20-13,27
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,58-13,59	15,04-15,10
				6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 12,28
				7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,1	85,0

Mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi menunjukkan bahwa siswa memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan pekerjaan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang tinggi menunjukkan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Peningkatan dalam indikator-indikator ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik, yang merupakan fondasi penting untuk pengembangan industri dan pariwisata. Masyarakat yang terdidik lebih mampu berinovasi dan berpartisipasi dalam ekonomi modern, mendukung visi Sumatera Utara menjadi daerah unggul, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya pendidikan tinggi memberikan keterampilan dan pengetahuan yang lebih spesifik dan mendalam, yang penting untuk pekerjaan di sektor industri dan pariwisata yang berkembang. Proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk inovasi dan peningkatan produktivitas. Hal ini mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih kompleks dan bernilai tinggi, yang sesuai dengan visi Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan industri dan pariwisata global. Indikator Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi menunjukkan seberapa baik sistem pendidikan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Pekerja dengan keahlian menengah hingga tinggi penting untuk mendukung industri yang lebih maju dan pariwisata kelas dunia. Peningkatan dalam indikator ini akan membantu memastikan bahwa Sumatera Utara memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten, yang dapat mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing global.

5.2.3. Masyarakat Sumatera Utara Sejahtera dan Terlindungi

Masyarakat Sumatera Utara sejahtera dan terlindungi dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan

masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

2. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
3. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 9 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sumatera Utara Sejahtera dan Terlindungi

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan akses layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi; Peningkatan cakupan dan kualitas jaminan sosial ketenagakerjaan; Program pemberdayaan penyandang disabilitas dan peningkatan akses ke sektor formal; Program jaminan sosial untuk pekerja, termasuk di sektor bioindustri dan pariwisata.	Modernisasi fasilitas layanan sosial dan ketenagakerjaan; Peningkatan efisiensi sistem jaminan sosial; Pengembangan kebijakan inklusif berbasis data dan teknologi; Memperluas program perlindungan sosial bagi pekerja termasuk di sektor bioindustri dan pariwisata.	Penguatan kolaborasi internasional dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan; Pengembangan teknologi layanan sosial dan ketenagakerjaan canggih; Peningkatan kualitas dan akses layanan bagi penyandang disabilitas; Perlindungan sosial yang komprehensif untuk pekerja termasuk di sektor bioindustri dan pariwisata.	Optimalisasi sistem jaminan sosial berbasis digital; Peningkatan standar layanan sosial dan ketenagakerjaan global; Penguatan layanan inklusif dan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas; Perlindungan sosial yang komprehensif untuk pekerja termasuk di sektor bioindustri dan pariwisata.	8. Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	0,17- 0,67
				9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	41,0	75,8
				10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27	60

Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Dengan mengurangi kemiskinan, Sumatera Utara dapat memastikan bahwa lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan industri dan pariwisata. Ini juga mendukung visi daerah yang unggul dan berkelanjutan karena masyarakat yang sejahtera lebih produktif dan inovatif. Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tinggi memastikan bahwa pekerja memiliki

perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin mereka hadapi selama bekerja. Ini meningkatkan keamanan kerja dan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi. Dengan memberikan perlindungan sosial yang memadai, Sumatera Utara dapat menarik lebih banyak investasi dan tenaga kerja berkualitas, mendukung pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan. Inklusi penyandang disabilitas dalam sektor formal menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan inklusi ekonomi. Memberikan kesempatan kerja yang setara kepada penyandang disabilitas meningkatkan kesejahteraan mereka dan memanfaatkan potensi produktif mereka dalam ekonomi. Ini mendukung visi Sumatera Utara menjadi daerah yang unggul dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

5.2.4. Masyarakat Sumatera Utara yang Produktif dengan Keunggulan IPTEK dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

Masyarakat Sumatera Utara yang produktif dengan keunggulan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
2. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
4. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*.
5. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
6. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
7. Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian.
8. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
9. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
10. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital *marketplace/platform*.

11. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
12. Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
13. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
14. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
15. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
16. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
17. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi *bioproduct*, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi) dan penguatan rantai nilai industri halal.
18. Pengembangan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan kabupaten/kota dengan penyediaan tenaga kerja, meningkatkan daya saing industri, penetapan upah minimum yang sesuai, memperluas akses pasar dan kelancaran konektivitas lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan investasi dan pembiayaan sektor perbankan, penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian
19. Pengembangan sektor unggulan kabupaten/kota yang terpadu khususnya dalam memenuhi kebutuhan lokal/daerah Provinsi Sumatera Utara
20. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)
21. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan *grid* tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
22. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Medan dan kawasan perkotaan Sibolga/Padangsidempuan.
23. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain: layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya).

24. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
25. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.
26. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.
27. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan.
28. Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Medan.
29. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Medan.
30. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
31. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan.
32. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan metropolitan Medan (*urban tourism*) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Danau Toba dan Dataran Tinggi Bukit Barisan/*Tapanuli Highland*.
33. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
34. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
35. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
36. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan sekitar Bandara Kuala Namu untuk mewujudkan Aerotropolis.
37. Pengembangan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone* yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera.
38. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
39. Pembangunan Jalan bebas-hambatan/highway/Tol Trans Sumatera pada wilayah Sumatera Utara untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas:
 - Lhokseumawe-Idi Rayeuk-Langsa-Karangbaru-Stabat-Binjai-Medan;
 - Blangkejeren-Kutacane-Kabanjahe-Medan;
 - Tapaktuan-Subulussalam-Salak-Sidikalang-Kabanjahe;
 - Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;
 - Parapat-Balige-Siborongborong-Tarutung-Sibolga;
 - Doloksanggul-Siborongborong;
 - Doloksanggul-Sidikalang;
 - Sibolga-Pandan-Padangsidempuan-Panyabungan; dan
 - Padangsidempuan-Gunungtua-Sibuhuan.

40. Pembangunan jalan bebas-hambatan/highway/tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan bebas-hambatan/highway/tol intraregional Medan.
41. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan *dry port* untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.
42. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kualatanjung.
43. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan Sibolga.
44. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kepulauan Nias.
45. Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kepulauan Nias.
46. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Kualanamu.
47. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kepulauan Nias.
48. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Kepulauan Nias.
49. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai.
50. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK termasuk dalam pengembangan industri halal di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran nasional dan global.
51. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
52. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon.
53. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
54. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, serta pemenuhan standarisasi dan sertifikasi (BPOM, PIRT, Halal, HAKI, Merk, dan lain-lain.)
55. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
56. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
57. Peningkatan produktivitas BUMD, khususnya dalam rangka mengembangkan industri unggulan dan sektor unggulan kabupaten/kota.

58. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
59. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh wilayah pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
60. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion & interregion* pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
61. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
62. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.
63. Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias) melalui bertambahnya *demand*.
64. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).
65. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
66. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.

67. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
68. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.
69. Pengembangan perpustakaan dan pustakawannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi, promosi dan pelestarian budaya, pusat komunitas, dan pengembangan ekonomi lokal.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 10 Target Kinerja Masyarakat Sumatera Utara yang Produktif dengan Keunggulan IPTEK dan Inovasi serta Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TAR-GET 2045
Pengembangan teknologi industri dan kreatif; Peningkatan riset dan inovasi; Peningkatan akses keuangan, pendidikan, dan pelatihan; Pengembangan fasilitas pariwisata; Promosi pariwisata internasional; Pelatihan SDM pariwisata; Penyediaan akses pasar dan jaringan pemasaran untuk UMKM, koperasi, dan BUMD; Pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru; Program pemberdayaan perempuan; Penerapan teknologi canggih dalam produksi bioindustri dan inovasi dalam layanan wisata.	Modernisasi industri; Diversifikasi produk wisata; Peningkatan kerjasama internasional; Pengembangan destinasi wisata baru; Peningkatan efisiensi produksi; Insentif pajak untuk industri kreatif; Penguatan jaringan distribusi dan akses pasar; Program wirausaha; Kebijakan fleksibel di tempat kerja untuk mendukung partisipasi perempuan; Peningkatan investasi dalam R&D dan inovasi produk di sektor bioindustri dan pariwisata.	Pengembangan klaster industri; Peningkatan kolaborasi antara industri dan lembaga penelitian; Peningkatan investasi di sektor pariwisata; Pengembangan pariwisata berkelanjutan; Peningkatan akses teknologi dan inovasi; Penguatan kapasitas manajerial UMKM, koperasi, dan BUMD; Pengembangan program pelatihan keterampilan; Peningkatan akses informasi pekerjaan; Jaringan dukungan kerja bagi perempuan; Peningkatan R&D dan inovasi di sektor bioindustri dan pariwisata.	Pengembangan teknologi industri maju; Peningkatan daya saing global; Penguatan ekosistem pariwisata unggulan; Kolaborasi publik-swasta; Peningkatan inovasi dalam ekonomi kreatif; Ekspansi pasar internasional; Optimalisasi program pelatihan kerja; Program kesetaraan gender dan akses ke modal usaha bagi perempuan; Inovasi berkelanjutan di sektor bioindustri dan pariwisata.	11.Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	27,18-31,85
				12.Pengembangan Pariwisata:		
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	5,33
				b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	300,00 - 350,00	1.110,21
				c) Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN)		
				13.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	5,45	6,89
				14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,66	12,84
				a-ii) Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level provinsi (%)	5,04	9,66
				b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,68	8,00
				c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	4,70

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TAR-GET 2045
				d) <i>Return on Asset (RoA) BUMD (%)</i>	1,24	5,60
				15.Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	5,27-5,56 43	3,02-4,02 80
				16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,39	74,40
				17.Tingkat Penguasaan IPTEK: Indeks Inovasi Daerah	57,50 – 60.00	81,01-90,01
Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi hijau; Peningkatan riset dan inovasi terkait teknologi hijau; Investasi awal dalam proyek-proyek energi terbarukan (EBT); Program edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ekonomi hijau; Implementasi praktik bioindustri yang ramah lingkungan dan pengembangan ekowisata.	Implementasi skala besar proyek energi terbarukan; Integrasi teknologi hijau dalam sektor industri utama; Peningkatan insentif dan subsidi untuk proyek EBT; Penguatan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam penerapan teknologi hijau; Pengembangan praktik industri dan wisata yang lebih ramah lingkungan.	Diversifikasi sumber energi terbarukan dan peningkatan kapasitas produksi EBT; Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri; Penguatan kebijakan insentif pajak untuk industri hijau; Promosi dan pemasaran internasional untuk teknologi hijau dan produk hijau Indonesia; Implementasi penuh industri hijau dan wisata berkelanjutan.	Optimalisasi penggunaan EBT dalam bauran energi nasional hingga mendominasi bauran energi; Implementasi standar global untuk teknologi dan produk hijau; Peningkatan investasi berkelanjutan dalam teknologi hijau; Penguatan daya saing global Indonesia sebagai pemimpin dalam penerapan ekonomi hijau; Industri hijau dan wisata berkelanjutan di seluruh wilayah.	18.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	51,12 23,98	77,18 71,33
Pengembangan infrastruktur TIK di seluruh wilayah kabupaten/kota; Peningkatan akses internet dan layanan digital; Program literasi digital dan pelatihan TIK untuk	Modernisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK; Integrasi TIK dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; Peningkatan	Peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi TIK canggih; Penguatan ekosistem <i>start-up</i> dan perusahaan teknologi; Promosi dan ekspansi internasional	Optimalisasi penggunaan TIK dalam semua sektor kehidupan; Implementasi standar global dalam pengembangan TIK; Penguatan posisi Indonesia	19.Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,0	7,5

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET			
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TAR-GET 2045		
masyarakat dan tenaga kerja; Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan TIK; Promosi investasi di sektor bioindustri dan digitalisasi promosi pariwisata.	investasi di sektor TIK; Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan internasional dalam pengembangan TIK; Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan investasi dan promosi.	produk dan layanan TIK Indonesia; Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang TIK melalui pelatihan lanjutan dan program beasiswa; Transformasi digital yang mendukung investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.	sebagai pusat inovasi TIK di tingkat global; Peningkatan investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan TIK; Transformasi digital yang mendukung investasi di sektor bioindustri dan pariwisata.					
Peningkatan infrastruktur transportasi, logistik, dan industri; Penyediaan insentif investasi; Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas barang dan jasa ekspor; Pengembangan pasar ekspor baru; Meningkatkan ekspor produk bioindustri dan promosi pariwisata Sumatera Utara secara internasional.	Modernisasi sistem logistik dan infrastruktur industri; Optimalisasi distribusi barang dan jasa antar wilayah; Penguatan regulasi dan kolaborasi internasional; Diversifikasi produk dan jasa ekspor; Memperkuat jaringan internasional dan meningkatkan ekspor serta kunjungan wisatawan.	Pengembangan teknologi canggih dalam logistik dan produksi; Peningkatan investasi dan inovasi industri; Promosi internasional dan peningkatan daya saing global; Penguatan <i>branding</i> produk di pasar global; Ekspansi global dan promosi internasional produk bioindustri dan pariwisata.	Optimalisasi sistem digital dalam distribusi dan produksi; Peningkatan standar global untuk investasi, logistik, dan ekspor; Penguatan stabilitas dan daya saing berkelanjutan dalam ekonomi global; Ekspansi global dan promosi internasional produk bioindustri dan pariwisata.	20.Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	11,26	5,85		
				21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,65	25,11		
				22.Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	22,80-23,00	29,73		
				a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	81,65	94		
Peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik di kota dan desa; Program pembangunan perumahan layak dan terjangkau; Perencanaan permukiman baru skala besar dan pengurangan luas kawasan kumuh; Pemberdayaan desa untuk mencapai kemandirian ekonomi; Peningkatan konektivitas	Modernisasi infrastruktur perkotaan dan perdesaan; Pengembangan kota cerdas (<i>smart city</i>) dan desa cerdas (<i>smart village</i>); Integrasi teknologi dalam manajemen perkotaan dan perdesaan; Peningkatan akses hunian layak dan berkelanjutan; Pengembangan kawasan permukiman baru skala besar, hunian	Penataan dan peremajaan permukiman perkotaan menuju kota skala global; Peningkatan daya saing wilayah metropolitan di tingkat nasional dan internasional; Penguatan kolaborasi antara kota dan desa dalam pembangunan berkelanjutan; Promosi internasional untuk investasi di kota dan desa; Peningkatan kualitas hidup di desa melalui	Optimalisasi pengelolaan kota dan desa berbasis digital; Implementasi standar global untuk hunian layak dan berkelanjutan; Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang unggul, maju dan berdaya saing global; Peningkatan kontribusi wilayah metropolitan terhadap PDRB nasional;	23.Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26 WM Medan (terdiri dari Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo)	3,00 WM Medan (terdiri dari Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo)		
				a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)			74,36	100
				b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan			0,73	5,35
c) Persentase desa mandiri (%)								

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TAR-GET 2045
antar wilayah metropolitan dan pedesaan; Pembangunan industri/ bioindustri di daerah perkotaan dan pedesaan serta pengembangan destinasi wisata; Modernisasi infrastruktur perpustakaan.	vertikal dan pengentasan kawasan kumuh; Mendorong pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan pedesaan dengan pembangunan industri bioindustri dan pariwisata; Percepatan modernisasi perpustakaan.	program kemandirian ekonomi; Mendorong pertumbuhan yang seimbang di perkotaan dan pedesaan dengan industri /bioindustri dan pariwisata; Perpustakaan yang terintegrasi dan inovatif.	Penguatan kemandirian desa berkelanjutan; Pertumbuhan seimbang di perkotaan dan pedesaan dengan industri/ bioindustri dan pariwisata; Perpustakaan pintar dengan teknologi canggih.			

Industri pengolahan adalah salah satu sektor kunci dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi. Rasio PDRB industri pengolahan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki basis industri yang kuat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan dalam sektor ini juga mendukung pengembangan bioindustri yang lebih maju dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Sumatera Utara. Pariwisata adalah sektor ekonomi penting yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan rasio PDRB dari penyediaan akomodasi dan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa Sumatera Utara berhasil menarik lebih banyak wisatawan, yang mendukung pengembangan pariwisata bertaraf global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan akan meningkatkan IPKN Sumatera Utara. IPKN menggambarkan kualitas Pembangunan Kepariwisata bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan tujuan untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia pada *Travel and Tourism Development Index*. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor yang mengandalkan kreativitas dan inovasi, seperti seni, desain, media, dan teknologi. Proporsi PDRB ekonomi kreatif yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ekosistem inovasi yang kuat, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Ini sejalan dengan visi Sumatera Utara untuk menjadi daerah unggul dan inovatif. UMKM, koperasi, dan BUMD memainkan peran penting dalam ekonomi daerah. Indikator-indikator ini menunjukkan seberapa produktif sektor-sektor tersebut dalam berkontribusi terhadap PDRB dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan produktivitas di sektor-sektor ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kuat dan dinamis di Sumatera Utara. Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan bahwa ekonomi daerah mampu menciptakan cukup banyak lapangan kerja untuk penduduknya. Penurunan tingkat pengangguran adalah indikator penting dari stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang mendukung visi Sumatera Utara sebagai daerah unggul dan maju. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tinggi menunjukkan inklusi gender dalam ekonomi dan meningkatkan potensi produktivitas keseluruhan daerah. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi sumber daya manusia daerah dimanfaatkan secara optimal, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Indeks Inovasi Daerah menunjukkan seberapa baik daerah tersebut dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru serta inovasi. Penguasaan IPTEK yang tinggi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi, yang mendukung visi Sumatera Utara sebagai daerah unggul dan inovatif.

Indeks Ekonomi Hijau yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonominya. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau, Sumatera Utara dapat meningkatkan daya saing global, menarik investasi hijau, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini sejalan dengan visi menjadi daerah yang unggul dan berkelanjutan. Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer menunjukkan komitmen daerah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi terbarukan mendukung keberlanjutan lingkungan dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pembangunan industri dan pariwisata yang ramah lingkungan di Sumatera Utara. Penggunaan energi terbarukan juga dapat menarik investor yang tertarik dengan praktik bisnis yang berkelanjutan, mendukung visi Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan industri bertaraf global.

Indeks Pembangunan TIK yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki infrastruktur TIK yang baik, akses yang luas terhadap teknologi informasi, dan tingkat penggunaan yang tinggi oleh masyarakat dan sektor bisnis. Hal ini penting karena akses dan penggunaan TIK meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi seperti industri, pendidikan, dan kesehatan, memungkinkan proses bisnis yang lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Infrastruktur TIK yang baik juga mendukung pengembangan industri berbasis teknologi dan sektor pariwisata melalui promosi, manajemen destinasi, dan peningkatan pengalaman wisatawan. Selain itu, akses yang luas terhadap TIK memberdayakan masyarakat dengan keterampilan digital, memudahkan akses informasi, layanan publik, dan peluang pendidikan, serta menciptakan peluang kerja baru. Transformasi digital dalam pemerintahan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan mempercepat proses administratif. Lebih lanjut, TIK mendukung inovasi di berbagai sektor dan dapat digunakan untuk mendukung praktek ramah lingkungan dan keberlanjutan, seperti smart grid dan manajemen energi.

Koefisien variasi harga yang rendah menunjukkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung perdagangan domestik. Hal ini penting karena harga yang seragam memastikan bahwa semua masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang setara terhadap barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, mengurangi perbedaan harga antar wilayah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta menunjukkan pasar yang lebih efisien dan terintegrasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Ekspor barang dan jasa yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu bersaing di pasar global dan memiliki produk serta layanan yang diminati oleh negara lain. Hal ini penting karena ekspor membantu diversifikasi ekonomi dengan membuka pasar baru dan mengurangi

ketergantungan pada pasar domestik. Selain itu, ekspor meningkatkan pendapatan daerah dari devisa, yang penting untuk stabilitas ekonomi. Ekspor juga membantu daerah untuk meningkatkan standar kualitas dan efisiensi produksi, yang mendukung daya saing global. Koefisien variasi harga yang rendah dan kelancaran ekspor sangat tergantung dengan kondisi kemantapan jalan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas.

Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan yang tinggi menunjukkan bahwa kota-kota besar dan daerah perkotaan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Hal ini penting karena kota besar sebagai pusat ekonomi utama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, wilayah metropolitan yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional menarik lebih banyak investasi domestik dan internasional. Peningkatan kontribusi dari wilayah metropolitan juga mencerminkan pengembangan infrastruktur yang baik, yang mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Akses ke hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini penting karena hunian yang layak dan terjangkau meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, akses ke perumahan yang layak mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga mendukung stabilitas sosial. Lingkungan hunian yang baik juga mendukung produktivitas dan partisipasi ekonomi masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan. Desa mandiri mencerminkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi di daerah perdesaan. Hal ini penting karena desa yang mandiri mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah desa mandiri membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Desa mandiri juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien dan bertanggung jawab.

5.2.5. Pemerintahan Sumatera Utara Berkinerja Unggul Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Pemerintahan Sumatera Utara berkinerja unggul didukung partisipasi masyarakat yang tinggi dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah menuju regulasi satu data, sinkron dengan proses bisnis dengan dukungan teknologi informasi.
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif serta sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Sumatera Utara menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Sumatera Utara yang profesional dan bebas korupsi.
6. Pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja dan memegang teguh *core value*.
7. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

8. Penguatan fungsi pengawasan yang mengedepankan pengendalian internal dengan dukungan penuh teknologi informasi.
9. Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja dan *core value*.
10. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
11. Penguatan integritas partai politik.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 11 Target Kinerja Pencapaian Pemerintahan Sumatera Utara Berkinerja Unggul Didukung Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penataan regulasi hukum yang transparan dan akuntabel; Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum; Implementasi program pelatihan dan pendidikan hukum untuk aparat penegak hukum	Modernisasi sistem peradilan dan penegakan hukum; Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses hukum; Pengembangan kebijakan hukum berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam reformasi hukum; Implementasi teknologi canggih dalam penegakan hukum; Promosi internasional standar hukum Indonesia	Optimalisasi sistem hukum berbasis digital; Peningkatan standar global dalam penegakan hukum; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem hukum	24. Indeks reformasi hukum	70	100
Pembangunan infrastruktur TIK untuk pemerintahan; Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah; Pengembangan platform <i>e-government</i> dasar	Modernisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK pemerintahan; Integrasi layanan publik berbasis digital; Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan <i>e-government</i>	Pengembangan teknologi canggih dalam <i>e-government</i> ; Promosi internasional layanan <i>e-government</i> Indonesia; Penguatan inovasi digital dalam sistem pemerintahan	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital secara menyeluruh; Implementasi standar global dalam <i>e-government</i> ; Penguatan posisi Indonesia sebagai pemimpin <i>e-government</i> di tingkat global	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	5,00
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan publik; Penyediaan infrastruktur layanan publik yang memadai; Pengembangan sistem manajemen layanan publik berbasis data	Modernisasi fasilitas dan sistem layanan publik; Integrasi teknologi dalam manajemen layanan publik; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik	Penguatan inovasi dalam layanan publik; Pengembangan kolaborasi internasional dalam manajemen layanan publik; Promosi standar pelayanan	Optimalisasi sistem layanan publik berbasis digital; Implementasi standar global dalam pelayanan publik; Penguatan transparansi dan akuntabilitas	26. Indeks Pelayanan Publik	3,99	5,00

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
		publik Indonesia di tingkat global	dalam layanan publik			
Penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah, pembangunan <i>talent pool</i> di seluruh instansi	Pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi ASN	Penguatan manajemen kinerja ASN, pengembangan kompetensi ASN	Optimalisasi manajemen talenta berbasis teknologi, penguatan kebijakan penghargaan bagi ASN			
Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, penerapan sistem penggajian tunggal (<i>single salary</i>) dan sistem pensiun	Penguatan pengawasan atas penerapan sistem merit, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian	Penguatan upaya pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai, penguatan sistem pelaporan harta kekayaan ASN	Optimalisasi sistem pendidikan anti korupsi melalui redesain kurikulum, penguatan tata kelola berbasis integritas			
Peningkatan kesadaran dan pendidikan antikorupsi; Penerapan sistem pelaporan harta kekayaan yang transparan; Penguatan lembaga antikorupsi dan pengawasan internal pemerintah	Modernisasi sistem pengawasan dan audit; Peningkatan efisiensi dan efektivitas lembaga antikorupsi; Pengembangan kebijakan integritas berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi; Implementasi teknologi canggih dalam sistem pengawasan dan audit; Promosi standar integritas Indonesia di tingkat global	Optimalisasi sistem pengawasan dan audit berbasis digital; Peningkatan standar global dalam pemberantasan korupsi; Penguatan budaya integritas dan transparansi di semua lapisan masyarakat	27. Indeks Integritas Nasional	66,78	80,44
Penerapan tata kelola yang transparan dan adaptif di sektor bioindustri dan pariwisata.	Mengoptimalkan regulasi dan tata kelola yang adaptif dan berintegritas di sektor bioindustri dan pariwisata.	Tata kelola yang adaptif dan transparan di sektor bioindustri dan pariwisata.	Tata kelola yang adaptif dan transparan di sektor bioindustri dan pariwisata.			

Indeks Reformasi Hukum yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum di suatu daerah berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Hal ini penting karena reformasi hukum meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu, kepastian hukum mendorong investasi domestik dan asing dengan memberikan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Sistem hukum yang kuat juga membantu dalam pengendalian dan pemberantasan korupsi, yang mendukung tata kelola yang baik. Indeks SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan telah mengadopsi teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini penting karena *e-government*

meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan transparansi dalam pelayanan publik. Selain itu, sistem elektronik mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Teknologi informasi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Indeks Pelayanan Publik yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menerima layanan yang berkualitas dan memuaskan dari pemerintah. Hal ini penting karena pelayanan publik yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kualitas layanan publik yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan. Indeks Integritas Nasional yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan memiliki integritas yang kuat dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Hal ini penting karena integritas yang tinggi membantu dalam mencegah dan memberantas korupsi di semua level pemerintahan. Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Pemerintahan yang berintegritas juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

5.2.6. Masyarakat Sumatera Utara yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gentar Kawasan

Masyarakat Sumatera Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul dan berdaya gentar kawasan dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
2. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
4. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
5. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kepulauan Nias).

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 12 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sumatera Utara yang Demokratis dan Aman dengan Stabilitas Ekonomi Makro yang Unggul dan Berdaya Gentar Kawasan

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penataan regulasi hukum yang transparan dan	Modernisasi sistem peradilan dan penegakan hukum;	Penguatan kerjasama internasional dalam reformasi	Optimalisasi sistem hukum berbasis digital;	28.Hukum Berkeadilan a) Persentase Penegakan Hukum		

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
akuntabel; Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum; Implementasi program pelatihan dan pendidikan hukum untuk aparat penegak hukum	Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses hukum; Pengembangan kebijakan berbasis data dan teknologi	hukum; Implementasi teknologi canggih dalam penegakan hukum; Promosi internasional standar hukum Indonesia	Peningkatan standar global dalam penegakan hukum; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem hukum	Peraturan Daerah b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70 70	100 90
Peningkatan patroli keamanan dan kehadiran polisi di lingkungan; Program edukasi dan penyuluhan tentang keamanan masyarakat; Penguatan kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan	Modernisasi fasilitas keamanan dan teknologi pengawasan; Peningkatan efisiensi respons cepat terhadap kejadian kriminal; Pengembangan kebijakan keamanan berbasis data dan teknologi	Penguatan kolaborasi internasional dalam menjaga keamanan; Implementasi teknologi canggih dalam sistem keamanan; Promosi internasional standar keamanan lingkungan Indonesia	Optimalisasi sistem keamanan berbasis digital; Peningkatan standar global dalam menjaga keamanan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem keamanan	29.Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	53,94	71,32
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi; Program edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak demokrasi; Penguatan lembaga demokrasi dan transparansi dalam proses pemilihan	Modernisasi sistem pemilihan umum; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses demokrasi; Pengembangan kebijakan demokrasi berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam proses demokrasi; Implementasi teknologi canggih dalam sistem pemilihan umum; Promosi internasional standar demokrasi Indonesia	Optimalisasi sistem pemilihan umum berbasis digital; Peningkatan standar global dalam proses demokrasi; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem demokrasi	30.Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan demokratis serta meningkatkan keamanan di destinasi wisata.	Memastikan lingkungan yang aman dan kondusif di tempat kerja dan destinasi wisata.	Lingkungan yang aman dan demokratis di kawasan industri dan destinasi wisata.	Lingkungan aman dan demokratis di kawasan industri dan destinasi wisata.			
Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pajak;	Modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi; Peningkatan	Penguatan kerjasama internasional dalam bidang perpajakan; Implementasi	Optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital; Peningkatan	31.Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,37	2,10

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak; Penyediaan insentif dan kemudahan dalam pembayaran pajak	efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak; Pengembangan kebijakan perpajakan berbasis data dan teknologi	teknologi canggih dalam sistem perpajakan; Promosi internasional standar perpajakan Indonesia	standar global dalam sistem perpajakan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem perpajakan			
Pengendalian harga barang dan jasa; Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi; Penguatan regulasi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga	Modernisasi sistem distribusi dan manajemen stok; Peningkatan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa; Pengembangan kebijakan berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas harga; Implementasi teknologi canggih dalam pengendalian inflasi; Promosi internasional standar inflasi Indonesia	Optimalisasi sistem pengendalian inflasi berbasis digital; Peningkatan standar global dalam menjaga stabilitas harga; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengendalian inflasi	32.Tingkat Inflasi (%)	1,75 – 3,75	0,9 – 3,10
Peningkatan literasi keuangan masyarakat; Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pendalaman sektor keuangan; Penyediaan insentif dan kemudahan dalam akses ke layanan keuangan	Modernisasi sistem keuangan berbasis teknologi; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan; Pengembangan produk dan layanan keuangan inovatif	Penguatan kerjasama internasional dalam sektor keuangan; Implementasi teknologi canggih dalam layanan keuangan; Promosi internasional standar keuangan Indonesia	Optimalisasi sistem keuangan berbasis digital; Peningkatan standar global dalam layanan keuangan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sektor keuangan	33.Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) d) Total Kredit/PDRB (%)	31,02 0,13 8.103.064,03 25,7	69,40 1,31 75.281.842,63 61,5
Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan; Program literasi dan edukasi keuangan untuk semua lapisan masyarakat; Penyediaan insentif dan kemudahan dalam akses ke layanan	Modernisasi sistem keuangan berbasis teknologi; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan; Pengembangan produk dan layanan keuangan inovatif	Penguatan kerjasama internasional dalam sektor keuangan; Implementasi teknologi canggih dalam layanan keuangan; Promosi internasional standar keuangan Indonesia	Optimalisasi sistem keuangan berbasis digital; Peningkatan standar global dalam layanan keuangan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sektor keuangan	34.Inklusi Keuangan (%)	97,52	99,83

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
keuangan						
Menjamin stabilitas ekonomi dengan pengelolaan industri yang efisien dan pengelolaan pariwisata yang baik.	Menjaga stabilitas ekonomi dengan manajemen yang efisien di sektor bioindustri dan pariwisata.	Menjaga stabilitas ekonomi di sektor bioindustri dan pariwisata dengan manajemen yang efisien.	Stabilitas ekonomi di sektor bioindustri dan pariwisata dengan manajemen yang efisien.			
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur diplomatik daerah; Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung diplomasi internasional; Penguatan kerjasama dengan lembaga internasional; Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor bioindustri dan pariwisata.	Modernisasi fasilitas dan sistem diplomasi berbasis teknologi; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam diplomasi internasional; Pengembangan program kerjasama internasional inovatif; Meningkatkan ketangguhan diplomasi untuk mendukung sektor-sektor utama.	Penguatan kolaborasi internasional dalam bidang diplomasi; Implementasi teknologi canggih dalam sistem diplomasi; Promosi internasional standar diplomasi Indonesia; Diplomasi yang kuat dan efektif untuk mendukung sektor-sektor utama.	Optimalisasi sistem diplomasi berbasis digital; Peningkatan standar global dalam diplomasi internasional; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem diplomasi; Diplomasi yang kuat dan efektif untuk mendukung sektor-sektor utama.	35. Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province)	20	100
Peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah; Program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; Penyediaan insentif dan penghargaan untuk kepala daerah berprestasi	Modernisasi sistem manajemen dan kepemimpinan daerah; Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah; Pengembangan kebijakan kepemimpinan berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam bidang kepemimpinan daerah; Implementasi teknologi canggih dalam sistem manajemen kepemimpinan; Promosi internasional standar kepemimpinan daerah Indonesia	Optimalisasi sistem kepemimpinan berbasis digital; Peningkatan standar global dalam tata kelola pemerintahan daerah; Penguatan integritas dan transparansi dalam kepemimpinan daerah	36. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	3,0	4,5

Indeks Pembangunan Hukum yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum di daerah tersebut berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Hal ini penting karena kepastian hukum memberikan rasa aman bagi

masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisnis. Selain itu, sistem hukum yang adil dan efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang baik juga mencegah konflik dan kekacauan, serta mendukung lingkungan yang aman dan tertib. Proporsi penduduk yang merasa aman adalah indikator penting dari lingkungan yang aman dan stabil. Hal ini penting karena rasa aman meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memungkinkan mereka untuk beraktivitas tanpa rasa takut. Selain itu, lingkungan yang aman mendorong aktivitas ekonomi, seperti berbelanja dan bekerja, tanpa khawatir akan kejahatan. Rasa aman juga memperkuat kepercayaan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan komunitas. Indeks Demokrasi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sistem demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik. Hal ini penting karena demokrasi yang kuat melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Selain itu, demokrasi yang berfungsi dengan baik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Sistem demokrasi yang stabil juga mencegah konflik politik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Rasio pajak daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan dari pajak secara efektif. Hal ini penting karena pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, rasio pajak yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan pajak yang stabil juga membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung stabilitas ekonomi makro. Tingkat inflasi yang terkendali sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Hal ini penting karena inflasi yang rendah dan stabil menjaga daya beli masyarakat dan mencegah penurunan kesejahteraan. Selain itu, inflasi yang terkendali menarik investasi karena menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dapat diprediksi. Tingkat inflasi yang moderat juga memudahkan perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi yang efektif. Pendalaman sektor keuangan mencerminkan kemampuan sektor keuangan untuk mendukung perekonomian daerah. Hal ini penting karena pendalaman sektor keuangan meningkatkan akses masyarakat dan bisnis terhadap modal, yang penting untuk investasi dan ekspansi. Selain itu, sektor keuangan yang dalam dan luas meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko sistemik. Penetrasi asuransi yang tinggi juga membantu masyarakat dan bisnis mengelola risiko, meningkatkan keamanan ekonomi. Inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting karena akses ke layanan keuangan memungkinkan masyarakat untuk menabung, mendapatkan pinjaman, dan mengelola risiko, yang memberdayakan mereka secara ekonomi. Selain itu, inklusi keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan partisipasi ekonomi dan konsumsi. Akses ke layanan keuangan juga mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih merata bagi semua kelompok masyarakat.

Jumlah kerjasama internasional yang tinggi menunjukkan bahwa daerah aktif dalam menjalin hubungan diplomatik dan memiliki keterlibatan yang kuat di kancah internasional. Hal ini penting karena kerjasama internasional membuka peluang untuk transfer teknologi, investasi asing, dan peningkatan kapasitas, yang meningkatkan daya saing daerah. Selain

itu, hubungan diplomatik yang baik mendorong perdagangan dan investasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama internasional juga memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan, yang memperkaya masyarakat serta meningkatkan keterampilan dan inovasi. Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan keberhasilan dalam pemerintahan daerah. Hal ini penting karena kepemimpinan yang baik menciptakan lingkungan politik dan sosial yang stabil, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, pemimpin yang efektif mampu mengelola sumber daya dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, dan menjalankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang berintegritas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang penting untuk keberhasilan program dan kebijakan publik.

5.2.7. Masyarakat Sumatera Utara Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan

Masyarakat Sumatera Utara berketahanan sosial budaya dan ekologi yang unggul, maju dan berkelanjutan dicapai dengan arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

Indikator kinerja, target kinerja, dan arah kebijakan lima tahunan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 13 Target Kinerja Pencapaian Masyarakat Sumatera Utara Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat; Peningkatan program pelestarian budaya; Penguatan lembaga budaya dan pendidikan kebudayaan; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur budaya;	Pendidikan budaya di sekolah; Modernisasi fasilitas budaya; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pelestarian budaya; Penguatan kebijakan kebudayaan berbasis data dan teknologi;	Pengembangan program pendidikan budaya berbasis komunitas; Penguatan kerjasama internasional dalam pelestarian budaya; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan budaya; Promosi internasional budaya Indonesia;	Optimalisasi pendidikan budaya berkelanjutan; Optimalisasi sistem pelestarian budaya berbasis digital; Peningkatan standar global dalam pengelolaan budaya; Penguatan daya saing budaya Indonesia di tingkat global;	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	64,43-64,77
Peningkatan dialog antar umat beragama; Program edukasi dan penyuluhan tentang toleransi; Penguatan lembaga kerukunan umat beragama	Peningkatan moderasi beragama; Modernisasi fasilitas untuk dialog antar umat beragama; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam program toleransi; Pengembangan kebijakan kerukunan berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama antar lembaga keagamaan; Penguatan kerjasama internasional dalam promosi kerukunan; Implementasi teknologi canggih dalam manajemen kerukunan; Promosi internasional standar kerukunan Indonesia	Penguatan kerukunan umat beragama berbasis nilai-nilai lokal; Optimalisasi sistem kerukunan berbasis digital; Peningkatan standar global dalam manajemen kerukunan; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem kerukunan	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,34-78,41	85,58-86,36
Memperkuat peran budaya dan agama dalam mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.	Memperkuat peran budaya dan agama dalam mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.	Memperkuat budaya dan agama dalam mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.	Memperkuat budaya dan agama dalam mendukung sektor bioindustri dan pariwisata.			
Peningkatan program pendidikan dan penyuluhan keluarga; Penguatan lembaga keluarga dan komunitas; Penyediaan fasilitas dan layanan untuk kesejahteraan keluarga	Modernisasi fasilitas dan layanan keluarga; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam program kesejahteraan keluarga; Pengembangan kebijakan keluarga berbasis data	Penguatan kerjasama internasional dalam promosi kualitas keluarga; Implementasi teknologi canggih dalam manajemen keluarga; Promosi internasional standar kualitas	Optimalisasi sistem manajemen keluarga berbasis digital; Peningkatan standar global dalam kesejahteraan keluarga; Penguatan integritas dan transparansi dalam	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65,82 - 65,83	70,56-70,59

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
	dan teknologi	keluarga Indonesia	manajemen keluarga			
Pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial, peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender; Penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja; Penguatan lembaga yang menangani isu kesetaraan gender; Mendorong kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.	Penguatan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, pengembangan program pemberdayaan komunitas; Modernisasi fasilitas untuk mendukung kesetaraan gender; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam program kesetaraan gender; Pengembangan kebijakan kesetaraan gender berbasis data dan teknologi; Mendorong inklusivitas dan kesetaraan di tempat kerja.	Penguatan program kesetaraan gender dan inklusi sosial berbasis komunitas, pengembangan kebijakan yang mendukung keluarga berkualitas; Penguatan kerjasama internasional dalam promosi kesetaraan gender; Implementasi teknologi canggih dalam manajemen kesetaraan gender; Promosi internasional standar kesetaraan gender Indonesia; Kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.	Optimalisasi program kesetaraan gender dan inklusi sosial berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program inklusi sosial; Optimalisasi sistem manajemen kesetaraan gender berbasis digital; Peningkatan standar global dalam kesetaraan gender; Penguatan integritas dan transparansi dalam sistem kesetaraan gender; Kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,404 – 0,403	0,194- 0,179
Peningkatan program pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan lembaga pengelola keanekaragaman hayati; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian keanekaragaman hayati	Modernisasi fasilitas untuk pelestarian keanekaragaman hayati; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; Pengembangan kebijakan pelestarian berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; Promosi internasional standar pelestarian Indonesia	Optimalisasi sistem pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis digital; Peningkatan standar global dalam pelestarian keanekaragaman hayati; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan hayati	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,562	0,656
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan;	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan program lingkungan hidup berbasis komunitas;	Penguatan program pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi, pengembangan kebijakan lingkungan hidup yang inklusif;	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan lingkungan yang	42. Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b) Rumah Tangga dengan	77,20	83,49 60,00

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
Peningkatan program pelestarian lingkungan hidup; Penguatan lembaga pengelola lingkungan hidup; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah	Modernisasi fasilitas untuk pelestarian lingkungan hidup; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; Pengembangan kebijakan pelestarian berbasis data dan teknologi; Peningkatan pengelolaan sampah dan akses sanitasi	Penguatan kerjasama internasional dalam pelestarian lingkungan hidup; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan lingkungan hidup; Promosi internasional standar pelestarian Indonesia; Peningkatan pengelolaan sampah dan akses sanitasi	berkelanjutan; Optimalisasi sistem pengelolaan lingkungan hidup berbasis digital; Peningkatan standar global dalam pelestarian lingkungan hidup; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup; Optimalisasi pengelolaan sampah dan akses sanitasi	Akses Sanitasi Aman (%)		
				c) Pengelolaan sampah		
				i. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	10	90
				ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	33	100
Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui praktik industri hijau dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.	Memastikan praktik ramah lingkungan diterapkan di sektor bioindustri dan pariwisata.	Konservasi lingkungan hidup di sektor bioindustri dan pariwisata.	Lingkungan berkualitas di sektor bioindustri dan pariwisata.			
Penguatan ketahanan energi dengan meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan; Peningkatan program ketahanan energi, air, dan pangan;- Penguatan lembaga pengelola ketahanan energi, air, dan pangan; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk ketahanan energi, air, dan pangan; Mengembangkan teknologi yang mendukung	Peningkatan kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan, pengembangan program ketahanan energi berbasis teknologi; Modernisasi fasilitas untuk ketahanan energi, air, dan pangan; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan energi, air, dan pangan; Pengembangan kebijakan ketahanan berbasis data dan teknologi; Mengembangkan teknologi energi dan air di sektor bioindustri dan	Penguatan program ketahanan air dan pangan berbasis komunitas, pengembangan kebijakan ketahanan energi yang inklusif; Penguatan kerjasama internasional dalam ketahanan energi, air, dan pangan; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan energi, air, dan pangan; Promosi internasional standar ketahanan Indonesia; Ketahanan energi dan air di sektor bioindustri dan pariwisata.	Optimalisasi program ketahanan energi, air, dan pangan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup melalui ketahanan energi, air, dan pangan yang berkelanjutan; Optimalisasi sistem ketahanan energi, air, dan pangan berbasis digital; Peningkatan standar global dalam ketahanan energi, air, dan pangan; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan ketahanan energi dan air di sektor	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
				a) Ketahanan Energi		
				i. Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850-1.050	2.825
				ii. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	171	145
				b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	0,41
				c) Ketahanan Air		
i. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,64	20,93				
ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap	41	100				

ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		BASE-LINE 2025	TARGET 2045
ketahanan energi dan air serta memastikan ketersediaan air bersih dan energi di destinasi wisata.	pariwisata.		bioindustri dan pariwisata.	Minum perpipaan (%) iii. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	57,47	63,35
Peningkatan program mitigasi dan penanggulangan bencana; Penguatan lembaga pengelola risiko bencana; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk mitigasi bencana; Menerapkan strategi mitigasi risiko bencana dalam operasi industri dan pengembangan destinasi wisata yang tahan terhadap bencana dan perubahan iklim.	Modernisasi fasilitas mitigasi dan penanggulangan bencana; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan risiko bencana; Pengembangan kebijakan mitigasi berbasis data dan teknologi; Strategi mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim diterapkan di sektor bioindustri dan pariwisata.	Penguatan kerjasama internasional dalam mitigasi dan penanggulangan bencana; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan risiko bencana; Promosi internasional standar mitigasi Indonesia; Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim di sektor bioindustri dan pariwisata.	Optimalisasi sistem mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis digital; Peningkatan standar global dalam mitigasi bencana; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan risiko bencana; Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim di sektor bioindustri dan pariwisata.	44.Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	138,5	116,14 -93,62
Peningkatan program penurunan emisi GRK; Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penurunan emisi GRK; Penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk penurunan emisi GRK	Modernisasi fasilitas untuk penurunan emisi GRK; Peningkatan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan emisi GRK; Pengembangan kebijakan penurunan emisi berbasis data dan teknologi	Penguatan kerjasama internasional dalam penurunan emisi GRK; Implementasi teknologi canggih dalam pengelolaan emisi GRK; Promosi internasional standar penurunan emisi GRK Indonesia	Optimalisasi sistem penurunan emisi GRK berbasis digital; Peningkatan standar global dalam penurunan emisi GRK; Penguatan integritas dan transparansi dalam pengelolaan penurunan emisi GRK	45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a) Kumulatif b) Tahunan	10,06 19,04	36,22 79,85

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki lingkungan yang mendukung pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Hal ini penting karena pengembangan kebudayaan memperkuat identitas dan kearifan lokal, yang penting untuk keutuhan sosial dan kebanggaan daerah. Selain itu, warisan budaya yang kaya menarik wisatawan, mendukung sektor pariwisata, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendidikan budaya juga mendorong kreativitas dan inovasi, yang penting untuk perkembangan sosial dan ekonomi. Indeks Kerukunan Umat Beragama yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki lingkungan yang harmonis dan toleran. Hal ini penting karena

kerukunan umat beragama mencegah konflik sosial dan menciptakan lingkungan yang damai, yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, toleransi beragama memperkuat keberagaman dan inklusi sosial, yang penting untuk kohesi sosial dan solidaritas. Kerukunan beragama juga meningkatkan citra daerah sebagai tempat yang aman dan harmonis, yang menarik wisatawan dan investor.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang tinggi menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di daerah tersebut memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Hal ini penting karena keluarga yang berkualitas dan sejahtera menciptakan dasar yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keluarga yang sehat dan stabil memberikan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak, yang penting untuk masa depan daerah. Keluarga yang kuat dan berkualitas juga berkontribusi pada stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat kesetaraan gender yang baik. Hal ini penting karena kesetaraan gender memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, kesetaraan gender meningkatkan produktivitas dan inovasi, karena seluruh potensi sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal. Kesetaraan gender juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang tinggi menunjukkan bahwa daerah berhasil melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini penting karena keanekaragaman hayati yang terjaga mendukung ekosistem yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Selain itu, keanekaragaman hayati yang kaya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan mendukung ekonomi hijau. Ekosistem yang sehat juga mendukung ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting karena lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik mendukung pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Lingkungan hidup yang berkualitas juga meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan dan investor.

Ketahanan energi yang baik menunjukkan bahwa daerah memiliki akses yang memadai dan pemanfaatan energi yang efisien. Hal ini penting karena akses yang memadai terhadap energi listrik mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi energi yang tinggi mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akses listrik yang luas juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar seperti penerangan, pemanas/memasak, dan perangkat elektronik. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengukur persentase penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup dalam jangka waktu tertentu, mencerminkan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat. Ketahanan pangan yang baik penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Hal ini penting karena kecukupan gizi meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, gizi yang baik mendukung kemampuan belajar anak-anak dan produktivitas kerja orang dewasa.

Memastikan semua penduduk mendapatkan cukup pangan juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketahanan air yang baik menunjukkan bahwa daerah mampu menyediakan sumber daya air yang memadai dan aman bagi penduduknya. Hal ini penting karena akses terhadap air minum yang aman mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, ketersediaan air baku mendukung irigasi dan produksi pertanian, yang penting untuk ketahanan pangan. Ketersediaan air yang memadai juga mendukung industri dan kebutuhan ekonomi lainnya, mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Indeks Risiko Bencana yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat risiko bencana yang rendah atau telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Hal ini penting karena mengurangi risiko bencana membantu melindungi nyawa dan properti masyarakat. Selain itu, mengurangi dampak bencana alam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Daerah dengan risiko bencana rendah juga lebih menarik bagi investor karena menawarkan lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil. Penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan menunjukkan komitmen daerah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini penting karena mengurangi emisi GRK adalah langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim global yang berdampak pada suhu, pola cuaca, dan fenomena alam ekstrem. Selain itu, penurunan emisi GRK mengurangi polusi udara, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Daerah yang berhasil mengurangi emisi GRK juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang tinggi.

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

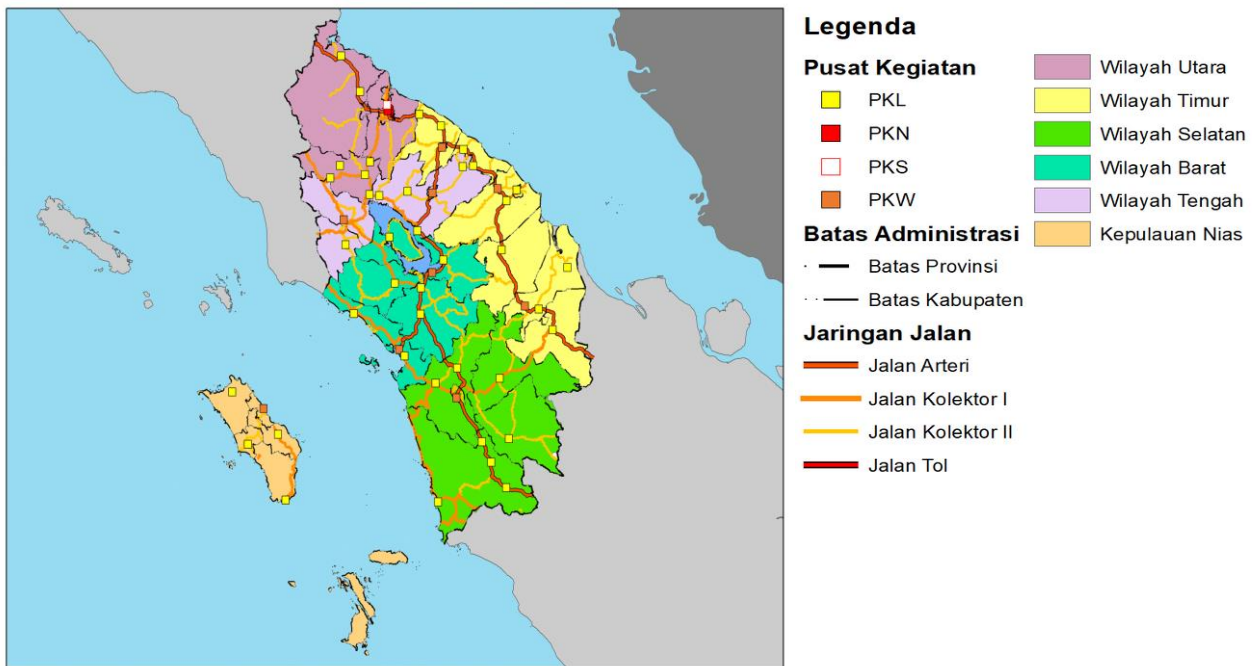
Arah kebijakan pembangunan wilayah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan wilayah Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global dengan mengimplementasikan Misi 6 yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah dan Misi 7 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah yang dilihat dari susunan sebaran pusat kegiatan, karakteristik pola pergerakan lalu-lintas wilayah, lokasi hub logistik dan prioritas industri, serta jarak posisi wilayah administrasi, Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 6 (enam) kelompok wilayah kabupaten/kota. Enam kelompok wilayah kabupaten/kota tersebut menjadi dasar pembagian Provinsi Sumatera Utara menjadi 6 wilayah pengembangan (WP), yaitu:

1. **WP Utara:** meliputi kota-kota dengan pola lalu lintas yang tinggi, terutama Medan yang menjadi pusat ekonomi utama dan memiliki banyak aktivitas logistik. Deli Serdang juga penting sebagai hub regional untuk industri pertanian dan manufaktur. Kabupaten Karo mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata.
2. **WP Timur:** termasuk kawasan dengan aktivitas pelabuhan dan industri berat seperti Batu Bara dan Tanjungbalai. Wilayah ini juga mendukung pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
3. **WP Selatan:** memiliki fokus pada pengolahan hasil pertanian dan industri ringan, dengan Padangsidimpuan sebagai hub utama.
4. **WP Barat:** termasuk kota-kota dengan aktivitas pelabuhan seperti Sibolga dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.

5. **WP Kepulauan Nias:** fokus pada inter-konektivitas pulau dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.
6. **WP Tengah:** termasuk hub industri utama seperti Pematangsiantar dan Sei Mangkei yang mendukung bioindustri dan pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata.

Gambar 5. 1 Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Sumatera Utara



Wilayah Pengembangan Utara meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat. Kota Medan berperan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat distribusi utama. Kota Medan adalah pusat ekonomi dan logistik utama yang mendukung berbagai sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Deli Serdang, juga berstatus PKN, memiliki volume lalu lintas sedang hingga tinggi dengan lalu lintas industri yang signifikan, menjadikannya hub logistik regional yang mendukung produk pertanian dan industri. Kota Binjai, yang juga PKN, memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas komuter. Kota ini berfungsi sebagai dukungan untuk industri lokal. Kabupaten Karo, berstatus PKN, menunjukkan pola lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian dan pariwisata, mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata. Kabupaten Langkat, memiliki pusat kegiatan lokal (PKL) di Pangkalan Brandan dan Stabat, kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dengan fokus pada lalu lintas pertanian, mendukung pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.

Wilayah Pengembangan Timur meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batu Bara, Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Asahan memiliki pusat kegiatan wilayah (PKW) di Kisaran menjadikan kabupaten ini dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung pengolahan hasil pertanian. Kabupaten Labuhanbatu, juga memiliki PKW di Rantauprapat, kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal. Kota Tebingtinggi, dengan statusnya sebagai PKW memiliki volume lalu lintas tinggi dan berperan sebagai koridor transportasi utama, kota ini berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung manufaktur ringan dan

perakitan. Kota Tanjungbalai, yang berstatus PKL, memiliki volume lalu lintas sedang dengan lalu lintas pelabuhan yang signifikan, mendukung pengolahan ikan dan *seafood*. Kabupaten Batu Bara, memiliki PKL di Indrapura dan Lima Puluh, memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas industri dan pelabuhan, mendukung industri berat dan manufaktur untuk ekspor. Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki PKL di Perbaungan dan Sei Rampah, memiliki volume lalu lintas sedang hingga tinggi dengan dominasi lalu lintas campuran industri dan pertanian, mendukung pengolahan makanan dan manufaktur ringan. Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, keduanya memiliki PKL di Aek Kanopan dan Kota Pinang, memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal.

Wilayah Pengembangan Selatan meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara. Kota Padangsidimpuan berstatus PKW dengan volume lalu lintas tinggi dan dominasi lalu lintas pertanian, berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan hasil pertanian dan manufaktur ringan. Di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas, dan Kabupaten Padanglawas Utara, tersebar PKL di Sipirok, Batang Toru, Gunung Tua, Sibuhuan, Natal, Siabu, Panyabungan, dan Kotanopan, kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal dan pariwisata.

Wilayah Pengembangan Barat meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Toba. Kota Sibolga berstatus PKW dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pelabuhan, berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan ikan dan *seafood*. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, tersebar PKL di Barus, Pandan, Tarutung, Siborong-borong, dan Dolok Sanggul, kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata. Samosir juga memiliki PKL di Pangururan dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pariwisata, mendukung pariwisata dan pengolahan hasil pertanian. Kabupaten Toba memiliki PKW di Balige, memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pariwisata, mendukung pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.

Wilayah Pengembangan Kepulauan Nias meliputi Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias. Kota Gunungsitoli berstatus PKW dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas antar-pulau dan pariwisata, berfungsi sebagai hub logistik utama untuk Kepulauan Nias, mendukung perikanan dan pariwisata. Di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias, tersebar PKL di Teluk Dalam, Pulau Telo, Lotu, Lahomi, dan Gido, kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas antar-pulau, mendukung industri lokal dan pariwisata.

Wilayah Pengembangan Tengah meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kota Pematangsiantar berstatus PKW dengan volume lalu lintas tinggi dan berperan sebagai koridor transportasi utama, berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan hasil pertanian dan

manufaktur ringan. Kabupaten Simalungun memiliki PKL di beberapa lokasi yaitu di Pematang Raya, Perdagangan, Parapat, dan Saribudolok, memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, berfungsi sebagai hub logistik Sei Mangkei yang mendukung bioindustri, pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata. Kabupaten Dairi yang memiliki PKW di Sidikalang dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan PKL-nya di Salak, keduanya memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal dan pariwisata.

Karakteristik kabupaten/kota yang menjadikan mereka bergabung menjadi satu wilayah pengembangan dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5. 14 Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Berdasarkan Pola Lalu Lintas, Lokasi Hub Logistik, dan Prioritas Industri

WP	Kabupaten/ Kota	Pusat Kegiatan	Karakteristik Pola Lalu Lintas	Lokasi Hub Logistik	Prioritas Industri
Utara	Medan	PKN	Kemacetan tinggi pada jam sibuk, volume lalu lintas tinggi	Pusat distribusi utama	Pusat ekonomi dan logistik utama
	Deli Serdang	PKN	Volume sedang hingga tinggi, lalu lintas industri signifikan	Hub logistik regional	Dukungan untuk produk pertanian dan industri
	Binjai	PKN	Volume sedang, lalu lintas komuter	-	Dukungan untuk industri lokal
	Karo	PKN	Volume sedang, lalu lintas pertanian dan pariwisata	-	Dukungan untuk pertanian, agro-industri, dan pariwisata
	Langkat	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk pengolahan hasil pertanian dan pariwisata
Timur	Asahan	PKW	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Pengolahan hasil pertanian
	Labuhan-batu	PKW	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal
	Tebingtinggi	PKW	Volume tinggi, koridor transportasi utama	Hub logistik regional	Manufaktur ringan dan perakitan
	Tanjung Balai	PKL	Volume sedang, lalu lintas pelabuhan signifikan	Hub logistik regional	Pengolahan ikan dan seafood
	Batubara	PKL	Volume sedang, lalu lintas industri dan pelabuhan signifikan	Hub logistik Kuala Tanjung	Industri berat dan manufaktur untuk ekspor
	Serdang Bedagai	PKL	Volume sedang hingga tinggi,	Hub logistik regional	Pengolahan makanan

WP	Kabupaten/ Kota	Pusat Kegiatan	Karakteristik Pola Lalu Lintas	Lokasi Hub Logistik	Prioritas Industri
			campuran industri dan pertanian		dan manufaktur ringan
	Labuhan- batu Utara	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal
	Labuhan- batu Selatan	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal
Selatan	Padang- sidempuan	PKW	Volume tinggi, lalu lintas pertanian signifikan	Hub logistik regional	Pengolahan hasil pertanian dan manufaktur ringan
	Mandailing Natal	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
	Tapanuli Selatan	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
	Padang- lawas	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal
	Padang- lawas Utara	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal
Barat	Sibolga	PKW	Volume sedang, lalu lintas pelabuhan signifikan	Hub logistik regional	Pengolahan ikan dan seafood
	Tapanuli Tengah	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian dan perikanan	-	Dukungan untuk industri lokal, dan pariwisata
	Tapanuli Utara	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal
	Humbang Hasundutan	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Pengolahan hasil pertanian dan pariwisata
	Samosir	PKL	Volume sedang, lalu lintas pariwisata signifikan	-	Dukungan untuk pariwisata dan pengolahan hasil pertanian
	Toba	PKW	Volume sedang, lalu lintas pariwisata signifikan	-	Pengolahan hasil pertanian dan dukungan pariwisata

WP	Kabupaten/ Kota	Pusat Kegiatan	Karakteristik Pola Lalu Lintas	Lokasi Hub Logistik	Prioritas Industri
Kepulauan Nias	Gunungsitoli	PKW	Volume sedang, lalu lintas antar- pulau dan pariwisata	Hub logistik utama untuk Nias	Perikanan dan dukungan pariwisata
	Nias Selatan	PKL	Volume sedang, lalu lintas antar- pulau	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
	Nias Utara	PKL	Volume sedang, lalu lintas antar- pulau	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
	Nias Barat	PKL	Volume sedang, lalu lintas antar- pulau	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
	Nias	PKL	Volume sedang, lalu lintas antar- pulau	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
Tengah	Pematang- siantar	PKW	Volume tinggi, koridor transportasi utama	Hub logistik regional	Pengolahan hasil pertanian dan manufaktur ringan
	Simalungun	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian signifikan	Hub logistik Sei Mangkei	Bioindustri dan pengolahan hasil pertanian dan pariwisata
	Dairi	PKW	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata
	Pakpak Bharat	PKL	Volume sedang, lalu lintas pertanian	-	Dukungan untuk industri lokal dan pariwisata

Pertimbangan pembagian 6 WP di atas dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik (nilai rantai pasok), mengurangi kemacetan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai kondisi Sumatera Utara menjadi pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global dalam 20 tahun ke depan. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan infrastruktur kewilayahan dan sarana prasarana akan memainkan peran penting dalam mencapai keinginan tersebut. Dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi kemacetan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk memaksimalkan fungsi WP di atas, maka terdapat 5 (lima) rute

pergerakan lalu-lintas utama di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 15 Tabel Rute Pergerakan Lalu-Lintas Utama Provinsi Sumatera Utara

No	Rute Utama	Wilayah yang Dilalui	Karakteristik Pola Lalu Lintas	Fungsi
1	Koridor Utara-Selatan	Medan - Deli Serdang - Tebingtinggi - Pematangsiantar - Simalungun - Toba - Padangsidimpuan	Volume lalu lintas tinggi, kemacetan pada jam sibuk, dominasi kendaraan berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koneksi Antar Wilayah: Koridor ini menghubungkan kota-kota utama di Sumatera Utara dari utara ke selatan, mendukung arus barang dan penumpang. 2. Pusat Ekonomi dan Distribusi: Medan sebagai pusat distribusi utama, dengan Deli Serdang, Tebingtinggi, dan Pematangsiantar sebagai titik distribusi regional. 3. Akses ke Objek Wisata: Koridor ini juga menghubungkan wilayah dengan objek wisata utama seperti Danau Toba. 4. Pengembangan Infrastruktur: Mengarahkan investasi untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung.
2	Koridor Timur-Barat	Tanjungbalai - Batu Bara - Tebingtinggi - Medan - Langkat	Volume sedang hingga tinggi, lalu lintas pelabuhan dan industri, kemacetan di Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Antar Pelabuhan dan Pusat Distribusi: <ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Balai: Sebagai pelabuhan penting untuk aktivitas ekspor-impor dan industri perikanan. • Medan: Pusat ekonomi utama dan hub distribusi terbesar di Sumatera Utara. • Langkat: Wilayah dengan potensi pertanian dan industri yang memerlukan akses ke pasar yang lebih luas. 2. Dukungan untuk Industri dan Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Batu Bara: Memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendukung industri berat dan manufaktur. • Tebingtinggi: Pusat distribusi untuk produk pertanian dan industri ringan. 3. Efisiensi Logistik: <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Ketergantungan pada

No	Rute Utama	Wilayah yang Dilalui	Karakteristik Pola Lalu Lintas	Fungsi
				<p>Medan: Dengan adanya koridor ini, arus barang dari Tanjungbalai tidak harus selalu melalui Medan untuk mencapai Langkat, sehingga mengurangi beban lalu lintas di Medan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Lebih Merata: Memungkinkan distribusi yang lebih efisien ke berbagai wilayah di sepanjang koridor tanpa harus terpusat di Medan. <p>4. Peningkatan Ekonomi Regional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses ke Pasar: Koridor ini membuka akses pasar bagi daerah-daerah seperti Tanjungbalai dan Batu Bara untuk mendistribusikan produk mereka lebih efisien. • Pengembangan Infrastruktur: Mendorong pengembangan infrastruktur di sepanjang rute yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
3	Konektivitas Kepulauan Nias	Gunungsitoli - Bandara Binaka - Pelabuhan Gunungsitoli - Nias Selatan/Utara/Barat	Volume sedang, lalu lintas antar-pulau, peningkatan saat musim turis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan aksesibilitas dan konektivitas antara Pulau Nias dan daratan Sumatera Utara. Memfasilitasi transportasi penumpang dan barang dengan ekspansi fasilitas bandara dan pelabuhan 2. Mendukung sektor pariwisata dan distribusi produk lokal. Mendukung mobilitas penduduk dan wisatawan antar-pulau.
4	Sirkuit Pariwisata Danau Toba	Medan - Deli Serdang - Pematangsiantar - Toba - Samosir	Volume tinggi, lalu lintas pariwisata meningkat saat musim liburan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung perkembangan pariwisata di sekitar Danau Toba. 2. Meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata utama. Memastikan akses yang mudah dan nyaman ke Pulau Samosir dengan peningkatan layanan ferry. 3. Mendukung pengembangan ekonomi pariwisata dan distribusi produk lokal.
5	Sabuk Industri dan Pertanian Selatan	Medan - Deli Serdang - Serdang Bedagai - Asahan - Labuhanbatu Utara -	Volume tinggi, dominasi kendaraan berat mengangkut hasil pertanian dan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan untuk Pertanian dan Industri: Rute ini mendukung transportasi hasil pertanian dan produk industri dari wilayah selatan menuju pasar utama. 2. Distribusi Efisien:

No	Rute Utama	Wilayah yang Dilalui	Karakteristik Pola Lalu Lintas	Fungsi
		Padanglawas Utara - Padanglawas - Tapanuli Selatan - Mandailing Natal		Menghubungkan daerah-daerah produksi utama dengan pusat distribusi dan pelabuhan untuk ekspor. 3. Pengembangan Infrastruktur: Fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal. 4. Peningkatan Ekonomi Regional: Meningkatkan akses pasar bagi daerah-daerah di sepanjang rute dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam rangka pengembangan wilayah 6 WP di atas menjadi pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, masing-masing WP diidentifikasi keunikan potensi bioindustri dan pariwisatanya. Berikut uraian pengembangan bioindustri dan pariwisata masing-masing WP.

5.3.1. Pengembangan Bioindustri

Bioindustri secara umum adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang industri. Bioteknologi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis yang menghasilkan barang dan jasa. Bahan baku untuk bioindustri ini umumnya berupa: 1) hasil pertanian seperti sereal, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan; 2) hasil peternakan misalnya susu sapi, daging; 3) hasil perkebunan contohnya kopi, coklat, tebu; maupun 4) limbah industri seperti molase, jerami, dedak, kulit kopi, kulit coklat, sabut kelapa, ampas tahu, ampas biji yang telah diambil minyaknya, air limbah, dan sampah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, maupun industri. Berikut ditampilkan jenis hasil produksi masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara yang dapat dijadikan bahan baku untuk bioindustri.

Tabel 5. 16 Tabel Produk Bahan Baku Bioindustri

Kabupaten/Kota	Produk Bahan Baku
Asahan	Kelapa sawit, karet, kakao, kelapa
Batu Bara	Kelapa sawit, karet, hasil perikanan
Dairi	Kopi, sayur dan buah segar, tanaman pangan
Deli Serdang	Kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, daging
Gunungsitoli	Kelapa, hasil laut
Humbang Hasundutan	Kopi, tanaman hortikultura
Karo	Kakao, sayuran, buah-buahan, kopi, kentang, tanaman hortikultura, tanaman pangan
Labuhanbatu	Kelapa sawit, karet
Labuhanbatu Selatan	Kelapa sawit, karet
Labuhanbatu Utara	Kelapa sawit, karet
Langkat	Kelapa sawit, karet, kakao, karet, daging
Mandailing Natal	Kopi, kakao, karet, hasil hutan

Kabupaten/Kota	Produk Bahan Baku
Nias	Kelapa, kapulaga, hasil laut
Nias Barat	Kelapa, hasil laut
Nias Selatan	Kelapa, kakao, hasil laut
Nias Utara	Kelapa, hasil laut
Padanglawas	Kelapa sawit, karet
Padanglawas Utara	Kelapa sawit, karet
Padangsidempuan	Kopi, hasil pertanian
Pakpak Bharat	Kopi, tanaman hortikultura
Pematangsiantar	Kelapa sawit, karet, hasil pertanian
Samosir	Kopi, hasil pertanian organik, pariwisata berbasis agroindustri
Serdang Bedagai	Kelapa sawit, karet, kakao, tanaman pangan
Sibolga	Hasil laut, perikanan
Simalungun	Kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tanaman hortikultura, tanaman pangan, perikanan
Tanjungbalai	Hasil laut, perikanan
Tapanuli Selatan	Kopi, kakao, hasil hutan
Tapanuli Tengah	Kelapa sawit, karet, kakao, hasil perikanan
Tapanuli Utara	Kopi, tanaman hortikultura
Tebing Tinggi	Kelapa sawit, karet, kakao
Toba	Kopi, tanaman hortikultura, tanaman pangan, hasil pertanian organik, pariwisata berbasis agroindustri

Beberapa kota seperti Medan tidak memiliki produksi bahan baku yang signifikan tetapi lebih berfokus pada pengolahan dan distribusi produk bahan baku dari kabupaten/kota lain. Medan menjadi pusat pengolahan dan distribusi, Binjai lebih fokus pada pengolahan dan distribusi, Pematangsiantar sebagai pusat pengolahan dan distribusi, Sibolga lebih fokus pada pengolahan hasil laut, dan Tanjungbalai fokus pada pengolahan hasil laut. Bahan baku di atas dalam 20 tahun ke depan akan dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bioindustri. Gambaran contoh produk turunan dimaksud antara lain dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Tabel 5. 17 Tabel Produk Turunan Bioindustri

Produk Bahan Baku	Produk Turunan Pertama	Produk Turunan Kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan Advanced
Kelapa	Santan, Minyak Kelapa, Serabut Kelapa, Tepung Kelapa	Minyak Kelapa Murni (VCO), Produk Serat Kelapa, Air Kelapa	Produk Makanan Berbasis Kelapa (Kelapa Parut Kering, Kripik Kelapa), Produk Kesehatan Kelapa, Briket Kelapa	Kosmetik Berbasis Kelapa, Nutraceuticals, Produk Kesehatan Berbasis Kelapa, Biofuel
Hasil Laut dan Perikanan	Ikan Beku, Udang Beku, Fillet Ikan, Kerupuk Ikan	Produk Ikan Kaleng, Produk Ikan Olahan (Fish Balls, Fish Sticks), Tepung Ikan	Suplemen Omega-3, Minyak Ikan Berkualitas Tinggi, Pakan Ikan	Kosmetik Berbasis Ikan, Produk Kesehatan Berbasis Hasil Laut, Bioteknologi Kelautan
Kelapa Sawit	Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Tandan Kosong	RBD Palm Oil, Palm Olein, Palm Stearin, Palm Kernel Cake	Margarin, Minyak Goreng, Shortening, Oleokimia (Glycerin, Fatty Acids, Fatty Alcohols), Pakan Ternak	Bio-plastik, Surfactants, Detergents, Pharmaceuticals, Cosmetics, Biodiesel
Karet	Karet Lembaran,	Ban, Produk Karet Teknis	Produk Karet Berkualitas Tinggi	Bahan Nano-karet, Karet

Produk Bahan Baku	Produk Turunan Pertama	Produk Turunan Kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan Advanced
	Karet Gulungan, Lateks	(Gaskets, Seals, Hoses), Sarung Tangan Karet	(Latex Gloves, Medical Equipment), Pakaian Pelindung	untuk Industri Dirgantara, Otomotif, Biomaterial
Kopi	Kopi Panggang, Kopi Bubuk, Kopi Hijau	Kopi Instan, Kopi Decaf, Kopi Spesialti	Minuman Kopi Siap Saji, Ekstrak Kopi, Kopi Kapsul	Kosmetik Berbasis Kopi, Nutraceuticals, Produk Kesehatan Berbasis Kopi, Produk Kopi Premium
Hasil Pertanian, Tanaman Hortikultura, dan Hasil Pertanian Organik	Sayuran Beku, Buah-Buahan Beku, Tepung Sayuran	Sayuran dan Buah-Buahan Kaleng, Jus Buah, Puree Buah	Produk Olahan Sayuran dan Buah (Pickles, Sauces, Selai), Bubuk Buah	Ekstrak Buah dan Sayuran untuk Nutraceuticals, Produk Kesehatan, Produk Pangan Fungsional
Pariwisata Berbasis Agroindustri	Produk Wisata Agro (Produk Olahan Hasil Pertanian, Edukasi Wisata)	Produk Wisata Edukasi dan Agro (Tur Edukasi, Wisata Petik)	Produk Wisata Inovatif Berbasis Agro (Agro-tour, Wisata Kuliner)	Produk Wisata Berkelanjutan dan Edukasi Internasional (Resort Edukasi, Agro-tech Park)
Kakao	Cocoa Butter, Cocoa Mass, Cocoa Powder, Biji Kakao Fermentasi	Cokelat Batangan, Cokelat Bubuk, Cokelat Cair, Cokelat Compound	Produk Cokelat Berkualitas Tinggi (Gourmet Chocolate), Produk Cokelat Fungsional (Healthy Chocolate), Bubuk Kakao Instant	Kosmetik Berbasis Kakao, Nutraceuticals, Produk Kesehatan Berbasis Kakao, Produk Cokelat Premium
Hasil Hutan	Rotan Mentah, Kayu Gergajian, Kayu Lapis	Produk Rotan Olahan (Furniture, Handicrafts), Papan Kayu, Veneer, Plywood	Produk Kayu Olahan Berkualitas Tinggi (Engineered Wood, MDF), Produk Furnitur Berkualitas Tinggi, Kertas, Tisu	Bahan Bangunan Ramah Lingkungan, Produk Interior Berkelas Dunia, Produk Rotan Inovatif

Berdasarkan pertimbangan: 1) akses ke bahan baku: lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku utama seperti kelapa sawit, kopi, karet, ikan, dan lain-lain; 2) infrastruktur transportasi: ketersediaan jalan, pelabuhan, dan bandara yang memadai untuk distribusi produk; 3) potensi pasar: dekat dengan pasar utama dan pusat distribusi regional; 4) teknologi dan pelatihan: ketersediaan fasilitas pelatihan dan teknologi produksi yang canggih; 5) kerjasama dan kemitraan: kemudahan untuk membangun kemitraan dengan petani, nelayan, dan produsen lokal, maka sebaran lokasi optimal pengolahan produk bioindustri di atas berdasarkan WP dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 18 Tabel Arahkan Lokasi Pengolahan Produk Bioindustri

WP	Kabupaten/Kota	Produk Turunan	Tingkatan Produk Turunan	Sumber Bahan Baku
Utara	Medan	Oleokimia, bioplastik, produk	Produk Turunan Lanjutan dan	Langkat, Deli Serdang

WP	Kabupaten/Kota	Produk Turunan	Tingkatan Produk Turunan	Sumber Bahan Baku
		lateks	<i>Advanced</i>	
	Deli Serdang	Jus buah, produk pangan beku, makanan siap saji, kosmetik	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Binjai	Produk pangan siap saji, pakaian jadi, kain batik, minuman kesehatan	Produk Turunan Lanjutan	Deli Serdang, Langkat
	Karo	Sayuran kalengan, buah kering, jus buah, makanan beku	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Langkat	Oleokimia, sabun, kosmetik, produk lateks, kopi instan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
Timur	Asahan	Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks, makanan siap saji	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Labuhanbatu	Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Tebingtinggi	Makanan siap saji, minuman kesehatan, pakaian jadi, produk plastik fungsional	Produk Turunan Lanjutan	Asahan, Labuhanbatu
	Tanjung Balai	Ikan kalengan, seafood beku, produk pangan siap saji dari ikan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Wilayah Kepulauan Nias, Sibolga
	Batu Bara	Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks, makanan siap saji	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Serdang Bedagai	Makanan siap saji, minuman kesehatan, pakaian jadi	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Labuhanbatu Utara	Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Labuhanbatu Selatan	Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
Selatan	Padangsidempuan	Kopi instan, kopi bubuk, produk lateks, makanan siap saji	Produk Turunan Pertama, Kedua, dan Lanjutan	Lokal
	Mandailing Natal	Kopi instan, kopi bubuk, cokelat, rempah-rempah kemasan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Tapanuli Selatan	Kopi instan, kopi bubuk, produk lateks, makanan siap saji	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Padanglawas	Oleokimia,	Produk	Lokal

WP	Kabupaten/Kota	Produk Turunan	Tingkatan Produk Turunan	Sumber Bahan Baku
		bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks, rempah-rempah kemasan	Turunan Pertama dan Kedua	
	Padanglawas Utara	Oleokimia, bioplastik, sabun, kosmetik, produk lateks, rempah-rempah kemasan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
Barat	Sibolga	Ikan kalengan, seafood beku, produk pangan siap saji dari ikan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah
	Tapanuli Tengah	Ikan kalengan, seafood beku, produk lateks	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Tapanuli Utara	Kopi instan, kopi bubuk, produk lateks, makanan siap saji	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Humbang Hasundutan	Kopi instan, kopi bubuk, kentang beku, sayuran kalengan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Samosir	Produk olahan pariwisata (souvenir), sayuran kalengan, buah kering	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Toba	Kopi instan, kopi bubuk, ikan kalengan, seafood beku	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
Kepulauan Nias	Gunungsitoli	Ikan kalengan, seafood beku, produk olahan pariwisata (souvenir)	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Nias Selatan	Ikan kalengan, seafood beku, produk olahan pariwisata (souvenir)	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Nias Utara	Ikan kalengan, seafood beku, produk olahan pariwisata (souvenir)	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Nias Barat	Ikan kalengan, seafood beku, produk olahan pariwisata (souvenir)	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Nias	Ikan kalengan, seafood beku, produk olahan pariwisata (souvenir)	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
Tengah	Pematangsiantar	Produk kertas, tisu, makanan siap saji, pakaian jadi	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Simalungun
	Simalungun	Biodiesel, bioplastik kemasan, makanan siap saji	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Dairi	Kopi instan, kopi bubuk, kentang beku, sayuran kalengan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Lokal
	Pakpak Bharat	Kopi instan, kopi	Produk	Lokal

WP	Kabupaten/Kota	Produk Turunan	Tingkatan Produk Turunan	Sumber Bahan Baku
		bubuk, kentang beku, sayuran kalengan	Turunan Pertama dan Kedua	

Berdasarkan susunan WP yang berkembang dengan pengolahan produk bioindustri di atas, maka dalam 20 tahun ke depan diharapkan akan terjadi perkembangan bioindustri di Sumatera Utara yang sebelumnya hanya menjadi penghasil produk bahan baku, secara bertahap akan berkembang menjadi penghasil produk turunan bioindustri. Namun tidak semua kabupaten/kota dikembangkan menjadi pusat bioindustri karena keterbatasan jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri lanjutan. Ketersediaan bahan baku tidak cukup hanya diperoleh dari lokal dan regional dalam satu wilayah pengembangan (WP). Berikut tahapan perkembangan setiap WP dalam pengembangan bioindustri.

Tabel 5. 19 Tabel Tahapan Perkembangan Pusat Pengembangan Bioindustri

WP	Kabupaten/Kota	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Utara	Medan	R&D, Teknologi, Produk Turunan Pertama dan Kedua	Pusat Inovasi, Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>	Produk Turunan <i>Advanced</i>
	Deli Serdang	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
Timur	Asahan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
	Batu Bara	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
	Labuhanbatu	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
Selatan	Padangsidempuan	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
	Mandailing Natal	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
Barat	Sibolga	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
	Tapanuli Utara	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
Kep. Nias	Gunungsitoli	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
Tengah	Pematangsiantar	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>
	Simalungun	Produk Turunan Pertama dan Kedua	Produk Turunan kedua	Produk Turunan Lanjutan	Produk Turunan <i>Advanced</i>

Kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam pusat pengembangan bioindustri produk turunan lanjutan/*advanced* di atas tetap

mengembangkan produk bahan baku dan produk turunan pertama/kedua sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel Arahana Lokasi Pengolahan Produk Bioindustri, dan produksinya diharapkan dapat lebih besar seiring dengan bergesernya produk bioindustri kabupaten/kota yang menjadi Pusat Pengembangan Bioindustri Produk Turunan Lanjutan/*Advanced* di atas dari sebelumnya penghasil produk bahan baku dan produk turunan pertama/kedua menjadi terspesialisasi menjadi penghasil produk turunan kedua dan lanjutannya. Dengan demikian diharapkan terjadi integrasi rantai pasok (*supply chain*) bioindustri di Provinsi Sumatera Utara. Arah kebijakan untuk mewujudkan integrasi rantai pasok ini sebagai berikut.

1. Peningkatan Infrastruktur:

- Modernisasi dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan, bandara, dan pelabuhan untuk memperlancar distribusi bahan baku dan produk turunannya.
- Pembangunan pusat distribusi dan gudang logistik di lokasi strategis di Medan, Deli Serdang, Tebingtinggi, Serdang Bedagai, Tanjungbalai, Batu Bara, Pematangsiantar, Simalungun, Padangsidimpuan, Sibolga, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Gunungsitoli.
- Pengembangan infrastruktur pendukung berupa peningkatan fasilitas terminal bus dan pelabuhan di wilayah-wilayah utama untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas orang.

2. Teknologi dan Digitalisasi:

- Investasi dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk industri.
- Implementasi sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi antar pelaku industri.
- Penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan pelacakan produk dari hulu ke hilir.

3. Kolaborasi dan Kemitraan:

- Membangun kemitraan antara petani, nelayan, produsen, distributor, dan pengecer untuk menciptakan rantai pasok yang terintegrasi.
- Mendorong pembentukan koperasi atau asosiasi produsen untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi operasional.
- Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Membangun kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan di sektor-sektor utama.
- Kolaborasi Antar Kawasan Industri:
 - Sinergi Produk Industri: Mendorong kerjasama antara kawasan industri di wilayah-wilayah berbeda untuk menciptakan rantai pasokan yang efisien dan meningkatkan nilai tambah produk.
 - Klaster Industri Terpadu: Membentuk klaster industri terpadu yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur, untuk menciptakan sinergi dan efisiensi.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

- Memberikan pelatihan kepada pelaku industri tentang manajemen rantai pasok, teknologi produksi, dan standar kualitas.
- Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan.

5.3.2. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di luar lingkungan biasa seseorang untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau kegiatan lainnya. Industri pariwisata mencakup berbagai

layanan dan produk yang mendukung aktivitas ini, termasuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta atraksi wisata. Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan kaya dengan keindahan alam, warisan budaya, serta keragaman etnis dan tradisi sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya di Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah. Berikut ini diuraikan beberapa daftar potensi wisata prioritas di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Tabel 5. 20 Potensi Wisata Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Potensi Wisata Prioritas
1	Medan	Istana Maimun, Masjid Raya, pusat perbelanjaan, museum.
2	Deli Serdang	Wisata agro, wisata pantai.
3	Binjai	Taman kota, fasilitas rekreasi keluarga.
4	Langkat	Bukit Lawang (ekowisata orangutan), Tangkahan (ekowisata hutan).
5	Karo	Wisata pegunungan, kebun buah, pasar tradisional
6	Samosir	Pulau Samosir (budaya Batak, wisata alam).
7	Toba	Danau Toba (wisata alam dan budaya).
8	Pematangsiantar	Kebun binatang, warisan kolonial, pusat perbelanjaan.
9	Sibolga	Pantai, pelabuhan, akses ke pulau-pulau terdekat.
10	Nias	Surfing, budaya lompat batu, wisata pantai.
11	Tapanuli Selatan	Wisata agro, wisata sejarah, air terjun.
12	Labuhanbatu	Pengolahan hasil pertanian, wisata alam.
13	Padangsidempuan	Wisata agro, budaya lokal.
14	Mandailing Natal	Ekowisata hutan, air terjun, wisata alam.
15	Dairi	Perkebunan kopi, wisata alam.
16	Pakpak Bharat	Wisata alam, budaya lokal.
17	Tapanuli Tengah	Pantai, pelabuhan, wisata alam dan budaya.
18	Humbang Hasundutan	Wisata alam, perkebunan.
19	Tapanuli Utara	Wisata alam, budaya lokal.
20	Gunungsitoli	Wisata budaya dan sejarah, pantai.
21	Labuhanbatu Utara	Wisata alam, agro wisata.
22	Labuhanbatu Selatan	Wisata alam, agro wisata.
23	Serdang Bedagai	Wisata pantai, ekowisata.
24	Tebingtinggi	Wisata sejarah dan budaya, agro wisata.
25	Padanglawas	Wisata alam, sejarah dan budaya.
26	Padanglawas Utara	Wisata alam, sejarah dan budaya.
27	Asahan	Wisata alam, pantai, sejarah, dan budaya lokal.
28	Batu Bara	Wisata pantai, sejarah, dan budaya lokal.
29	Nias Barat	Wisata pantai, budaya lokal, surfing.
30	Nias Selatan	Wisata pantai, budaya lompat batu, surfing.
31	Nias Utara	Wisata pantai, budaya lokal, surfing.
32	Simalungun	Kebun teh, wisata alam, Danau Toba.
33	Tanjungbalai	Wisata pantai, sejarah dan budaya, wisata kuliner.

Potensi wisata prioritas di atas akan dikembangkan dalam paket pengembangan wisata dalam 20 tahun ke depan. Pengembangan paket wisata tersebut terbagi dalam 3 prioritas pengembangan yaitu prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Berikut diuraikan prioritas paket pengembangan wisata di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 5. 21 Tabel Prioritas Paket Pengembangan Wisata Provinsi Sumatera Utara

No	Paket Pengembangan Wisata	WP	Kabupaten/Kota	Status Prioritas
1	Sirkuit Danau Toba	Barat, Tengah, dan Utara	Toba, Samosir, Pematangsiantar, Simalungun, Humbang Hasundutan, Karo, Tapanuli	Prioritas Pertama

No	Paket Pengembangan Wisata	WP	Kabupaten/Kota	Status Prioritas
			Utara, Dairi	
2	Rute Pariwisata Medan	Utara	Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai	Prioritas Pertama
3	Rute Pariwisata Pantai Barat dan Kepulauan Nias	Barat dan Kepulauan Nias	Sibolga, Nias, Tapanuli Tengah, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunungsitoli	Prioritas Pertama
4	Agrowisata dan Wisata Pedesaan	Utara, Tengah, Selatan, dan Timur	Deli Serdang, Dairi, Padangsidempuan, Simalungun, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal	Prioritas Kedua
5	Rute Pariwisata Bukit Barisan	Utara, Tengah, Barat, dan Selatan	Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal	Prioritas Kedua
6	Rute Pariwisata Sejarah dan Budaya, serta Pesisir	Timur	Tanjungbalai, Asahan, Batu Bara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai	Prioritas Ketiga
7	Ekowisata dan Wisata Alam	Tengah dan Selatan	Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan	Prioritas Ketiga

Berdasarkan tabel di atas, WP Utara, WP Barat, WP Kepulauan Nias dan WP Tengah merupakan prioritas pertama dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, kemudian disusul WP Selatan dan WP Timur sebagai prioritas berikutnya.

Berdasarkan susunan paket pengembangan wisata dan prioritas pengembangannya di atas, maka dalam 20 tahun ke depan diarahkan perkembangan pariwisata di Sumatera Utara dengan tahapan sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Tabel Tahapan Pengembangan Pariwisata

No	Paket Pengembangan Wisata	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Sirkuit Danau Toba	Peningkatan akses jalan, pembangunan fasilitas wisata, promosi internasional	Pembangunan fasilitas wisata kelas dunia, promosi global	Menjadi destinasi wisata internasional terkemuka dengan fasilitas berkelas dunia	Menjadi destinasi wisata alam dan budaya internasional dengan penerapan konsep pariwisata berkelanjutan
2	Rute Pariwisata Medan	Peningkatan fasilitas sejarah, budaya, ekowisata, akses jalan, promosi internasional	Peningkatan akomodasi, promosi internasional, fasilitas ekowisata	Menjadi pusat wisata sejarah, budaya, dan ekowisata internasional	Menjadi pusat wisata sejarah, budaya, dan ekowisata berkelanjutan
3	Rute Pariwisata Pantai Barat dan Kepulauan Nias	Peningkatan fasilitas pantai, akomodasi, promosi internasional	Pengembangan resort kelas dunia, fasilitas pantai, promosi global	Menjadi destinasi wisata pantai dan surfing internasional terkemuka	Menjadi destinasi wisata pantai dan surfing berkelanjutan

No	Paket Pengembangan Wisata	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
4	Agrowisata dan Wisata Pedesaan	Peningkatan fasilitas agrowisata, akses jalan, promosi internasional	Peningkatan fasilitas agrowisata internasional, promosi global	Menjadi destinasi agrowisata internasional dengan fasilitas berkelas dunia	Menjadi destinasi agrowisata berkelanjutan dengan fasilitas berkelas dunia
5	Rute Pariwisata Bukit Barisan	Peningkatan fasilitas wisata pegunungan, akomodasi, promosi internasional	Pengembangan fasilitas wisata pegunungan kelas dunia, promosi global	Menjadi destinasi wisata pegunungan internasional dengan fasilitas berkelas dunia	Menjadi destinasi wisata pegunungan berkelanjutan dengan fasilitas berkelas dunia
6	Rute Pariwisata Sejarah dan Budaya, serta Pesisir	Peningkatan fasilitas sejarah dan budaya, akomodasi	Peningkatan fasilitas budaya dan sejarah internasional, promosi global	Menjadi pusat wisata budaya dan sejarah internasional	Menjadi pusat wisata budaya dan sejarah berkelanjutan
7	Ekowisata dan Wisata Alam	Peningkatan fasilitas ekowisata, akomodasi, akses jalan	Pengembangan pusat ekowisata internasional, fasilitas kelas dunia	Menjadi pusat ekowisata internasional dengan fasilitas berkelas dunia	Menjadi pusat ekowisata berkelanjutan dengan fasilitas berkelas dunia

5.3.3. Arah Kebijakan Konektivitas dan Perpustakaan

Perhatian utama dalam arah kebijakan pembangunan wilayah adalah konektivitas WP. Hal itu dikarenakan pengembangan wilayah harus terintegrasi dengan konektivitas yang tinggi. Konektivitas sangat penting dalam pembangunan wilayah karena meningkatkan aksesibilitas, memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, dan menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Konektivitas yang baik membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, membuka akses ke layanan publik dan peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, konektivitas mendukung efisiensi, produktivitas, dan inovasi, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, konektivitas yang baik adalah fondasi penting bagi pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Sama halnya dengan perpustakaan, perpustakaan juga meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat akses informasi yang menyediakan berbagai sumber daya, baik fisik maupun digital, yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan menyediakan koleksi buku, jurnal, *e-book*, serta akses ke basis data elektronik dan internet, perpustakaan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan berkualitas. Selain itu, perpustakaan juga menawarkan program literasi informasi dan pelatihan teknologi yang membantu masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dengan demikian, perpustakaan memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan, mendukung pendidikan, pengembangan keterampilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Perpustakaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung pencapaian Visi Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan yang dicapai dengan menjalankan fungsi sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama perpustakaan:

1. Pusat Informasi dan Pengetahuan

Akses ke Informasi Terkini: Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai sumber informasi terkini, termasuk buku, jurnal, laporan penelitian, dan basis data digital yang relevan dengan bioindustri dan pariwisata.

Pengembangan Koleksi Khusus: Mengembangkan koleksi khusus yang berfokus pada bioindustri dan pariwisata, termasuk literatur tentang teknologi terbaru, praktik terbaik, dan studi kasus dari seluruh dunia.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan Literasi Informasi: Pustakawan dapat menyelenggarakan program pelatihan literasi informasi untuk masyarakat, pengusaha, dan profesional di bidang bioindustri dan pariwisata, membantu mereka mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan efektif.

Kerjasama dengan Institusi Pendidikan: Bekerjasama dengan universitas, sekolah, dan lembaga pelatihan untuk mendukung kurikulum yang berfokus pada bioindustri dan pariwisata, serta menyediakan sumber daya belajar yang diperlukan.

3. Penelitian dan Inovasi

Dukungan Penelitian: Perpustakaan dapat menyediakan layanan dukungan penelitian, seperti bantuan dalam penelusuran literatur, pengelolaan data penelitian, dan akses ke publikasi ilmiah.

Fasilitasi Inovasi: Menciptakan ruang dan program untuk inovasi, seperti maker spaces, laboratorium penelitian, dan inkubator bisnis yang fokus pada bioindustri dan pariwisata.

4. Promosi dan Pelestarian Budaya

Dokumentasi dan Arsip: Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengarsipkan sejarah, budaya, dan perkembangan industri di Sumatera Utara, termasuk tradisi lokal, produk budaya, dan perkembangan industri pariwisata.

Program Budaya dan Edukasi: Menyelenggarakan program budaya, seminar, dan pameran yang mempromosikan kekayaan budaya dan potensi pariwisata Sumatera Utara kepada masyarakat dan wisatawan.

5. Pusat Komunitas

Fasilitas Komunitas: Menyediakan ruang untuk pertemuan komunitas, diskusi kelompok, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di sektor bioindustri dan pariwisata.

Akses Teknologi: Menyediakan akses ke teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer, internet, dan perangkat lunak khusus yang relevan dengan kebutuhan industri dan pariwisata.

6. Pengembangan Ekonomi Lokal

Dukungan untuk UMKM: Menyediakan informasi dan sumber daya yang membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam bioindustri dan pariwisata untuk mengembangkan bisnis mereka.

Promosi Pariwisata: Bekerjasama dengan dinas pariwisata untuk mempromosikan destinasi wisata lokal melalui berbagai media informasi yang tersedia di perpustakaan.

Pada dua tabel selanjutnya di bawah ini diuraikan arah kebijakan terkait konektivitas dan perpustakaan di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 5. 23 Tabel Arah Kebijakan Konektivitas

WP	Infrastruktur Utama	Arah Kebijakan	
		Konektivitas Infrastruktur	Integrasi Infrastruktur
Utara	Bandara Kualanamu, Pelabuhan Belawan, Jalan Tol, Stasiun Kereta Api	Pengembangan jalan tol/bebas hambatan dan kereta api untuk mendukung integrasi wilayah; Membangun jalan lingkar di sekitar kota dan kabupaten besar untuk memperlancar lalu lintas dan mengurangi kemacetan perkotaan; Mengembangkan jalan layanan di sepanjang jalan utama untuk lalu lintas lokal dan akses ke bisnis serta area perumahan; Menyelidiki kelayakan pengenalan layanan kereta api cepat antara kota-kota besar di sepanjang koridor ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keamanan: Implementasi langkah-langkah keamanan seperti tanda jalan yang lebih baik, penerangan, dan patroli rutin. • Pemeliharaan Rutin: Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk jalan-jalan ini agar tetap dalam kondisi optimal.
Timur	Pelabuhan Tanjung Balai, Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Lintas Sumatera, Stasiun Kereta Api	Pengembangan pelabuhan dan jalan lintas untuk mendukung ekspor dan distribusi produk industri; Meningkatkan jalur kereta api yang ada untuk mendukung kereta kargo yang lebih cepat dan lebih berat, memfasilitasi pergerakan kargo yang efisien dari zona industri ke pelabuhan; Menyelidiki kelayakan pengenalan layanan kereta api cepat antara kota-kota besar di sepanjang koridor ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Lalu Lintas Cerdas: Implementasi sistem manajemen lalu lintas cerdas menggunakan IoT dan AI untuk memantau arus lalu lintas dan mengelola kemacetan.
Selatan	Jalan Lintas Sumatera, Terminal Bus Besar	Peningkatan jalan lintas dan terminal bus untuk mendukung mobilitas dan distribusi; Membangun hub logistik dan fasilitas <i>cold storage</i> di sepanjang rute untuk mendukung rantai pasok pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas Intermodal: Mengembangkan konektivitas intermodal yang mulus antara jalan, kereta api, udara, dan laut untuk memperlancar pergerakan barang dan orang.
Barat	Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Ajibata, Jalan Lintas Sumatera	Pengembangan pelabuhan dan jalan lintas untuk mendukung pariwisata dan industri; Membangun hub logistik dan fasilitas <i>cold storage</i> di sepanjang rute untuk mendukung rantai pasok pertanian; Mengembangkan jalan <i>scenic</i> di sekitar Danau Toba dengan fasilitas wisata khusus, termasuk area istirahat, titik pandang, dan tempat parker; Meningkatkan terminal dan layanan feri di Danau Toba untuk menyediakan konektivitas yang lebih baik antara daratan dan Pulau Samosir.	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Berkelanjutan: Memastikan semua pengembangan/peningkatan
Nias	Bandara Binaka, Pelabuhan	Peningkatan bandara dan pelabuhan untuk mendukung pariwisata dan distribusi produk lokal; Memperluas	

WP	Infrastruktur Utama	Arah Kebijakan	
		Konektivitas Infrastruktur	Integrasi Infrastruktur
	Gunungsitoli, Pelabuhan Lokal	pelabuhan dengan tambahan dermaga dan fasilitas penanganan kargo modern.	dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan/ penggunaan teknologi dan praktik ramah lingkungan.
Wilayah Tengah	Jalan Lintas Sumatera, Stasiun Kereta Api, Terminal Bus	Peningkatan jalan lintas dan terminal bus untuk mendukung mobilitas dan distribusi; Meningkatkan jalur kereta api yang ada untuk mendukung kereta kargo yang lebih cepat dan lebih berat, memfasilitasi pergerakan kargo yang efisien dari zona industri ke pelabuhan.	

Bandara Kualanamu, Pelabuhan Belawan, jalan tol, dan stasiun kereta api menjadi fokus utama di WP Utara. Arah kebijakan pengembangan mencakup pembangunan jalan tol dan kereta api untuk integrasi wilayah, pembangunan jalan lingkar untuk mengurangi kemacetan, serta jalan layanan untuk lalu lintas lokal. Pengembangan layanan kereta api cepat antar kota juga dipertimbangkan. Keamanan transportasi ditingkatkan dengan tanda jalan, penerangan, dan patroli rutin. Sistem manajemen lalu lintas cerdas menggunakan IoT dan AI diterapkan, serta konektivitas antar jalan, kereta api, udara, dan laut dikembangkan dengan perhatian pada keberlanjutan. Pelabuhan Tanjung Balai dan Kuala Tanjung, Jalan Lintas Sumatera, dan stasiun kereta api adalah infrastruktur utama di WP Timur. Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan pelabuhan dan jalan lintas untuk mendukung ekspor dan distribusi produk industri, serta peningkatan jalur kereta api untuk kargo yang lebih cepat dan berat. Kemungkinan layanan kereta api cepat antar kota juga dipelajari kelayakannya. Di WP Selatan, peningkatan jalan lintas dan terminal bus menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas dan distribusi. Hub logistik dan fasilitas *cold storage* dibangun di sepanjang rute untuk mendukung rantai pasok pertanian. Wilayah Pengembangan Barat mengutamakan pengembangan Pelabuhan Sibolga dan Ajibata serta Jalan Lintas Sumatera. Arah kebijakan mencakup pembangunan hub logistik dan fasilitas *cold storage*, serta pengembangan jalan *scenic* di sekitar Danau Toba dengan fasilitas wisata. Terminal dan layanan feri di Danau Toba juga ditingkatkan untuk konektivitas yang lebih baik ke Pulau Samosir. Bandara Binaka dan Pelabuhan Gunungsitoli menjadi fokus di WP Kepulauan Nias. Arah kebijakan mencakup peningkatan bandara dan pelabuhan untuk mendukung pariwisata dan distribusi produk lokal, serta perluasan pelabuhan dengan dermaga dan fasilitas kargo modern. Di WP Tengah, peningkatan Jalan Lintas Sumatera, stasiun kereta api, dan terminal bus menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas dan distribusi. Jalur kereta api ditingkatkan untuk kargo yang lebih cepat dan berat, memfasilitasi pergerakan kargo dari zona industri ke pelabuhan. Dengan arah kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pengembangan industri, pariwisata, dan pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara.

Arah kebijakan pengembangan perpustakaan di Provinsi Sumatera Utara pada 5 tahun pertama diawali dengan transformasi perpustakaan dengan renovasi dan desain modern. Komputer dan internet berkecepatan tinggi disediakan, serta ruang multimedia dan area kerja bersama dikembangkan. Koleksi khusus bioindustri dan pariwisata ditambahkan, dan akses ke e-book diperluas. Pelatihan literasi informasi, workshop, dan seminar mulai

diadakan. Kolaborasi dengan universitas dan industri lokal diperkuat, dan pustakawan mendapat pelatihan dalam teknologi informasi dan manajemen. Sistem perpustakaan digital mulai diterapkan. Pada 5 tahun berikutnya dilanjutkan dengan renovasi perpustakaan di daerah terpencil dengan fasilitas ramah lingkungan. Ruang pameran budaya dikembangkan, dan koleksi digital serta akses data ilmiah ditingkatkan. Pelatihan literasi informasi lanjutan dan *workshop* tentang teknologi baru serta keberlanjutan mulai diselenggarakan. *Networking* untuk industri bioindustri dan pariwisata diadakan secara rutin. Pustakawan mendapat pelatihan lanjutan dan sertifikasi profesional. Aplikasi perpustakaan *mobile* dan integrasi teknologi IoT serta AI mulai diterapkan. Pada tahap berikutnya yaitu periode 2035-2040 dilakukan Integrasi dan Inovasi Perpustakaan. Desain bangunan hijau dan energi terbarukan diterapkan pada perpustakaan. Ruang inovasi dan *maker space* dikembangkan. Koleksi interaktif dan multimedia diperluas serta diintegrasikan ke *platform* pembelajaran *online*. Layanan penelitian kolaboratif dengan universitas dan industri, serta program mentoring untuk UMKM diperkenalkan. Kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan ditingkatkan. Pustakawan dilatih dalam manajemen proyek dan analisis data, serta sistem manajemen perpustakaan berbasis AI dan *platform* VR/AR diterapkan. Di akhir periode rencana pembangunan jangka panjang daerah ini diharapkan tercapai perpustakaan pintar. Perpustakaan pintar dengan teknologi canggih dibangun. Ruang kolaborasi interdisipliner disediakan, serta fasilitas VR dan AR untuk pendidikan dan pelatihan dikembangkan. Koleksi berbasis AI dan akses sumber daya global ditingkatkan, serta arsip digital berbasis blockchain diterapkan. Program pembelajaran mandiri berbasis AI dan layanan konsultasi *online* diperkenalkan. Kolaborasi global dengan perpustakaan dan pusat inovasi teknologi diperkuat. Pustakawan dilatih dalam teknologi canggih dan manajemen inovasi, serta implementasi *blockchain* dan analitik prediktif untuk manajemen perpustakaan dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, perpustakaan di Sumatera Utara berkembang menjadi pusat pengetahuan dan inovasi yang mendukung bioindustri dan pariwisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 5. 24 Tabel Arah Kebijakan Pengembangan Perpustakaan

Periode	Arah Kebijakan Pengembangan Perpustakaan
2025-2029	<p>Modernisasi Infrastruktur:Renovasi perpustakaan dengan desain modern dan ramah pengguna; Peningkatan fasilitas aksesibilitas; Penyediaan komputer dan internet berkecepatan tinggi; Pengembangan ruang multimedia dan area kerja bersama.</p> <p>Pengembangan Koleksi dan Sumber Daya: Penambahan koleksi buku dan jurnal khusus bioindustri dan pariwisata; Ekspansi akses ke e-book dan jurnal elektronik; Pengumpulan dan dokumentasi karya lokal serta sejarah daerah.</p> <p>Layanan dan Program Inovatif: Pelatihan literasi informasi bagi masyarakat; Workshop dan seminar tentang bioindustri dan pariwisata; Layanan referensi dan penelusuran literatur untuk penelitian.</p> <p>Kolaborasi dan Kemitraan: Kerjasama dengan universitas dan sekolah; Membangun kemitraan dengan industri lokal; Keterlibatan dalam program komunitas.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pustakawan: Pelatihan profesional dalam teknologi informasi dan manajemen perpustakaan; Pengembangan keterampilan pustakawan dalam fasilitasi workshop dan konsultasi bisnis.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Cerdas: Implementasi sistem manajemen perpustakaan digital; Penyediaan layanan digital dan akses jarak jauh; Penggunaan analisis data untuk evaluasi layanan.</p>
2030-2034	<p>Modernisasi Infrastruktur Lanjutan: Pembangunan atau renovasi perpustakaan di daerah terpencil; Peningkatan fasilitas ramah lingkungan;</p>

Periode	Arah Kebijakan Pengembangan Perpustakaan
	<p>Pengembangan ruang pameran dan program budaya.</p> <p>Pengembangan Koleksi dan Sumber Daya Berkelanjutan: Penambahan koleksi digital dan multimedia; Peningkatan akses ke basis data ilmiah dan penelitian; Pengarsipan digital warisan budaya lokal.</p> <p>Layanan dan Program Inovatif Lanjutan: Pelatihan literasi informasi lanjutan; Workshop tentang teknologi baru dan pemasaran digital; Program edukasi tentang keberlanjutan dan lingkungan.</p> <p>Kolaborasi dan Kemitraan Lanjutan: Memperluas kerjasama dengan institusi riset dan LSM; Mengadakan acara networking untuk pelaku industri bioindustri dan pariwisata.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pustakawan Lanjutan: Pelatihan lanjutan dalam literasi digital dan konsultasi bisnis; Program sertifikasi untuk pustakawan profesional.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Cerdas Lanjutan: Pengembangan aplikasi perpustakaan mobile; Integrasi teknologi IoT dan AI dalam manajemen perpustakaan; Peningkatan keamanan siber dan privasi data pengguna.</p>
2035-2039	<p>Infrastruktur Berkelanjutan: Implementasi desain bangunan hijau dan energi terbarukan; Pengembangan ruang inovasi dan maker space; Penyediaan fasilitas untuk kegiatan sosial dan budaya.</p> <p>Koleksi dan Sumber Daya Terintegrasi: Pengembangan koleksi yang lebih interaktif dan multimedia; Peningkatan integrasi koleksi digital dengan platform pembelajaran Online; Pengarsipan dan dokumentasi sejarah digital.</p> <p>Layanan dan Program Terintegrasi: Layanan penelitian kolaboratif dengan universitas dan industri; Pengembangan program mentoring dan coaching untuk UMKM; Program edukasi masyarakat tentang inovasi dan teknologi.</p> <p>Kolaborasi dan Kemitraan Terintegrasi: Peningkatan kerjasama internasional dengan perpustakaan dan institusi riset global; Program pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan perpustakaan internasional.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pustakawan Terintegrasi: Pelatihan dalam manajemen proyek dan kepemimpinan; Pengembangan keterampilan dalam analisis data dan penelitian pasar.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Cerdas Terintegrasi: Peningkatan sistem manajemen perpustakaan berbasis AI; Implementasi platform pembelajaran berbasis <i>Virtual Reality</i> (VR) dan <i>Augmented Reality</i> (AR); Penggunaan big data untuk personalisasi layanan perpustakaan.</p>
2040-2045	<p>Infrastruktur Inovatif: Pembangunan perpustakaan pintar dengan teknologi canggih; Penyediaan ruang kolaborasi interdisipliner; Pengembangan fasilitas virtual dan augmented reality untuk pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Koleksi dan Sumber Daya Futuristik: Penambahan koleksi buku dan jurnal berbasis AI; Peningkatan akses ke sumber daya global dan multibahasa; Pengembangan arsip digital berbasis <i>blockchain</i> untuk keamanan dan keaslian data.</p> <p>Layanan dan Program Futuristik: Pengembangan program pembelajaran mandiri berbasis AI; Layanan konsultasi dan mentoring <i>online</i> untuk pelaku industri; Program edukasi tentang teknologi masa depan dan dampaknya terhadap industri lokal.</p> <p>Kolaborasi dan Kemitraan Global: Membangun jejaring perpustakaan global untuk pertukaran pengetahuan; Kolaborasi dengan pusat inovasi dan startup teknologi; Program kolaborasi riset internasional.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pustakawan Futuristik: Pelatihan dalam teknologi canggih dan manajemen inovasi; Pengembangan keterampilan dalam analisis data besar dan kecerdasan buatan.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Cerdas Futuristik: Implementasi teknologi <i>blockchain</i> dalam manajemen perpustakaan; Pengembangan layanan perpustakaan berbasis AI yang personal; Penggunaan analitik prediktif untuk pengelolaan koleksi dan layanan.</p>

5.4 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Arah kebijakan implementasi transformasi ini merupakan pelaksanaan dari Misi 8 yaitu mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas

pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Arah kebijakan transformasi antara lain:

1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
4. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, *trust*, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
9. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
12. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan penerapan satu data Indonesia dan perencanaan berdasarkan riset yang berkualitas
13. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
14. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
15. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam dua puluh tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara untuk turut andil dalam pembangunan daerah Sumatera Utara selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

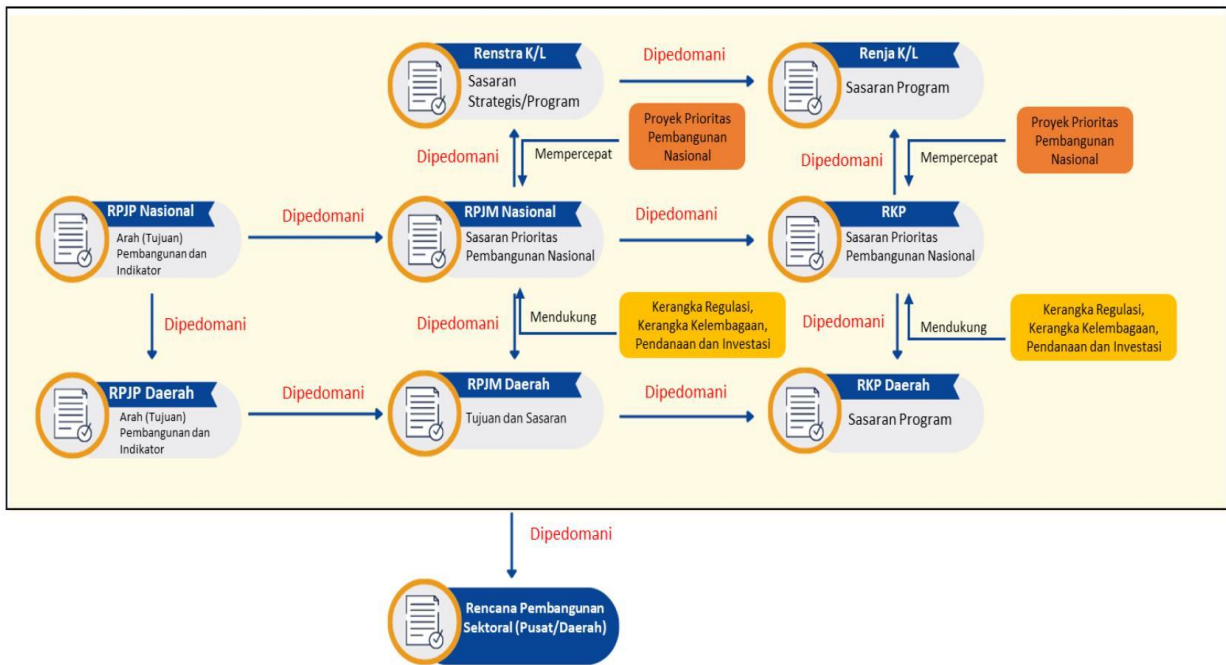
Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJPD adalah berupa arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RPJM Daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tersebut dipedomani RKP Daerah untuk menyusun sasaran dan program pembangunan tahunan. Semua

rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 6. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, RPJPD, beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

- 1) RPJPD bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat arah kebijakan yang mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis 5 tahunan daerah dimuat ke dalam RPJM Daerah.
- 2) Penyusunan RPJPD seperti penentuan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJP Nasional.
- 3) Tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah Tingkat Provinsi berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional. Selain itu RPJM Daerah Tingkat Provinsi menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) Tingkat Provinsi.
- 4) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
- 5) Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

6.1.1.2 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

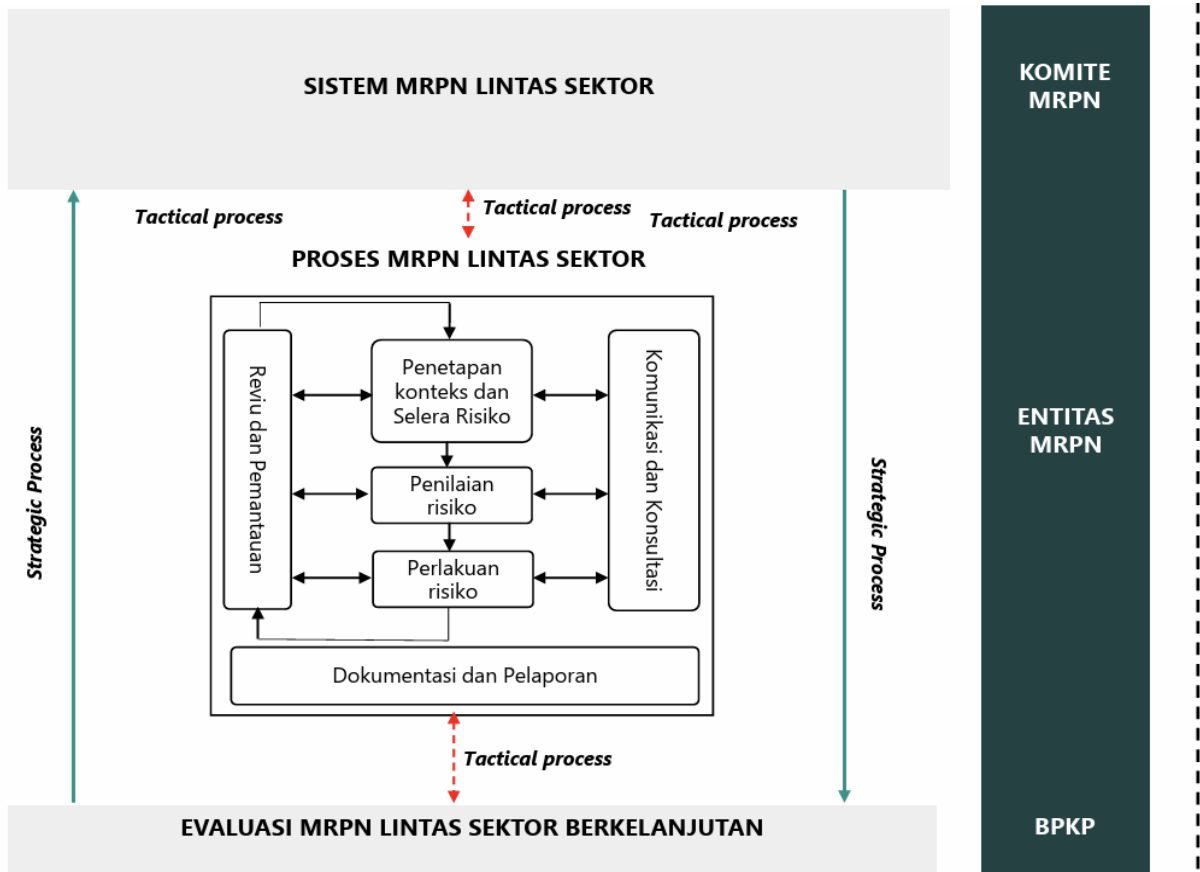
Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar di bawah.

Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses *assessment* risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian

tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

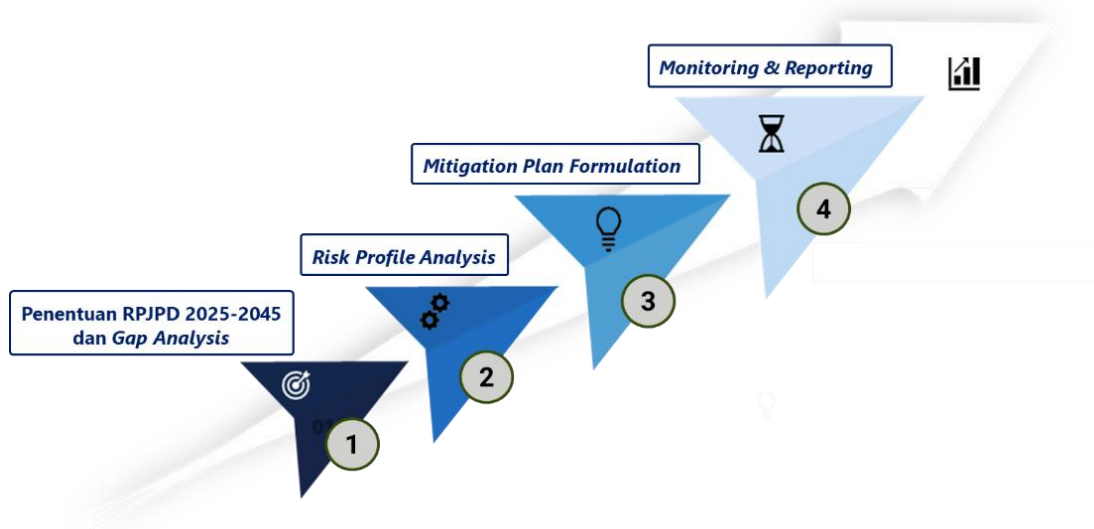
Gambar 6. 2 Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024

Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJPD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 6. 3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPD



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

- 1) Penentuan RPJPD periode 2025-2045 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2045. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka panjang yang diharapkan dapat membawa Provinsi Sumatera Utara menuju pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJPD periode sebelumnya. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJPD.
- 2) *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan *assessment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJPD periode 2025-2045. Selanjutnya, dilakukan *assessment* risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak serius (*severity*) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJPD.
- 3) Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/ Lembaga/ Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJPD periode 2025-2045.
- 4) Melakukan *monitoring & reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJPD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses

tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJPD Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2045 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJPD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJPD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 yaitu:

- 1) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi sosial, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh jenis pekerjaan, serta percepatan wajib belajar 13 tahun khususnya perluasan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Selain itu, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola yang efisien menjadi hal yang sangat penting. Langkah-langkah ini juga melibatkan integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Selanjutnya, upaya pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM) juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkelanjutan. Selaras dengan itu, pengendalian penyakit dan promosi budaya hidup sehat menjadi aspek yang tak terpisahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
- 2) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi ekonomi, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, mendukung percepatan transisi energi dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Kedua, mengembangkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri daerah. Selanjutnya, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi melalui peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Peningkatan kemandirian desa untuk memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Terakhir, pentingnya peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi termasuk dalam sektor pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting dengan memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini melibatkan penerapan praktik-praktik wisata yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, intermediasi dan layanan iptek yang ditingkatkan dapat memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi dalam pariwisata berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

- 3) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi tata kelola, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, adalah terwujudnya tata kelola regulasi yang profesional dan berkualitas, yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam proses regulasi. Kedua, terwujudnya ekosistem digital pelayanan publik yang terpadu dan inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah maupun masyarakat harus diimplementasikan secara efektif, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban serta meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Terakhir, terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran secara optimal dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, beberapa aspek utama dipertimbangkan. Pertama, adalah terwujudnya kelembagaan demokrasi yang transformatif, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan dengan meningkatnya inklusi keuangan serta terwujudnya kesetaraan masyarakat pada sektor politik, ekonomi, dan sosial juga harus diperhatikan dalam upaya menciptakan daerah yang tangguh dan stabil secara menyeluruh.
- 5) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat. Selanjutnya, penerapan ekonomi sirkular dari sumber domestik secara partisipatif perlu diperhatikan, dengan reformasi tata kelola sampah yang efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Pengembangan pangan lokal melalui peningkatan produksi pangan lokal juga menjadi penting dalam memenuhi kecukupan konsumsi pangan. Selain itu, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana serta peningkatan kinerja program perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang berkelanjutan.

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap aspek tersebut, rencana pembangunan dalam jangka panjang dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

b. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan

RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Tahun 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan *branding* dengan *marketing digital* dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak

untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

6.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJPD menjabarkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja selama kurun waktu 20 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dengan periodisasi 5 tahunan

serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara dengan periodisasi tahunan.

RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu: “Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Sumatera Utara sangat diharapkan dalam mewujudkan daerah Sumatera Utara. Terwujudnya visi dan misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Aprilla H. Siregar
APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19690421 199003 2 003